



**ANALISIS FRAMING VIDEO PERNYATAAN GUBERNUR
DKI JAKARTA TENTANG DIBOHONGI PAKAI AL-
MAIDAH 51 di Kompas.com dan Republika.co.id**

T E S I S

NAMA : MULKAN HABIBI
NPM : 2014960032
KONSENTRASI : KOMUNIKASI POLITIK

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

2017

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

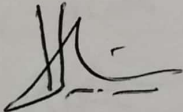
**ANALISIS FRAMING VIDEO PERNYATAAN GUBERNUR DKI
JAKARTA TENTANG DIBOHONGI PAKAI AL-MAIDAH 51
Di Kompas.com dan Republika.co.id**

Disusun oleh:

Nama : Mulkan Habibi
NPM : 2014960032
Konsentrasi : Komunikasi Politik

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Jakarta, 19 Agustus 2017
Dosen Pembimbing


Dr. Fal. Harmonis, M.Si



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Mulkan Habibi
NPM : 2014960032
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Konsentrasi : Komunikasi Politik
Judul Tesis : ANALISIS FRAMING VIDEO PERNYATAAN GUBERNUR DKI
JAKARTA TENTANG DIBOHONGI PAKAI AL-MAIDAH 51
di Kompas.com dan Republika.co.id

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tesis Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta,

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Agustus 2017
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
TIM PENGUJI TESIS**

Ketua Sidang : Dr. Fal. Harmonis, M.Si.

(.....)

Penguji I : Dr. Rulli Nasrullah, M.Si.

(.....)

Penguji II : Dr. Nani Nurani Muksin, M.Si

(.....)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulkan Habibi

NPM : 2014960032

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

“Analisis Framing Video Pernyataan Gubernur DKI Jakarta tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51 di Kompas.com dan Republika.co.id” adalah benar hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua sumber data dan informasi yang digunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil *plagiat* dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BIODATA SINGKAT PENULIS	
KATA PENGANTAR	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Permasalahan	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Signifikansi Penelitian	18
E. Keterbatasan Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA KONSEP

A. Tinjauan Pustaka	20
1. Komunikasi Politik	20
a. Unsur-unsur Komunikasi Politik.....	22
b. Strategi Komunikasi Politik	23
c. Fungsi Komunikasi Politik.....	26
d. Pesan Komunikasi Politi	28
2. Media	29
a. Realita Media	32
b. Ideologi Media	34
3. Media Online	36
4. Konstruksi Sosial Media Massa	30
a. Konstruksi Sosial.....	48

b. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luchman	44
c. Fakta dan Berita Dilihat dari Paradigma Konstruksionis	45
d. Diskursus Konstruksi Sosial	57
e. Proses Konstruksi Sosial.....	53
5. Analisis Framing.....	57
a. Defenisi Analisis Framing	57
b. Teknik Framing Dan Konsep Model Zhondhang Pan Dan Gerald M. Kosicki.....	59
c. Proses Framing	61
B. Kajian Terdahulu	62
C. Kerangka Konsep	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	71
A. Pendekatan Penelitian	71
B. Metode Penelitian	71
C. Sifat Penelitian	72
D. Operasional Konsep.....	72
E. Unit Analisis.....	73
F. Informasi dan Sumber Informasi.....	73
G. Teknik Pengumpulan Data.....	73
H. Teknis Analisis Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Hasil Penelitian.....	77
1. Kompas.com.....	77
2. Republika.co.id.....	83
3. Framing <i>Kompas.com</i> dan <i>Republika.co.id</i>	85
4. Isu framing <i>kompas.com</i> dan <i>republika.co.id</i>	278
5. Konstruksi realitas pernyataan Ahok tentang Al-Maidah 51	280
B. Pembahasan.....	282
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	287

Kesimpulan	287
Saran	288
DAFTAR PUSTAKA	290

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Kompas.com, 6 Oktober 2016	91
2. Kompas.com, 7 Oktober 2016.....	98
3. Kompas.com, 8 Oktober 2016.....	109
4. Kompas.com, 10 Oktober 2016.....	117
5. Kompas.com, 13 Oktober 2016.....	126
6. Kompas.com, 15 Oktober 2016.....	136
7. Kompas.com, 24 Oktober 2016.....	143
8. Kompas.com, 30 Oktober 2016.....	153
9. Kompas.com, 4 November 2016	161
10. Kompas.com, 8 November 2016	169
11. Kompas.com, 10 November 2016	176
12. Kompas.com, 11 November 2016... ..	184
13. Kompas.com, 16 November 2016	192
14. Republika.co.id, 10 Oktober 2016	204
15. Republika.co.id, 11 Oktober 2016	210
16. Republika.co.id, 13 Oktober 2016	214
17. Republika.co.id, 15 Oktober 2016	220
18. Republika.co.id, 20 Oktober 2016	225
19. Republika.co.id, 21 Oktober 2016	230
20. Republika.co.id, 25 Oktober 2016	235
21. Republika.co.id 31 Oktober 2016.....	241
22. Republika.co.id, 6 November 2016	248
23. Republika.co.id, 8 November 2016	256
24. Republika.co.id, 10 November 2016	263
25. Republika.co.id, 11 November 2016	270
26. Republika.co.id, 16 November 2016	276



**ANALISIS FRAMING VIDEO PERNYATAAN GUBERNUR
DKI JAKARTA TENTANG DIBOHONGI PAKAI AL-
MAIDAH 51 di Kompas.com dan Republika.co.id**

T E S I S

NAMA : MULKAN HABIBI
NPM : 2014960032
KONSENTRASI : KOMUNIKASI POLITIK

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu untuk program kerjasama Pemprov DKI dengan Sekolah Tinggi Perikanan pada hari Selasa 27 September 2016. Dalam acara kunjungan Ahok melakukan transplantasi terumbu karang serta melakukan penebaran benih ikan di Keramba Jaring Apung di Pulau Semak Daun dan melakukan panen ikan di Pulau Panggang.

(<http://megapolitan.kompas.com> 27 September 2016 | 08:29 WIB)

Pada umumnya setiap ada kunjungan yang dilakukan oleh Gubernur ke daerah, ada waktu yang diberikan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pidato singkat yang berisi arahan dan beberapa informasi penting bagi masyarakat sekitar. Setelah itu dilanjutkan dengan berbagai macam aktifitas sebagai bentuk dari program kunjungan.

Rangkaian kegiatan seperti itu, juga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada saat kunjungan Ahok memulai aktifitas dengan menyampaikan pidato yang berisi tentang tujuan kunjungan dan manfaatnya buat masyarakat sekitar, diawal beliau menyampaikan keberadaannya di pulau seribu serasa berada di Bangka Belitung yang merupakan kampungnya. Setelah itu beliau melanjutkan dengan menyampaikan pentingnya budidaya ikan di kepulauan Seribu.

Setelah menyampaikan banyak hal tentang budidaya ikan, Ahok kemudian juga menyinggung pilkada DKI 2017. Dalam point tentang pilkada beliau menyampaikan agar warga tidak khawatir jika dirinya tak terpilih lagi di Pilgub DKI 2017, karena program-program yang dicanangkannya di Kepulauan Seribu akan tetap berjalan. Ahok mengatakan *bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macem-macem.*

Pernyataan Ahok dibohongi pake surat Al-Maidah ayat 51 yang berdurasi 30 detik itu kemudian dibagikan pada akun Face Book atas nama Buni Yani yang berprofesi sebagai Dosen lulusan Ohio University Amerika Serikat, mantan wartawan Tempo tahun 1996. Video itu dibagikan dari tautan milik media NKRI tertanggal 5 Oktober 2016 di upload jam 20.52 WIB. Sebagai seorang akademisi peneliti media dan seorang mantan wartawan Buni Yani menganggap ada sesuatu yang sensitif disampaikan oleh seorang pejabat publik, yaitu menyinggung kitab suci umat muslim sehingga kemudian Buni Yani punya inisiatif untuk mengupload ulang video tersebut pada tanggal 6 Oktober 2016 tersebut di akun Face Book miliknya dengan menuliskan traskrip *“PENISTAAN TERHADAP AGAMA?”*

"Bapak-Ibu [pemilih Muslim]... dibohongi Surat Al-Maidah 51"... [dan] "masuk neraka [juga Bapak-Ibu] dibodohi".

Kelihatannya akan terjadi sesuatu yang kurang baik dengan video ini”

Kemudian video ini menimbulkan beragam komentar di akun face book dan dibagikan oleh lebih dari 10 ribu orang, tidak hanya itu video tentang dibohongi surat Al-Maidah 51 itu telah menimbulkan kehebohan yang luar biasa di Jakarta, terlebih di dunia maya, dan juga berhasil memancing tokoh-tokoh politik, agama dan ormas islam akhirnya keluar dan membuka suara.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Din Syamsudin pun angkat suara bahwa sikap Ahok itu benar adanya telah melakukan penistaan agama meski sudah dibantah Ahok sendiri dan Nusron Wahid. Beliau menyampaikan apa yang diucapkan Ahok, seperti dalam video, tidak dapat diingkari adalah penistaan terhadap Kitab Suci Al-Qur'an dan Agama Islam. Din yang juga Presiden Asian Conference on Religion and Peace (ACRP) ini menyayangkan sikap kepentingan politik Ahok itu. Apalagi hal itu sangat menyakiti hati umat Islam Indonesia yang mayoritas. Dan sangat wajar jika sikap masyarakat Islam melakukan protes atas penistaan itu. Sungguh disayangkan bahwa kepentingan politik melibatkan penistaan agama, wajar kalau umat Islam yaang beriman kepada Al-Qur'an memprotes. Prof. Din Syamsudin meminta persoalan ini dibawa ke jalur hukum agar tidak main hakim sendiri dengan kekerasan dan

tidak terjadi hal yang sama dikemudian hari. Perlu diselesaikan secara hukum agar tidak terulang kembali dan tidak perlu ada pihak yang main hakim sendiri. Kekerasan verbal dengan menistakan agama tidak harus dibalas dengan kekerasan fisik maupun verbal. Makanya itu hukum harus ditegakkan. Prof. Din Syamsudin menyebutkan bahwa aparat kepolisian tidak ragu-ragu menegakan hukum yang ada di Indonesia demi supremasi hukum tetap tegak. Masyarakat mendukung Polri agar tidak ragu-ragu untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara yg berdasarkan hukum. (<http://sangpencerah.id/> 8 Oktober 2016). Prof. Din Syamsudin mengaku sudah menyimak seluruh video rekaman pidato Ahok, baik yang telah diedit maupun yang diklaim asli. Menurut dia, ucapan dari Ahok tersebut berkonotasi mendiskreditkan kesucian agama islam. Sebab walaupun Ahok mengaku pernyataan tersebut bukan ditujukan terhadap Al-Qur'an , tapi menilai pemahaman umat islam salah dalam menafsirkan surat Al-Maidah dan dibawa ke ranah politik hal itu salah dan merendahkan. Ahok melakukan judgement terhadap pemahaman orang lain. Seyogianya, pejabat publik tidak masuk ke dalam zona sensitif seperti itu. Ini yang harus diakui sebagai kesalahan, sehingga tidak perlu dibela oleh siapapun.

Tidak puas dengan itu sejumlah tokoh organisasi massa dan kelompok masyarakat melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana penistaan agama tersebut. Salah satu ormas yang melaporkan Basuki Tjahaja Purnama ke kepolisian adalah Pimpinan Pusat Pemuda Muhamadiyah yang melaporkan Ahok ke Polda Metro Jaya, Jumat, 7 Oktober 2016. Sementara itu, pada hari yang sama, organisasi masyarakat bernama Aksi Bersama Rakyat, melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Pengaduan serupa dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Badan Koordinasi Penanggulangan Penodaan Agama (Bakorppa), dengan mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta pada Jumat, 7 Oktober 2016. (<https://m.tempo.co> Jum'at, 07 Oktober 2016 | 22:08 Wib)

Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia juga menyampaikan keberatannya terhadap dibohongi pake surat Al-Maidah yang disampaikan Ahok di kepulauan seribu. MUI Pusat akhirnya resmi mengeluarkan Sikap dan pendapatnya pada Selasa 11 Oktober 2016 setelah sebelumnya mengadakan Rapat Pimpinan Ormas Islam di MUI Pusat, masalah Penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Rapat tersebut dihadiri oleh 50 Ormas Islam dan Ormas Nasionalis yang berlangsung alot dan keras. Berikut hasil Rapat tersebut yang juga langsung dibuat Press Rilisnya sebagai berikut.

PENDAPAT DAN SIKAP KEAGAMAAN MAJELIS ULAMA INDONESIA Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan "Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya" yang telah meresahkan masyarakat, maka Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah

kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an

5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan :

- 1) Menghina Al-Qur'an dan atau
- 2) Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Qur'an dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Qur'an dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang. (<http://www.pos-metro.com/> selasa 11 oktober 2016)

Merespon terhadap kekesalan dari para tokoh, pendapat dan sikap Majelis Ulama Indonesia dan beberapa ormas islam yang sebelumnya telah melaporkan ke polda metrojaya terkait pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki

Tjahaja Purnama tentang dibodohi pakai surat Al-Maidah 51. Pada jum'at 14/10/2016 setelah melaksanakan sholat jum'at Ribuan massa yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat (ormas) mulai berdatangan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Masa beramai-ramai mendatangi Balai Kota sekitar pukul 13.50 WIB dengan berjalan kaki dan membawa bendera tiap-tiap ormas. Sejumlah ormas yang tampak, di antaranya Front Pembela Islam (FPI) dan Forum Betawi Rempug (FBR). Sesampainya di Balai Kota, massa secara serentak mengucapkan shalawat, kemudian meneriakkan tuntutan agar Basuki Tjahaja Purnama tidak lagi diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selama berlangsungnya unjuk rasa, lagu-lagu shalawat terus berkumandang melalui mobil pembawa speaker milik kepolisian. Pemasangan lagu-lagu shalawat tersebut sengaja dilakukan oleh kepolisian agar kondisi lebih tenang. (<http://www.Republika.co.id/> 14 Oktober 2016, 14:58 WIB)

Ribuan massa mendesak penegak hukum memproses dan menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menistakan agama. Aksi unjuk rasa dilakukan usai menggelar shalat Jumat di Masjid Istiqlal. Sebelum melakukan longmarch, para tokoh agama menaiki mobil komando yang terparkir di depan Masjid Istiqlal. Di atas mobil itu juga tampak pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq bin Hussein Shihab.

Kemudian Rizieq membacakan petisi dari berbagai Ormas yang disebut 'Aksi Bela Islam' tersebut. "Petisi dewan Islam, sehubungan dengan terbitnya sikap keagamaan MUI dan menyatakan Ahok telah menistakan agama Islam dan menghina Al-Qur'an dan meledek ulama umat Islam. Maka para habaib, para ulama dan tokoh Islam dan semua tergabung bela Islam mendesak kepolisian, kejaksaan, pengadilan untuk memproses hukum Ahok terkait penistaan agama," kata Habib Rizieq saat membacakan petisi itu.

Dalam petisi itu, Habib Rizieq juga meminta para penegak hukum untuk cepat memproses hukuman Ahok terkait penodaan agama tanpa intervensi pihak mana pun. Jika dalam waktu satu bulan belum ada respons dari penegak hukum, maka massa yang tergabung dalam 'Aksi Bela Islam' itu akan

mengambil tindakan sesuai isi petisi dewan Islam tersebut. "Jika negara dan pemerintah Indonesia melindungi penista agama, maka para habib dan ulama yang tergabung bela Islam menyerukan, umat Islam akan bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menegakan hukum Islam, yaitu hukuman mati," (<http://www.Republika.co.id/> 14 Oktober 2016, 14:23 WIB)

Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) M Iriawan bersama dengan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya, Mayjen Teddy Lhaksana turut hadir di tengah-tengah massa yang tengah melakukan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Bahkan, kedua Jenderal bintang dua itu sempat naik ke atas mobil komando milik massa. Keduanya menaiki mobil komando setelah sebelumnya mengelilingi lokasi unjuk rasa dengan berboncengan bersama menggunakan motor trail. Di atas mobil komando, keduanya pun menyampaikan sepatah dua patah kata pada massa dari beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan unjuk rasa di sana. Beliau menyampaikan terima kasih masa dapat menjalankan (unjuk rasa) apa yang diinginkan, dengan tertib dan damai. Kemudian beliau juga memberikan semangat dengan melafadzkan Allahu Akbar dari atas mobil komando, Jumat. Dia mengatakan bahwa Bareskrim Mabes Polri berjanji akan mengawal terus laporan beberapa pihak terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama. Usai Iriawan, giliran Teddy yang memberikan sepatah dua patah kata. Teddy meminta massa untuk menunggu proses dari pihak Kepolisian yang sudah berjanji untuk melanjutkan proses hukum. Mendengar pernyataan Iriawan dan Teddy itu, massa pun berteriak meminta pernyataan itu untuk dibuktikan dan bukan sekedar isapan jempol saja. (<http://metro.news.viva.co.id/> 14 Oktober 2016 16:41 WIB)

Tidak saja di Ibu Kota Jakarta. Ribuan umat yang terdiri dari berbagai ormas diberbagai daerah di seluruh indonesia-pun serentak pada tanggal (14/10/2016) turun ke jalan dalam aksi tangkap Ahok. MEDAN masa memadati Masjid Agung Medan, Jumat (14/10/2016). Di samping melakukan demonstrasi, mereka juga melakukan orasi sambil meneriakkan takbir sambil menyebut tangkap Ahok. Sebagaimana dilansir Pojoksumut, di lapangan

tampak ribuan umat Islam dari berbagai ormas ini beraksi untuk melaporkan Ahok ke Polresta Medan atas ucapannya yang dianggap menistakan agama Islam.

Magelang, dikutip dari sindonews.com : Ribuan orang yang tergabung dalam Front Aliansi Umat Islam Bersatu (FAUIB) melakukan aksi damai yang dimulai dari kawasan Bambu Runcing hingga di Jalan Pemuda, Muntilan, Kabupaten Magelang. Mereka mendesak agar Polri memproses laporan masyarakat terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki T Purnama (Ahok).

Kaltim, Puluhan pengunjuk rasa berbaris di jalan raya Simpang Empat Lembuswana Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Para pendemo tampak mengibarkan berdera bertuliskan huruf Arab dan membentangkan spanduk bertuliskan "Ahok Minta Maaf? Penghina Al-Qur'an Tetap Harus Dihukum." SOLO, Ribuan masyarakat dan Ormas Islam Soloraya berdemo didepan Mapolresta Solo, Jl Adisucipto 4, Solo guna mendesak pemerintah menangkap Ahok, Jum'at (14/10/2016). Massa yang datang setelah sholat jum'at, bergelombang dengan motor, mobil, dan jalan kaki membawa bendera ormas sambil meneriakkan "Bunuh Ahok! Bunuh Ahok!" berkumpul di depan Mapolresta Solo. Poster bergambar Ahok dengan tulisan "Fatwa MUI tentang pernyataan Ahok di Kepulauan seribu" banyak dibawa peserta aksi. Perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Solo, Prof Furqon Hasbi. Lc, ikut berorasi mendukung MUI Pusat segera mendesak pemerintah memproses Ahok yang telah melecehkan Al Qur'an.

Palembang, Ribuan umat Muslim di Palembang menggelar aksi unjuk rasa menuntut pihak kepolisian menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Massa menilai Ahok pantas dihukum lantaran menghina dan melecehkan Al-Qur'an . Massa yang berasal dari beragam organisasi masyarakat Islam itu melakukan longmarch dari Masjid Agung Palembang menuju kantor DPRD Sumatera Selatan sejauh lima kilometer. Mereka mengatasnamakan Gerakan Umat Islam Sumsel (GUIS). Ketua Front Pembela

Islam Sumsel Habib Mahdi mengungkapkan, pihaknya siap mengawal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah memperkarakan Ahok ke polisi.

Padang, Ribuan umat Islam meneriakkan yel yel tangkap Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, red) saat melakukan demo di depan Kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejak se usai waktu Shalat Jumat (14/10). Demo yang dilakukan umat Islam itu terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa waktu yang lalu di Kepulauan Seribu. Pendemo mendesak agar penegak hukum menangkap Ahok yang telah menistakan agama Islam.

Sampit, Aksi protes terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dinilai telah melukai perasaan umat Islam juga terjadi di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Aksi hanya membentangkan spanduk dan membagikan selebaran berisi pernyataan sikap. Ini sebagai bentuk reaksi keras terhadap pernyataan Ahok

Bandung, Demo kecaman terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, terhadap dugaan penistaan Al-Qur'an juga digelar di Bandung. Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mendesak aparat kepolisian mengusut pernyataan Ahok yang dinilai melecehkan umat Muslim.

Aceh, Demo protes Tjahaja Basuki Purnama (Ahok) di Lhokseumawe Aceh juga menggelora usai shalat Jumat sekitar pukul 14.15 WIB hingga pukul 15.10 WIB. Demo laskar Islam tersebut terkait, Gubernur DKI Jakarta dinilai telah menistakan Kitab Suci umat Islam, Jumat (14/10/2016). Laskar Front Pembela Islam (FPI) Aceh yang bergabung dengan santri Dayah Mujahidin Lhokseumawe itu, memprotes Ahok dengan perkataan melecehkan Al-Qur'an, dengan kata-katanya, (<http://www.faktamedia.net/> 15 Oktober 2016)

Lain halnya dengan Buya Safi'i Marif saat diminta komentar oleh karni ilyas pada acara Indonesia Lawyer Club Selasa 11 Oktober 2016. Beliau menganggap bahwa kegaduhan masyarakat saat ini terkait dengan video Ahok yang menyatakan dibohongi pake surat Al-Maidah ini justru dikarena suasana politik jelang pilkada DKI Jakarta 2017. Buya Safi'i Marif meminta agar

persoalan Ahok mengutip Al-Maidah 51 ini agar bisa diselesaikan dengan baik, Karena Ahok sudah minta maaf. Jadi agar jangan diperpanjang lagi. Ketika ditanya Bung Karni Ilyas, Bagaimana pendapatnya tentang Politisi yang membawa-bawa Ayat-Ayat untuk tujuan politiknya? Buya Maarif Menjawab, Kalau tujuannya jujur, bolehlah ya. Tapi, Kalau memperalat Tuhan, untuk tujuan politik yang kotor, itu ndak bisa di benarkan. (video ILC 11-10-2016)

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku sedih saat ini isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA) mulai mewarnai pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta.

Megawati menyampaikan DKI mulai ada gejala, salah satu isu yang terus menerus ditampilkan adalah SARA, padahal dasar bernegara kita adalah empat pilar. Pancasila mengajarkan untuk bertoleransi antara suku, agama dan ras. Ia berharap media massa tidak ikut memprovokasi isu SARA ini. Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengharapkan media tidak memprovokasi, kalau media ikut melakukan demikian, maka kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Megawati mengenang saat media berjuang di era orde baru menuju reformasi. Jika media menyuarakan isu berbau SARA, maka sama saja dengan kemunduran. Presiden kelima RI itu mengaku tak masalah apabila media memihak pada salah satu pasangan calon seperti pilpres 2014 lalu, selama tidak menyampaikan isu SARA. Jangan sampai ada Tabloid Obor yang isu SARA itu berjangkit dengan tidak sehat. Jokowi dikatakan Chinese, agamanya ada yang bilang Nasrani. Ia menilai, harusnya pilkada DKI diisi oleh pertarungan program, bukan isu SARA.

(<http://nasional.kompas.com/> 10 oktober 2015)

Berbeda dengan KH Sholahuddin Wahid Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, ia meminta publik dan umat Islam tetap tenang. Publik juga diminta memercayakan penanganan kasus penistaan agama Gubernur DKI Jakarta kepada kepolisian. Dengan langkah itu, menjadi cara terbaik agar suasana Pilkada DKI Jakarta tidak membawa tensi ketegangan politik hingga ke daerah lain. Menurutnya untuk kasus penistaan agama Gubernur Basuki atau Ahok ini kuncinya adalah yang bersangkutan sengaja atau tidak sengaja

melakukan pernyataan tersebut. Dalam Undang Undang terkait penistaan agama, kalimat yang menjadi kata kuncinya adalah 'Barang siapa yang dengan sengaja', artinya ada kesengajaan.

Tentunya, menurut KH Sholahuddin Wahid pihak Ahok telah menegaskan hal itu di luar kesengajaan, karena konteksnya saat itu ia berbicara satu jam, yang membicarakan tentang Al-Maidah cuma setengah menit. Tapi pihak lain menilai itu sengaja. Karena itu ia berharap proses hukum ini biar berjalan, dan polisi bisa mengkaji proses tersebut. Kasus ini bisa diselidiki lebih cepat atau segera lakukan, walaupun ada pihak yang ingin menunda karena dianggap politisasi. Dan pihak lain yang menganggap penundaan itu juga politisasi.

Sesuatu yang diharapkan tentu mengenai kebijakan presiden Jokowi Dodo terhadap kasus ini, sebagai kepala negara beliau seharusnya lebih peka terhadap tindakan-tindakan yang menyangkut dengan penistaan terhadap agama terlebih bagian sebagian orang bahwa ini menyangkut dengan isu SARA jelang pilkada DKI 2017. Hal demikian juga suda dilontarkan oleh Tokoh Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia (dikutif pada situs <http://politik.rmol.co/> 12 OKTOBER 2016 , 19:51:00 WIB) beliau menyampaikan bahwa Jokowi harus turun tangan karena dia merupakan kepala negara yang terpilih oleh dukungan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sudah saatnya pak Jokowi juga berpendapat dan tegas kepada aparatnya yang telah melakukan penistaan agama. Jangan sepertinya tidak ambil peduli, dan nanti bisa menimbulkan kesan justru mendukung apa yang dinyatakan Ahok.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar umat muslim seluruh Indonesia marah kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, terkait kontroversi Surah Al-Maidah 51. Yusuf Kalla menyatakan walaupun itu di mana-mana juga sering timbul soal SARA, tapi harus dipahami juga ini demokrasi orang memilih sesuai apa yang dia suka. Kalla mengingatkan, untuk tidak menggunakan isu SARA dalam pilkada. Walau menurutnya, memang banyak peluang orang berbicara SARA.

Dalam kasus Ahok, menurut JK yang menjadi masalah adalah ada kalimat 'bohong' itulah pangkal masalah sehingga Ahok disebut melakukan penistaan terhadap agama. Karena ada kata bohong itulah, yang membuat Ahok dinilai menistakan agama Islam. Kalau dipotong bohongnya, pernyataan itu menjadi 'saudara-saudara sekalian, apabila tidak pilih saya karena ayat Al-Maidah itu ya enggak apa apa'. Maka jika pernyataannya demikian mungkin masyarakat muslim tidak marah kepada Ahok. (<http://metro.news.viva.co.id/> 21 Oktober 2016 20:36 WIB)

Indonesia terdiri dari beragama Suku, Bahasa, Budaya dan Agama. Masyarakat diberikan kebebasan dalam menjalankan perbedaan itu tanpa mengganggu dan saling mengusik satu sama lain. *Dalam hal keyakinan agama indonesia sudah mengatur tentang kebebasan dalam menyakini agama yang tertuang dalam UUD 1945 bab XI pasal 29 “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*. Sebagai warga Negara sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama dan saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada diantara kita demi keutuhan. Oleh karena itu pemerintah harus bisa mendorong keberagaman tersebut menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju indonesia yang lebih baik.

Budaya Indonesia tidak bisa dilepaskan dari budaya agama, bahkan budaya agama sudah mengakar sejak awal kedatangan generasi pertama di negeri ini. tapi dalam tahun-tahun belakangan ini agama sering dijadikan alat oleh sekelompok orang untuk melakukan tindak kekerasan, munculnya radikalisme, dan fundamentalisme yang menegasikan the other. Suatu fenomena yang sangat menyedihkan sekali, jika dibandingkan dengan kondisi kehidupan beragama di masyarakat Indonesia pada masa klasik. Dalam khazanah ilmu-ilmu social modern, agama ternyata tidak dikaitkan dengan konflik, melainkan lebih kepada integrasi dan harmoni. Di Indonesia agama, khususnya Islam telah menjadi satu dasar pemersatu yang penting, dan mampu

beradaptasi dengan budaya setempat, sehingga agama menjadi system pemertahanan kultur dan harmoni. Selanjutnya agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai priestly religion, sebagai penyangga status qua, tetapi ia juga berfungsi sebagai propethic religion, yang menjadi model mobilisasi massa untuk menggerakkan perubahan. Oleh sebab itu peran pemerintah tentu sangat penting dalam menjaga keberagaman, jangan menjadi keberagaman sebagai sumber perpecahan namun keberagaman menjadi sebuah kekuatan yang dimiliki Negeri ini.

Di Kanada menurut Profesor dari Universitas Kanada, Jacques Bertrand, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kanada dalam memenuhi aspirasi penduduknya yang multi etnis bersifat fleksibel, yang diambil berdasarkan dialog terlebih dahulu dengan masyarakat dari berbagai suku bangsa atau golongan yang tinggal di negara tersebut. Pemerintah Kanada bahkan memiliki anggaran sendiri yang diatur oleh badan Warisan Kanada. Anggaran ini digunakan untuk mengimplementasikan semangat multikulturalisme sebagai hasil dari dialog dengan pemerintah. Sebagai contoh jika sekelompok Muslim ingin membangun masjid, maka pemerintah Kanada akan membangukannya dengan anggaran yang telah diatur.

Pemerintah melakukan dialog dengan dengan berbagai golongan yang ada di Kanada kemudian hasil dialog dengan berbagai golongan ini kemudian yang mendasari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kanada. Penghargaan dan penghormatan pemerintah Kanada didasarkan atas kontribusi etnis-etnis tersebut dalam membangun Kanada.

Duta Besar Kanada, MacKenzie Clugston, mengatakan bahwa pemerintah Kanada menjamin nilai-nilai keragaman dan hal tersebut tertuang dalam hukum dan kebijakan pemerintah. Hukum dan kebijakan Kanada mengakui keragaman ras, budaya, etnis, agama, leluhur dan daerah asal. Di Kanada juga menjamin kebebasan memeluk agama, menyampaikan pendapat, berserikat dan berkumpul. Semua ini dijamin oleh Konstitusi Kanada dan Piagam Hak Asasi dan Kebebasan Kanada, pemerintah Kanada berhasil menciptakan lingkungan yang harmonis antara lain karena beberapa sebab, yaitu fleksibilitas kebijakan,

pendekatan terhadap kelompok etnis, penghargaan terhadap mereka dan tidak memihak antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. (<http://dunia.news.viva.co.id/> 23 Maret 2011. 16:20 WIB)

Pada sisi lain peran terpenting juga berasal dari media massa, sebagai pemberi informasi kepada masyarakat terhadap, kemampuan media untuk meliput secara kritis, komprehensif dan berimbang dalam kasus-kasus kekerasan bernuansa agama diyakini akan berperan besar untuk membawa publik ke sebuah pengertian yang benar terhadap akar masalah kekerasan bernuansa agama maupun upaya-upaya penyelesaian konflik, karena media telah menempatkan masalah itu dalam konteks yang tepat. Namun bila pada sisi lain media semata menyajikan konflik demi konflik dengan mengabaikan konteks yang lebih mendasar dan tanpa mendorong upaya mencari solusi maka kemungkinan besar yang muncul adalah pemupukan rasa marah, stigmatisasi, kebencian, dan antitoleransi.

Banyak pengelola newsroom pada saat ini cenderung tidak menganggap agama sebagai sebuah bidang liputan yang menarik dan penting, kalah dibandingkan dengan liputan politik atau ekonomi, atau bahkan olahraga. Mungkin adanya anggapan yang keliru selama ini bahwa bidang liputan agama tak lebih dari seremoni demi seremoni seperti lebaran, naik haji, natal, nyepi, paskah dll. Agama dinilai sebagai sebuah persoalan yang banyak terkait dengan Tuhan, padahal tidak mungkin meminta konfirmasi kepada Tuhan. Dalam praktek jurnalistik, bidang ini dianggap “kurang seksi” dibanding bidang liputan lainnya.

Media massa di Indonesia diharapkan mampu mengonstruksi relasi antar umat beragama di Indonesia dengan komprehensif sebagai upaya bersama membangun sebuah Indonesia yang plural seperti diamanatkan oleh Bapak Bangsa ketika mereka mendirikan negara ini. Kegagalan media massa membangun sebuah konstruksi sosial mengenai nilai-nilai positif sebuah masyarakat yang plural, menghargai perbedaan, menghormati hak-hak asasi orang lain, tidak mendiskriminasikan kelompok lain khususnya minoritas dapat bermuara pada kehancuran bangsa ini.

Media massa memiliki peran strategis, sebagai saluran yang menyampaikan informasi kepada publik secara serempak di antara khalayak yang sedang menggunakan media tersebut. Pada dasarnya, media massa memiliki fungsi penghantar dalam menyebar berbagai macam pengetahuan, menyelenggarakan kegiatan dalam lingkungan publik yang dapat dijangkau segenap anggota masyarakat secara bebas, sukarela, umum dan murah, hubungan antara pengirim dan penerima seimbang dan sama, serta mampu menjangkau lebih banyak orang daripada institusi lainnya (McQuail, 1987: 51). Pesan yang disampaikan oleh media massa melalui majalah, koran, tabloid, buku, televisi, radio, internet, dan film diterima secara serempak oleh khalayak luas yang jumlahnya ribuan bahkan puluhan juta. Media massa yang baik seharusnya menjalankan fungsi yang sama dengan komunikasi massa seperti yang dikemukakan oleh Harold Laswell, diantaranya untuk menginformasikan (to inform), untuk mendidik (to educate), dan untuk menghibur (to entertain). Menurut Undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa fungsi pers adalah untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial (social control) baik pada perilaku publik maupun pada penguasa (Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers).

Di era online saat ini kontribusi media yang mengguna jaringan online cukup dirasakan bagi para pembaca, media *online* terbilang praktis karena kemudahan untuk mendapatkan berita dan informasinya, kapan saja bila diinginkan media *online* dapat dibuka dan dibaca sejauh didukung oleh fasilitas teknologi internet. *Handphone* yang memiliki fasilitas koneksi internet, komputer yang memiliki sambungan internet baik di perkantoran atau di rumah, dan dapat pula di warung internet (warnet) (Yunus, 2010:32). Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, media online tidak hanya dimiliki oleh institusi media yang menerbitkan secara online namun saat ini media cetak dan media elektronik juga memiliki versi online untuk melengkapai kekurangannya hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan audien (Vivian:2008:286).

Konflik Ambon dan kasus Kerusuhan di Temanggung mengajarkan kita betapa media disana, atau para wartawan dan pemilik media, kehilangan

orientasi ketika konflik dengan nuansa agama itu meledak (atau diledakan). Misalnya Harian *Suara Maluku* yang selama puluhan tahun menjadi koran yang menyuarakan pluralitas, seketika kehilangan cirinya itu ketika segregasi masyarakat manajam, sehingga akhirnya kelompok media Jawa Pos mendirikan *Ambon Ekspres* untuk mewadahi wartawan yang muslim dan melayani komunitas muslim Maluku. Atau *RRI Ambon* yang akhirnya dinilai lebih menyuarakan kaum Kristen Maluku, mendorong Laskar Jihad mendirikan stasiun radio *Suara Perjuangan Muslim Maluku*. Lengkaplah segregasi masyarakat di Ambon berdasarkan garis agama, dan realitas itulah yang dibangun media-media tersebut. (Eriyanto, 2003)

B. Perumusan Masalah

Kebebasan pers dimulai dengan ditandai munculnya Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers. Ketika itu mulai bermunculan berbagai nama media massa baru di masyarakat dan seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya penggunaan internet di lingkungan masyarakat, maka lahirlah pula apa yang disebut dengan jurnalisme online. Sayangnya, kelahiran kebebasan pers ini bukan saja membawa dampak pada terbukanya saluran dan sumber informasi komunikasi di masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah lain. Berita yang ada di media massa merupakan suatu cara untuk menciptakan realitas yang diinginkan mengenai peristiwa atau (kelompok) orang yang dilaporkan. Oleh karena telah melewati proses seleksi dan reproduksi, berita surat kabar sebenarnya merupakan laporan peristiwa yang artifisial, tetapi dapat diklaim sebagai objektif oleh surat kabar itu untuk mencapai tujuan-tujuan ideologi (dan bisnis) surat kabar tersebut. Dengan kata lain berita yang ada di media massa, bukan sekedar menyampaikan tetapi juga menciptakan makna (Eriyanto, 2002: xii)

Pada tanggal 27/9/2016 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kunjungan ke Kepulauan Seribu terkait program kerjasama Pemprov DKI dengan Sekolah Tinggi Perikanan. Kunjungan yang dilakukan itu lalu menjadi kontroversial tatkala Ahok menyampaikan pidatony yang pada

saat itu menyatakan dibohongi pakai surat Al-Maidah. Lantas pidato ini membuat pro kontra di masyarakat, bahkan beberapa komentar yang datang dari para tokoh Agama bahwa apa yang dilakukan Ahok merupakan penistaan agama. Kasus Ahok sontak menjadi pemberitaan publik, tidak hanya media televisi, media cetak bahkan di media online muatan berita tentang pidato ahok cukup banyak. Dari pemberitaan di media online kemudian dibagikan oleh para pengguna akun, seperti *Face Books*, *Twiter*, *Whatshap* dan lain-lain, sehingga dengan mudanya konten berita itu menyebar sampai ke daerah-daerah lalu menimbulkan berbagai macam reaksi dari kalangan masyarakat.

Dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana media terutama media online memfreming (membangkai) terkait dengan berita ini, sebagai media yang memberikan informasi kepada masyarakat tentu informasi yang disampaikan haruslah informasi yang benar dan tidak menyampaikan berita-berita bohong kepada publik, selain itu media media juga mempunyai tugas dalam menjaga sebuah kerukunan, atau ketentraman di masyarakat dengan tidak memuat konten yang berisi provokasi yang kemudain menimbulkan konflik di masyarakat.

Peneliti menduga para penulis berita (wartawan) atau pun editor tidak cukup komprehensif memahami konteks dan implikasi terhadap berita yang akan dimuat, sehingga paktor subjektifitas muncul lebih dominan terhadap sebuah kasus yang akan diterbitkan. Selain itu faktor siapa yang dijadikan sumber informasi berita juga akan berpengaruh terhadap isi berita tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini menganalisi dua isi berita media online di Indonesia, yakni *Kompas.com* dan *Republika.co.id*, terkait dengan pernyataan Ahok dibohongi pake surat Al-Maidah 51 pada Selasa 27 September 2016 lalu yakni saat Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan ke Pulau Seribu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang:

1. Framing *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta berkenaan dengan Al-Maidah 51.

2. Isu yang dominan ditonjolkan berdasarkan framing *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51 berdasarkan berita yang dipublikasikan 6 Oktober – 16 November 2016
3. Konstruksi realitas sosial video pernyataan Gubernur DKI Jakarta tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51 pada *Kompas.com* dan *Republika.co.id*

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang komunikasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada wartawan dan media dalam memaknai, memahami serta membongkai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) “Dibohongi pakai surat Al-Maidah 51”

E. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada proses konstruksi dan memberi pengetahuan bagaimana media *online* membongkai terhadap suatu realitas, dalam hal ini memberikan framing terhadap pernyataan Ahok “dibohongi pake surat Al-Maidah”

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka peneliti memberikan keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penelitian ini akan berupaya mengetahui bagaimana framing (pembongkai) yang dibuat oleh dua media online, yakni *Kompas.com* dan *Republika.co.id* dalam memuat berita tentang pernyataan Ahok “dibohongi pake surat Al-Maidah”
- b. Penelitian ini akan membandingkan bagaimana framing dan dengan dasar alasan apa berita diantara kedua media ini bisa berbeda walaupun dengan sumber dan konteks berita yang sama.

F. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulisan, agar proses penelitian ini bisa diterima di kalangan akademik serta mempermudah dalam proses penelitian ini. Adapun sistematika penelitian ini akan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan: Latar Belakang Masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, keterbatasan penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA KONSEP

Dalam penulisan ini penulis menuliskan beberapa tinjauan kepustakaan diantaranya: media, Realita Media, Ideologi Media Media Online.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menggunakan metode penelitian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, Sifat Penelitian, Penjelasan Konsep, Unit Analisis, Informandan Sumber Informasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini penulis menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahsan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian yaitu berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA KONSEP

A. Tinjauan Pustaka

1. Komunikasi Politik

Menurut Rush dan Althoff (1997:255) sebagaimana yang dikutip oleh Asep Saipul Muhtadi (2008:28), Komunikasi politik adalah transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik; dan proses sosialisasi, partisipasi serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi.

Dalam buku *The Politics of The Development Areas*, pada tahun 1960. Almond berpendapat bahwa komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda (Maswadi Rauf, 1993:21).

Menurut Dan Nimmo (2004: 9) komunikasi Politik yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Gejala komunikasi politik menurutnya bisa dilihat dari dua arah. Pertama, bagaimana institusi-institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada publik. Kedua, bagaimana insfrastruktur politik merespons dan mengartikulasikan pesan-pesan politik terhadap suprastruktur.

Komunikator itu sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Rakhmat (dalam Dan Nimmo, 2005) digolongkan menjadi tiga yaitu politisi, profesional dan aktivis ketiganya dalam aktivitas keseharian mereka harus melakukan komunikasi politik. Nimmo (2005;30) menjelaskan secara rinci mengenai komunikator politik ini. Ia memaparkan bahwa terdapat tiga macam komunikator politik. Pertama, adalah komunikator politik yang

mempunyai pekerjaan sebagai politisi/politikus, mereka adalah calon atau pemegang jabatan tertentu di pemerintahan. Tak peduli apakah ia ditunjuk atau pejabat karir dan tak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif atau yudikatif. Pekerjaan mereka adalah aspek utama kegiatan ini. Politisi atau politikus inilah yang sering juga disebut sebagai elite politik.

Dalam kegiatan keseharian, para politikus harus melakukan komunikasi politik. Hal ini dilakukan, untuk mengomunikasikan pesan-pesan politik kepada sesama politikus, pesan politik ini bisa berupa tuntutan, protes dan kebijakan. Kemudian, melakukan komunikasi politik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meraih dukungan masyarakat agar ia tetap bisa menduduki jabatan yang saat ini dimilikinya (bagi yang belum mempunyai jabatan, dukungan masyarakat diperlukan untuk meraih jabatan tersebut).

Kedua; profesional sebagai komunikator politik muncul diakibatkan karena berkembangnya perangkat teknologi media massa. Ia menyuarakan pendapat komunikator politik yang sesungguhnya dan menghubungkan dengan masyarakat, menghubungkan publik umum, dengan pemimpin politik dan membantu menempatkan masalah dan peristiwa pada agenda diskusi publik. Yang termasuk dalam profesional adalah para jurnalis (reporter, koordinator berita, penerbit, pengarah berita, eksekutif stasiun dan lainnya). Profesional lainnya adalah promotor, ia adalah orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu. Seperti agen publisitas, tokoh masyarakat, pejabat humas, pejabat informasi publik, sekretaris presiden dan lainnya (Dan Nimmo, 2005:35).

Para jurnalis dan promotor ini bekerja sebagai penghubung antara komunikator politik yang sebenarnya dengan masyarakat. Selain menyuarakan pendapat komunikator politik para profesional khususnya jurnalis juga menjadi penghubung pendapat yang datangnya dari masyarakat.

a) Unsur-unsur Komunikasi Politik

Proses komunikasi politik sama dengan proses komunikasi pada umumnya (komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia) komunikasi politik sebagai body of knowledge juga terdiri atas berbagai unsur, yakni :

1) Komunikator Politik

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan juga lembaga pemerintahan legislative dan eksekutif. Dengan demikian, sumber atau komunikator politik adalah mereka-mereka yang dapat memberi informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik misalnya presiden, menteri, anggota DPR, MPR, KPU, gubernur, bupati/walikota, politisi, fungsionaris partai politik, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bias mempengaruhi jalannya pemerintahan.

2) Pesan Politik

Ialah pernyataan yang disampaikan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal maupun non verbal. Tersembunyi maupun terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak disadari yang isinya mengandung bobot politik. Misalnya pidato politik, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu, pernyataan politik, artikel atau isi buku/brosur dan berita surat kabar, radio, televisi dan internet yang berisi ulasan politik dan pemerintahan, spanduk atau baliho, iklan politik, propaganda, makna logo, warna baju atau bendera dan sebagainya.

3) Saluran atau Media Politik

Saluran atau media politik ialah alat atau sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan politiknya. Misalnya media cetak, yaitu surat kabar, tabloid, majalah. Media elektronik, misalnya film, radio, televisi, komputer, internet. Media format kecil, misalnya leaflet, brosur, selebaran, stiker, bulletin. Media luar ruang (out door media), misalnya baliho, spanduk, reklame, bendera,

jumbai, pin, logo, topi, rompi, kaos oblong, kalender, blok note dan segala sesuatunya yang biasa digunakan untuk membangun citra (image building).

4) Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi dukungan dalam bentuk pemberian suara kepada partai atau kandidat dalam pemilihan umum. Mereka adalah pengusaha, pegawai negeri, buruh, perempuan, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, mahasiswa, petani, yang berhak memilih maupun pelajar dan siswa yang akan memilih setelah cukup usia. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik Efek komunikasi politik yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman terhadap system pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya akan bermuara pada pemberian suara dalam pemilihan umum. Pemberian suara sangat menentukan terpilih tidaknya seorang kandidat untuk posisi mulai tingkat presiden dan wakil presiden, anggota DPR, MPR, gubernur, dan wakil gubernur, bupati dan wail bupati, walikota dan wakil walikota sampai pada tingkat DPRD. (Cangara 2009:37-39)

a) Strategi Komunikasi Politik

Keberhasilan suatu kegiatan komunikasi dipengaruhi oleh strategi yang digunakannya. Menurut Arifin (2003), strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Cangara (2009) menjelaskan bahwa komunikasi politik diantaranya berfungsi untuk:

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat.
- 2) Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik

- 3) Memberikan motivasi kepada politisi, fungsionaris, dan para pendukung partai.
- 4) Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik.
- 5) Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting, maupun komentator-komentator politik.

Strategi komunikasi memiliki fungsi ganda yaitu yang pertama adalah untuk menyebarkan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal. Fungsi yang kedua adalah untuk menjembatani kesenjangan budaya akibat kemudahan diperolehnya dan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya. (Effendy, 2002) Ardial (2009) menjelaskan strategi komunikasi politik yang harus dijalankan oleh komunikator politik, yaitu diantaranya adalah menciptakan kebersamaan antara politikus dengan khalayak dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang homofilis. Suasana homofilis yang harus diciptakan adalah persamaan bahasa (simbol komunikasi), dan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama mengenai pesan politik, metode dan media politik. Langkah-langkah strategi komunikasi politik antara lain sebagai berikut:

- 1) Memahami Khalayak Komponen psikologis yang harus dikenal pada diri khalayak yang berkaitan dengan politik adalah keyakinan, kepentingan, dan motivasi khalayak, baik yang bersifat politik maupun nonpolitik. Menurut Ardial, hasil studi menunjukan bahwa para pemilih memberikan suara kepada kandidat yang sesuai dengan ideologinya. Kebutuhan dan motivasi individu-individu yang akan menjadi khalayak politik juga harus dikenali, diketahui, dan dipahami yang terdiri atas pengetahuan khalayak mengenai pokok persoalan, kemampuan khalayak untuk menerima pesan-pesan melalui media

yang digunakan, pengetahuan khalayak terutama perbendaharaan kata yang digunakan (Ardial 2009:85).

- 2) Menyusun Pesan Persuasif Agar pesan politik dapat bersifat persuasif, maka perlu diperhatikan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Syarat utama agar pesan tersebut dapat mempengaruhi adalah pesan harus mampu membangkitkan perhatian, selain keinginan khalayak untuk menyaksikan politikus yang akan menyajikan pesan-pesan politik tersebut. Pesan politik akan menarik perhatian selama ia memberikan harapan atau hasil yang kuat relevansinya dengan persoalan kebutuhan yaitu kebutuhan pribadi dan kelompok (Ardial, 2009:85)
- 3) Menetapkan Metode Langkap berikutnya menurut Ardial adalah memilih metode penyampaian dan metode menyusun isi pesan politik yang sesuai. Menurut Arifin (2003), terdapat beberapa metode komunikasi yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak, yaitu:
 - a. Redundancy, dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi dengan jalan mengulang-ulang pesan politik kepada khalayak. Manfaatnya adalah khalayak akan lebih memperhatikan pesan dan tidak mudah melupakan pesan-pesan itu karena disampaikan berulang-ulang.
 - b. Canalizing, yaitu komunikator politik menyediakan saluran-saluran tertentu untuk menguasai motif-motif yang ada pada khalayak. Proses canalizing ialah memahami dan meneliti pengaruh kelompok terhadap individu atau khalayak. Untuk berhasilnya komunikasi politik haruslah dimulai dari memenuhi nilai-nilai dan standar kelompok dan masyarakat.
 - c. Informative, yaitu bentuk dan isi pesan yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara memberi penerangan yang artinya menyampaikan pesan yang sesuai dengan fakta, data, dan pendapat yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penerangan memiliki fungsi untuk memberikan

informasi tentang fakta semata maupun kontroversial, atau memberikan informasi untuk menuntun khalayak ke arah pendapat tertentu.

- d. *Persuasive*, yaitu mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan tidak memberikan kesempatan untuk berpikir kritis, bahkan jika perlu dapat terpengaruh secara tidak sadar. Melalui metode ini, kesan politik itu akan selalu berisim selain fakta dan pendapat juga dapat non-fakta dan bentuk pernyataannya dapat berubah menjadi propaganda, agitasi, dan sebagainya.
- e. *Educative*, dikenal juga sebagai salah satu usaha untuk mempengaruhi khalayak mengenai pernyataan politik yang dilontarkan yang dapat diwujudkan ke dalam bentuk pesan yang akan berisi pendapat, fakta, dan pengalaman, Metode ini dapat disebut juga metode mendidik yang memberikan gagasan kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat dan pengalaman yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang mendalam kepada khalayak (Ardial, 2009:92-94).

b) Fungsi Komunikasi Politik.

Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Dengan definisi lain, fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik

dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat (Sastroatmodjo, 1995: 123).

Fungsi komunikasi politik yang dikemukakan oleh McNair (2003) dikombinasikan dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh Goran Hedebro (1982), Komunikasi politik berfungsi untuk:

- 1) Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat;
- 2) Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program dan tujuan lembaga politik;
- 3) Memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris dan para pendukung partai;
- 4) Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini publik;
- 5) Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara;
- 6) Menjadi hiburan masyarakat sebagai pesta demokrasi dengan menampilkan para juru kampanye artis, dan para komentator atau pengamat politik;
- 7) Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna menghindari konflik dan ancaman berupa tindakan separatis yang mengancam persatuan nasional;
- 8) Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui informasi untuk mencari dukungan masyarakat luas terhadap gerakan reformasi dan demokratisasi;
- 9) Meningkatkan aktivitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda setting maupun melalui komentar-komentar politik (Cangara, 2009:40-41).

Dari beberapa definisi tentang politik dapat dilihat bahwa kegiatan perpolitikan tidak bisa terlepas dari kegiatan berkomunikasi, baik

individu dengan individu atau kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dari definisi di atas berafiliasi dengan yang dilakukan oleh pasangan Ratu Atut-Rano Karno dan tim suksesnya, mereka melakukan strategi komunikasi politik untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat Banten dalam Pilkada Banten 2011, agar dapat mendominasi serta memenangkan pilkada tersebut.

Strategi komunikasi politik tim sukses pasangan Ratu Atut-Rano Karno dibuat berdasarkan latar belakang serta analisa-analisa dari hasil situasi pada saat strategi tersebut akan dijalankan. Perumusan strategi komunikasi khususnya pada sebuah kampanye politik akan melalui waktu yang relatif lama, dikarenakan banyaknya pertimbangan sehingga pada akhirnya suatu strategi komunikasi politik diaplikasikan. Dan strategi komunikasi yang efektif adalah yang fleksibel di sini adalah dapat berubah sesuai dengan kebutuhan baik situasi dan kondisi di lapangan.

c) Pesan Komunikasi Politik

Pesan dari komunikasi politik bisa berupa informasi, ajakan, himbauan, maupun perintah kepada khalayak yang menjadi komunikan, sehingga mereka mengikuti apa yang telah disampaikan. Pesan ini dapat dengan bentuk yang berbeda mulai dari bahasa, simbol atau lambang maupun gambar. Penggunaannya disesuaikan dengan komunikan dan media yang digunakan. Partai politik dalam perjalanan politiknya akan berupaya untuk senantiasa menyakinkan kader partainya untuk selalu percaya terhadap partai. Proses menyakinkan ini biasanya tidak lepas dari pembentukan opini publik terhadap partai tersebut. Pada kenyataan seperti itu, maka partai politik akan selalu menampilkan citra yang baik dimata kader dan masyarakat.

Dengan berhati-hati dalam berstatemen di media massa, tidak ikut terprovokasi untuk menghujat partai lain dan senantiasa menjaga sikap dimata publik. Selain itu partai politik juga berusaha menanamkan rasa

kepemilikan yang besar terhadap partai bagi para kadernya. Adanya menyelenggarakan pengkaderan-pengkaderan yang akan menumbuhkan kecintaan terhadap partai tersebut, sehingga kader akan merasa punya tanggung jawab untuk membesarkan partai dimasa yang akan datang.

Dengan kembali digunakannya Islam sebagai azas partai, maka konsekuensi logis yang timbul adalah pijakan partai dalam mengambil setiap kebijakan tak boleh lepas dari jalan Islam. Artinya proses komunikasi politik yang disampaikan pada kader dan konstituen senantiasa bernafaskan Islam. Pesan-pesan dakwah ma'ruf nahi munkar harus senantiasa ditampilkan oleh DPC PPP Kabupaten Purworejo sebagai bukti bahwa gerakan politik mereka benar-benar berlandaskan islam. (Antar 2004:36).

2. Media.

Secara sederhana, istilah media biasa dijelaskan sebagai alat komunikasi. Terkadang pengertian media ini cenderung lebih dekat terhadap sifatnya yang massa karena terlihat dari berbagai teori yang muncul dalam komunikasi massa. Namun, semua defenisi yang ada memiliki kecenderungan yang sama bahwa ketika disebut kata “media”, yang muncul bersamaan dengan itu adalah sarana disertai dengan teknologinya. Koran merupakan representasi dari media cetak, sementara radio yang merupakan media audio dan televisi sebagai media audio visual merupakan representasi dari media elektronik, dan internet merupakan representasi dari media *online* atau di dalam jaringan.

Terlepas dari cara pandang melihat media dari bentuk dan teknologinya, pengungkapan kata “media” bias dipahami dengan melihat dari proses komunikasi itu sendiri. Proses terjadinya komunikasi memerlukan tiga hal, yaitu objek, organ, dan medium. Saat menyaksikan sebuah program di televise, televise adalah objek dan mata adalah organ. Perantara dan antara televise dan mata adalah gambar dan visual. Contoh sederhana ini membuktikan bahwa media merupakan wadah untuk membawa pesan dari proses komunikasi.

Beragam criteria bias dibuat untuk melihat bagaimana media itu. Ada yang membuat criteria media berdasarkan teknologinya, seperti media cetak yang menunjukkan bahwa media tersebut dibuat dengan mesin cetak dan media elektronik yang dihasilkan dari perangkat elektronik. Dari sumber atau organ yang menjelaskan bagaimana cara mendapatkan atau bagaimana kode-kode pesan itu diolah, misalnya media audio-visual yang diakses menggunakan organ pendengaran dan penglihatan. Ada juga yang menuliskannya berdasarkan bagaimana pesan itu disebarkan. Contohnya, media penyiaran (broadcast) di mana media merupakan pusat dari produksi pesan, seperti stasiun televisi, dan pesan itu disebarkan serta bias dinikmati oleh siapa saja asal memiliki pesawat televisi. Atau berdasarkan teknologi, pola penyebaran, sampai pada bagaimana khalayak mengakses media, seperti media lama (old media) dan media baru (new media)

Menurut Meyrowitz (1999) sebagaimana dikutip dalam buku Rully Nasrullah, dalam upaya memahami kata “medium” guna memahami bagaimana media beroperasi. Ada tiga ungkapan untuk melihat medium. *Pertama*, medium sebagai saluran (*medium-as-vessel/conduit*). Seperti sebuah saluran air, pipa merupakan sarana yang membawa pesan atau dalam contoh nyata suara adalah konten yang dibawa oleh radio. Ketika orang ingin mendengarkan siaran pertandingan bulu tangkis melalui radio, diperlukan perangkat radio untuk menangkap sinyal dari stasiun radio. Hanya dalam konteks ini, konten harus dimaknai berbeda dengan bagaimana medium ini membawanya. Betul, suara atau radio adalah pesan yang dibawa oleh perangkat radio, namun yang menimbulkan reaksi adalah isi pesan.

Kedua, medium adalah bahasa (*medium-as-language*). Medium adalah bahasa itu sendiri. Ini bermakna bahwa media memiliki sesuatu yang unik yang bias mewakili ekspresi atau mengandung suatu pesan. Pengalaman emosi yang muncul dengan perantara medium bias jadi sama dan bias jadi berbeda antara si pembuat pesan dengan penerima pesan.

Memang dalam pengantar sebelumnya dikatakan bahwa konten lebih diperhatikan disbanding alat yang membawa konten tersebut, tetapi bagaimana konten itu dikreasikan tidak bias dilepaskan dari pengaruh alat.

Ketiga, medium sebagai lingkungan (*medium-as-environment*). Maksudnya adalah media tidak bias dipandang pada teks semata, tetapi juga harus dilihat dalam segi konteks itu sendiri. Dalam perspektif ini, eyerowitz sampai pada pertanyaan, bagaimana pemilihan konten dan gramatikal membuat karakteristik medium menjadi berbeda antara satu dengan medium lainnya, baik secara penampilan, psikologis, maupun sosiologis. Perspektif medium sebagai lingkungan ini membuat beberapa kondisi, yakni:

- a) Bagaimana bentuk informasi yang bias atau tidak bias ditransmisikan oleh medium?
- b) Bagaimana kecepatan dan tingkat komunikasinya?
- c) Bagaimana medium itu menyalurkan pesan, apakah *unidirectional*, *bidirectional*, atau *multidirectional*.
- d) Apakah interaksi komunikasinya simultan (*simultaneous*) atau berurutan (*sequential*)?
- e) Bagaimana kebutuhan fisik untuk menggunakan media?
- f) Apakah mempelajari serta menggunakan medium untuk menghasilkan (*code*) dan menerima (*decode*) pesan relative mudah atau sulit? Apakah medium itu digunakan sekaligus atau dalam kondisi tertentu saja?

Oleh karena itu, perspektif terakhir ini bias dilihat dari level mikro maupun level makro. Level mikro merujuk pada bagaimana pemilihan medium yang dilakukan khalayak dalam melakukan interaksi atau dalam situasi tertentu. Tiga perspektif Meyrowitz dalam melihat medium ini memberikan gambaran bahwa medium bias dilihat dari berbagai macam aspek. Media medium tidakhanya bias dilihat dari persoalan teknis atau teknologi apa yang terkandung di dalamnya, apakah cetak, audio, visual, analog, digital, dan sebagainya.

Pada tahap selanjutnya, medium bias mengandung nilai-nilai tidak sekedar menjadi sarana dalam penyampaian pesan, tetapi memberikan pengaruh pada segi social, budaya, politik, bahkan ekonomi. Melihat media tidak hanya sebatas dalam makna (*sense*) perangkat teknologi sebagaimana terkandung dalam penyebutan media, tetapi juga dimaknai secara historis, teknologi, social, budaya, hingga politik. (Rully, 2015 : 4-6)

a) Realita Media

Sudah tidak diragukan lagi bahwa media/pers mempunyai peranan dalam mengonstruksi realitas sosial (*construction of social reality*), bahkan menjadi *defning agency* karena pers/media tidak bisa menjadikan dirinya hanya sebagai sebuah saluran (*chanel*) yang netral, pasif, atau sekedar kumpulan medium yang melaporkan realitas sosial begitu saja. Jadi media punya peran ikut mendefinisikan isu/permasalahan apa yang relevan, memberi konteks/makna pada berbagai kejadian yang dilaporkannya.

Upaya media untuk memberi konteks terhadap realitas sosial tersebut dalam ilmu komunikasi disebut sebagai *framing* (pembingkai), yakni upaya media mendefinisikan suatorealitas sosial melalui penyajian yang terkesan obyektif, berimbang, atau tidak memihak (*non partisan*). Meski ada upaya untuk tidak memihak, namun pada realitas sosial itu dalam kerangka (bingkai) tertentu, dari angle/sudut pandang nilai-nilai pengelola media, dengan pemilihan penggunaan kata/kalimat yang tertentu pula, atau bahkan cara berfikir tertentu pula. (Nugroho, 1999:viii-ix). Atau framing dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana penekanan atau konstruksi sebuah pesan berdampak pada interpersi di pihak penerima.

Mereka yang mengembangkan teori mengenai peran dalam menyusun realitas sosial pada umumnya mendapati bahwa efek jangka panjang media terjadi tanpa disadari, dan itu merupakan hasil dari

kecendrungan organisasi media, praktek dalam pekerjaan, keterbatasan teknis dan penerapan sistematis dari sejumlah nilai berita, pemingkai dan pemformatan. Palets dan Entman (1981) menyebutkan dengan istilah *pack journalism* yakni kecendrungan para wartawan bekerja bersama-sama, membentuk konsensus bersama, meliput berita yang sama dan juga sumber berita yang sama. Wartawan-wartawan media barat, misalnya, cenderung meringkai berita mengenai konflik di Balkan, Perang Teluk (1990) yang mendukung aksi Amerika Serikat dan sekutunya (McQuaill, 2005:522). Bahkan dalam agresi Amerika Serikat ke Irak, sangat jelas media massa di negara itu telah menjadi alat disinformasi, propaganda, dan menyebarkan kebohongan demi mendukung Presiden Bush dan Pentagon. Media hanya menelan mentah-mentah fakta yang disodorkan pemerintah, dan abai terhadap fakta lain yang tidak sejalan dengan pemerintah, demi membangun pendapat umum yang mendukung rencana agresi (Kallner, 1995:198-226)

Dalam konteks Indonesia, ada kecendrungan wartawan melaporkan kekerasan demi kekerasan bernuansa agama apa adanya, karena konflik itu apakah itu persekusi/aniaya, penindasan, bentrok antar masyarakat, konflik di antara dua pemeluk agama dalam hal perkawinan, tokoh berpindah agama dll sesuai dengan prinsip *bad news is good news*, yakni menyajikan sebuah peristiwa sebagai berita selama ada aksi di situ. Peliputan berbagai konflik bernuansa agama yang cenderung mengabaikan pemahaman latar belakang masalahnya, akan terefleksi dalam pelaporan para wartawan yang hanya melihat kejadian itu sebagai sekadar sebuah (rangkai)an kejadian/event, ketimbang sebagai sebuah fenomena gunung es dari permasalahan lain yang lebih luas. Kalau fenomena ini yang terus dikembangkan, wartawan akan selalu kesulitan memahami sebuah situasi konflik keagamaan yang dihadapi secara jernih, mereka akan dengan akan sangat mudah tersesat di tengah rimba persoalan dan sulit akan menemukan akar masalah. Sehingga

kalau ini situasi yang berkembang di banyak media, maka dari hari ke hari laporan yang dibuat para wartawan tidak akan beranjak dari satu konflik ke konflik yang lain, tanpa berusaha mengangkat akar persoalan demi jalan keluar.

b) Ideologi Media

Penempatan sumber berita yang menonjol dibandingkan dengan sumber lain, menempatkan wawancara seorang tokoh lain, liputan yang hanya satu sisi dan merugikan pihak lain, tidak berimbang dan secara nyata memihak satu kelompok menurut pendekatan positivistik adalah semata-mata karena kekeliruan atau bias wartawan atau media bersangkutan. Akan tetapi, pendekatan konstruksionis melihat hal-hal tersebut sebagai praktik yang lazim dan manusiawi diujalakan oleh wartawan.

Pada titik inilah pendekatan konstruksionisme memperkenalkan konsep “ideologo”. Konsep ini membantu menjelaskan bagaimana bias wartawan membuat liputan berita memihak satu pandangan, menempatkan pandangan satu lebih menonjol dibandingkan pandangan kelompok lain dan sebagainya. Praktek-praktek yang menurut pendekatan positivistic dianggap sebagai tidak benar ini, dalam pendekatan konstruksionis dipandang sebagai praksis jurnalistik yang wajar dan alami. Namun yang erluh digaris bawah, praktek-praktek itu mencerminkan ideology dari si wartawan atau media tempat ia bekerja. Oleh karena itu, untuk mengerti kenapa praktek jurnalistik bias semacam itu bukan dengan meneliti sumber bias, namun dengan mengarahkan penelitian pada aspek ideology dibalik media yang melahirkan berita semacam itu. (Sudibiyo, 2001:54)

Pendekatan konstruksionis juga menilai aspek etika, moral dan nilai-nilai tertentu tidak mungkin dihilangkan dari pemberitaan media. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. Etika, moral, atau keyakinan pada kelompok atau nilai tertentu adalah bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam membentuk dan

mengkonstruksi realitas. wartawan disini bukan hanya pelapor, karena disadari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subjektifitas dalam public. Karena fungsinya tersebut, wartawan menulis berita bukan hanya sebagai penjelas, tapi mengkonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dengan realitas yang diamati.

Media disini dipandang sebagai instrumen ideologi, melalui mana satu kelompok menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Media bukanlah rana yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan kepada khalayak. Media berperan dalam mendefinisikan realitas. Kelompok dan ideologi dominanlah yang biasanya lebih berperan dalam hal ini.

Menurut gambaran Marx, ideologi merupakan sarana yang digunakan untuk ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai suatu yang alami dan wajar. Ideologi ini menjaga masyarakat berada dalam kesadaran palsu, kesadaran manusia tentang siapa dirinya, bagaimana mereka berelasi dengan bagian lain dari masyarakat, dan pengertian kita tentang pengalaman sosial dihasilkan oleh masyarakat dan lingkungan tempat kita dilahirkan (Fiske, 1990: 239).

Ideologi berkaitan dengan konsep seperti “pandangan dunia”, “sistem kepercayaan” dan “nilai”. Namun, ruang lingkup ideologi lebih luas daripada konsep-konsep tersebut. Ideologi tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan yang terkandung mengenai dunia, tapi juga cara yang mendasari definisi dunia. Oleh sebab itu, ideologi tidak hanya tentang politik. Ideologi memiliki cakupan yang lebih luas lagi dan mengandung makna konotasi (Croteau dan Hoynes, 1997:163). Ideologi merupakan sarana yang digunakan untuk ide-ide kelas yang berkuasa sehingga bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat sebagai alami dan

wajar (Fiske, 1990: 239). Shoemaker dan Reese melihat ideologi sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi isi media. Ideologi diartikan sebagai suatu mekanisme simbolik yang berperan sebagai kekuatan pengikat dalam masyarakat. Tingkat ideologi menekankan pada kepentingan siapakah seluruh rutinitas dan organisasi media itu bekerja (Shoemaker dan Reese, 1996: 223).

Hal ini tidak terlepas dari unsur nilai, kepentingan dan kekuatan atau kekuasaan apa yang ada dalam media tersebut. Kekuasaan tersebut berusaha dijalankan dan disebarakan melalui media sehingga media tidak dapat lagi bersifat netral dan tidak berpihak. Media bukanlah ranah netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapat perlakuan yang sama dan seimbang (Sudibyo, 2001:55). Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa media berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari kelompok pemegang kekuasaan dan kekuatan dalam masyarakat. Nilai yang dianggap penting bagi pemegang kekuasaan disebarakan melalui media sehingga isi media mencerminkan ideologi pihak yang berkuasa itu (Shoemaker dan Reese, 1996:229).

Sejumlah perangkat ideologi diangkat dan diperkuat oleh media massa diberikan legitimasi oleh mereka, dan didistribusikan secara persuasif, sering dengan menyolok, kepada khalayak yang besar jumlahnya. Dalam proses itu, konstelasi-konstelasi ide yang terpilih memperoleh arti penting yang terus meningkat, dengan memperkuat makna semula mereka dan memperluas dampak sosialnya (Lull, 1998:4). Kunci analisa dalam menguji ideologi media adalah kesesuaian antara gambaran dan kata-kata yang disajikan media dengan cara berpikir mengenai isu-isu sosial dan budaya (Croteau dan Hoynes, 1997: 164).

3. Media Online

Bentuk paling baru dari jurnalisme adalah jurnalisme online. Jurnalisme online memiliki kelebihan-kelebihan yang menawarkan

peluang untuk menyampaikan berita jauh lebih besar ketimbang bentuk jurnalisme konvensional seperti surat kabar. Deuze menyatakan bahwa perbedaan jurnalisme online dengan media tradisional, terletak pada keputusan jenis baru yang dihadapi oleh para wartawan cyber. “Online Journalism harus membuat keputusan-keputusan mengenai format media yang paling tepat mengungkapkan sebuah kisah tertentu dan harus mempertimbangkan cara-cara untuk menghubungkan kisah tersebut dengan kisah lainnya, arsip-arsip, sumber-sumber, dan lain-lain melalui *hyperlinks*” (Santana, 2005:137). Rafaeli dan Newhagen mengidentifikasi perbedaan utama antara jurnalisme online dan media massa tradisional, yaitu kemampuan internet untuk mengombinasikan sejumlah media, kurangnya tirani penulis atas pembaca, tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung, dan interaktivitas web (Santana, 2005:137).

Pengertian Media Online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online. kemudian Pengertian Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas. (M.Romli, 2012:34)

Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia. Didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dll, dengan karakteristik masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya.

Salah satu desain media online yang paling umum diaplikasikan dalam praktik jurnalistik modern dewasa ini adalah berupa situs berita. Situs berita atau portal informasi sesuai dengan namanya merupakan pintu gerbang informasi yang memungkinkan pengakses informasi memperoleh aneka fitur fasilitas teknologi online dan berita didalamnya. Contennya merupakan perpaduan layanan interaktif yang terkait informasi secara langsung, misalnya tanggapan langsung, pencarian artikel, forum diskusi, dll. Atau yang tidak berhubungan sama sekali dengannya, misalnya games, chat, kuis, dll

a) Perkembangan Media Online

Media online secara perlahan semakin berkembang, bahkan mungkin penemu sistem internet tidak terbayangkan bahwa perkembangan dunia internet sebegitu majunya apalagi yang telah terjadi 10 tahun belakangan ini. Tidak hanya improvisasi dalam bidang jaringan dan perangkat lunak (software) namun saat ini juga mulai banyak hadir improvisasi dalam bidang perangkat keras (hardware). Semua pengembang beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pada tahun 1990, Mark Poster meluncurkan buku besarnya, *The Second Media Age*, yang menandai periode baru dimana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan, khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. Ada dua pandangan yang dominan tentang perbedaan antara era media pertama, dengan penekanannya pada penyiaran, dan era media kedua, dengan penekanannya pada jaringan (Littlejohn, Foss 2009:413).

Pandangan Mark Poster pada bukunya tersebut menampakan kebenarannya, kini setiap orang saling terhubung baik kepada rekannya ataupun kepada informasi yang tersedia di media online. Setiap orang tidak cukup awam hanya untuk sekedar mencari sebuah berita yang dia butuhkan. Tidak menutup kemungkinan juga generasi akademis kedepan akan menggunakan media online sebagai sumber informasi

akademis terpercaya dan pilihan utama. Paul Levinson dalam buku yang berjudul *New New Media* menyebutkan media online tidak hanya terbatas media sosial, media online lebih daripada itu.

Paul Levinson menyebutkan ada menyebutkan beberapa layanan yang dapat dikategorikan dalam new media atau media online, setidaknya ada 4 yang termasuk dalam pokok bahasan pada penelitian ini :

- 1) Website atau situs online yang menyediakan berbagai macam berita dalam satu tempat yang terdiri atas beberapa halaman.
- 2) Media Sosial yang meliputi Facebook, Twitter dan Myspace dan sebagainya yang memberikan keleluasaan pada penggunanya untuk berbagi informasi pribadi dan melakukan percakapan.
- 3) Youtube sebuah platform yang memungkinkan penggunanya dapat mengunggah video dan kemudian pengguna lainnya dapat menikmatinya pula secara streaming.
- 4) Blog Pada awal kehadirannya pengguna blog disebut pula Citizen Journalist dimana pemilik akun blog menceritakan apa yang sedang terjadi dalam kesehariannya, sehingga dapat memberikan informasi kepada pemilik blog lainnya.

Sehingga kurang tepat jika mengatakan bahwa media online hanya terdiri atas situs online saja atau media sosial saja. Selain itu, dalam buku *New Media a Critical Introduction* disebutkan bahwa media online memiliki beberapa karakteristik yang menjadi pembeda dengan yang lainnya, yakni sebagai berikut:

- 1) Pengalaman tekstual yang baru: Sebuah jenis baru baik genre dan penyajiannya serta dalam cara mengkonsumsi hiburan dan pola seperti permainan komputer, simulasi, special efek pada film)
- 2) Cara baru memperlihatkan dunia: dimana media tidak selalu terdefinisikan dengan baik, media menawarkan cara baru dalam memperlihatkan beberapa kemungkinan dan pengalaman baru.

- 3) Adanya hubungan baru (yang berbeda dari sebelumnya) antara subjek (users dan consumers) dengan media teknologi: Hal yang berubah adalah cara penggunaan dan penerimaan dari tampilan dan media komunikasi dalam keseharian dan arti dari berinvestasi kepada media teknologi.
- 4) Pengalaman baru dari hubungan antara perwujudan, identitas dan komunitas: Dalam artian menggantikan nilai personal dan pengalaman sosial terhadap waktu, ruang dan tempat (baik dalam lingkup lokal dan global) yang mana berdampak pada pengalaman diri dan tempat kita berada. (Martin, 2009 :12-13)

Pada penjabaran diatas bisa disimpulkan bahwa media online memiliki karakteristik yang unik sehingga tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah kiblat dalam pencarian informasi kedepannya. Siapapun bisa jadi komunikator dan komunikan dalam media online, siapapun bebas mencari dan kemudian menyebarkan informasi yang didapat. Khalayak memiliki kuasa penuh atas informasi yang didapat. Pilihan selanjutnya adalah kepada khalayak tersebut akan dibagaimanakan informasi yang sudah mereka dapatkan selama menembus ruang dan waktu dalam dunia maya.

4. Konstruksi Sosial Media Massa

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Asumsi dasar dalam pendekatan konstruktivis ini adalah realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, namun tidak juga turun karena campur tangan Tuhan. Tapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan demikian, realitas yang sama bisa ditanggapi, dimaknai dan dikonstruksi secara berbeda-beda oleh semua orang. Karena, setiap orang mempunyai pengalaman, referensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu, dimana kesemua itu suatu saat akan digunakan untuk menafsirkan realitas sosial yang ada disekelilingnya dengan konstruksinya masing-masing.

Selain itu, realitas merupakan suatu bentukan secara simbolik melalui interaksi sosial. Keberadaan simbol atau bahasa menjadi penting dalam membentuk realitas. Berbagai kelompok dengan identitas, pemaknaan, pengalaman, kepentingan, dan sebagainya mencoba mengungkapkan diri dan selanjutnya akan memberi sumbangan dalam membentuk realitas secara simbolik. Interaksi sosial menjadi penting dalam proses ini. Realitas secara simbolik merupakan hasil bersama secara sosial.

Istilah konstruksi atas realitas sosial (social construction of reality) menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge* (1966). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

a) Konstruksi Sosial

Membahas teori konstruksi sosial (social construction), tentu tidak bisa terlepas dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Peter L. Berger merupakan sosiolog dari New School for Social Reserach, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua akademisi ini sebagai suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan.

Asal usul konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glaserfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia, ia adalah cikal bakal konstruktivisme (Suparno dalam Bungin, 2008:13)

Dalam aliran filsafat, gagasan konstruktivisme telah muncul sejak sokrates menemukan jiwa dalam tubuh manusia, sejak Plato menemukan akal budi dan ide. Gagasan tersebut semakin lebih konkret lagi setelah Aristoteles mengenalkan istilah, informasi, relasi, individu, substansi, materi, esensi dan sebagainya. Ia mengatakan bahwa, manusia adalah makhluk sosial, setiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika dan dasar pengetahuan adalah fakta (Bertens dalam Bungin, 2008:13). Aristoteles pulalah yang telah memperkenalkan ucapannya ‘Cogito, ergo sum’ atau ‘saya berfikir karena itu saya ada’ (Tom Sorell dalam Bungin, 2008:13). Kata-kata Aristoteles yang terkenal itu menjadi dasar yang kuat bagi perkembangan gagasan-gagasan konstruktivisme sampai saat ini.

Berger dan Luckman (Bungin, 2008:14) mulai menjelaskan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman ‘kenyataan dan pengetahuan’. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas yang diakui sebagai memiliki keberadaan (being) yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Berger dan Luckman (Bungin, 2008:15) mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan; Berger menyebutnya sebagai momen. Ada tiga tahap peristiwa.

Pertama, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai tertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia

berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia.

Kedua, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas suigeneris. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya atau kebudayaan non-materiil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia.

Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada diluar kesadaran manusia, ada “di sana” bagi setiap orang. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang.

Ketiga, internalisasi. Proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Bagi Berger, realitas itu tidak dibentuk secara ilmiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang

bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

b) Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru (Margaret 2010: 301).

Sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. Berger dan Luckmann mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi.

Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan

mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi (Burhan Bungin 2008: 14).

c) Fakta dan Berita Dilihat dari Paradigma Konstruksionis

Paradigma konstruksionis mempunyai penilaian bagaimana media, wartawan, dan berita dilihat. dalam buku Analisis Framing yang ditulis Eriyanto 2002 penilaiannya yaitu :

1. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Fakta berupa kenyataan itu sendiri bukan sesuatu yang terberi, melainkan ada dalam benak kita yang melihat fakta tersebut. Kitalah yang memberi definisi dan menentukan fakta tersebut sebagai kenyataan. Dalam paradigma konstruksionis fakta merupakan konstruksi atas realitas. Kebenaran suatu fakta bersifat relative, berlaku sesuai konteks tertentu.
2. Media adalah agen konstruksi. Dalam paradigma konstruksionis media bukanlah sekedar saluran atau sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator kepada komunikan, media juga merupakan objek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Lewat berbagai intrumenyang dimilikinya, media ikut membentuk realita yang tersaji dalam pemberitaan. Media bukan hanya. memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan actor dan peristiwa.

3. Berita bukan refleksi dari realitas, Ia hanyalah konstruksi dari realitas. Dalam paradig konstruksionis berita ibaratnya seperti sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realita, melainkan potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Menurut kaum konstruksionis, berita adalah hasil konstruksi sosial yang selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media.
4. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas. Opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subjektif.
5. Wartawan bukan pelapor, Ia agen konstruksi relitas. Dalam paradigma konstruksionis wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya. Berita bukan hanya produk individual, melainkan juga bagian dari proes organisai dan interaksi antara wartawannya. Topik apa yang diangkat dan siapa yang diwawancarai, disediakan oleh kebijakan redakisional tempat wartawan bekerja, bukan semata-mata bagian dari pilihan profesional individu. Wartawan yaitu sebagai partisipan yang menjembatani keragaman objektifitas pelaku sosial.
6. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produki berita. Nilai, etika, atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Wartawan bukan hanya pelapor, karena diadari atau tidak Ia menjadi patisipan dari keragaman penafsiran dari objektifitas dalam publik.
7. Nilai, etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian. Salah satu sifat dasar dari penelitian yang berifat konstruksionis adalah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subjek yang bebas nilai. Pilihan etika, moral, atau keberpihakan peneliti menjadi bagian yang terpisahkan dari proses penelitian.

8. Khalayak memiliki penafsiran tersendiri atas berita. Dalam paradigma konstruksionis, khalayak tidak dilihat sebagai subjek yang pasif, Ia juga subjek yang aktif dalam menafirkan apa yang Ia baca (Eriyanto 2002: 22).

Dalam pandangan konstruksionis, realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural melainkan hasil dari konstruksi. Konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini sering sekali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna. Ia sering dilawankan dengan paradigma prositivis atau paradigma transmisi.

Pradigma ini melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Yang menjadi titik perhatian bukan bagaimana seorang mengirim pesan, tetapi bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi saling memproduksi dan mempertukarkan makna. Disini diandaikan tidak ada pesan dalam arti yang statis yang saling dipertukarkan dan disebarkan. Pesan itu sendiri dibentuk secara bersama-sama antara pengirim dan penerima atau pihak yang berkomunikasi dan dihubungkan dengan konteks sosial dimana mereka berada. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pesan politik dibuat dan diciptakan oleh komunikator dan bagaimana pesan secara aktif ditafsirkan oleh individu sebagai penerima (Eriyanto 2002: 43)

d) Diskursus Konstruksi Sosial, Hegemoni, dan Kesadaran Manusia

Konstruksi sosial amat terkait dengan kesadaran manusi terhadap realitas sosial itu. Karena itu kasadaran adalah bagian yang paling penting dalam konstruksi sosial. Berger dan Luckman mengatakan bahwa, Marx pernah menjelaskan beberapa konsep kuncinya di antaranya adalah kesadaran manusia. Marx menyebutnya dengan

'kesadaran palsu', yaitu alam pemikiran manusia yang teralienasi dari keberadaan sosial yang sebenarnya dari si pemikir.

Selain konsep kesadaran palsu, Karl Marx juga menggambarkan kesadaran masyarakat terefleksi ke dalam struktur masyarakat. Menurut Berger dan Luckmann, Marx kemudian membagi struktur itu menjadi dua bagian, yaitu substruktur dan superstruktur. Superstruktur lebih diidentifikasi sebagai struktur ekonomi semata-mata, sedangkan superstruktur adalah refleksi dari substruktur atau struktur ekonomi itu.

Berger dan Luckmann kemudian menjelaskan pemikiran Marx mengenai substruktur dan superstruktur adalah pemikiran manusia didasarkan atas kegiatan manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan atas hubungan-hubungan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Substruktur dan superstruktur dapat dipahami paling baik jika kita memandangnya berturut-turut, sebagai kegiatan manusia dan dunia yang dihasilkan oleh kegiatan itu. Bagaimanapun substruktur dan superstruktur didasarkan pada hubungan pemikiran dan kenyataan yang mendasarinya, yang lain dari pemikiran itu sendiri. Konstruksi sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gagasan substruktur dan superstruktur. (Bungin 2008:25)

Dalam sosiologi pengetahuan, Scheler (Luckmann dkk dalam Bungin 2008: 26) melihat bahwa ada hubungan antara pemikiran dan kenyataan yang mendasarinya. Dengan demikian, substruktur merupakan kenyataan sosial yang dibangun melalui proses dialektika: eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Sedangkan superstruktur merupakan bentuk lain dari pemikiran dan kesadaran palsu yang terefleksi dari substruktur.

Dalam contoh yang konkret, filsuf Herbert Marcuse (Hartanto dalam Bungin 2008:26) menyebutkan masyarakat mengenal diri

mereka pada barang dagangan yang mereka pakai. Mereka menemukan jiwa mereka pada barang konsumtif lainnya. Mekanisme yang menempatkan posisi seseorang di tengah masyarakat yang berubah dan pengendalian sosial kini terletak pada kebutuhan baru secara konsumtif. Pernyataan posisi seseorang dalam masyarakat kemudian dapat dikonstruksikan melalui iklan televisi, antara lain melalui iklan yang menunjukkan penggunaan produk-produk komersial tertentu yang ada di masyarakat.

Agar sebuah iklan komersil memiliki kemampuan mengkontruksi gender atau kelas sosial di masyarakat, maka lebih dahulu produk itu dikonstruksi sebagai barang yang mampu memberi kontribusi pembentukan kelas eksklusif di masyarakat. Kerena itu produk komersial tertentu harus dikonstruksi sebagai bagian dari kelas atas atau kelas eksklusif itu sendiri. Kemudian penggunaan media televisi dalam konteks ini dengan maksud, selain televisi memiliki kemampuan optimal untuk secara luas dan akurat mengkonstruksi *image* masyarakat. Televisi juga bagian dari masyarakat eksklusif, modern, urbanis, dan kosmopolitan.

Televisi telah muncul sebagai fenomena perubahan sosial, kendati Herbert Marcuse (Hartanto dalam Bungin 2008:26) adalah orang yang skeptis terhadap perubahan-perubahan sosial dilingkungannya, terutama perubahan itu justru terjadi disebabkan karena ide-ide materi Marx mendominasi sendi-sendi kehidupan masyarakat. dan ide-ide itu dituangkan ke dalam instrumen-instrumen kapitalis. sehingga akhirnya perilaku masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat yang konsumtif serta menjadi bagian dari masyarakat kapitalis yang konsumtif serta menjadi bagian dari sistem produksi itu sendiri.

Menurut Hartanto sebagaimana dikutip dalam buku Burhan Bungin, salah satu pemicu kondisi di atas adalah iklan itu sendiri.

Iklan seperti yang disinggung di atas, adalah bagian dari masyarakat kapitalis, yang oleh Al Ries dan Jack Trout, diartikan sebagai ‘pencipta ilusi’. Suatu contoh, iklan rokok tidak lagi sekedar menjual rokok, akan tetapi menjual sebuah kebutuhan, menjual gaya hidup yang penuh pesona. Dari sisi ini kemudian pemenuhan kebutuhan bagaikan meniti sebuah tangga. Tiap tangga adalah bagian dari kemewahan tertentu untuk mengejar kemewahan di atasnya. Anak tangga itu kemudian dapat menciptakan strata sosial di dalam masyarakat.

Melalui interaksi simbolis, konstruksi sosial kadang mampu menghadirkan dunia kesadaran jauh sebelum manusia memahami eksistensi materi dari apa yang disadari sendiri. Hal ini dilakukan melalui *trial and error* terhadap peluang pasar, yang dilakukan oleh media iklan televisi sebagai bagian yang sangat penting dari kekuatan iklan pada umumnya.

Pada saat kesadaran itu mampu dibeli oleh kapitalisme, maka persoalannya menjadi semakin menjadi. Dalam arti, apabila iklan televisi sebelumnya telah menjadi media konstruksi sosial yang efektif, maka kekuatan kapitalisme telah memoles *make up* yang tebal pada semua program televisi melalui iklan-iklan mereka. Tidak saja sampai disitu, karena kemudian ‘darah’ kapitalisme mengalir ke dalam kesadaran semua orang yang berkecimpung di dunia ini. Seakan tanpa campur tangan kapitalisme program televisi itu tak mampu diteruskan. Sehingga jadilah iklan televisi sebagai bagian utama dalam sajian-sajian program televisi.

Iklan televisi juga dapat dilihat sebagai bagian dari konstruksi simbol bahasa budaya dalam masyarakat kapitalis ataupun bahasa kelas sosial. Sebagaimana Gramsci (Patria dan Arief dalam Bungin 2008:27), suatu kelas sosial akan unggul melalui dua cara, yaitu

melalui dominasi atau paksaan dan melalui kepemimpinan intelektual dan moral, yang disebut Gramsci sebagai hegemoni.

Lebih jauh, konstruksi sosial dilihat sebagai bagian dari hegemoni 'penguasa ekonomi' terhadap masyarakat pemirsa. Konteks ini terlihat jelas di saat gagasan konstruksi sosial menjadi bagian dari kekuasaan kapitalis, sehingga hegemoni juga dapat dilihat sebagai bagian dari alat kapitalis dalam mengkonstruksi ideologi masyarakat tentang diri dan kebutuhan hidupnya.

Konstruksi sosial juga telah digunakan untuk secara dialektis, di mana iklan menciptakan kebutuhan dan informasi, sedangkan kebutuhan dan informasi itu menciptakan iklan-iklan baru. Kondisi ini terus-menerus menyebabkan masyarakat terus berada dalam kebutuhan konsumetismenya sendiri. Sehingga pada giliran lain, konsumerisme menjadi bagian yang mengalienasi masyarakat itu sendiri.

Seperti yang dikatakan oleh Durkheim, alienasi dapat menciptakan anomie dalam kehidupan sosial. Maka apabila masyarakat hidup dalam konsumerisme, sedangkan kemampuan sosial ekonominya tidak mendukung kebutuhan konsumerisme, maka Robert K. Merton mengatakan akan banyak bermunculan perilaku menyimpang di masyarakat (Turner dalam Bungin 2008:28).

Menurut Gluckmann sebagaimana dikutip dalam buku Burhan Bungin, Gramsci muda justru dituduh mengembangkan analisisnya dengan berpihak kepada liberalisme, bukan kepada kapitalisme. Banyak kalangan mempertanyakan apakah Gramsci muda lebih liberal, dalam arti analisisnya lebih memberi angin pada perkembangan liberalisme. Namun banyak bukti yang mengatakan pemikiran liberalisme politik Gramsci muda tidak dapat memperkuat kesimpulan bahwa analisis Gramsci pertama kali adalah liberal.

Bahkan sebuah artikel yang dipengaruhi oleh ide-ide Selatan dan ide-ide liberal, memaparkan pembenaran yang tidak cocok dengan kerangka berpikir Gramsci.

Selain memberi dasar yang kuat bagi perkembangan lanjutan dari kapitalisme, menurut Christine Buci-Gluckmann, liberalisme dalam tingkat moral adalah cikal bakal sosialisme. Itulah sebabnya maka Gramsci muda mengembangkan analisis pertamanya tentang liberalisme dengan menggunakan dasar pemikiran seperti ini. Berikutnya, konsep kepemimpinan intelektual dan moral Gramsci memiliki persamaan dengan ideologi dominan, yang merupakan sebuah ideologi yang mempererat penyebaran sejarah tiap kelas (Bungin 2008:28).

Mengacu pada pandangan Berger dan Luckmann terhadap Marx, maka ideologi dominan itu adalah superstruktur, sedangkan media dan termasuk juga iklan televisi adalah substruktur dalam masyarakat kapitalis. Perusahaan besar dengan kekuatan kapitalis saat ini memiliki dua jalan untuk membuat mereka tetap eksis di masyarakat. *Pertama*, menggunakan kekuatan ekonomi makro dan politik untuk menyelamatkan modal mereka melalui pergerakan modal. *Kedua*, menggunakan kekuatan akumulasi modal di pasar dengan menjual produk dan jasa.

Pada jalan kedua ini konstruksi sosial menjadi salah satu kekuatan mereka. Kekuatan kapital yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar, membuat mereka leluasa membangun 'ideologi baru' yang dikonstruksikan melalui pembiayaan yang sangat besar untuk merebut pasar, sekaligus terus-menerus mengkonstruksi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gramsci dikutip dalam buku Burhan Bungin, tentang kepemimpinan intelektual dan moral (yang kemudian dikenal dengan hegemoni) dengan dominasi kultural

(ideologi dominan) seperti yang dijelaskan di atas, maka kapitalisme telah mengambil alih kekuatan ini melalui penguasaan kapital dan menebarkan dominasi hegemoninya serta pelebaran sayap melalui produk-produk mereka.

Tentang bagaimana hegemoni (ideologis) ini menebarkan sayapnya, Stuart Hall berpendapat, media massa merupakan sarana paling penting dari kapitalisme abad ke-20 untuk memelihara hegemoni ideologis, sebagaimana juga menyediakan kerangka berfikir bagi berkembangnya budaya massa. Melalui dimana kelompok dominan terus-menerus berusaha mempertahankan, melembagakan, melestarikan kepenguasaan demi menggerogoti, melemahkan, dan meniadakan potensi tanding dari pihak-pihak yang dikuasai.

Dari gagasan pemikiran di atas itulah lahir teori 'hegemoni media' dengan penekanan yang lebih kuat terhadap kerangka berfikir betapa pentingnya kelompok dominan. Melalui mekanisme kerja tertentu, segala bentuk ekspresi dan cara penerapannya dalam rangka memengaruhi alam pikiran media, serta kemampuan media untuk membentuk 'agenda setting' masyarakat dalam menentukan pilihan-pilihan kultural

Hegemoni media massa antara lain menghasilkan 'ideologi iklan', bahwa produk iklan selalu menyodorkan sisi baik sebuah produk, hal ini menurut Zaim Saidi (1996: 41) dilakukan melalui *selling effect*, tujuannya tentu saja, 'menembak' psikologis konsumen dan bukan akal sehat. Sehingga iklan selalu sarat dengan kegunaan sekunder (Bungin 2008:29)

e) **Proses konstruksi sosial media massa melalui tahapan sebagai berikut:**

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi

Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada desk editor yang ada di setiap media massa. Masing-masing media memiliki desk yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan tiga hal yaitu kedudukan, harta, dan perempuan. Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial yaitu : a. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Sebagaimana diketahui, saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidak dimiliki oleh kapitalis. Dalam arti kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan pelipat gandaan. b. Keberpihakan semu kepada masyarakat. Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah juga untuk menjual berita demi kepentingan kapitalis. c. Keberpihakan kepada kepentingan umum. Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya adalah visi setiap media massa, namun akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar. Jadi, dalam menyiapkan materi konstruksi, media massa memosisikan diri pada tiga hal tersebut di atas, namun pada umumnya keberpihakan pada kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang mau ataupun tidak harus menghasilkan keuntungan.

2. Tahap sebaran konstruksi Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing media berbeda, namun prinsip utamanya adalah real time. Media cetak memiliki konsep real time terdiri dari beberapa konsep hari, minggu atau bulan, seperti terbitan harian, terbitan mingguan atau terbitan beberapa mingguan

atau bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep real time yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut. Pada umumnya sebaran konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah, dimana media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai pada pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media menjadi penting pula bagi pembaca.

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas a. Tahap pembentukan konstruksi realitas Tahap berikut setelah sebaran konstruksi, dimana pemberitaan telah sampai pada pembaca yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. Pertama, konstruksi realitas membenaran; kedua, kesediaan dikonstruksi oleh media massa; ketiga, sebagai pilihan konsumtif. Tahap pertama adalah konstruksi membenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran. Dengan kata lain, informasi media massa sebagai otoritas sikap untuk membenarkan sebuah kejadian. Tahap kedua adalah kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari tahap pertama. Bahwa pilihan seseorang untuk menjadi pembaca media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa. Tahap ketiga adalah menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, dimana seseorang secara habit tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan hidup yang tak bisa dilepaskan. Pada tingkat tertentu, seseorang merasa tak mampu

beraktivitas apabila ia belum membaca koran b. Pembentukan konstruksi citra Pembentukan konstruksi citra bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Dimana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model: 1) model good news dan 2) model bad news. Model good news adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Pada model ini objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek itu sendiri. Sementara pada model bad news adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri.

4. Tahap konfirmasi Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. Ada beberapa alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi ini yaitu: a) kehidupan modern menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi media massa, b) kedekatan dengan media massa adalah life style orang modern, dimana orang modern sangat menyukai popularitas terutama sebagai subjek media massa itu sendiri, dan c) media massa walaupun memiliki kemampuan mengkonstruksi realitas media berdasarkan subjektivitas media, namun kehadiran media massa dalam kehidupan seseorang merupakan sumber pengetahuan tanpa batas yang sewaktu-waktu dapat diakses (Burhan Bungin. 2008: 195-200)

5. Analisis Framing

Konsep framing telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media. Dalam ranah studi komunikasi, analisis framing mewakili tradisi yang mengedepankan pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisis fenomena atau aktivitas komunikasi. Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perpektifnya. (Sobur, 2006:162)

a) Defenisi Analisis Framing

Ada beberapa definisi framing dalam Eriyanto. Definisi tersebut dapat diringkas dan yang disampaikan oleh beberapa ahli. Meskipun berbeda dalam penekanannya dan pengertian. Masih ada titik singgung utama dari definisi tersebut, yaitu antara lain:

1. Menurut Robert Etman Proses seleksi di berbagai aspek realitas sehingga aspek tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya. Ia juga menyatakan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya.
2. Menurut Todd Gitlin Strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
3. Menurut David Snow dan Robert Benford Pemberian makna untuk ditafsirkan peristiwa dari kondisi yang relevan. Frame mengorganisasikan system kepercayaan dan diwujudkan dalam kata

kunci tertentu, seperti anak kalimat, citra tertentu, sumber informasi dan kalimat tertentu.

4. Menurut Zhongdan dan Pan Konsicki Sebagai konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita. Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian yang lain disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang tidak ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh khalayak karena khalayak digiring pada satu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut. Framing adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Di tambah pula dengan berbagai kepentingan, maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut. (Sobur 2006: 167)

Disini media memberikan ruang kepada salah satu realita untuk terus ditonjolkan. Dan ini merupakan sesuatu realita yang direncanakan oleh suatu media untuk ditampilkan. Dalam menampilkan suatu realita ada pertimbangan terkait dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Secara selektif media menyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkannya. Seperti menyunting bahkan wartawan sendiri memilih mana berita yang disajikan dan mana yang disembunyikan. Dengan demikian media mempunyai kemampuan untuk menstruktur dunia dengan memilah berita tertentu dan mengabaikan yang lain. Media membentuk citra seperti apa yang disajikan oleh media dengan cara menyediakan ruang atau waktu untuk sebuah realitas dengan ruang dan waktu secara tertentu. Ada dua aspek dalam framing, yaitu:

- a. Memiliki fakta atau realitas

Proses pemilihan fakta adalah berdasarkan asumsi dari wartawan akan memilih bagian mana dari realitas yang akan diberitakan dan bagian

mana yang akan dibuang. Setelah itu wartawan akan memilih angle dan fakta tertentu untuk menentukan aspek tertentu akan menghasilkan berita yang berbeda dengan media yang menekankan aspek yang lain.

b. Menuliskan fakta

Proses ini berhubungan dengan penyajian fakta yang akan dipilih kepada khalayak. Cara penyajian itu meliputi pemilihan kata, kalimat, preposisi, gambar dan foto pendukung yang akan ditampilkan. Tahap menuliskan fakta itu berhubungan dengan penonjolan realitas. Aspek tertentu yang ingin ditonjolkan akan mendapatkan alokasi dan perhatian yang lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

b) Teknik Framing Dan Konsep Model Zhondhang Pan Dan Gerald M. Kosicki

Disiplin ilmu ini bekerja dengan didasarkan pada fakta bahwa konsep ini bisa ditemui di berbagai literatur lintas ilmu sosial dan ilmu perilaku. Secara sederhana, analisis framing mencoba untuk membangun sebuah komunikasi bahasa, visual, dan pelaku dan menyampaikannya kepada pihak lain atau menginterpretasikan dan mengklasifikasikan informasi baru. Melalui analisa bingkai, kita mengetahui bagaimanakah pesan diartikan sehingga dapat diinterpretasikan secara efisien dalam hubungannya dengan ide penulis. Framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut, menurut Pan dan Kosicki ada dua konsep dari framing yang saling berkaitan, yaitu konsep psikologis dan konsep sosiologis yaitu :

1. Dalam konsep psikologis, framing dilihat sebagai penempatan informasi dalam suatu konteks khusus dan menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih menonjol dalam

kognisi seseorang. Elemen-elemen yang diseleksi itu menjadi lebih penting dalam mempengaruhi pertimbangan seseorang saat membuat keputusan tentang realitas.

2. Sedangkan konsep sosiologis framing dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas diluar dirinya Dalam Zhondhang Pan Dan Gerald M Kosicki, kedua konsep tersebut diintegrasikan. Secara umum konsepsi psikologis melihat frame sebagai persoalan internal pikiran seseorang, dan konsepsi sosiologis melihat frame dari sisi lingkungan sosial yang dikonstruksi seseorang. Menurut Etnman, framing berita dapat dilakukan dengan empat teknik, yakni pertama, problem identifications yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan nilai positif atau negatif apa, causal interpretations yaitu identifikasi penyebab masalah siapa yang dianggap penyebab masalah, treatment recommendations yaitu menawarkan suatu cara penanggulangan masalah dan kadang memprediksikan penanggulannya, moral evaluations yaitu evaluasi moral penilaian atas penyebab masalah. (Sobur, 2006: 172)

Secara teknis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk men-framing seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian (happening) penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide yang diberitakan. Framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: pertama, pada identifikasi masalah (problem identification), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (causal interpretation), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (moral evaluation), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran

penanggulangan masalah (treatment recommendation), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksikan hasilnya.

c) Proses Framing

Dengan analisis framing juga untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi dan menulis berita. Proses pemberitaan dalam organisasi media, akan sangat mempengaruhi suatu berita yang akan diproduksinya. Frame yang diproses dalam organisasi media tidak lepas dari latar belakang pendidikan wartawan sampai ideology institusi media tersebut. Tiga proses framing dalam organisasi berita antara lain sebagai berikut:

1. Proses framing sebagai metode penyajian realitas. Dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibalik secara halus. Dengan memberikan sorotan aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat-alat ilustrasi lainnya.
2. Proses Framing merupakan bagian yang tidak terpisahkan diproses penyutungan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak redaktur dengan atau tanpa konsultasi dengan redaktur pelaksana, dalam menentukan laporan reporter akan dimuat atau tidak, serta menentukan judul yang akan diberikan.
3. Proses framing juga tidak hanya melibatkan para pekerja pers, tetapi juga pihak-pihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu, yang masing-masing berusaha menampilkan sisi informasi yang ingin ditonjolkan, sambil menyembunyikan sisi lain.

Dalam analisis yang akan dilakukan pertama kali adalah melihat bagaimana media mengkonstruksi suatu realita. Peristiwa dipahami bukan sesuatu yang taken for Grated, sebaliknya wartawan dan

medialah yang secara aktif membentuk realitas. Realitas tercipta dalam konsepsi wartawan. Berbagai hal yang terjadi, fakta, orang diabstrakan menjadi peristiwa yang kemudian hadir dihadapan khalayak. Jadi, bagaimana media membingkai peristiwa dalam konstruksi tertentu, sehinggalah yang menjadi titik perhatian bukan apakah media memberikan negative atau positif, melainkan bagaimana bingkai yang dikembangkan oleh media.

B. Kajian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini penulis memaparkan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis framing pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51 di *Kompas.com* dan *Republika.co.id*.

Secara khusus penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang meneliti persis seperti yang sedang penulis teliti, yaitu analisis framing pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51. Namun sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini penulis ada tiga penelitian terdahulu yang menurut penulis cukup relevan untuk dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Noor Irfan (2011) dalam tesisnya yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Harian Kompas atas RUUK-DIY tesis ini melakukan penelitian dengan latar belakang gencarnya pemberitaan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan-Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK-DIY) pada harian Umum Kompas, baik dalam jumlah berita maupun tulisan Tajuk Rencana. Karena harian Kompas yang berskala nasional tidak mudah dipahami bila justru berpihak terhadap daerah, sementara di daerah setempat sudah ada koran lokal yang hegemonik kekuasaan lokal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana Harian Umum Kompas (1) melakukan pembedaan terhadap berita RUUK-DIY dan bagaimana politik pemberitaan Kompas (2) terhadap wacana RUUK-DIY.

Melalui analisis framing Gamson dan Modigliani diperoleh fakta keberpihakan harian Umum Kompas terhadap warga Yogyakarta yang menginginkan penetapan dalam suksesi kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal yang berlawanan dengan kehendak pemerintah pusat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Kemendagri Gamawan Fauzi yang menginginkan pemilihan sebagaimana berlaku untuk daerah lain di Indonesia. Koran Kompas memiliki kredibilitas dan idealisme tinggi, hanya sedikit media di Indonesia mempertaruhkan reputasinya dalam pemilihan terhadap RUUK-DIY. Dengan demikian pasti memiliki alasan kuat dalam pemilihan ini. Dari hasil wawancara, penelitian naskah pemberitaan, maupun tajuk rencana harian ini diperoleh hasil sebagai berikut. Kompas memiliki komitmen kebangsaan yang sangat kuat terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan. Dengan demikian persoalan RUUKDIY Kompas melihat saat ini bukan merupakan prioritas persoalan yang harus segera di tangani. Di lain hal, Kompas memiliki kepercayaan kuat terhadap kecerdasan masyarakat Yogya dalam menyelesaikan persoalannya sendiri. Dalam hal penetapan maupun keistimewaan Yogyakarta, terbukti sudah 66 tahun menurut Kompas tidak ada persoalan yang urgen baik dalam skala kedaerahan maupun nasional.

Kristanto (2012) dalam tesisnya yang berjudul ‘Analisis Framing Kasus Kompas dan Media Indonesia dalam Liputan Kerusuhan di Temanggung 8 Februari 2011’ penelitian ini menelaah mengenai bagaimana dua surat kabar nasional *Kompas* dan *Media Indonesia* membuat framing dalam liputan mereka atas kasus kerusuhan di Kota Temanggung, pada 8 Februari 2011. Penelitian ini yang bersifat kualitatif dan deskriptif ini menggunakan metode analisis framing untuk membuktikan bahwa meski kedua surat kabar melancarkan framing, yang mendesak Pemerintah agar melindungi warga negara dan kaum minoritas dari kekerasan atas nama agama dan mendesak pembubaran ormas anarkis, namun pada prakteknya proses itu tidak tuntas, sehingga efek yang diharapkan juga tidak terlalu kuat. Hasil penelitian ini menyarankan agar kedua surat kabar memahami kiat-kiat melancarkan

framing yang efektif, mendidik para wartawannya untuk belajar memahami dan menggali konteks, mengembangkan pola pemberitaan interpretatif (*interpretative story*), serta meningkatkan kemampuan dan kompetensi untuk meliputi agama-agama (*how to cover religions*) dalam upaya memelihara pluralitas dan demokrasi di Indonesia.

Farah Diba (2014) dalam ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id Analisis Framing pada Pemberitaan Politik Partai Hanura di Media Online Sindonews. penelitian ini berisi tentang pengemasan pemberitaan Partai Hanura yang berkaitan khusus tentang Pemilihan Presiden 2014 oleh kantor berita online Sindonews. Jenis penelitian yang digunakan peneliti bersifat kualitatif deskriptif interpretatif dengan metode analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Konsep framing dalam metode ini adalah strategi kontruksi dan memproses berita. Fokus penelitian ini yaitu siktaksis, skrip ,tematik dan retorik. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan kliping berita tentang pemberitaan Partai Hanura yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2014 pada edisi 2 Juli – 2 Agustus 2013 di Sindonews. Hasil penelitian ini menunjukkan Sindonews melalui pemberitaannya menunjukkan keberpihakkannya terhadap Partai Hanura dengan selalu memberikan pemberitaan positif dan tidak satu pun memuat berita negative terhadap Partai Hanura Hal tersebut menunjukkan kekuasaan pemilik perusahaan media sangat berpengaruh terhadap isi pemberitaan. Selanjutnya membuat skematis hasil penelitian tersebut dalam sebuah tabel yang disusun berdasarkan tahun penelitian dari yang terdahulu hingga yang terkini. Untuk memudahkan pemahaman terhadap bagian ini, dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

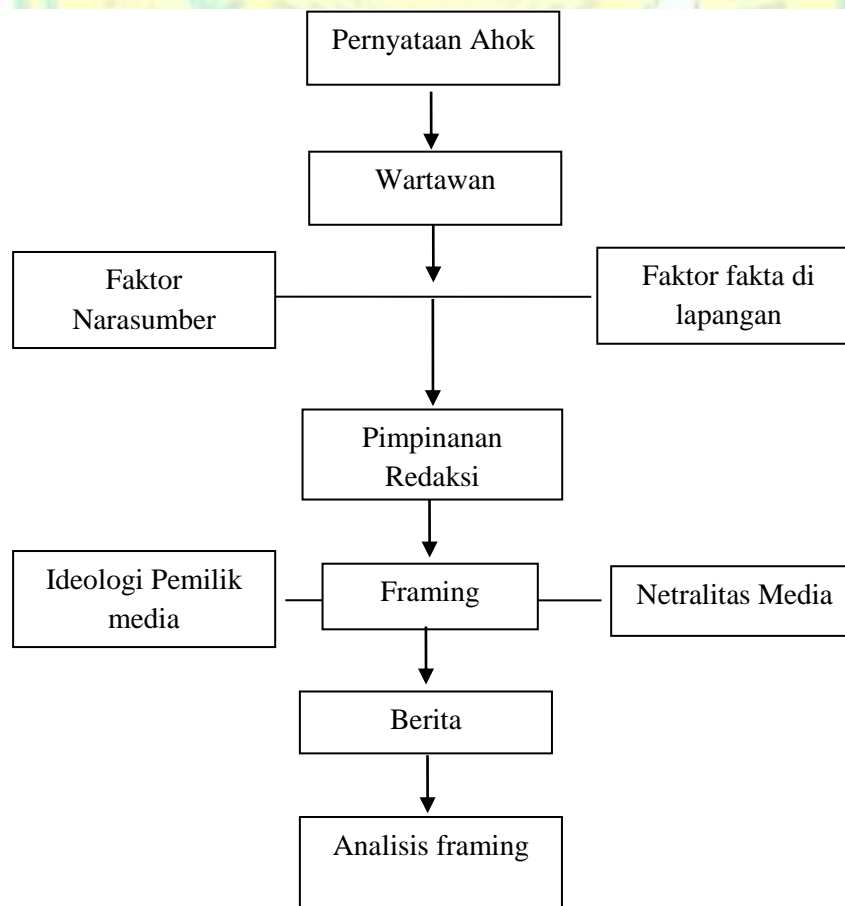
NO	Tahun	Peneliti	Masalah penelitian	Hasil/ temuan
1	2011	Noor Irfan	Pemberitaan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan-Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK-DIY) pada harian Umum Kompas. Karena harian Kompas yang berskala nasional tidak mudah dipahami bila justru berpihak terhadap daerah, sementara di daerah setempat sudah ada koran lokal yang hegemonik kekuasaan lokal	Melalui analisis framing Gamson dan Modigliani diperoleh fakta keberpihakan harian Umum Kompas terhadap warga Yogyakarta yang menginginkan penetapan dalam suksesi kepala daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal yang berlawanan dengan kehendak pemerintah pusat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Kemendagri Gamawan Fauzi yang menginginkan pemilihan sebagaimana berlaku untuk daerah lain di Indonesia.
2	2012	Kristanto	Aksi kekerasan bernuansa agama, yakni penyerangan terhadap rumah milik Jamaah Ahmadiyah di kampung Cikeusik, Pandeglang yang menewaskan 3 (tiga) orang pada 6 Februari 2011 dan dua hari kemudian disusul dengan kerusuhan di Pengadilan Negeri Temanggung yang merembet pada	terdapat faktor-faktor teknis di kedua surat kabar itu sehingga framing yang mereka buat kurang kontekstual. Namun hal yang sangat baik adalah, meski ada kecenderungan terjadi konservatisme di

			<p>pengerusakan tiga buah gedung gereja dan sekolah Kristen di kota itu.</p>	<p>lingkungan sosial, politik, ekonomi (eksternal) pasca kejatuhan Orde Baru, namun di kedua surat kabar tersebut hal itu belum berdampak, mereka masih tetap menjunjung nilai-nilai kebersamaan sebagai bangsa yang majemuk</p>
3	2014	Fara Diba	<p>pemilik dari media akan memiliki keleluasaan yang lebih dalam menyiarkan iklan yang terkait dengan partai atau dirinya. Hal tersebut diperkuat para pemilik media yang mencalonkan diri merupakan pemilik televisi yang menjadi media primadona dalam pemilu. Salah satunya adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Hanura mengusung Wiranto sebagai Capres dan Hary Tanoesoedibjo sebagai Cawapres. Penelitian ini akan melihat bagaimana media Sindonews melakukan framing terhadap pemberitaan mengenai partai HANURA yang mengusung Wiranto dan Harry Tanoe sebagai Capres dan Cawapres pada pemilu 2014.</p>	<p>Dari hasil analisis pembingkaiian terlihat bahwa pemilik media memiliki keberpihakan pemberitaan pada medianya. Hal ini menunjukkan bahwa netralitas dan objektivitas media dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media. Pembingkaiian yang dilakukan oleh Sindonews sangat berpihak kepada Partai Hanura</p>

C. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual atau kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi. Suatu kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teoretis antar variabel penelitian, yaitu antara variabel bebas dan terikat. Analisis framing dalam penelitian ini akan melihat bagaimana media membingkai sebuah peristiwa, atau untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

Berita dalam pandangan konstruksi sosial, bukan merupakan peristiwa atau fakta dalam arti yang riil. Disini realitas bukan hanya dioper begitu saja sebagai berita. Ia adalah produk interaksi antara wartawan dengan fakta. Kerangka berfikir dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Pernyataan yang disampaikan Ahok tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51 yang disampaikan pada saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu menjadi objek utama penelitian, yang dijadikan tema berita oleh para wartawan media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*, dalam penulisan berita ini masing-masing wartawan akan menulis dengan gaya dan bahasanya yang berbeda. Tulisan atau analisis tertulis oleh wartawan akan dipengaruhi oleh minimal dua faktor yaitu narasumber berita dan fakta yang terjadi di lapangan. Narasumber adalah seorang tokoh atau orang yang kompeten dalam menyampaikan opininya terkait dengan pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 yang dipilih oleh wartawan.

Sedang Fakta di lapangan merupakan kejadian yang terjadi di lapangan apa adanya terkait dengan pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 yang dilihat langsung oleh wartawan di tempat kejadian. Dengan memperhatikan kedua faktor itu maka wartawan akan menyusun atau menceritakan kejadian itu dalam bentuk berita sehingga memenuhi rumus baku dalam penulisan yakni 5W + 1H. Setelah tulisan tersebut selesai disusun dalam bentuk berita maka tulisan itu dikirim kepada pimpinan redaksi untuk dilakukan pengeditan kembali.

Pimpinan Redaksi: orang yang pertama yang bertanggung jawab atas semua isi berita, yang mengontrol baik buruk sebuah berita. Pimpinan redaksi ini menjadi orang penting terkait dengan isi berita yang akan diterbitkan. Cara pandang pimpinan redaksi terkait dengan sebuah berita akan dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya ideologi pemilik media dan juga pertimbangan fakta yang terjadi di lapangan.

Framing akan dilakukan oleh pimpinan redaksi, dengan mempertimbangkan berbagai hal sebelum berita tentang pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 ini dimuat dalam sebuah media *online*, banyak faktor yang mempengaruhi di dalamnya, namun pada akhirnya seorang pimpinan redaksi akan tetap memiliki kewenangan bagaimana isi berita yang akan dipublikasikan.

Ideologi pemilik media: ideologi pemilik media ini akan berpengaruh terhadap Penempatan sumber berita yang berdampak menonjolnya seorang sumber dibandingkan dengan sumber lain, berita yang akan ditulis dalam sebuah berita sangat tidak mungkin bertentangan dengan ideologi pemilik media. Meski dalam faktanya di lapangan yang terjadi akan bertentangan dengan ideologi pemilik media, maka media ini akan memberikan framing dari sisi lain.

Netralitas media: media harus memberikan tempat yang sama pada pandangan yang berbeda. Media tidak perlu mendikte atau mengarahkan, cukup mengungkap fakta apa adanya dan masyarakatlah yang memberi penilaian. Netralitas sebuah media adalah keadaan tidak membantu salah satu pihak dalam ketidaksepakatan, kompetisi, dan sebagainya. Dari rumusan yang serba ringkas itu, netralitas memuat pengertian tentang kemampuan subjek sosial dalam menjaga jarak ketika terjadi pertikaian atau persaingan.

Berita: secara defenisi berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, Internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Berita yang disajikan dalam penelitian ini adalah pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51.

Analisis framing: penulis melakukan analisis framing berita tentang pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 pada media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id* yang dipublikasikan dari tanggal 6 Oktober – 16 November 2017. Analisis framing merupakan salah satu alternatif model analisis yang dapat mengungkap rahasia dibalik sebuah perbedaan bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. Analisis framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Elemen-elemen tersebut bukan hanya bagian dari teknis jurnalistik, melainkan menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Inilah sesungguhnya sebuah realitas politik, bagaimana media

membangun, menyuguhkan, mempertahankan, dan mereproduksi, suatu peristiwa kepada pembacanya.

Melalui analisis framing akan dapat diketahui siapa menendalikan siapa, siapa lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena analisis framing merupakan suatu seni-kreativitas yang memiliki kebebasan dalam menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu. Ada dua esensi utama dari analisis framing yaitu, Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana menekankan tentang analisis framing oleh dua media mengenai suatu kasus. Pendekatan kualitatif dilakukan untuk meneliti pembingkaihan yang dilakukan oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id* mengenai video pernyataan Gubernur DKI Jakarta tentang dibohongi Al-Maidah 51. Pendekatan ini menggunakan paradigma konstruksionis untuk melihat pemaknaan dan proses bagaimana suatu realitas dibentuk atau digambarkan, karena media dianggap sebagai suatu yang dinamis.

Penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis, objektivitas, sistematis, dan sistemik sehingga diperoleh ketetapan dalam interpretasi, sebab hakikat dari suatu fenomena atau gejala bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas atau gestalt. Pertimbangan peneliti dalam penggunaan dan penafsiran makna yang terkandung di dalam fenomena temuan sangat diperlukan. Pertimbangan dilakukan dengan cara menetapkan kategori yang lain, dan menentukan kriteria yang akan digunakan terhadap kategori-kategori itu. Analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif-analitik yang berarti interpretasi terhadap isi dibuat dan disusun secara sistemik/menyeluruh dan sistematis. (Margono 2010:36-37).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang dilakukan secara teratur dan sistematis untuk melakukan pengumpulan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data sesuai fakta-fakta yang ada. Metode deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk dapat melakukan pendeskripsian terhadap data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam suatu teks pemberitaan oleh media massa. Selanjutnya, peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan penelitian

secara kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis framing model analisis yang telah diperkenalkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Margono 2010:36). Jadi, metode penelitian deskriptif-kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan pendeskripsian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta berupa kata-kata tertulis yang terdapat dalam suatu teks berita di media massa.

C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dalam artian tidak bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian tetapi memberikan gambaran realitas sosial mengenai sebuah berita, dalam hal ini framing terhadap pernyataan Ahok “dibohongi pake surat Al-Maidah” yang dimuat pada media online yakni, *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, maka perlu bagi kami untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas.

D. Operasional Konsep

Konsep penelitian yang dibangun dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat pada tinjauan pustaka. Beberapa penjelasan mengenai konsep dalam penelitian kata kuncinya adalah analisis framing, secara sederhana analisis framing merupakan metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media

atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada ‘cara melihat’ terhadap realitas yang dijadikan berita. ‘cara’ melihat ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas.

Dengan kata lain, Analisis framing akan melihat bagaimana sebuah media melakukan konstruksi sosial terhadap sebuah peristiwa, media akan membangun sebuah konstruksi berdasarkan faktor-faktor tertentu, sehingga sebuah peristiwa yang sama lapangan, bisa jadi akan berbeda tatkala itu muncul dalam sebuah media, perbedaan terletak pada penekanan/penonjolan kata-kata tertentu, isu tertentu dan lain-lain.

E. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita tentang pernyataan Ahok “dibohongi pakai surat Al-Maidah” yang dipublikasikan oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. dari tanggal 6 Oktober – 16 November 2016.

F. Informasi dan Sumber Informasi

Informasi dan sumber informasi pada penelitian ini adalah berita tentang pernyataan Ahok dibohongi pakai surat Al-Maidah pada media online *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. terbitan sejak tanggal 6 Oktober - 16 November 2016.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu data primer dan skunder. Data primer merupakan sasaran utama dalam analisis, sedangkan data sekunder diperlukan guna mempertajam analisis data primer sekaligus dapat dijadikan bahan pendukung ataupun pembanding.

1. Data primer, yaitu data tekstual yang diperoleh dari media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*. penulis memilih berita yang hanya menyangkut video pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surat Al-Maidah 51.
2. Data sekunder, yaitu dengan mencari referensi berupa buku-buku dan tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisa ini mencakup baik presentasi data-data empiris secara tepat dan teratur, maupun interpretasi data-data tersebut ke dalam dasar-dasar teori yang telah dikenal sebelumnya. Sementara itu interpretasi data yang dimaksud merupakan kegiatan memberi arti signifikan terhadap analisis data, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

dengan kata lain, analisis data merupakan sebuah proses yang dilakukan penulis untuk mengolah data-data penelitian yang diambil dari berbagai sumber baik data utama seperti media online *Kompas.com* dan *Republika.co.id* atau data-data pendukung seperti buku-buku atau tulisan terkait, yang kemudian data tersebut dianalisis oleh penulis dan pada akhirnya memiliki hasil penelitian yang sesuai berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di awal penulisan.

Penelitian ini akan menggunakan model Zhongdan Pan Konsicki, model ini dibagi dalam empat struktur besar, yaitu:

- a. Siktaksis Adalah cara wartawan dalam penyusunan peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Struktur sintaksi memiliki perangkat, yaitu:
 - 1) Headline merupakan berita yang dijadikan topik utama oleh media
 - 2) Lead (teras berita) merupakan paragraf pembuka dari sebuah berita yang biasanya mengandung kepentingan lebih tinggi. Struktur ini sangat tergantung pada ideologi penulis terhadap peristiwa.
 - 3) Latar informasi
 - 4) Kutipan
 - 5) Sumber
 - 6) Pernyataan
- b. Skrip Adalah cara wartawan mengisahkan fakta atau bagaimana wartawan menceritakan peristiwa ke dalam berita. Struktur skrip memfokuskan perangkat framing pada kelengkapan berita:
 - 1) What (apa)

- 2) When (kapan)
- 3) Who (siapa)
- 4) Where (di mana)
- 5) Why (mengapa)
- 6) How (bagaimana)

c. Tematik

cara wartawan menulis fakta atau bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat, atau antar hubungan hubungan kalimat yang memberntuk teks secara keseluruhan. Struktur tematik mempunyai perangkat framing, yaitu antara lain:

- 1) Detail
- 2) Maksud dan hubungan kalimat
- 3) Nominalisasi antar kalimat
- 4) Koherensi
- 5) Bentuk kalimat
- 6) Kata ganti, Unit yang diamati adalah paragraf atau proposisi

d. Retoris Adalah cara wartawan menekankan fakta, bagaimana menekankan arti tertentu dalam suatu berita. Struktur retorik mempunyai perangkat framing:

- 1) Leksikon/pilihan kata. Perangkat ini merupakan penekanan terhadap sesuatu yang penting.
- 2) Grafis
- 3) Metafor
- 4) Pengandaian. Unit yang diamati adalah kata, idiom, gambar/foto, dan grafis

Analisi berita tentang pernyataan Ahok “dibohongi pake surat Al-Maidah 51” dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain:

- a. Penulis melakukan transkrip terhadap perntaan Ahok.
- b. Mengumpulkan berita tentang pernyataan Ahok “dibohongi pake surat Al-Maidah 51” yang dipublikasikan.

- c. Melakukan transkrip terhadap semua hasil wawancara dengan semua narasumber dengan tujuan untuk menghubungkan data yang sudah didapat melalui komparasi dengan informasi berita yang telah dipublikai di media *online* dan juga melakukan pengelompokan atau pemetaan terhadap data sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.
- d. Data yang telah dikelompokkan, diatur sesuai dengan urutannya atau bagianbagiannya sehingga menjadi benar dan terarah, lalu memasukkannya ke dalam suatu pola kategori dan satu uraian bergantung perkembangan data yang diperoleh.
- e. Melakukan penyesuaian data-data yang ada baik dari wawancara maupun dari sumber berita.
- f. Setelah semua selesai, maka dilakukan penulisan laporan yang disajikan secara deskriptif analisis, yaitu dari data yang diperoleh selain penggambaran menyeluruh hasil temuan tersebut, juga dianalisis secara mendalam berdasarkan penafsiran rasional serta keterkaitannya dengan teori atau konsep yang telah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kompas.com

Kompas.com merupakan media kompas yang berbentuk online. Sejarah Kompas mengutip tesis Analisis Framing Pemberitaan Harian Kompas atas RUUK-DIY (Noor Irfan: 2011) Kompas lahir di tanah Indonesia pada awalnya bernama Intisari, apabila kita membicarakan Intisari tidak dapat kita lepaskan dari Kelompok Kompas Gramedia atau disingkat KKG. Tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1963, Intisari lahir dalam nuansa suka cita dalam usia Republik Indonesia yang ke-18. Pada awal terbit masih bersifat bulanan, setahun kemudian Presiden Soekarno memberikan desakan kepada Partai Katolik untuk mendirikan koran sebagai langkah untuk menandingi komunis pada waktu itu. Mulailah beberapa wartawan katolik direkrut untuk menindak lanjuti keinginan dari Soekarno. Dari pertemuan itulah terbentuk pengurus Kompas dan melalui rahim Yayasan Bentara Rakyat inilah lahir Kompas.

Di tengah lingkungan politik, ekonomi dan infrastruktur yang kurang menunjang, P.K. Ojong dan Jacob Oetama mulai membangun perusahaan dengan mempersiapkan penerbitan koran baru sebagai corong Partai Katolik. Namun kondisi politik yang kurang kondusif membuat pekerjaan tersebut menjadi tidak mudah dan rencananya koran ini dinamai Bentara Rakyat. Meskipun beratnya syarat yang harus dipenuhi sebuah surat kabar yang akan terbit pada waktu itu, dengan adanya aturan pengumpulan tanda tangan pelanggan sebanyak 5.000 orang, tidak menyurutkan semangat para pengurus, termasuk di dalamnya Frans Seda. Pada tanggal 28 Juni 1965 di Jakarta Kompas terbit untuk yang pertama kali dengan tiras 4800 eksemplar.

Dalam kondisi nasional yang kurang kondusif tersebut pada akhirnya Kompas mampu memenuhi syarat-syarat yang lumayan berat untuk di penuhi. Dengan dukungan yang diberikan oleh Jendral A. Yani

sebagai bentuk harapan untuk mengeliminir kekuatan komunis pada saat itu sehingga muncul semacam kekuatan jurnalistik untuk berposisi dengan komunis, selain itu juga mengingat pada saat itu banyak koran yang mengalami pembredelan dikarenakan dinilai kurang revolusioner. Kompas sendiri menemui banyak cemoohan dari media massa yang condong pada komunis dalam usia yang sangat belia saat itu.

Meskipun demikian, sesuai dengan tujuan sejak awal pendiriannya yaitu untuk menyelamatkan dari penyimpangan opini dan hasutan-hasutan masa komunis serta demi tegaknya orde baru. Pertama kali terbit Kompas terdiri dari empat halaman, dengan tampilan berita baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang antara lain mengenai tertundanya Konferensi Asia Afrika (KAA) dengan diberi judul ‘ KAA II Ditunda Empat Bulan. Selain itu sebagai kata perkenalan dari Kompas muncul Pojok Kompas di kanan bawah yang berbunyi ‘ Mari ikat hati mulai hari ini dengan Mang Usil ’. Sedangkan staf dan pengurus redaksi ditulis pada pojok kiri atas halaman pertama dengan pimpinan redaksi Jakob Oetama sedangkan nama P.K. Ojong tidak tercantum dalam kepengurusan redaksi pada saat itu dikarenakan dinilai “tabu politik”.

Tajuk rencana yang merupakan sikap dari media , belum dimunculkan oleh redaksi, tetapi di halaman dua terdapat tulisan tentang “Lahirnya Kompas” yang disebut sebagai tajuknya Kompas. Halaman dua ditampilkan beberapa berita dari luar maupun dari dalam negeri dengan ditambah beberapa artikel lepas. Berita olah raga masih mendapatkan porsi yang kecil, yakni dua buah berita di halaman empat. Tampilan pada usia yang masih muda masih memerlukan banyak perbaikan dalam segi penulisan dan penyajian berita. Seperti halnya pada gambar yang kurang jelas atau aksesoris yang masih kurang untuk menambah tampilan dari Kompas. Pemerintahan sangat memberikan warna dalam dinamika pers, dalam masa demokrasi Terpimpin, pemerintah saat itu memberlakukan peraturan menyangkut kehidupan pemberlakuan peraturan yang menyangkut kehidupan pers di Indonesia

melalui Peraturan Presiden no. 6 tahun 1964 yang menetapkan bahwa setiap surat kabar berafiliasi dengan partai politik yang ada.

Kompas sendiri pada saat itu bergabung dengan Partai Katolik Indonesia (Parkindo). Kompas kembali menjadi media cetak yang independen serta bersifat umum. Kembalinya Kompas menjadi surat kabar yang independen didasarkan pada keyakinan para perintisnya sejak semula, yaitu bahwa visi kemasyarakatan koran harus terbuka. Visi dan sikap itu selain sesuai dengan keyakinan para perintisnya, juga dianggap sesuai dengan fungsi pers Indonesia, yaitu ikut mengembangkan sikap saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk. Dengan keterbukaan itulah memungkinkan Kompas berkembang lebih cepat. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 3 bulan usianya, Kompas sudah dilarang terbit bersama beberapa surat kabar lainnya, tepatnya pada Oktober 1965. Larangan terbit ini berkaitan dengan peristiwa nasional G 30 S PKI yang menewaskan enam Jenderal pucuk pimpinan TNI AD, termasuk Letjen Achmad Yani yang menggagas terbentuknya Kompas .

Waktu itu hanya harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha dan LKBN Antara saja yang diizinkan terbit oleh Pelaksana Penguasa Perang Daerah (Pepelrada). Sebenarnya Kompas boleh saja tetap terbit, mengingat edisi tanggal 2 Oktober 1965, beritanya berpihak ada Orde Baru, apalagi Kompas sering mengkritik PKI, bahkan dalam salah satu tajuknya yang secara tegas menyatakan "...dengan perbuatan G 30 S-nya sudah nyata PKI dan ormas - ormasnya dari partai progresif revolusioner jatuh menjadi kontra revolusioner...". Tetapi suasana menjelang tengah malam dan kekalutan sedang menimpa Jakarta, sulit untuk mencari kejelasan atas alasan terbit dengan situasi semacam ini. Setelah suasana tenang, tanggal 6 Oktober Kompas dan beberapa koran diperbolehkan terbit kembali.

Namun, Kompas baru terbit kembali pada 6 November 1965 dengan partner percetakan PT. Kinta, salah satu percetakan terbaik pada waktu itu. Pindahannya Kompas ke partner baru, yaitu PT. Kinta

dikarenakan Pepsu tetap melarang terbit kepada beberapa media, yang salah satunya berpartner dengan PT. Kinta. Melihat peluang ini, Kompas segera bergabung dengan PT. Kinta. Dengan partner barunya, bukan saja wajah Kompas yang semakin cantik tetapi tirasnya juga meningkat menjadi 23.268 eksemplar. Peningkatan ini, tentu saja bukan karena cantiknya tampilan Kompas tapi juga didorong oleh kevakuman informasi sebagai akibat larangan terbit beberapa surat kabar. Sehingga ketika larangan itu dicabut, munculnya surat kabar menjadi sarana untuk mendapatkan informasi yang paling penting di samping radio. Usaha peningkatan mutu cetakan terus dilakukan. Belum genap satu tahun Kompas dicetak PT. Kinta, Kompas sudah berpindah-pindah cetakan. Setelah PT. Kinta, Kompas pindah ke percetakan Abadi dan pada 2 Agustus 1966, Kompas sudah pindah percetakan lagi ke percetakan Masa Merdeka.

Dalam rangka menuju surat kabar yang memiliki manajemen profesional, Kompas senantiasa membenahi dirinya dan melakukan audit sirkulasi Kompas sejak tahun 1971. Sirkulasi Kompas diaudit oleh Drs. Utomo, seorang akuntan publik dari tiga biro iklan terkemuka saat itu. Data audit diterbitkan dan disiarkan setiap Minggu kepada para biro iklan, sehingga para biro iklan tersebut dapat memantau sirkulasi Kompas dengan data yang sebenarnya (valid). Untuk memantapkan data audit tersebut, maka sejak Desember 1978, Kompas resmi menjadi anggota audit Bureau of Circulation Sydney, Australia. Badan audit tersebut merupakan badan internasional yang dibentuk bersama oleh penerbit surat kabar dan pemasang iklan untuk menyiarkan angka-angka sirkulasi yang benar (valid) dari para anggotanya. Pihak Kompas menyadari penuh bahwa selama ini penerbitan Kompas sangat bergantung pada percetakan. Sementara Kompas selalu berpindah-pindah percetakan, sehingga banyak kendala yang menghalangi perkembangannya. Untuk itu, Kompas berobsesi untuk memiliki percetakan sendiri demi kemajuan Kompas Obsesi tersebut terwujud

pada pertengahan tahun 1972 dengan lahirnya percetakan Gramedia. Secara bertahap, dengan adanya percetakan sendiri, seluruh kegiatan keredaksionalan Kompas mulai disatukan di Kompleks Palmerah, Jakarta Barat. Meskipun demikian kegiatan administrasinya masih berlangsung di gedung Perintis, Jakarta Barat Dengan adanya percetakan milik sendiri, Kompas mengalami peningkatan oplah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Kompas semakin dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Dari sisi pemberitaan pun, Kompas dinilai cukup kritis.

Kekritisannya ini pun berbuah peringatan keras dari pemerintah pada tahun 1978, dan Kompas dilarang untuk terbit dua Minggu. Larangan terbit dari pemerintah ini muncul karena ada pemberitaan tentang maraknya demonstrasi mahasiswa di berbagai kota yang dinilai oleh pemerintah sebagai pemberitaan yang tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab. Setelah diperbolehkan terbit kembali, Kompas mulai terbit 7 kali dalam seminggu, dengan Kompas edisi Minggu yang sebelumnya belum ada. Mulai tahun 1982, penerbit Kompas bukan lagi Yayasan Bentara Rakyat, tetapi PT. Kompas Media Nusantara, 'Pergantian' ini dikarenakan terbitnya Undang-undang pokok Pers tahun 1982 mengenai ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang mewajibkan seluruh penerbit pers berbadan hukum. Kompas merupakan surat kabar pelopor bagi industrialisasi pers di Indonesia.

Kompas dengan kelompok Gramedianya mempunyai sedikitnya tujuh jenis usaha yang berbeda, yaitu: pers, penerbitan buku, pasar swalayan, percetakan, perhotelan, bank dan tambak udang. Khusus di bidang pers, Kompas juga mengembangkan berbagai majalah dan tabloid olahraga Bola, majalah mingguan Jakarta, majalah anak-anak Bobo, majalah remaja Hai, tabloid wanita Nova, tabloid hiburan Citra, Bintang, Monitor, majalah hiburan Senang, tabloid kesehatan dan eksekutif Senior, tabloid ekonomi dan bisnis Kontan, serta suplemen Kompas untuk kaum muda dan wanita, yaitu Aktual Muda dan Swara. Khusus

tabloid hiburan Monitor, majalah Senang dan majalah Jakarta Jakarta sudah tidak terbit. Tabloid Monitor tidak terbit karena kasus angket tokoh idola yang dilakukan tabloid ini yang mengundang protes keras dari umat Islam pada tahun 1990. Dalam angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad di bawah beberapa tokoh terkenal lainnya seperti Soeharto dan KH Zainuddin MZ.

Sedangkan majalah Senang membekukan diri karena dirasa telah mengilustrasikan gambar Nabi Muhammad pada salah satu rubrik konsultasi mimpi. Sedang majalah Jakarta tidak terbit karena alasan ekonomi. Di samping mengembangkan beberapa media tersebut, Kompas juga melebarkan sayap ke daerah-daerah. Media yang dikembangkan Kompas di daerah antara lain Harian Sriwijaya Pos, Serambi Indonesia di Aceh, Harian Surya di Surabaya, dan Harian Bernas di Yogyakarta. Kompas juga telah merambah dalam media audio visual dengan mendirikan stasiun televisi dengan nama TV7. Selain itu pula seiring dengan maraknya pengembangan internet di Indonesia, di mana banyak media-media yang berbasis internet, Kompas juga memanfaatkan internet dengan membuka homepage dengan nama Kompas Online pada alamat *www.Kompas.com*.

Banyaknya media yang dimiliki, oleh Kompas maka isu-isu konglomerasi pers pun muncul. Banyak sekali kritikan kepada Kompas mengenai pengaburan idealisme dan komersialisme. Akan tetapi kritikan tersebut ditanggapi Jakob Oetama selaku pimpinan bahwa Kompas akan selaku membangun komitmen serta visi sebagai jati diri dari grup Kompas Tahun 2000 dalam rangka memberikan kontrol efektif terhadap kualitas isi Kompas maka dibentuklah Tim Ombudsman Kompas Lembaga ini merupakan lembaga independen yang bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan saran perbaikan pada manajemen. Sehingga diharapkan Kompas mampu menjaga konsistensi terhadap visi serta kebijakan redaksionalnya dengan terus mengingatkan terhadap kelompok yang mapan, mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. **Republika.co.id**

Republika.co.id merupakan media Republika dalam bentuk online, Republika online (ROL) hadir sejak 17 Agustus 1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. ROL merupakan portal berita yang menyajikan informasi secara teks, audio, dan video, yang terbentuk berdasarkan teknologi hipermedia dan hiperteks. Dengan kemajuan informasi dan perkembangan sosial media, ROL kini hadir dengan berbagai fitur baru yang merupakan percampuran komunikasi media digital. Informasi yang disampaikan diperbarui secara berkelanjutan yang terangkum dalam sejumlah kanal, menjadikannya sebuah portal berita yang bisa dipercaya. Selain menyajikan informasi, ROL juga menjadi rumah bagi komunitas. ROL kini juga hadir dalam versi English.

(www.Republika.co.id/page/about)

Harian umum Republika yang terbit pada tahun 1993 merupakan koran Islam yang berasosiasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abadi Bangsa yang dipimpin oleh mantan Menristek BJ Habibie. Nama Republika berasal dari ide Presiden Soeharto, yang saat itu disampaikan saat beberapa pengurus ICMI Pusat menghadap untuk menyampaikan rencana peluncuran harian umum tersebut. Pada awalnya, harian ini akan diberi nama Republik. Yayasan Abadi Bangsa, sebagai pengelola harian Republika, mendapatkan SIUPP dari pemerintah, yakni Departemen penerangan RI pada tanggal 19 Desember 1992, melalui dukungan ICMI. Perolehan SIUPP Republika ini sangat mudah bila dibandingkan dengan media lain, karena lima tahun terakhir menjelang Republika lahir pemerintah tidak pernah mengeluarkan SIUPP baru.

Hal ini berkaitan dengan pernyataan Menteri Penerangan Harmoko bahwa SIUPP baru untuk harian umum tidak akan dikeluarkan karena peredarannya sudah jenuh. Motto pada waktu itu yang dicanangkan Republika adalah “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”. Maksud motto tersebut adalah untuk mewujudkan media massa yang mendorong bangsa

menjadi kritis dan berkualitas. Namun pada tahun 2008, motto tersebut diubah menjadi “Pegangan Kebenaran”.

Tujuan Republika searah dengan tujuan ICMI yang berdiri pada tanggal 7 Desember 1990, yaitu mewujudkan penyebaran program ICMI ke seluruh bangsa melalui program 5K, yaitu Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Karya, Kualitas Kerja, dan Kualitas Pilar. Kehadiran harian ini membawa konsep baru dalam dunia persuratkabaran di Indonesia. Di awal pembentukannya, Republika dikelola oleh para jurnalis yang handal dan intelektual muslim modernis yang ingin mempersiapkan masyarakat dalam era baru perkembangan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya.

Oleh para pengagasnya harian Republika ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia secara proporsional dalam percaturan nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Mereka adalah rakyat yang tergolong lemah secara ekonomi. Karena ekonominya lemah, kecil pula aksesnya pada sumber-sumber informasi dan pusat-pusat pengambilan keputusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, mereka sering dirugikan, dan sering disebut the underdog.

Sejak awal, koran ini telah berpihak pada kepentingan mereka.⁹⁵ Harian Republika merupakan harian yang “dekat” dengan pemerintah saat itu. Kedekatan ini terlihat dari adanya beberapa menteri kabinet yang menjadi anggota ICMI, seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardjiman Joyonegoro, Menteri Perdagangan Satrio Budiharjo, Menteri Perhubungan Harjanto Danutirto, dan Menteri Kesehatan Sujudi. Kedekatan Republika dengan pemerintah juga terlihat dalam mudahnya Republika mendapatkan SIUPP yang selama ini sangat sulit diperoleh. Keberadaan Republika tidak bisa dipisahkan dari ICMI, organisasi yang pernah menjadi mesin politik BJ Habibie, sebagai sponsor lain Republika.

Adanya orang-orang ICMI di Republika sampai saat ini, menurut Zaim Uchrowi, tidak memengaruhi sikap jurnalistik Republika. Asas keseimbangan berita senantiasa di jaga. Sejak mulai terbit pada tanggal 4 Januari 1993, oplah penjualan Republika terus meningkat. Sepuluh hari sejak terbit, oplah Republika sudah mencapai 100.000 eksemplar. Padahal rencana awal terbit hanya diperkirakan sekitar 40.000 eksemplar per hari pada semester pertama tahun 1993, berarti oplah Republika meningkat 2,5 kali lipat dari rencana awal. Pada semester kedua, oplah Republika naik menjadi 130.000 eksemplar dan memasuki tahun kedua sudah meningkat menjadi 160.000 eksemplar per hari (Arifatul 2007 :199-202)

3. Framing *Kompas.com* dan *Republika.co.id* pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51

Kompas.com, dan *Republika.co.id* sama-sama lebih aktif untuk memuat berita video pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51, kemudian menunjukkan framing yang berbeda. Video pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau sering disebut Ahok merupakan pidato beliau pada saat melakukan kunjungan kerja di kepulauan seribu tanggal 27 September 2016, secara fakta dan data video ini tidak mungkin bisa dirubah oleh siapapun, karena video ini merupakan video asli dari pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai rangkaian kegiatan kunjungan kerja, selain itu keaslian video ini ditunjukkan dengan publikasi video yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta sendiri.

Kompas.com dan *Republika.co.id* memiliki alasan masing-masing ketika memberikan frame terhadap berita video pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Hal itu dilatar belakangi oleh dua hal penting, *pertama*, bahwa pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 merupakan potongan video dari pidato Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu yang sengaja dipotong oleh oknum, kemudian diupload pada akun Face Book atas nama Buni Yani yang

berprofesi sebagai Dosen lulusan Ohio University Amerika Serikat, mantan wartawan Tempo tahun 1996. Frame yang dibangun dengan adanya pemotongan video pidato Ahok, merupakan bentuk kesengajaan untuk memancing amarah kelompok-kelompok tertentu, terutama umat Islam.

Kedua, bahwa video pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 merupakan bentuk penistaan agama, pada akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat dan juga berhasil memancing tokoh-tokoh politik, agama dan ormas Islam untuk berkomentar. Secara lengkap framing *Kompas.com* dan *Republika.co.id* bisa dilihat sebagai berikut:

Framing *Kompas.com*

Framing *Kompas.com* yang dipublikasi dalam waktu 6 Oktober - 16 November 2016 sebagai berikut:

1) *Kompas.com* 6 Oktober 2016: Ahok menyebut lawan politiknya yang membuat videonya kutip ayat suci jadi viral.

Analisis **Siktaksis**, frame *Kompas.com* terhadap video Ahok yang menyebut Al-Maidah 51 ini adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh para kelompok lawan politik Ahok, video ini dianggap sengaja untuk disebar luaskan atau diviralkan untuk memberikan citra buruk terhadap Ahok. Tindakan yang dilakukan terhadap Ahok ini merupakan bagian dari upaya untuk menjatuhkan nama baik sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-teman separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. Apabila teman-teman separtai tidak menyenangkannya, maka bisa berakibat dikeluarkan dari partainya dan ini berarti karir politiknya di partai tersebut hancur. Bahkan mungkin sulit untuk diterima di partai yang lain. Apabila khalayak pendukung atau masyarakat luas tidak menyenangkannya, maka diharapkan yang bersangkutan gagal terpilih dalam sebuah pencalonan.

Frame *Kompas.com* terhadap video Ahok yang menyatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 ini, merupakan upaya untuk

menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang Ahok, dengan cara memunculkan cerita buruk Ahok melalui video pidato Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, yang kemudian dipotong pada menit Ahok menyampaikan “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya dibohongin pake surat Al-Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. itu hak bapak ibu. ya. jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. program ini jalan saja. ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok”

Dalam berita ini terlihat bentuk dukungan *Kompas.com* terhadap Ahok, atau kelompok yang menganggap bahwa Ahok tidak menistakan agama. Bentuk dukungan itu bisa dilihat dari lead berita yang disajikan oleh *Kompas.com*, pada kalimat pembuka dikatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengklarifikasi atas videonya yang menjadi viral di media sosial. Dalam video itu, Basuki atau Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia juga mengutip surat Al-Maidah ayat 51.

Kompas.com tidak ada menyebutkan bahwa video yang tersebar di *youtube* mengenai pidato Ahok itu menyebutkan kebohongan surah Al-Maidah atau orang yang memakai surah Al-Maidah untuk berbohong, namun *Kompas.com* memframe bahwa pidato yang disampaikan Ahok yang ada kaitannya dengan surah Al-Maidah 51 adalah permintaan Ahok untuk tidak memilih dia pada pilkada DKI Jakarta, kemudian di dalam pernyataan yang meminta kepada warga Kepulauan Seribu agar tidak memilih dia itu mengutip surah Al-Maidah 51 sebagai dalil. Jadi permintaan Ahok kepada warga agar tidak memilih dia pada pilkada DKI Jakarta, merupakan bentuk kerendahan dan keikhlasan hatinya. Artinya program budidaya ikan yang beliau berikan kepada warga di Kepulauan Seribu tidak ada embel-embel politik, atau strategi politik supaya warga

tertarik dan berhutang budi padanya sehingga pada akhirnya akan memilih Ahok pada pilkada DKI Jakarta.

Analisis **Skrip**, berita ini menampilkan pernyataan Ahok terkait dengan videonya yang menyinggung surah Al-Maidah 51. Dalam berita ini *Kompas.com* menuliskan pernyataan Ahok bahwa lawan politik yang buat video Ahok kutip ayat suci jadi "viral". Unsur *Who*, siapa yang membuat video sehingga menjadi viral, maka jawabannya adalah lawan politik Ahok pada pilkada DKI Jakarta, Pertarungan dalam pada pilkada DKI Jakarta membutuhkan berbagai strategi untuk mencapai kemenangan. Masing-masing tim kandidat tentu sudah menyusun strategi terbaik untuk mencapai kemenangan. Strategi yang disusun tentu bermacam-macam, mulai dari meningkat elektabilitas calonnya hingga pada upaya menurunkan elektabilitas lawan politik.

Kompas.com menganggap video Ahok yang menyampaikan tentang dibohongi surah Al-Maidah 51 ini dimanfaatkan oleh lawan politiknya sebagai momentum untuk menjatuhkan figur seorang Ahok yang selama ini dianggap seseorang yang berkarakter tegas dan cerdas, namun dengan video ini bisa saja persepsi masyarakat terhadap Ahok berubah, dulunya dianggap cerdas kemudian akibat video yang viral itu Ahok dianggap berubah menjadi bodoh. Bodoh karena tidak mampu menjaga ucapannya, bodoh karena sudah berperilaku seperti bukan seorang pemimpin. Akibat pidatonya yang menganggap orang yang menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an adalah sebuah kebohongan.

Kemudian pada unsur *What*, berita ini menjelaskan tentang penyebaran video Ahok tentang Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh lawan politiknya sehingga menjadi viral, secara otomatis akan merugikan Ahok dan timnya. Video yang disebar adalah potongan pidato Ahok yang disampaikan pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu untuk program kerjasama Pemprov DKI dengan Sekolah Tinggi

Perikanan pada hari Selasa 27 September 2016. Pada acara kunjungan tersebut Ahok melakukan transplantasi terumbu karang serta melakukan penebaran benih ikan di Keramba Jaring Apung di Pulau Semak Daun dan melakukan panen ikan di Pulau Panggang.

Analisis **Tematik**, dari unsur tematik bisa dilihat bahwa *Kompas.com* mendukung bahwa pernyataan Ahok bukanlah penistaan terhadap agama melainkan Ahok menunjukkan sikap profesionalnya sebagai seorang pemimpin yang konsisten untuk memikirkan kemakmuran rakyatnya, menjalankan program tanpa ada unsur kepentingan politik pada pilkada DKI Jakarta. Bentuk dukungan yang dilakukan *Kompas.com* terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, bisa dilihat dari tema dalam teks kalimat berita tersebut. *Kompas.com* menuliskan Basuki atau Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Kemudian tema berikutnya dilanjutkan dengan menyampaikan, Ia juga mengutip surat Al-Maidah ayat 51. *Kompas.com* tidak menggunakan kata dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 apalagi menggunakan kata dugaan penistaan agama. Tidak ada yang salah dengan bahasa mengutip surah Al-Maidah, sebagai bagian dari ayat suci Al-Qur'an tentu sangat bagus jika seseorang menyampaikan sesuatu lalu mengutip ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sepeninggal Rasulullah SAW, kehidupan umat manusia pasti akan kacau tanpa pegangan atau pedoman. Dengan diturunkannya kitab suci, maka umat manusia memiliki pedoman hidup walaupun nabi atau rasul telah tiada. Jadi mengutip Al-Maidah seperti yang disampaikan *Kompas.com* merupakan sesuatu yang sangat positif, sehingga pidato Ahok yang menyatakan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 itu bukanlah penistaan agama.

Analisis **Retoris**, *Kompas.com* menggunakan kata lawan politik, pesan yang timbul dengan menggunakan lawan politik adalah bentuk lain dari kampanye politi yang dilakukan oleh lawan politik Ahok pada pilkada DKI Jakarta Kampanye politik atau *black campaign* merupakan salah satu bentuk kegiatan propaganda politik, yang berkonotasi negatif dalam penilaian publik. Bertujuan untuk membentuk opini publik untuk citra yang buruk terhadap lawan politiknya.

Secara spesifik memang *Kompas.com* tidak menggunakan bahasa kampanye hitam, namun hanya menuduh bahwa video itu sengaja disebari oleh lawan politik untuk merusak citra Ahok. Jika ada kampanye hitam, sesungguhnya ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian dan Bawaslu, yang seperti ini bisa dikategorikan pidana pemilu, sehingga kalau terbukti bersalah, yang bersangkutan bisa dipenjara. Namun dalam penggunaan kata lawan politik pada berita ini, tidak dilanjutkan dengan rencana pelaporan terhadap dugaan-dugaan yang menganggap penyebaran terhadap video itu dilakukan oleh lawan politiknya.

Kemudian tampilan gambar pada berita menampilkan foto Ahok yang sedang memakai pakaian dinas didampingi beberapa orang yang saat itu juga sedang mengenakan pakaian dinas dengan keterangan foto “Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memanen ikan kerapu di perairan Kepulauan Seribu, Selasa (26/9/2016)” foto menggambarkan program positif yang dilakukan oleh Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, dengan wajah yang tersenyum bahagia serta memegang seekor ikan kerapu seakan-akan hari itu merupakan hari kesuksesan Ahok untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lewat budidaya ikan yang dikembangkannya.

Tabel 4.1 Frame Kompas.com 6 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Dalam berita ini terlihat bentuk dukungan Kompas.com terhadap Ahok, atau kelompok yang menganggap bahwa Ahok tidak menistakan agama. Bentuk dukungan itu bisa dilihat dari lead berita yang disajikan oleh Kompas.com, pada kalimat pembuka dikatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengklarifikasi atas videonya yang menjadi viral di media sosial. Dalam video itu, Basuki atau Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia juga mengutip surat Al-Maidah ayat 51.</p>
Skrip	<p>Dalam berita ini Kompas.com menuliskan pernyataan Ahok bahwa lawan politik yang buat video Ahok kutip ayat suci jadi "viral". Unsur Who, siapa yang membuat video sehingga menjadi viral, maka jawabannya adalah lawan politik Ahok pada pilkada DKI Jakarta, Pertarungan dalam pada pilkada DKI Jakarta membutuhkan berbagai strategi untuk mencapai kemenangan.</p> <p>Kemudian pada unsur What, berita ini menjelaskan tentang penyebaran video Ahok tentang Al-Maidah 51 yang dilakukan oleh lawan politiknya sehingga menjadi viral, secara otomatis akan merugikan Ahok dan timnya. Video yang disebarakan adalah potongan pidato Ahok yang disampaikan pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu untuk program kerjasama Pemprov DKI dengan Sekolah Tinggi Perikanan pada hari Selasa 27 September 2016. Pada acara kunjungan tersebut Ahok melakukan transplantasi terumbu karang serta melakukan penebaran benih ikan di Keramba Jaring Apung di Pulau Semak Daun dan melakukan panen ikan di Pulau Panggang.</p>
Tematik	<p><i>Kompas.com</i> mendukung bahwa pernyataan Ahok</p>

	<p>bukanlah penistaan terhadap agama melainkan Ahok menunjukkan sikap profesionalnya sebagai seorang pemimpin yang konsisten untuk memikirkan kemakmuran rakyatnya, menjalankan program tanpa ada unsur kepentingan politik pada pilkada DKI Jakarta. Bentuk dukungan yang dilakukan <i>Kompas.com</i> terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, bisa dilihat dari tema dalam teks kalimat berita tersebut. <i>Kompas.com</i> menuliskan Basuki atau Ahok meminta warga Kepulauan Seribu tidak memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.</p> <p>Kemudian tema berikutnya dilanjutkan dengan menyampaikan, Ia juga mengutip surat Al-Maidah ayat 51. <i>Kompas.com</i> tidak menggunakan kata dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 apalagi menggunakan kata dugaan penistaan agama. Tidak ada yang salah dengan bahasa mengutip surah Al-Maidah, sebagai bagian dari ayat suci Al-Qur'an tentu sangat bagus jika seseorang menyampaikan sesuatu lalu mengutip ayat Al-Qur'an .</p>
Retoris	<p><i>Kompas.com</i> menggunakan kata lawan politik, pesan yang timbul dengan menggunakan lawan politik adalah bentuk lain dari kampanye politi yang dilakukan oleh lawan politik Ahok pada pilkada DKI Jakarta Kampanye politik atau black campaign merupakan salah satu bentuk kegiatan propaganda politik, yang berkonotasi negatif dalam penilaian publik. Bertujuan untuk membentuk opini publik untuk citra yang buruk terhadap lawan politiknya.</p> <p>Secara spesifik memang <i>Kompas.com</i> tidak menggunakan bahasa kampanye hitam, namun hanya menuduh bahwa video itu sengaja disebari oleh lawan politik untuk merusak citra Ahok.</p>

2) **Kompas.com, 7 Oktober 2016: Nusron Wahid memberikan penjelasan tentang video pernyataan Ahok yang mengutip Ayat Al-Qur'an.**

Analisis **Siktaksis**, dari unsur siktaksis *Kompas.com* menunjukkan dukungannya kepada Ahok, ini terlihat dari lead berita yang dituliskan menampilkan penjelasan Nusron Wahid bahwa tidak ada satu pun rangkaian kalimat yang menyatakan Ahok melakukan penistaan terhadap Al Quran. Ahok justru dianggap telah memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang memolitisasi agama. Saat menyampaikan pidato tentang Al-Maidah 51 yang dituju atau dimaksud Ahok adalah orang yang membohongi. Bukan berarti ayat Al-Maidah yang bohong.

Dari unsur siktaksis dalam berita ini, *Kompas.com* menunjukkan dukungannya terhadap Ahok, salah satu bentuk dukungan itu ketika yang diambil sebagai narasumber pada berita ini adalah Nusron Wahid. Nusron Wahid merupakan Politikus Golkar Nusron Wahid kini dikenal sebagai tokoh yang gigih membela Basuki T Purnama alias Ahok. Nusron yang juga kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bahkan pasang badan saat Ahok diserang dengan kasus dugaan menista Al-Qur'an . Nusron memang ditugaskan dari Partai Golkar, karena partai itu telah resmi mendukung dan mengusung Ahok sebagai calon gubernur DKI. Tentu sebagai kader partai yang mendukung Ahok, sangat wajar jika Nusron Wahid berupaya memenangkan Ahok yang berduet dengan Djarot.

Secara etika penempatan Nusron Wahid sebagai sumber informasi satu-satunya tanpa ada narasumber yang lain oleh *Kompas.com* menunjukkan keberpihakannya kepada Ahok, karena sumber berita adalah tempat atau dari mana asalnya berita itu diperoleh. Bagi seorang pencari berita atau wartawan, kegiatan pertama yang mereka lakukan

ialah mencari dan menemukan sumber berita. Banyak sumber berita yang dapat ditemukan. Pada kenyataannya sumber berita selalu berpangkal pada manusia dan alam sekitar manusia. Manusia sebagai sumber berita tidak terbatas hanya pada para pejabat dari instansi pemerintah atau swasta, tetapi juga mereka yang tidak memiliki kedudukan tertentu seperti abang becak, tukang sayur, sopir, kondektur, dan sebagainya.

Meskipun demikian tidak semua manusia tepat untuk dijadikan sumber berita. Manusia tepat untuk dijadikan sumber berita, apabila manusia tersebut: Terlibat langsung di dalam suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita (manusia tersebut mengalami sendiri peristiwa atau masalahnya). Tidak terlibat langsung di dalam suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita, tetapi mempunyai hubungan erat secara formal, persahabatan, persaudaraan, atau keluarga dengan manusia yang terlibat langsung pada masalah/peristiwa tersebut. Menyaksikan jalannya atau terjadinya suatu peristiwa yang dijadikan berita (manusia tersebut biasa dinamakan saksi mata). Memiliki wewenang dan menangani secara langsung suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita (misalnya, polisi yang bertugas menangani langsung suatu peristiwa kejahatan). Ahli di dalam bidangnya. (Misalnya seorang ahli pelayaran dapat diminta pendapatnya, sehubungan dengan terjadinya peristiwa kapal yang tenggelam).

Dalam berita ini *Kompas.com* seakan mengandalkan sumber berita yang berasal dari komponen syarat berita yaitu tidak terlibat langsung di dalam suatu masalah atau peristiwa yang dijadikan berita, tetapi mempunyai hubungan erat secara formal, persahabatan, persaudaraan, atau keluarga dengan manusia yang terlibat langsung pada masalah/peristiwa tersebut. Sehingga berita yang diperoleh dominan kepada pembelaan terhadap Ahok, dan tidak ada sumber berita lain yang

mampu memperkuat atau menyeimbangi pernyataan yang disampaikan Nusron Wahid.

Analisis **Skrip**, berita ini menampilkan penjelasan tentang pernyataan Ahok dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, unsur *Who*, siapa dalam berita ini adalah siapa yang menjelaskan pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Yang menjelaskan pernyataan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 pada berita ini adalah Nusron Wahid, beliau adalah Ketua PB NU sekaligus sebagai politikus partai Golkar. Golkar adalah partai pendukung Ahok pada pilkada DKI Jakarta, didalam beberapa kesempatan ketua umum partai Golkar, Setya Novanto mengungkap ada beberapa alasan mendasar Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Ahok.

Pertama, kebijakan Ahok membebaskan Jakarta dari masalah banjir dalam waktu 6 tahun. Kedua, mengurai kemacetan di Jakarta dengan memperbanyak transportasi publik yang nyaman untuk warga. Ketiga, meremajakan tempat-tempat kumuh di beberapa titik di Jakarta menjadi tempat pemukiman yang nyaman, sehat dan ramah lingkungan. Peremajaan ruang pemukiman ini dapat dilakukan dengan membangun Rusunawa atau rumah susun yang terjangkau warga.

Keempat, membebaskan warga Jakarta untuk mendapatkan akses pendidikan yang gratis dan berkualitas melalu Kartu Pintar. Kelima, meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan gratis bagi warga Jakarta melalui kartu Sehat. "Kelima program utama yang dimandatkan Partai Golkar kepada Ahok selama ini telah dilakukan. Dalam kepemimpinan lima tahun ke depan, kami percaya Ahok dapat menuntaskannya. Dari identitas unsur *Who*, bisa disimpulkan bahwa *Kompas.com* menunjukkan dukungannya terhadap Ahok .

Kemudian pada unsur *What*, berita ini menampilkan penjelasan tentang video pidato Ahok yang telah disebar di youtube. Penjelasan tentang video ini menulis pendapat pribadi seorang Nusron Wahid, yang menyimpulkan bahwa rekaman video kegiatan Gubernur DKI Jakarta

Basuki T Purnama di Pulau Seribu yang berdurasi satu jam itu tidak ada satu pun rangkaian kalimat yang menyatakan Ahok melakukan penistaan terhadap Al Quran. Ahok justru memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang memolitisasi agama.

Jadi, yang dituju atau dimaksud Ahok adalah orang yang membohongi. Bukan berarti ayat Al-Maidah yang bohong, justru Ahok menempatkan ayat suci secara sakral dan adiluhung. Bukan alat agitasi dan kampanye yang mendeskreditkan.

Analisis **Tematik**, bentuk dukungan *Kompas.com* terhadap kelompok yang menganggap Ahok tidak menistakan agama juga terlihat pada tema-tema yang tulis pada berita ini, diantaranya, Dari rekaman utuh satu jam itu, kata dia, tidak ada satu pun rangkaian kalimat yang menyatakan Ahok melakukan penistaan terhadap Al Quran. Tema ini menegaskan bahwa pernyataan Ahok tidak menistakan agama jika video itu disaksikan secara utuh selama 1 jam. Tema berikutnya dikatakan Ahok justru memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang memolitisasi agama.

Pada kalimat berikutnya disampaikan justru Ahok menempatkan ayat suci secara sakral dan adiluhung. Bukan alat agitasi dan kampanye yang mendeskreditkan. Video yang disebar dan menuduh Ahok telah menistakan Al Quran sengaja dipotong sehingga menimbulkan mispersepsi dan intepretasi yang bias dan dikembangkan di masyarakat. Cara-cara seperti ini dianggap picik, tidak fair, dan tidak beradab dan tidak sesuai akhlakul karimah.

Pada kalimat akhir *Kompas.com* menuliskan jika Ahok tak mempermasalahkannya dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta. Ahok pun bersedia datang jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Bawaslu DKI Jakarta. Hal ini ingin sebagai bentuk keyakinan yang disampaikan Ahok bahwa dia tidak melakukan penistaan terhadap agama.

Analisis **Retoris**, berita ini memberikan beberapa penekanan kata yang menunjukkan dukungannya kepada Ahok, diantaranya terdapat pada kalimat “tidak ada satu pun rangkaian kalimat yang menyatakan Ahok melakukan penistaan terhadap Al Quran”. Kalimat ini bentuk penegasan terhadap tuduhan oleh beberapa kelompok yang menganggap bahwa Ahok telah menistakan agama atas pernyataan tentang dibohongi pakai suarah Al-Maidah 51 disampaikan pada pidato kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Menggunakan kata tidak ada satu pun, bearti betul-betul yakin dan percaya bahwa tidak ada diantara ucapan Ahok saat menyampaikan pidatony yang masuk kedalam kategori menistakan agama.

Melihat latar belakang sumber berita dalam hal ini Nusron Wahid, yang berasal dari kalangan yang mengerti agama, hari-harinya beliau selalu menggunakan kofiah sebagai identitas islam Indonesia dan sekaligus sebagai pengurus besar organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Agaknya ini dimanfaatkan oleh *Kompas.com* untuk membangun frame di kalangan masyarakat, bahwa menurut sala satu ulama (Nusron Wahid) kalau pidato Ahok itu tidak menistakan agama islam.

Kemudian penekanan juga terdapat pada kata “memolitisasi agama”, *Kompas.com* menuliskan Ahok justru memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang memolitisasi agama, yang dituju atau dimaksud Ahok adalah orang yang membohongi. Bukan berarti ayat Al-Maidah yang bohong, Ahok menempatkan ayat suci secara sakral dan adilihung. Bukan alat agitasi dan kampanye yang mendeskreditkan. Banyak bahasa yang bermakana politisasi ayat Al-Qur’an yang digunakan oleh *Kompas.com*. ini merupakan upaya yang dilakukan *Kompas.com* agar umat islam tidak mencampurkan politik dengan ajaran islam (Al-Qur’an).

Dalam konteks Indonesia, antara agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Perjalanan bangsa Indonesia sejak awal telah bersinggungan antara agama dan urusan negara. Sebagai contoh pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mencantumkan kalimat ‘berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa’. Selain itu, sila pertama Pancasila dengan tegas menyatakan ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, kemudian juga pasal 29 UUD 1945 yang membahas masalah keagamaan.

Jika dilihat dari konteks itu maka agama tidak bisa dipisahkan dengan kedudukan negara. Oleh sebab itu tidak boleh digiring konsep berpikir umat islam untuk memisahkan antara politik dengan agama, terlebih untuk kepentingan politik kelompok minoritas. Jika umat islam diperintahkan untuk memilih pemimpin kafir, maka itu bukan bentuk bertentangan antara islam dan politik. Tetapi itu adalah perintah islam dalam memilih pemimpin, namun dalam keadaan tertentu sah-sah saja umat islam memilih orang kafir tatkala ditempat itu dia menjadi minoritas dan tidak ada lagi alternatif pilihan untuk umat islam.

Tabel 4.2 Frame Kompas.com, 7 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Dari unsur siktaksis dalam berita ini, Kompas.com menunjukkan dukungannya terhadap Ahok, salah satu bentuk dukungan itu ketika yang diambil sebagai narasumber pada berita ini adalah Nusron Wahid. Nusron Wahid merupakan Politikus Golkar Nusron Wahid kini dikenal sebagai tokoh yang gigih membela Basuki T Purnama alias Ahok. Nusron yang juga kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bahkan pasang badan saat Ahok diserang dengan kasus dugaan menista Al-Qur'an . Nusron memang ditugaskan dari Partai Golkar, karena partai itu telah resmi mendukung</p>

	<p>dan mengusung Ahok sebagai calon gubernur DKI. Tentu sebagai kader partai yang mendukung Ahok, sangat wajar jika Nusron Wahid berupaya memenangkan Ahok yang berduet dengan Djarot.</p> <p>Secara etika penempatan Nusron Wahid sebagai sumber informasi satu-satunya tanpa ada narasumber yang lain oleh Kompas.com menunjukkan keberpihakannya kepada Ahok. karena sumber berita adalah tempat atau dari mana asalnya berita itu diperoleh. Bagi seorang pencari berita atau wartawan, kegiatan pertama yang mereka lakukan ialah mencari dan menemukan sumber berita. Banyak sumber berita yang dapat ditemukan. Pada kenyataannya sumber berita selalu berpangkal pada manusia dan alam sekitar manusia. Manusia sebagai sumber berita tidak terbatas hanya pada para pejabat dari instansi pemerintah atau swasta, tetapi juga mereka yang tidak memiliki kedudukan tertentu seperti abang becak, tukang sayur, sopir, kondektur, dan sebagainya.</p>
Skrip	<p>Berita ini menampilkan penjelasan tentang pernyataan Ahok dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, unsur Who, siapa dalam berita ini adalah siapa yang menjelaskan pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Yang menjelaskan pernyataan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 pada berita ini adalah Nusron Wahid, beliau adalah Ketua PB NU sekaligus sebagai politikus partai Golkar. Golkar adalah partai pendukung Ahok pada pilkada DKI Jakarta, didalam beberapa kesempatan ketua umum partai Golkar, Setya Novanto mengungkap ada beberapa alasan mendasar Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Ahok.</p>

	<p>Kemudian pada unsur What, berita ini menampilkan penjelasan tentang video pidato Ahok yang telah disebar di youtube. Penjelasan tentang video ini menulis pendapat pribadi seorang Nusron Wahid, yang menyimpulkan bahwa rekaman video kegiatan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Pulau Seribu yang berdurasi satu jam itu tidak ada satu pun rangkaian kalimat yang menyatakan Ahok melakukan penistaan terhadap Al Quran. Ahok justru memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang memolitisasi agama.</p>
Tematik	<p>Kalimat yang dituliskan Kompas.com adalah “dari rekaman utuh satu jam itu, tidak ada satu pun rangkaian kalimat yang menyatakan Ahok melakukan penistaan terhadap Al Quran”. Tema ini menegaskan bahwa pernyataan Ahok tidak menistakan agama jika video itu disaksikan secara utuh selama 1 jam. Tema berikutnya dikatakan Ahok justru memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang memolitisasi agama.</p> <p>Pada kalimat berikutnya disampaikan justru Ahok menempatkan ayat suci secara sakral dan adiluhung. Bukan alat agitasi dan kampanye yang mendeskreditkan. Video yang disebar dan menuduh Ahok telah menistakan Al Quran sengaja dipotong sehingga menimbulkan mispersepsi dan interpretasi yang bias dan dikembangkan di masyarakat.</p>
Retoris	<p>“tidak ada satu pun rangkaian kalimat yang menyatakan Ahok melakukan penistaan terhadap Al Quran”. Kalimat ini bentuk penegasan terhadap</p>

	<p>tuduhan oleh beberapa kelompok yang menganggap bahwa Ahok telah menistakan agama atas pernyataan tentang dibohongi pakai suarah Al-Maidah 51</p> <p>Kemudian penekanan juga terdapat pada kata “memolitisasi agama”, Kompas.com menuliskan Ahok justru memberikan edukasi kepada rakyat agar memilih secara cerdas. Ahok mengedukasi warga agar jangan mau dibohongi oleh orang yang memolitisasi agama, yang dituju atau dimaksud Ahok adalah orang yang membohongi. Bukan berarti ayat Al-Maidah yang bohong, Ahok menempatkan ayat suci secara sakral dan adililung. Bukan alat agitasi dan kampanye yang mendeskreditkan.</p>
--	--

3) Kompas.com, 8 Oktober 2016: Menurut Pengurus NU Jakarta Ahok tidak mengatakan ayat yang membohongi, tetapi membohongi pakai ayat.

Analisis **Siktaksis**, *Kompas.com* kembali menunjukkan dukungannya terhadap Ahok, atau kelompok yang menganggap Ahok tidak menistakan agama atas pernyataan tentang dibohongi pakai suarah Al-Maidah 51. Headline pada berita ini, terlihat pada judul “Pengurus NU Jakarta: Ahok tak bilang ayat yang membohongi, tetapi membohongi pakai ayat, *Kompas.com* membuat judul dengan claim bahwa Ahok tidak mengatakan Al-Qur’an yang membohongi, namun ada orang yang melakukan kebohongan dengan menggunakan Al-Qur’an.

Dari kalimat diatas, artinya *Kompas.com* menyimpulkan bahwa Al-Qur’an sebagai alat untuk berbohong, dan ini tentu bertentangan dengan pemahaman umat islam. Tidak bisa Al-Qur’an dijadikan alat untuk berbohong, surat Al-Maidah 51 tidak bisa dijadikan alat untuk berbohong. Jadi ketika Pak Basuki berkata dengan kalimat seperti itu,

sudah pasti dia menyakiti Umat Islam karena menempatkan Al-Maidah 51 sebagai “keterangan alat” yang didahului oleh predikat bohong. Menempelkan sesuatu yang suci dengan sebuah kata negatif, itulah kesalahannya.

Logikanya sama dengan kasus seperti, Seseorang Ustadz menghimbau jamaahnya: "Jangan makan babi, Allah mengharamkannya dalam Surat Al-Maidah ayat 3." Pedagang babi lalu komplain: "Anda jangan mau dibohongi Ustadz pake Surat Al-Maidah Ayat 3." Atau Seseorang Ustadz menghimbau jamaahnya: "Al Quran mengharamkan khamr dan judi dalam Surat Al-Maidah ayat 90." Bandar judi dan produsen vodka pun protes: "Anda jangan mau dibohongi Ustadz pakai Surat Al-Maidah Ayat 90."

Frame merupakan upaya untuk menghilangkan opini yang berkembang, bahwa Ahok menistakan agama dengan alasan Ahok menganggap Al-Qur'an berbohong. Sehingga kalimat itu dirubah menjadi Ahok tak bilang ayat yang membohongi, tetapi membohongi pakai ayat. Namun dari tatabahasa ini juga bermakna sama, Ahok menganggap orang lain melakukan kebohongan dengan menggunakan Al-Qur'an, Al-Qur'an dijadikan sebagai alat untuk berbohong. Maka akan berbeda dengan pemahaman umat islam bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup apapun yang disampaikan di dalam Al-Qur'an adalah kebenaran, sehingga tidak akan bisa orang berbohong dengan menggunakan ayat dalam Al-Qur'an.

Analisis **Skrip**, berita ini menjelaskan tentang pendapat Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, yang mengatakan bahwa Ahok tak bilang ayat yang membohongi, tetapi membohongi pakai ayat. Alasan yang disampaikan dalam berita ini adalah berdasarkan video yang ditonton Wakil Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, bahwa Ahok tidak bermaksud melecehkan

ayat dalam surat Al-Maidah ayat 51, tetapi Ahok ingin menyampaikan bahwa ada orang-orang yang kerap menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta. Khususnya menyangkut larangan memilih pemimpin non-Muslim.

Jadi, titik tekannya adalah kalimat 'membohongi pakai ayat', bukan ayatnya yang membohongi. Tidak semua orang yang membawa-bawa ayat Al Quran dalam konteks pilkada berarti membohongi masyarakat. Ada orang yang memang tulus meyakini ada larangan memilih pemimpin non-Muslim berdasarkan dalil-dalil ayat Al Quran, tentu juga ada yang tidak ikhlas, dan semata-mata menjadikan alat politik semata.

Dari unsur skrip, *Kompas.com* menuliskan protesnya terhadap orang-orang yang menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) ke dunia politik. Isu SARA berpotensi melahirkan kontroversi. Isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) rupanya menjadi isu seksi dan komoditi yang diobral bebas serta liar terutama melalui media sosial, sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Isu sara salah satu cara termudah dan paling efektif menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat dalam pilkada adalah dengan cara membangkitkan ikatan emosional pemilih pada calon. Ikatan emosional mana yang bisa melebihi kecintaan seseorang pada identitas primordialnya suku, agama dan ras akan menjadi identitas yang paling kuat sehingga mudah menyulut emosi. Dalam ras, agama dan etnisitas ada stigmatisasi dan pelabelan yang pada akhirnya akan bermuara pada kebencian, syak wasangka, dan kecemburuan sosial.

Frame inilah yang ingin ditanamkan oleh *Kompas.com* lewat berita yang dipublikasikan pada media online *www.Kompas.com* edisi 8 Oktober

2016, berita ini mengharapkan Agar kejadian serupa tidak terulang, ke depannya tidak ada lagi yang menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) ke dunia politik. Isu SARA berpotensi melahirkan kontroversi. Karena dalam politik tak menutup kemungkinan ada orang yang menjadikan ayat-ayat hanya sebagai alat politik. Memperlakukan ayat-ayat sebagai alat politik justru inilah yang berbahaya karena berpotensi mengaburkan fakta politik yang sebenarnya.

Analisis **Tematik**, tema yang ditampilkan dalam berita ini terdapat kedalam dua bagian, tema pertama membahas tentang pernyataan Ahok dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, maksudnya Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, tetapi Membohongi Pakai Ayat. Jadi pidato yang disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu sewaktu melakukan kunjungan kerja itu tidak bermaksud melecehkan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 51. Namun Ahok ingin menyampaikan bahwa ada orang-orang yang kerap menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta.

Jadi *Kompas.com* menilai upaya-upaya lawan politik Ahok untuk mengalahkan beliau pada pilkada DKI Jakarta, salah satu alat yang digunakan adalah dengan memasukkan Al-Qur'an surah Al-Maidah 51, arti ayat "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim"

Ayat ini adalah satu dari belasan ayat yang berhubungan dengan larangan mengangkat pimpinan dari kalangan non muslim. Oleh karena itu, penafsirannya harus dipadukan satu sama lain. Kecuali itu, penafsiran surah Al-Maidah ayat 51 ini pun tidak bisa hanya sepotong ayat. Sebab,

potongan ayat selanjutna (sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain) adalah alasan atau dasar adanya larangan tersebut.

Kata WALI atau AULIYA (jamak) memiliki makna tidak kurang dari sepuluh makna. Antara lain teman, kawan setia, penolong, sekutu, pelindung, pemimpin, kekasih, dan lainnya. Pada ayat ini semua makna tersebut bisa berlaku, sebab substansinya adalah bahwa orang beriman dilarang masuk dalam lingkungan pengaruh atau kekuasaan mereka.

Dari mana makna itu diperoleh? Dari dasar atau alasan adanya larangan tersebut, yaitu “sebagian mereka adalah wali/auliya bagi sebagian lainnya”. Maksudnya adalah, ”Orang-orang beriman jangan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, sebab mereka itu hanya akan jadi wali di kalangan mereka sendiri. Orang Yahudi jadi wali bagi orang Yahudi sendiri sesuai dengan keyakinannya. Begitu juga orang Nasrani. Maka, kalau orang beriman menjadikan mereka sebagai wali, pasti akan masuk dalam kendali kepentingan ke-walian mereka.

Kemudian pada teme berikutnya *Kompas.com* menyebutkan orang-orang yang kerap menggunakan Al-Qur’an Al-Maidah 51 ayat tersebut untuk kepentingan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta. Meski ini tidak dilarang dalam agama dan negara, namun sepertinya *Kompas.com* menganggap ini sebgai ancaman untuk Ahok karena mewakili dari kaum minoritas.

Penggunaan ayat-ayat suci Al Quran sering terlihat di beberapa partai, diantaranya, penggunaan Q.S. Ibrahim Ayat 24 "Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit." ayat yang terdapat dalam kitab suci ini, kerap dipergunakan para juru kampanye Golkar menjelang Pemilu. Hanya untuk memberi justifikasi lambang pohon beringin selaras dengan firman Allah SWT

Hal serupa juga terjadi pada PPP, yang mendeklarasikan diri sebagai Rumah Besar Umat Islam. Salah seorang fungsionaris PPP mengingatkan kembali sejarah masa silam PPP sebagai fusi dari pelbagai partai dan ormas Islam. Dengan mengutip sebagian Surat Al Mu'minin Ayat 52 : "Sesungguhnya ini adalah umatmu, umat yang satu" dan Surat Ali imran Ayat 103 : "Berpeganglah kamu sekalian kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecahbelah".

Analisis **Retoris**, berita yang ditampilkan oleh media online *Kompas.com* pada edisi ini memberikan penekanan diantaranya pada sumber berita dan beberapa kalimat yang menunjukkan dukungannya kepada Ahok. *Kompas.com* menggunakan judul diawali dengan kalimat "Pengurus NU Jakarta" frame yang ingin ditampilkan adalah bahwa isi berita yang ditulis merupakan pandangan dari pengurus NU Jakarta. NU merupakan salah satu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang eksistensinya memainkan peran penting bagi kehidupan bangsa.

NU sebagaisalah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam membangun cita-cita bangsa. Hal ini tidak lain karena kontribusi NU tidak hanya dialamatkan kepada jama'ah NU, tetapi lebih besar dari itu bagaimana NU bisa berkontribusi kepada bangsa. Sesuai khittah An-Nahdliyyah 1926, NU bertujuan : ikut membangun, mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang bertaqwa kepada AllahSWT, cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera.

Disamping itu, NU juga telah merumuskan konsep mabadi" khoiro ummat (prinsip dasar umatterbaik) yang didasarkan pada orientasi moral untuk perubahan sosial ekonomimasyarakat. Pengukenan moralitas sebagai landasan dalam kehidupan sosial danekonomi masyarakat bertumpu pada ash-shidq (kejujuran) dan al-amanah (tanggung jawab)

sehingga tata laku masyarakat dilandasai oleh moralitas yang agung, bukan nafsu serakah menumpuk kekayaan dan kepentingan ego pribadi.

Dengan menjadikan pengurus NU sebagai informasi pada berita ini, seakan *Kompas.com* ingin memberikan frame bahwa sumber berita yang ditampilkan merupakan seseorang yang ahli, yang punya wewenang mengomentari terkait dengan kasus ini. Dari latar belakang dari ormas Islam terbesar di Indonesia.

Pada kalimat “membohongi pakai ayat”, berita ini berpendapat bahwa orang berbohong dengan menggunakan Al-Qur’an surah Al-Maidah 51. Ada orang-orang yang kerap menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta, ayat-ayat yang disampaikan menyangkut larangan memilih pemimpin non-Muslim. Jadi jika ada orang yang menyampaikan ayat yang melarang memilih pemimpin dalam konteks pilkada DKI, artinya dia berbohong.

Dalam islam berbohong adalah dosa besar, diantara surah Al-Qur’an yang melarang berbohong terdapat pada surah Al Israa’: 36 yang artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya”. Berbohong dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan keji seperti adu domba, hingga menyebar fitnah yang orang tersebut tak melakukannya. Inilah yang disebut bahaya lidah menurut agama islam, sehingga setiap mukmin harus menjaga lisannya agar selalu berkata yang baik.

Memang ada beberapa berbohong yang dibolehkan, para ulama telah menertibkan macam-macam kebohongan yang dibolehkan tersebut, dan sesuatu yang paling baik yang saya lihat dalam keakuratannya adalah

apa yang disebutkan oleh al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah seraya berkata, “Perkataan itu merupakan perantara menuju berbagai maksud, maka setiap maksud yang terpuji mungkin untuk dicapai dengan kejujuran dan kebohongan. Kebohongan di dalam perkataan tersebut adalah haram karena tidak adanya kebutuhan kepadanya. Dan apabila memungkinkan untuk menyampaikan perkataan tersebut dengan berbohong, serta tidak memungkinkan dengan kebenaran, maka kebohongan di dalamnya adalah mubah (diperbolehkan) apabila hasil dari maksud tersebut adalah mubah, dan hukumnya menjadi wajib apabila maksud tersebut adalah wajib.

Apabila seorang Muslim bersembunyi dari orang kafir, lalu dia menanyakannya, maka dia wajib berbohong untuk menyembunyikannya. Demikian pula kalau di sisinya atau di sisi selainnya ada titipan, lalu seorang yang zhalim menanyakannya dengan maksud mengambilnya, maka dia wajib berbohong untuk menyembunyikannya, hingga walaupun seseorang mengabarkan kepada orang zhalim tentang barang titipan di sisinya, lalu seorang yang zhalim mengambilnya secara paksa, maka dia wajib menjaminkannya atas barang yang dititipkan dan dikabarkan tersebut. Apabila si zhalim memintanya untuk bersumpah atas barang tersebut, maka dia harus bersumpah dan bertauriyah (yakni: menyatakan sesuatu di luar dari yang dimaksudkan) dalam sumpahnya. Apabila dia bersumpah, namun tidak bertauriyah, maka dia telah membatalkan janjinya menurut pendapat yang shahih.

Dalam riwayat lain dikatakan, “Dia tidak membatalkan”. Demikian pula apabila tujuannya adalah perang atau mendamaikan antara dua pihak yang bertikai, atau membuat condong hati salah satu pihak agar memaafkan tindakan kriminal yang hanya bisa dilakukan dengan berbohong, maka tindakan berbohong di sini tidaklah haram. Ini apabila tujuannya tidak bisa dicapai kecuali dengan berbohong.

Itulah beberapa ketentuan berbohong yang ada dalam Islam, jika *Kompas.com* menggunakan kalimat membohongi pakai ayat, artinya orang-orang yang menyampaikan ayat Al-Qur'an itu dianggap telah melakukan dosa besar hanya untuk kepentingan politik.

Tabel 4.3 Frame Kompas.com, 8 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Headline pada berita ini, terlihat pada judul “Pengurus NU Jakarta: Ahok tak bilang ayat yang membohongi, tetapi membohongi pakai ayat, Kompas.com membuat judul dengan claim bahwa Ahok tidak tidak mengatakan Al-Qur’an yang membohongi, namun ada orang yang melakukan kebohongan dengan menggunakan Al-Qur’an .</p> <p>Dari kalimat diatas, artinya Kompas.com menyimpulkan bahwa Al-Qur’an sebagai alat untuk berbohong, dan ini tentu bertentangan dengan pemahaman umat islam. Tidak bisa Al-Qur’an dijadikan alat untuk berbohong, surat Al-Maidah 51 tidak bisa dijadikan alat untuk berbohong. Jadi ketika Pak Basuki berkata dengan kalimat seperti itu, sudah pasti dia menyakiti Umat Islam karena menempatkan Al-Maidah 51 sebagai “keterangan alat” yang didahului oleh predikat bohong. Menempelkan sesuatu yang suci dengan sebuah kata negatif, itulah kesalahannya</p>
Skrip	<p>Dari unsur skrip, Kompas.com menuliskan protesnya terhadap orang-orang yang menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) ke dunia politik. Isu SARA berpotensi melahirkan kontroversi. isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) rupanya menjadi isu seksi dan komoditi yang diobral</p>

	<p>bebas serta liar terutama melalui media sosial, sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).</p> <p>Isu sara salah satu cara termudah dan paling efektif menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat dalam pilkada adalah dengan cara membangkitkan ikatan emosional pemilih pada calon. Ikatan emosional mana yang bisa melebihi kecintaan seseorang pada identitas primordialnya — suku, agama dan ras — akan menjadi identitas yang paling kuat sehingga mudah menyulut emosi. Dalam ras, agama dan etnisitas ada stigmatisasi dan pelabelan yang pada akhirnya akan bermuara pada kebencian, syak wasangka, dan kecemburuan sosial.</p> <p>Frame inilah yang ingin ditanamkan oleh Kompas.com lewat berita yang dipublikasikan pada media online www.Kompas.com edisi 8 Oktober 2016, berita ini mengharapkan Agar kejadian serupa tidak terulang, ke depannya tidak ada lagi yang menggunakan isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) ke dunia politik. Isu SARA berpotensi melahirkan kontroversi. Karena dalam politik tak menutup kemungkinan ada orang yang menjadikan ayat-ayat hanya sebagai alat politik. Memperlakukan ayat-ayat sebagai alat politik justru inilah yang berbahaya karena berpotensi mengaburkan fakta politik yang sebenarnya.</p>
<p>Tematik</p>	<p>tema yang ditampilkan dalam berita ini terdapat kedalam dua bagian, tema pertama membahas tentang pernyataan Ahok dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, maksudnya Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, tetapi Membohongi Pakai Ayat. Jadi pidato yang disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu sewaktu</p>

	<p>melakukan kunjungan kerja itu tidak bermaksud melecehkan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 51. Namun Ahok ingin menyampaikan bahwa ada orang-orang yang kerap menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta.</p> <p>Jadi Kompas.com menilai upaya-upaya lawan politik Ahok untuk mengalahkan beliau pada pilkada DKI Jakarta, salah satu alat yang digunakan adalah dengan memasukkan Al-Qur'an surah Al-Maidah 51, arti ayat "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain</p>
Retoris	<p>Memberikan penekanan diantaranya pada sumber berita dan beberapa kalimat yang menunjukkan dukungannya kepada Ahok. Kompas.com menggunakan judul diawali dengan kalimat "Pengurus NU Jakarta" frame yang ingin ditampilkan adalah bahwa isi berita yang ditulis merupakan pandangan dari pengurus NU Jakarta. NU merupakan salah satu organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang eksistensinya memainkan peran penting bagi kehidupan bangsa</p> <p>Pada kalimat "membohongi pakai ayat", berita ini berpendapat bahwa orang berbohong dengan menggunakan Al-Qur'an surah Al-Maidah 51. Ada orang-orang yang kerap menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta, ayat-ayat yang disampaikan menyangkut larangan memilih pemimpin non-Muslim.</p>

4) Kompas.com, 10 Oktober 2016: Ahok Minta Maaf kepada Umat Islam.

Analisis **Siktaksis**, *Kompas.com* menuliskan permintaan maaf yang disampaikan Ahok, pada judul berita ini diaktakan Ahok minta maaf kepada umat Islam. Lead dalam berita ini dituliskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci. Ahok sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, “saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa”.

Permintaan maaf ini dilakukan oleh Ahok atas dugaan penistaan agama yang beliau lakukan saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pada saat itu Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Saat melakukan pidato di depan warga, Ahok menyampaikan bahwa program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub Februari 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata hanya ingin program itu terus dilanjutkan.

Kemudian Ahok melanjutkan pidatonya dengan menyampaikan "Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu.

Kompas.com menyampaikan bahwa Ahok tidak ada niat untuk menistakan agama Islam lewat pidatonya itu, Pria yang biasa disapa Ahok

ini menyatakan bahwa ia bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam. Ia mengatakan, selama pemerintahannya, banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Banyak sekolah-sekolah Islam yang dibantu izin, pemberian KJP (Kartu Jakarta Pintar) untuk madrasah, serta telah banyak dibangun masjid. Alasan inilah yang diframe *Kompas.com* bahwa sesungguhnya Ahok tidak membenci islam.

Analisis **Skrip**, pada unsur *Who*, yang dimaksud dalam berita ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan nama Ahok. Kemudian pada unsur *What*, berita ini menyampaikan tentang permintaan maaf yang dilakukan oleh Ahok kepada umat islam. Logikanya, jika seseorang telah meminta maaf artinya seseorang itu telah mengakui kesalahannya, artinya kasus dugaan penistaan agama yang dituduh kepada beliau benar adanya.

Namun dalam penulisan berita yang dipublikasikan oleh *Kompas.com* tidak ada menuliskan pengakuan Ahok secara tegas bahwa beliau telah melakukan penistaan agama, misalnya pada teks berita “Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci. "Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa”

Teks ini tidak menunjukkan pengakuan secara tegas oleh Ahok bahwa telah melakukan penistaan agama, bahkan *Kompas.com* menggunakan bahasa dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci, bahasa ini tentu bukanlah pengakuan sebuah kesalahan terhadap muslim melainkan bentuk bantahan bahwa sesungguhnya tidak melakukan terhadap apa yang telah dituduh.

Analisis **Tematik**, pada unsur tematik *Kompas.com* lebih banyak menuliskan tentang bukti penguatan bahwa Ahok tidak akan melakukan penistaan agama, meskipun pada judul berita dituliskan Ahok minta maaf kepada umat Islam namun di beberapa isi berita *Kompas.com* menuliskan tema yang menggambarkan kebaikan Ahok. Seperti pada kutipan berita tentang pernyataan Ahok, "Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa".

Kemudian pada tema yang lain, *Kompas.com* menyatakan bahwa Ahok bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam. Karena selama pemerintahannya, banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti banyak sekolah-sekolah Islam yang dibantu izin, pemberian KJP (Kartu Jakarta Pintar) untuk madrasah, serta telah dibangun beberapa masjid.

Pada tema berikutnya *Kompas.com* menceritakan kronologis kasus yang menimpah Ahok yang dituduh telah melakukan penistaan agama, kasus itu bermula dari Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung isi Al Quran disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu, ia menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip bunyi surat Al-Maidah ayat 51. *Kompas.com* tidak menuliskan ucapan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, namun mengutip surat Al-Maidah ayatv 51.

Analisis **Retoris**, pilihan kata yang digunakan pada berita ini cenderung menunjukkan kebenaran terhadap Ahok, misalnya pada kata Ahok minta maaf. Dalam islam ucapan maaf adalah ungkapan permintaan atau permohonan ampun ataupun penyesalan karena suatu kesalahan. Meminta maaf berarti memberi ampunan atas kesalahan

tersebut dan tidak menganggap lagi kesalahan tersebut. Quraish Shihab dalam Membumikan Al-Qur'an menjelaskan: Kata maaf berasal dari bahasa Al-Qur'an al- 'afwu yang berarti "menghapus", yaitu yang memaafkan menghapus bekas-bekas luka di hatinya. Bukanlah memaafkan namanya, apabila masih ada tersisa bekas luka itu didalam hati, bila masih ada dendam yang membara.

Kemudian islam juga mengajarkan umatnya untuk agar dengan lapang dada memberi maaf kepada orang yang telah berbuat salah. Bagaimanapun juga manusia sering lupa dan khilaf. Memberi maaf kepada orang atas ketidaksengajaannya adalah keutamaan buat orang yang sempat tersakiti. Dan memberi maaf atas tindakan buruk orang lain juga sebuah keutamaan jika itu bisa dilakukan.

Adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersifat pemaaf. Ketika beliau melewati jalan dan sering diganggu oleh orang yang tidak suka dengannya, beliau selalu memaafkan. Sampai akhirnya ketika orang yang suka mengganggu itu sakit maka Rasulullah adalah orang pertama yang datang menjenguknya. Jika kita bicara sejarah lain dikisahkan bagaimana Nabi Muhammad mendapat perlakuan yang buruk dari masyarakat Thaif, sampai-sampai malaikat datang dan menanyakan apakah perlu masyarakat yang berlaku buruk tersebut dihukum, Nabi meminta untuk memaafkan mereka karena mungkin mereka belum tahu.

Memberi maaf bukanlah menunjukkan seseorang itu lemah atau tidak mampu membalas. Suka memaafkan justru menunjukkan sifat keutamaan dan kemuliaan seseorang karena ia belajar dari sifat Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun seberapa besar pun kesalahan yang pernah dilakukan hamba-Nya. Sikap pemaaf menunjukkan seseorang memilih jalan yang dekat dengan keridhoan Allah ketika sebenarnya dia bisa menuntut balas atas kesalahan orang lain.

Pilihan kata berikut terdapat pada kalimat, Ahok menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. *Kompas.com* lebih memilih potongan pernyataan Ahok bahwa tidak memaksa memilih dia pada pilkada DKI Jakarta, meskipun secara lengkap pernyataan Ahok pada saat itu bahwa Ahok menyampaikan meskipun beliau tidak terpilih pun pada pilkada DKI Jakarta mendatang kalo program ini aka tetap jalan, jangan berpikir nanti kalo gak kepilih, pasti, Ahok programnya bubar

Ahok melanjutkan pidatonya dengan menyatakan, “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya, ya dibohongin pake surat Al-Maidah surat 51 macam-macam gitu lho. itu hak bapak ibu. ya. jadi kalo bapak ibu, perasaan, gak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak papa. karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. program ini jalan saja. ya jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya gak bisa pilih Ahok. gak suka ama Ahok”.

Kemudian pilihan kata berikutnya terdapat pada mengutip ayat Al-Qur’an surah Al-Maidah 51, *Kompas.com* lebih memilih mengutip ayat Al-Qur’an dibandingkan dengan menuliskan pernyataan Ahok yang mengatakan dibohongin pake surat Al-Maidah surat 51. Dari beberapa pilihan kata yang ditampilkan oleh *Kompas.com* dapat menyimpulkan bahwa pada berita ini frame yang diberikan menunjukkan dukungannya terhadap Ahok.

Tabel 4.4 Frame Kompas.com, 10 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Analisis Siktaksis, Kompas.com menuliskan permintaan maaf yang disampaikan Ahok, pada judul berita ini diikatankan Ahok minta maaf kepada umat Islam. Lead dalam berita ini dituliskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci. Ahok sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, “saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa”.</p> <p>Kompas.com menyampaikan bahwa Ahok tidak ada niat untuk menistakan agama Islam lewat pidatonya itu, Pria yang biasa disapa Ahok ini menyatakan bahwa ia bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam. Ia mengatakan, selama pemerintahannya, banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Banyak sekolah-sekolah Islam yang dibantu izin, pemberian KJP (Kartu Jakarta Pintar) untuk madrasah, serta telah banyak dibangun masjid. Alasan inilah yang diframe Kompas.com bahwa sesungguhnya Ahok tidak membenci islam.</p>
Skrip	<p>pada unsur Who, yang dimaksud dalam berita ini adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan nama Ahok. Kemudian pada unsur What, berita ini menyampaikan tentang permintaan maaf yang dilakukan oleh Ahok kepada umat islalm. Logikanya, jika seseorang telah meminta maaf artinya seseorang itu telah mengakui</p>

	<p>kesalahannya, artinya kasus dugaan penistaan agama yang dituduh kepada beliau benar adanya.</p> <p>Teks ini tidak menunjukkan pengakuan secara tegas oleh Ahok bahwa telah melakukan penistaan agama, bahkan Kompas.com menggunakan bahasa dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci, bahasa ini tentu bukanlah pengakuan sebuah kesalahan terhadap muslim melainkan bentuk bantahan bahwa sesungguhnya tidak melakukan terhadap apa yang telah dituduh.</p>
<p>Tematik</p>	<p>pada unsur tematik Kompas.com lebih banyak menuliskan tentang bukti penguatan bahwa Ahok tidak akan melakukan penistaan agama, meskipun pada judul bewrita dituliskan Ahok minta maaf kepada umat Islam namun di beberapa isi berita Kompas.com menuliskan tema yang menggambarkan kebaikan Ahok.</p> <p>pada tema yang lain, Kompas.com menyatakan bahwa Ahok bukanlah orang yang anti atau memusuhi agama tertentu, termasuk Islam. Karena selama pemerintahannya, banyak madrasah yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti banyaka sekolah-sekolah Islam yang dibantu izin, pemberian KJP (Kartu Jakarta Pintar) untuk madrasah, serta telah dibangun beberapa masjid.</p> <p>Pada tema berikutnya Kompas.com menceritakan kronologis kasus yang menimpah Ahok yang dituduh telah melakukan penistaan agama, kasus itu bermula dari Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung isi Al Quran disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu, ia menyatakan tidak</p>

	<p>memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip bunyi surat Al-Maidah ayat 51. Kompas.com tidak menuliskan ucapan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, namun mengutip surat Al-Maidah ayatv 51.</p>
Retoris	<p>Pilihan kata yang digunakan pada berita ini cenderung menunjukkan kebenaran terhadap Ahok, misalnya pada kata Ahok minta maaf.</p> <p>Pilihan kata berikut terdapat pada kalimat, Ahok menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Kompas.com lebih memilih potongan pernyataan Ahok bahwa tidak memaksa memilih dia pada pilkada DKI Jakarta, meskipun secara lengkap pernyataan Ahok pada saat itu bahwa Ahok menyampaikan meskipun beliau tidak terpilih pun pada pilkada DKI Jakarta mendatang kalo program ini aka tetap jalan, jangan berpikir nanti kalo gak kepilih, pasti, Ahok programnya bubar</p> <p>Kemudian pilihan kata berikutnya terdapat pada mengutip ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah 51, Kompas.com lebih memilih mengutip ayat Ak-Qur'an dibandingkan dengan menuliskan pernyataan Ahok yang mengatakan dibohongin pake surat Al-Maidah surat 51. Dari beberapa pilihan kata yang ditampilkan oleh Kompas.com dapat menyimpulkan bahwa pada berita ini frame yang diberikan menunjukkan dukungannya terhadap Ahok.</p>

5) Kompas.com, 13 Oktober 2016: Bawaslu DKI menyebutkan Ahok tidak melanggar aturan Pemilu.

Analisis **Siktaksis**, judul berita yang ditampilkan *Kompas.com* sangat jelas memberikan dukungannya kepada Ahok. Judul itu melakukan nominalisasi bahwa lembaga Bawaslu DKI menyebutkan Ahok tidak melanggar aturan pemilu, atas dugaan penistaan agama terkait pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Yang menjadi judul dalam berita ini bukan menyebut perseorangan Bawaslu DKI Jakarta, melainkan lembaga Badan Pengawasan Pemilu DKI Jakarta. Judul semacam ini membawa otoritas intelektual tertentu, bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok tidak melanggar aturan pemilu. Frame membenaran terhadap Ahok kemudian muncul, karena sebagai calon Gubernur pada pilkada DKI Jakarta yang diduga melakukan penistaan terhadap agama atas pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 dibuktikan dengan pernyataan dari lembaga yang berwenang dalam pengawasan pemilu dan diputuskan bahwa Ahok tidak melanggar aturan pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Dalam kasus atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Muhammad Jufri, pernyataan bakal calon

petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip kitab suci bukan merupakan pelanggaran pemilu. Bawaslu DKI sudah memutuskan hal itu dalam rapat pleno terkait laporan masyarakat beberapa waktu lalu. Bawaslu DKI Jakarta memutuskan bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena bukan mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan.

Kompas.com menyampaikan bahwa Ahok juga tidak melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang terkait larangan dalam kampanye. Dalam larangan kampanye itu isinya melarang menghasut, mengadu domba, dan provokatif. karena belum memasuki masa kampanye dan masih ada tahapan pendaftaran calon, sehingga Bawaslu belum bisa menindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilu karena belum memasuki masa kampanye.

Analisis **Skrip**, peristiwa yang diangkat dalam berita ini adalah Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung kitab suci terjadi saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. *Kompas.com* mengambil dari sisi kebijakan dari Bawaslu terkait dengan kasus ini, dengan kesimpulan yang diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta, bahwa dari sisi pelanggaran pemilu Ahok tidak melanggar aturan pemilu, karena Ahok dinilai dinilai tidak melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang terkait larangan dalam kampanye. Dalam larangan kampanye itu isinya melarang menghasut, mengadu domba, dan provokatif.

Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Muhammad Jufri pernyataan bakal calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip kitab suci bukan merupakan pelanggaran pemilu. Bawaslu DKI sudah memutuskan hal itu dalam rapat pleno terkait laporan

masyarakat beberapa waktu lalu. Bawaslu memutuskan bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena bukan mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan.

Bawaslu merupakan sebuah lembaga yang berwewenang dalam menentukan tindak pelanggaran yang dilakukan pada proses pemilihan umum, telah memberikan keterangannya bahwa apa yang dilakukan Ahok tidak melanggar aturan pemilu. Walaupun ada beberapa orang yang menganggap bahwa itu adalah penodaan terhadap agama, karena beberapa hari terakhir publik khususnya umat Islam merasa tersinggung dengan beredarnya video mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam sebuah pertemuan dengan warga Pulau Seribu yang dalam satu bagian pernyataannya menyebut "dibohongi pakai surah Al-Maidah 51.

Bahkan pernyataan tersebut sontak membuat Umat Islam yang terpanggil hatinya menjadi marah dan menuntut Ahok terkait hal tersebut. Walau Ahok sendiri menilai tidak ada yang salah dengan pernyataan dirinya, namun sudah jelas bahwa pernyataan Ahok dengan membawa-bawa surah Al-Maidah 51 yang merupakan perintah Allah SWT bagi mereka yang "merasa dirinya" beriman untuk tidak memilih pemimpin yang tidak se-akidah, merupakan tindakan yang tidak patut dan berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama.

Analisis **Tematik**, beberapa tema yang disampaikan dalam berita ini merupakan bentuk dari dukungan yang ditunjukkan oleh *Kompas.com* terhadap Ahok, judul yang ditampilkan Bawaslu DKI sebut Ahok tak langgar aturan pemilu, tema ini menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan Ahok, karena dinilai tidak melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang terkait larangan dalam kampanye. Dalam

larangan kampanye itu isinya melarang menghasut, mengadu domba, dan provokatif.

Bawaslu menerangkan bahwa saat ini belum memasuki masa kampanye karena ada di tahapan pendaftaran calon, sehingga Bawaslu belum bisa menindaklanjuti sebagai pelanggaran pemilu karena belum memasuki masa kampanye. Dari sisi Bawaslu, namun yang dipersoalkan oleh umat Islam sebenarnya adalah terkesinggungan umat terkait pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Umat Islam tentu tidak menghubungkan ketersinggungannya dengan proses pilkada DKI Jakarta yang akan dilakukan, seandainya Ahok juga bukan salah satu bakal calon Gubernur pada pilkada DKI Jakarta, umat Islam juga akan tetap merasa sakait hati atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Tema berikutnya yang menunjukkan bentuk dukungan yang dilakukan *Kompas.com* terhadap Ahok terdapat pada kalimat yang menerangkan kronologis terjadi dugaan penistaan agama. *Kompas.com* menyatakan bahwa ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung kitab suci terjadi saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu, ia menyatakan dirinya tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51. Menurut Ahok, ucapannya itu murni tafsiran pribadinya dan dia tidak bermaksud untuk melecehkan. Ahok mengatakan bahwa tidak ada niat apapun. Warga Kepulauan Seribu pun waktu itu tidak ada yang tersinggung malah mereka tertawa-tawa. Niatnya itu hanya ingin menunjukkan sebetulnya dia enggak mau orang yang punya tafsiran itu bingung menerima bantuan, tapi enggak pilih Ahok.

Kompas.com menggunakan bahasa menyinggung kitab suci, bukan mengatakan dibohongi Al-Maidah 51, kata menyinggung yang digunakan *Kompas.com* bisa bermakna mengutip atau menyebutkan, tidak melecehkan atau bahkan menitakan. *Kompas.com* menghilangkan kalimat-kalimat negatif terhadap Ahok, mislanya yang berkembang di masyarakat muslim bahwa dugaan penistaan agama yang dilakukan atas pernyataannya tentang dibohongi Al-Maidah 51, yang disampaikan di depan warga Kepulauan Seribu saat melakukan kunjungan kerja pada 27 September 2016.

Analisis **Retoris**, dari unsur retorik *Kompas.com* memberikan penekanan pada judul berita, penekananan pertama ditunjukkan dengan menggunakan lembaga Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dengan menggunakan pernyataan dari lembaga ini akan timbul persepsi di kalangan pembaca bahwa yang disampaikan merupakan sebuah kebenaran karena menurut perundang-undangan lembaga Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jadi kesimpulan Bawaslu atas pernyataan bakal calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip kitab suci bukan merupakan pelanggaran pemilu merupakan upaya frame membenaran.

Dari sisi Bawaslu tidak ada tindakan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ahok, namun dari sisi agama apakah Ahok menistakan agama atau tidak pada berita ini tidak dimunculkan. Namun dari judul berita yang ditampilkan ini sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa Ahok pada posisi yang benar jika diteliti dari arena pemilu. Penekanan pada judul ini bisa saja berhasil untuk memberikan frame di kalangan masyarakat bahwa Ahok tidak melanggar, karena unsur piramida terbalik

dalam penulisan berita biasanya masyarakat bisa menyimpulkan berita itu meski tidak membaca berita tersebut secara keseluruhan.

Kemudian bentuk penekanan juga terdapat dari judul yang menampilkan isi dari pendapat Bawaslu DKI Jakarta, dalam berita ini disampaikan bahwa Bawaslu DKI sebut Ahok tak langgar aturan pemilu. Judul ini sudah bentuk dari kesimpulan berita, meskipun dalam isi berita akan menampilkan bermacam-macam alasan yang dikemukakan namun pada akhirnya berita ini akan menyampaikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok.

Tabel 4.5 Frame Kompas.com, 13 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	Judul berita yang ditampilkan Kompas.com sangat jelas memberikan dukungannya kepada Ahok. Judul itu melakukan nominalisasi bahwa lembaga Bawaslu DKI menyebutkan Ahok tidak melanggar aturan pemilu, atas dugaan penistaan agama terkait pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Judul dalam berita ini bukan menyebut perseorangan Bawaslu DKI Jakarta, melainkan lembaga Badan Pengawasan Pemilu DKI Jakarta. Judul semacam ini membawa otoritas intelektual tertentu, bahwa apa yang dilakukan oleh Ahok tidak melanggar aturan pemilu. Frame membenaran terhadap Ahok kemudian muncul, karena sebagai calon Gubernur pada pilkada DKI Jakarta yang diduga melakukan penistaan terhadap agama atas pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 dibuktikan dengan pernyataan dari lembaga yang berwenang dalam pengawasan pemilu dan diputuskan bahwa Ahok tidak melanggar aturan.

Scrip	<p>Peristiwa yang diangkat dalam berita ini adalah Ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung kitab suci terjadi saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Kompas.com mengambil dari sisi kebijakan dari Bawaslu terkait dengan kasus ini, dengan kesimpulan yang diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta, bahwa dari sisi pelanggaran pemilu Ahok tidak melanggar aturan pemilu, karena Ahok dinilai dinilai tidak melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun.</p> <p>Menurut Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta Muhammad Jufri pernyataan bakal calon petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang mengutip kitab suci bukan merupakan pelanggaran pemilu. Bawaslu DKI sudah memutuskan hal itu dalam rapat pleno terkait laporan masyarakat beberapa waktu lalu. Bawaslu memutuskan bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti karena bukan mengandung tindak pidana pemilihan atau pelanggaran administrasi pemilihan.</p>
Tematik	<p>Judul yang yang ditampilkan Bawaslu DKI sebut Ahok tak langgar aturan pemilu, tema ini menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan Ahok, karena dinilai tidak melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota yang terkait larangan dalam kampanye. Dalam larangan kampanye itu isinya melarang menghasut, mengadu domba, dan provokatif.</p> <p>Tema berikutnya yang menunjukkan bentuk dukungan</p>

	<p>yang dilakukan Kompas.com terhadap Ahok terdapat pada kalimat yang menerangkan kronologis terjadi dugaan penistaan agama. Kompas.com menyatakan bahwa ucapan Ahok yang dianggap banyak pihak menyinggung kitab suci terjadi saat ia melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Saat itu, ia menyatakan dirinya tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilihnya pada Pilkada DKI Jakarta 2017.</p>
Retoris	<p>Unsur retorik Kompas.com memberikan penekanan pada judul berita, penekananan pertama ditunjukkan dengan menggunakan lembaga Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, dengan menggunakan pernyataan dari lembaga ini akan timbul persepsi di kalangan pembaca bahwa yang disampaikan merupakan sebuah kebenaran karena menurut perundang-undangan lembaga Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.</p> <p>Kemudian bentuk penekanan juga terdapat dari judul yang menampilkan isi dari pendapat Bawaslu DKI Jakarta, dalam berita ini disampaikan bahwa Bawaslu DKI sebut Ahok tak langgar aturan pemilu. Judul ini sudah bentuk dari kesimpulan berita, meskipun dalam isi berita akan menampilkan bermacam-macam alasan yang dikemukakan namun pada akhirnya berita ini akan menyampaikan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok.</p>

6) Kompas.com, 14 Oktober 2016: PBNU imbau demo anti Ahok tidak anarkistis dan meminta ulama mengajak umat memaafkan Ahok.

Analisis **Siktaksis**, *Kompas.com* kembali menjadi pengurus organisasi islam terbesar di Indonesia sebagai sumber berita sebagai upaya untuk memberikan dukungan terhadap Ahok. Pada lead berita *Kompas.com* menuliskan arahan yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin yang memberikan pesan agar unjuk rasa yang dilakukan tetap berlangsung aman dan kondusif dan tidak anarkis, marah boleh tapi tidak boleh berlebihan. Umat Islam harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Judul yang dituliskan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh umat muslim untuk menuntut Ahok atas dugaan penistaan agama, kata yang dipakai pada penulisan judul berita ini adalah demo anti Ahok, *Kompas.com* memframe bahwa demo yang akan dilakukan merupakan demo yang dilakukan oleh kelompok yang anti kepada Ahok, sehingga ada kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya anarkis. Tindakan anarkis adalah tindakan semena-mena yang dilakukan menggunakan kekerasan terhadap kelompok atau seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Tindakan anarkis ini bisa berupa pemukulan, pengeroyokan, serta pengrusakan fasilitas umum.

Kekerasan yang kerap mewarnai pada aksi-aksi yang terjadi di Indonesia harus dihilangkan dari kebiasaan masyarakat, karena jika kebiasaan ini tidak bisa dihilangkan maka akan merusak generasi kita ke depannya. Setidaknya dalam penyampaian aspirasi, kemarahan akibat kesalahan orang dan lain sebagainya tidak harus diiringi dengan tindak kekerasan apalagi merusak, menghancurkan fasilitas umum, melakukan pembakaran terhadap kantor atau bangunan yang mana bangunan tersebut milik Negara. Karena semua itu adalah tindakan yang tidak benar dan menyebabkan kerugian pada Negara, untuk membangun suatu tempat atau

memperbaiki fasilitas yang hancur membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Kemudian pada kalimat berikutnya *Kompas.com* menuliskan situasi suhu politik di Jakarta semakin memanas. Khususnya saat kasus Ahok yang 'keseleo lidah' terkait komentarnya yang membawa ayat suci. Menurut sumber berita yang diambil *Kompas.com* umat Islam itu marah bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena keimanannya atau karena ghirah (rasa cemburu) mereka terhadap agamanya yang menurut sebagian besar mereka sengaja dilecehkan. Namun, keimanan yang seakar dengan kata "aman" dan "amanah" sejati itu seharusnya menciptakan situasi yang aman. Karena mewujudkan keamanan itu diamanahkan kepada orang-orang yang beriman.

Setiap masyarakat Indonesia termasuk di dalamnya adalah umat islam berhak menyampaikan aspirasinya dengan cara yang benar. Kita boleh memberikan aspirasi seperti melakukan demo namun hanya saja masih dalam konteks yang benar yang tidak berujung pada tindakan anarkis yang bisa menyebabkan kerugian pada negara. Melalui kalimat ini, *Kompas.com* ingin memberikan gambaran situasi politik di Jakarta yang kian memanas, akibat rencana aksi-aksi dari umat islam yang memprotes pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51.

Analisis **Skrip**, berita ini menyampaikan himbauan dari PBNU untuk tidak anarkis saat melakukan aksi, serta meminta kepada para ulama yang juga ikut dalam barisan aksi memprotes Ahok untuk memberikan maaf kepada Ahok. Unsur *Who* dalam berita menunjukkan siapa yang menyampaikan himbauan kepada para aksi agar tidak melakukan tindakan anarkis dan meminta para ulama yang terlibat untuk memberikan maaf kepada Ahok. Yang memberikan himbauan adalah PBNU, dalam lead berita dikatakan Rais Syuriah Pengurus Besar

Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin berpesan agar unjuk rasa yang dilakukan tetap berlangsung aman dan kondusif. Jangan anarkis, marah boleh tapi tidak boleh berlebihan. Umat Islam harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Dari unsur ini menunjukkan bentuk dukungan *Kompas.com* kepada Ahok, menggunakan kata anarkis menunjukkan sisi negatif terhadap kegiatan aksi yang akan dilakukan oleh umat islam atas dugaan penistaan agama yang telah dilakukan Ahok. Aksi ini merupakan aksi bela Islam terkait ucapan Ahok yang menyinggung soal surat Al-Maidah ayat 51. Ucapan Ahok tersebut dinilai termasuk penodaan agama. Aksi yang diikuti ribuan massa diawali dengan salat Jumat berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Massa lalu berjalan kaki untuk melakukan aksi di depan kantor Bareskrim di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan dan di kantor Balai Kota DKI Jakarta. Massa yang mayoritas berbusana putih memenuhi jalan Medan Merdeka Timur dan Medan Merdeka Selatan. Tuntutan massa adalah proses hukum terhadap Ahok.

Kemudian pada unsur *What*, berita ini menceritakan tentang himbuan yang disampaikan oleh PBNU terkait dengan aksi yang akan dilakukan oleh umat islam pada tanggal 14 November 2016, berita ini menceritakan himbuan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin berpesan agar unjuk rasa yang dilakukan tetap berlangsung aman dan kondusif. Ahmad menyampaikan jangan anarkis, marah boleh tapi tidak boleh berlebihan. Umat Islam harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.

Semua pihak mesti menjaga keamanan, kedamaian dan keutuhan. Perpecahan wajib untuk dihindari, saat ini situasi politik di Jakarta semakin memanas. Khususnya saat kasus Ahok yang 'keseleo lidah' terkait komentarnya yang membawa ayat suci. Ahmad percaya bahwa umat Islam itu marah bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena

keimanannya atau karena ghirah (rasa cemburu) mereka terhadap agamanya yang menurut sebagian besar mereka sengaja dilecehkan. Namun keimanan yang seakar dengan kata "aman" dan "amanah" sejati itu seharusnya menciptakan situasi yang aman. Karena mewujudkan keamanan itu diamanahkan kepada orang-orang yang beriman," ujar Ahmad.

Pada paragraf berikutnya, *Kompas.com* bahwa para tokoh agama bertanggung jawab untuk meredakan kemarahan, mendinginkan hati umatnya dan bukan sebaliknya justru provokatif turut terlibat memanaskan suasana yang berpotensi destruktif dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat atau mungkin saja kepentingan asing. Tokoh agama harus mengajak umat menahan amarahnya serta Memaafkan Ahok karena yang bersangkutan sudah minta maaf dan berlapang dada. *Kompas.com* menyatakan bahwa kasus pernyataan Ahok telah diserahkan kepada pihak berwajib, karena pihak kepolisian telah menerima laporan dari berbagai perwakilan umat Islam terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama.

Analisis **Tematik**, tema-tema yang ditampilkan pada teks berita ini berusaha untuk menghilangkan kata-kata penistaan agama dan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Kasus yang dipersoalkan pada aksi yang dilakukan umat islam ini adalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok terkait pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. *Kompas.com* menggunakan kalimat pada berita ini tanpa ada kata penistaan agama atau pelecehan Al-Qur'an seperti yang dianggap oleh banyak orang.

Kalimat yang digunakan oleh *Kompas.com* lebih banyak menggunakan istilah mengutip ayat Al-Qur'an , seperti misalnya pada paragraf pertama *Kompas.com* menuliskan "sejumlah elemen masyarakat

berencana mengadakan unjuk rasa di Jakarta usai shalat Jumat (14/10/2016) ini. Aksi unjuk rasa itu menyangkut ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait ayat kitab suci, yang jadi polemik belakangan ini”. *Kompas.com* menganggap bahwa aksi yang akan dilakukan adalah aksi oleh elemen masyarakat, tidak ada penegasan elemen masyarakat apa yang akan melakukan aksi.

Kemudian terkait dengan ayat Al-Qur’an , *Kompas.com* tidak menuliskan pernyataan Ahok yang mengatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, namun pada kalimat ini dikatakan dengan bahasa terkait ayat suci. Padahal dalam aksi yang akan dilakukan merupakan aksi umat islam menuntut hukuman untuk Ahok atas dugaan penistaan agama terkait dengan pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 yang disampaikan pada pidato kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang lalu.

Tema dukungan *Kompas.com* terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) juga terlihat pada paragraf kelima, pernyataan Ahok tentang dibohongi surah Al-Maidah 51 ditulis *Kompas.com* dengan menggunakan kata keseleo. “Ia mengakui suhu politik di Jakarta semakin memanas. Khususnya saat kasus Ahok yang 'keseleo lidah' terkait komentarnya yang membawa ayat suci. Ahmad percaya bahwa umat Islam itu marah bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena keimanannya atau karena ghirah (rasa cemburu) mereka terhadap agamanya yang menurut sebagian besar mereka sengaja dilecehkan’. Menggunakan kata keseleo merupakan upaya *Kompas.com* untuk melakukan frame ketidak sengajaan.

Analisis **Retoris**, dari unsur retorik *Kompas.com* melakukan penekanan pada kalimat ulama diminta ajak umat maafkan ahok, *Kompas.com* menyatakan bahwa para tokoh agama bertanggung jawab untuk meredakan kemarahan, mendinginkan hati umatnya dan bukan sebaliknya justru provokatif turut terlibat memanaskan suasana yang

berpotensi destruktif dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat atau mungkin saja kepentingan asing. Tokoh agama harus mengajak umat menahan amarahnya. Memaafkan orang yang sudah minta maaf dan berlapang dada.

Kompas.com menganggap aksi yang akan dilakukan oleh umat islam merupakan bagian dari pengaruh ulama. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Peran dan fungsi strategis ulama dapat diantaranya, pertama: pewaris para nabi. Tentu, yang dimaksud dengan pewaris nabi adalah pemelihara dan menjaga warisan para nabi, yakni wahyu/risalah, dalam konteks ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kata lain, peran utama ulama sebagai pewaris para nabi adalah menjaga agama Allah Swt. dari kebengkokan dan penyimpangan. Hanya saja, peran ulama bukan hanya sekadar menguasai khazanah pemikiran Islam, baik yang menyangkut masalah akidah maupun syariah, tetapi juga bersama umat berupaya menerapkan, memperjuangkan, serta menyebarkan risalah Allah.

Dalam konteks saat ini, ulama bukanlah orang yang sekadar memahami dalil-dalil syariah, kaidah istinbâth (penggalan), dan ilmu-ilmu alat lainnya. Akan tetapi, ia juga terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi saw.

Kedua: pembimbing, pembina dan penjaga umat. Pada dasarnya, ulama bertugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan lurus. Ulama juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir dan antek-anteknya; melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam.

Semua tugas ini mengharuskan ulama untuk selalu menjaga kesucian agamanya dari semua kotoran. Ulama juga harus mampu menjelaskan kerusakan dan kebatilan semua pemikiran dan sistem kufur kepada umat Islam. Ia juga harus bisa mengungkap tendensi-tendensi jahat di balik semua sepak terjang kaum kafir dan antek-anteknya. Ini ditujukan agar umat terjauhkan dari kejahatan musuh-musuh Islam.

Ketiga: pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ia juga mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum Muslim. Dengan ungkapan lain, seorang ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis.

Dengan demikian, fatwa-fatwanya mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum Muslim. Misalnya, fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikhul Islam mengenai bolehnya kaum Muslim mengadopsi sistem pemerintahan demokrasi dan perundang-undangan Barat pada akhir Kekhilafahan Islam. Fatwa ini tidak hanya keliru, tetapi juga menjadi penyebab kehancuran Khilafah Islamiyah. Fatwa ini muncul karena lemahnya visi politis-ideologis ulama pada saat itu.

Keempat: sumber ilmu. Ulama adalah orang yang fakih dalam masalah halal-haram. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, peran sentralnya adalah mendidik umat dengan akidah dan syariah Islam. Dengan begitu, umat memiliki kepribadian Islam yang kuat; mereka juga berani mengoreksi penyimpangan masyarakat dan penguasa.

Dari keempat fungsi yang ada di atas, maka sesungguhnya apa yang dilakukan ulama merupakan sesuatu yang bernilai kebaikan untuk umat islam, tidak ada seorang ulama bekerja untuk menghasut atau mengajak seseorang kelompok orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Frame ini menunjukkan bahwa *Kompas.com* menganggap para ulama yang tergabung kedalam aksi menuntut Ahok itu sebagai provokator aksi.

Tabel 4.6 Frame Kompas.com, 14 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Judul yang dituliskan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh umat muslim untuk menuntut Ahok atas dugaan penistaan agama, kata yang dipakai pada penulisan judul berita ini adalah demo anti Ahok, Kompas.com memframe bahwa demo yang akan dilakukan merupakan demo yang dilakukan oleh kelompok yang anti kepada Ahok, sehingga ada kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya anarkis. Tindakan anarkis adalah tindakan semena-mena yang dilakukan menggunakan kekerasan terhadap kelompok atau seseorang yang melakukan tindak kejahatan. Tindakan anarkis ini bisa berupa pemukulan, pengeroyokan, serta pengrusakan fasilitas umum.</p> <p>Kemudian pada kalimat berikutnya Kompas.com menuliskan situasi suhu politik di Jakarta semakin memanas. Khususnya saat kasus Ahok yang 'keseleo lidah' terkait komentarnya yang membawa ayat suci. Menurut sumber berita yang diambil Kompas.com umat Islam itu marah bukan karena hawa nafsunya, tetapi karena keimanannya atau karena ghirah (rasa cemburu) mereka terhadap agamanya yang menurut sebagian besar mereka sengaja dilecehkan.</p>

Scrip	<p>Berita ini menyampaikan himbauan dari PBNU untuk tidak anarkis saat melakukan aksi, serta meminta kepada para ulama yang juga ikut dalam barisan aksi memprotes Ahok untuk memberikan maaf kepada Ahok. Unsur Who dalam berita menunjukkan siapa yang menyampaikan himbauan kepada para aksi agar tidak melakukan tindakan anarkis dan meminta para ulama yang terlibat untuk memberikan maaf kepada Ahok. Yang memberikan himbauan adalah PBNU, dalam lead berita dikatakan Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin berpesan agar unjuk rasa yang dilakukan tetap berlangsung aman dan kondusif.</p> <p>Kemudian pada unsur What, berita ini menceritakan tentang himbauan yang disampaikan oleh PBNU terkait dengan aksi yang akan dilakukan oleh umat Islam pada tanggal 14 November 2016, berita ini menceritakan himbauan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin berpesan agar unjuk rasa yang dilakukan tetap berlangsung aman dan kondusif.</p>
Tematik	<p>Kalimat yang digunakan oleh Kompas.com lebih banyak menggunakan istilah mengutip ayat Al-Qur'an, seperti misalnya pada paragraf pertama Kompas.com menuliskan "sejumlah elemen masyarakat berencana mengadakan unjuk rasa di Jakarta usai shalat Jumat (14/10/2016) ini. Aksi unjuk rasa itu menyangkut ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait ayat kitab suci, yang jadi polemik belakangan ini". Kompas.com menganggap bahwa aksi yang akan dilakukan adalah aksi oleh elemen masyarakat, tidak ada penegasan elemen masyarakat apa yang akan</p>

	<p>melakukan aksi.</p> <p>Kemudian terkait dengan ayat Al-Qur'an , Kompas.com tidak menuliskan pernyataan Ahok yang mengatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, namun pada kalimat ini dikatakan dengan bahasa terkait ayat suci. Padahal dalam aksi yang akan dilakukan merupakan aksi umat islam menuntut hukuman untuk Ahok atas dugaan penistaan agama terkait dengan pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 yang disampaikan pada pidato kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 yang lalu.</p> <p>Tema dukungan Kompas.com terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) juga terlihat pada paragraf kelima, pernyataan Ahok tentang dibohongi surah Al-Maidah 51 ditulis Kompas.com dengan menggunakan kata keseleo. “Ia mengakui suhu politik di Jakarta semakin memanas.</p>
Retoris	<p>penekanan pada kalimat ulama diminta ajak umat maafkan ahok, <i>Kompas.com</i> menyatakan bahwa para tokoh agama bertanggung jawab untuk meredakan kemarahan, mendinginkan hati umatnya dan bukan sebaliknya justru provokatif turut terlibat memanas suasana yang berpotensi destruktif dan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik sesaat atau mungkin saja kepentingan asing. Tokoh agama harus mengajak umat menahan amarahnya. Memaafkan orang yang sudah minta maaf dan berlapang dada.</p> <p>Kompas.com menganggap aksi yang akan dilakukan oleh umat islam merupakan bagian dari pengaruh ulama.</p>

7) Kompas.com, 24 Oktober 2016: Bareskrim belum menjadikan rujukan sikap MUI terkait kasus Ahok

Analisis **Siktaksis**, dari unsur siktaksis *Kompas.com* menunjukkan keberpihakannya terhadap Ahok dengan menulis berita yang diberi judul “Kasus Ahok, sikap MUI belum jadi rujukan bareskrim”. Pada lead berita *Kompas.com* menuliskan pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang menganggap sikap Majelis Ulama Indonesia terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menjadi rujukan dalam perkara ini. Penyelidik masih akan memintai keterangan MUI untuk melihat kasus ini berdasarkan alat bukti yang dipegang penyelidik.

Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia telah memberikan sikap resminya, MUI menyampaikan bahwa pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : Menghina Al-Qur’an dan atau Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1. Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Qur’an dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3. Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Qur’an dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum. Masyarakat diminta untuk

tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Dari analisis siktaksis, terlihat bahwa *Kompas.com* menunjukkan keberpihakannya terhadap Ahok. Pernyataan Ahok yang sudah dianggap menghina Al-Qur'an dan atau menghina ulama oleh Majelis Ulama Indonesia, namun belum dijadikan rujukan oleh Bareskrim Polri dalam melakukan penyidikan terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama.

Analisis **Skrip**, berita ini menuliskan tentang pandangan Bareskrim Polri yang menganggap pandangan ulama terhadap yang telah mengina Al-Qur'an dan atau menghina ulama belum bisa dijadikan rujukan untuk menentukan status tersangka kepada Ahok. Pada unsur *What*, berita menjelaskan pendapat Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menganggap sikap Majelis Ulama Indonesia terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menjadi rujukan dalam perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok.

Bareskrim Polri mau tanya lagi Majelis Ulama Indonesia melihat video Ahok dari mana bahannya. Pasalnya, video yang selama ini beredar di media sosial berbeda dengan video lengkap yang dimiliki oleh kepolisian. Video yang dipegang polisi berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak disebarluaskan. Meskipun sebelumnya MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dikategorikan menghina Al Quran dan atau menghina ulama, namun Bareskrim tetap mencari fakta lain untuk nantinya memutuskan status Ahok.

Pada unsur *Who*, berita ini menuliskan Bareskrim Polri, dari segi penindakan hukum Bareskrim Polri lebih punya wewenang dibandingkan dengan lembaga Majelis Ulama Indonesia. Bareskrim merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada

tingkat Markas Besar dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.

Menggunakan nama Bareskrim dalam berita ini menunjukkan otoritas wewenang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketika Bareskrim menyatakan belum menjadikan sikap MUI sebagai rujukan dalam menentukan status hukum Ahok, maka itu menjadi sebuah pembenaran dalam sistem hukum di Indonesia.

Analisis **Tematik**, unsur tematik yang terdapat di dalam berita ini terletak pada pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim menganggap sikap Majelis Ulama Indonesia terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menjadi rujukan dalam perkara ini. Penyelidik masih akan memintai keterangan MUI untuk melihat kasus ini berdasarkan alat bukti yang dipegang penyelidik.

Tema ini menunjukkan kekuatan pandangan dari lembaga Majelis Ulama Indonesia masih belum kuat secara hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga meskipun dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia telah dinyatakan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama dan atau ulama, namun tetap saja wewenang untuk melakukan penyelidikan sebagai penentu status hukum Ahok ada pada pihak kepolisian.

Kemudian pada tema berikutnya *Kompas.com* menuliskan pernyataan Bareskrim polri yang mempertanyakan video yang diselidiki Majelis Ulama Indonesia didapat Pasalnya, video yang selama ini beredar di media sosial berbeda dengan video lengkap yang dimiliki oleh

kepolisian. Video yang kini dipegang polisi berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak disebarluaskan.

Tema ini menunjukkan tentang keabsahan video khususnya yang dijadikan Majelis Ulama Indonesia sebagai objek yang diteliti, artinya ada kemungkinan video yang diteliti oleh MUI telah dilakukan pengeditan terlebih dahulu sehingga video itu berbeda dengan video aslinya.

Analisis **Retoris**, pilihan kata yang ditampilkan *Kompas.com*, menunjukkan keperpihakannya terhadap Ahok. Keberpihakan ini misalnya bisa dilihat dari kutipan judul berita yang menyatakan bahwa Sikap MUI Belum Jadi Rujukan Bareskrim, padahal sebelumnya MUI sudah mengkaji pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama.

Majelis Ulama Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non Muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an .
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : Menghina Al-Qur'an dan atau Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.

Kemudian pada pilihan kata berikutnya, *Kompas.com* menuliskan pernyataan Bareskrim bahwa video yang selama ini beredar di media sosial berbeda dengan video lengkap yang dimiliki oleh kepolisian. Frame ini menyebutkan bahwa video yang berkembang merupakan video yang telah diedit atau video yang yang tersebar merupakan video palsu. Maka jika ada orang mengedit video Ahok, dia akan termasuk kedalam penyebaran berita bohong atau hoax dan bisa diancam pidana.

Polri akan menjerat penyebar hoax di media sosial atau internet dengan pasal 28 ayat 1 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sesuai ketentuan dalam pasal tersebut, pada ayat 1 mengatur setiap orang dilarang untuk menyebarkan berita bohong. "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik," demikian ketentuan ayat 1 pasal 28 UU ITE.

Dalam ayat kedua pasal tersebut, juga terdapat ketentuan larangan kepada setiap orang untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian. "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," bunyi ayat 2 pasal 28 UU ITE.

Dalam bab ketentuan pidana pada UU ITE tercantum rincian ancaman pidana penyebar hoax. Pasal 45 atau 2 UU ITE berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar. Selain pasal 28 tersebut, menurut kabar pesan berantai yang beredar di WhatsApp, penyebar hoax juga bisa dijerat

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Tabel 4.7 Frame Kompas.com, 24 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>dari unsur siktaksis Kompas.com menunjukkan keberpihakannya terhadap Ahok dengan menulis berita yang diberi judul “Kasus Ahok, sikap MUI belum jadi rujukan bareskrim”. Pada lead berita Kompas.com menuliskan pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto yang menganggap sikap Majelis Ulama Indonesia terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menjadi rujukan dalam perkara ini. Penyelidik masih akan memintai keterangan MUI untuk melihat kasus ini berdasarkan alat bukti yang dipegang penyelidik.</p> <p>Dari analisis siktaksis, terlihat bahwa Kompas.com menunjukkan keberpihakannya terhadap Ahok. Pernyataan Ahok yang sudah dianggap menghina Al-Qur’an dan atau menghina ulama oleh Majelis Ulama Indonesia, namun belum dijadikan rujukan oleh Bareskrim Polri dalam melakukan penyidikan terhadap Ahok atas dugaan penistaan agama.</p>
Skrip	<p>Berita ini menuliskan tentang pandangan Bareskrim Polri yang menganggap pandangan ulama terhadap yang telah mengina Al-Qur’an dan atau menghina ulama belum bisa dijadikan rujukan untuk menentukan status tersangka kepada Ahok. Pada unsur What, berita menjelaskan pendapat Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menganggap sikap Majelis Ulama Indonesia terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menjadi rujukan dalam perkara dugaan penodaan agama yang</p>

	<p>dialakukan Ahok.</p> <p>Pada unsur Who, berita ini menuliskan Bareskrim Polri, dari segi penindakan hukum Bareskrim Polri lebih punya wewenang dibandingkan dengan lembaga Majelis Ulama Indonesia. Bareskrim merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.</p> <p>Menggunakan nama Bareskrim dalam berita ini menunjukkan otoritas wewenang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketika Bareskrim menyatakan belum menjadikan sikap MUI sebagai rujukan dalam menentuka status hukum Ahok, maka itu menjadi sebuah pembenaran dalam sistem hukum di Indonesia.</p>
<p>Tematik</p>	<p>unsur tematik yang terdapat di dalam berita ini terletak pada pernyataan Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto, Kepala Bareskrim menganggap sikap Majelis Ulama Indonesia terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belum menjadi rujukan dalam perkara ini. Penyelidik masih akan memintai keterangan MUI untuk melihat kasus ini berdasarkan alat bukti yang dipegang penyelidik.</p> <p>Kemudian pada tema berikutnya Kompas.com</p>

	<p>menuliskan pernyataan Bareskrim polri yang mempertanyakan video yang diselidiki Majelis Ulama Indonesia didapat Pasalnya, video yang selama ini beredar di media sosial berbeda dengan video lengkap yang dimiliki oleh kepolisian. Video yang kini dipegang polisi berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak disebarluaskan.</p> <p>Tema ini menunjukkan tentang keabsahan video khususnya yang dijadikan Majelis Ulama Indonesia sebagai objek yang diteliti, artinya ada kemungkinan video yang diteliti oleh MUI telah dilakukan pengeditan terlebih dahulu sehingga video itu berbeda dengan video aslinya.</p>
Retoris	<p>Pilihan kata yang ditampilkan Kompas.com, menunjukkan keberpihakannya terhadap Ahok. Keberpihakan ini misalnya bisa dilihat dari kutipan judul berita yang menyatakan bahwa Sikap MUI Belum Jadi Rujukan Bareskrim, padahal sebelumnya MUI sudah mengkaji pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. MUI menilai pernyataan Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu dapat dikategorikan menghina Al Quran dan menghina ulama.</p> <p>Kemudian pada pilihan kata berikutnya, Kompas.com menuliskan pernyataan Bareskrim bahwa video yang selama ini beredar di media sosial berbeda dengan video lengkap yang dimiliki oleh kepolisian. Frame ini menyebutkan bahwa video yang berkembang merupakan video yang telah diedit atau video yang yang tersebar merupakan video palsu.</p>

8) Kompas.com, 30 Oktober 2016: Ketua DPR Imbau Seluruh Tokoh Menahan Diri Terkait Ucapan Ahok.

Analisis **Siktaksis**, berita ini menuliskan headline tentang pernyataan-pernyataan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian. *Kompas.com* memframe bahwa terkait rencana aksi yang akan dilakukan merupakan upaya yang dapat membuat negara ini menjadi ricuh, karena aksi besar-besaran yang rencananya akan dilakukan oleh umat muslim pada tanggal 4 November 2016 mendatang, tidak hanya diikuti oleh organisasi islam tertentu melainkan diikuti dari berbagai unsur masyarakat, seperti masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama dan bahkan para politisi aktif.

Aksi 411 merupakan demo besar-besaran terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu. Selain ormas Islam dari Jabodetabek, aksi ini juga diikuti massa dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti beberapa kota di Jawa, dari Medan, Makassar, Palembang dan masih banyak lagi. Adapun aksi ini juga akan diikuti ratusan ulama, dai-dai kondang, serta tokoh-tokoh ormas Islam dan lainnya.

Tokoh-tokoh yang hadir pada aksi tersebut diantaranya: Habib Rizieq, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) mengajak warga NU dan Muhammadiyah untuk bersama-sama ikut dalam demo Ahok 4 November 2016. Sehari sebelum 4 November, pertama, Habib Rizieq Shihab sendiri memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (3/11). Kedatangan Rizieq adalah untuk menjadi saksi ahli agama dalam perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kedua, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham memastikan aksi unjuk rasa pada 4 November ini akan berjalan damai. Beliau menyampaikan yang turun semua ulama ahli ahlussunnah wal jamaah. Yang datang semua orang-orang mukmin, yang jaga polisi saleh-saleh

semua. Insya Allah damai. Ketiga, Aa Gym, Dalam akun Facebook miliknya, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) mengungkapkan sejumlah alasan bergabung dalam aksi demo 4 November. "Insya Allah Aa akan ikut bergabung pada 4 November, mudah-mudahan ini jadi amal sholih kita semua,"

Keempat, Tengku Zulkarnain, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, merupakan salah satu sosok yang bersikap tegas atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait surat Al-Maidah. Kelima, Ratna Sarumpaet, Ratna memastikan diri untuk ikut dalam demo 4 November dan akan bergabung dengan elemen mahasiswa beserta para ustadz dari Banten atas nama.

Keenam, Ahmad Dhani, Ahmad Dhani mengimbau kepada artis yang selama ini Islami, artis yang menyanyikan lagu religius, artis-artis yang selama ini menggunakan simbol Islam dan artis-artis yang menikmati hasil dari menjual Islam, harusnya tanggal 4 besok ikut demo," kata Dhani di kediamannya, kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (3/11/2016).

Ketujuh, Fadli Zon. Fadli Zon mengakui kalau diminta ikut untuk aksi 411. Saya Insya Allah bersedia. Saudara Fahri juga. Ini bentuk solidaritas dan tujuan kita untuk menegakkan konstitusi Pasal 27 ayat 1. Aksi ini untuk mendorong penegakan hukum, bukan SARA," kata Fadli, se usai menerima rombongan yang dipimpin Habib Rizieq Shihab di DPR, Jumat Kedelapan, Fahri Hamzah, selain dirinya akan hadir, Fahri Hamzah juga mengimbau Ketua DPR untuk hadir, supaya menunjukkan pada masyarakat, (bahwa) biasa demokrasi itu.

Kompas.com menjadikan politikus partai golkar, Ade Komarudin sebagai sumber berita ini, dalam keterangannya politikus ini mengaku khawatir atas rencana aksi unjuk rasa "Aksi Bela Islam" yang akan digelar di depan Istana Negera pada Jumat (4/11/2016). Menurut nya, unjuk rasa itu rawan didomplengi kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Ade takut ada ormas yang anggotanya diperalat oleh

kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali.

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, setiap tokoh masyarakat berkewajiban menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Untuk itu, ia meminta, agar mereka dapat bijak dalam bersikap. Perlu kebijaksanaan dan perhatian sangat serius dari para pemimpin bangsa saat ini.

Analisis **Skrip**, berita ini menuliskan tentang himbuan yang disampaikan Ketua DPR supaya seluruh tokoh menahan diri terkait ucapan Ahok. Seuruh tokoh yang dimaksud adalah mereka yang tergabung kedalam kelompok yang menganggap bahwa pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 telah menistakan agama, tokoh-tokoh ini adalah mereka yang kerap memberikan komentarnya di depan publik terkait dengan pernyataan Ahok.

Beberapa tokoh yang menganggap Ahok telah menistakan agama, misalnya Aa Gym, beliau menyampaikan umat Islam terluka. Dalam video tersebut Aa Gym menuturkan Ahok yang terlahir sebagai Etnis Tionghoa bukan pilihannya namun hal tersebut adalah takdir yang menciptakannya. Sehingga bukan wilayah kita untuk mengomentari etnis. Saudara Ahok beragama non Islam itu adalah pilihan dan setiap orang berhak menentukan apa yang akan dipertanggungjawabannya dunia akhirat bagi kita umat Islam tidak ada masalah, lakum dinukum waliyadin. Namun, Ahok yang menyebutkan surat Al-Maidah pada sebuah acara yang digelar di Kepulauan Seribu tidaklah tepat.

Prof. DR. KH. Ahmad Zahro, MA, Ketum IPIM, beliau menyampaikan bahwa Ahok telah merendahkan Al Quran. Prof. DR. KH. Ahmad Zahro menyampaikan setelah menyaksikan video dan membaca transkrip narasi pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kepulauan Seribu, ungkapan Gubernur DKI Jaya tersebut jelas nyata, merendahkan kitab suci Al Quran karena menganggap surat Al Ma'idah ayat 51 adalah kebohongan.

Pernyataan Gubernur DKI Jaya tersebut jelas bernuansa SARA dan tergolong penistaan terhadap agama Islam. Demi ketenteraman umat Islam, demi kerukunan antar umat beragama, dan demi tetap terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, IPIM mengharap agar Kepolisian Negara RI bertindak cepat sesuai undang-undang yang berlaku, agar tidak terjadi hal-hal yang amat tidak kita inginkan.

Khatibul Umam Wiranu, Anggota DPR. Beliau menyampaikan bahwa Ahok telah mendiskreditkan umat Islam. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta telah melukai hati warga DKI Jakarta yang mayoritas beragama Islam. Pasalnya, Ahok secara langsung menempatkan ayat tersebut yang bermakna larangan untuk memilih “Pemimpin Non-Muslim” sebagai objek pembohongan. Ungkapan “Dibohongi Pakai Surah Al-Maidah 51” sama saja menyinggung dan mendiskreditkan umat Islam yang meyakini kebenaran ajaran agamanya.

Sebagai Gubernur yang juga Pemimpin Warga DKI Jakarta, sudah selayaknya Ahok tidak menempatkan pihak lain yang berseberangan, apalagi pemeluk agama yang berbeda dengan keyakinannya sebagai lawan. Ahok harus secara dewasa menyampaikan pernyataan maaf atas pernyataan tersebut kepada seluruh warga DKI Jakarta, baik beragama Islam maupun masyarakat selain beragama Islam.

Anies Baswedan, Mantan menteri. Beliau menyampaikan pernyataan Ahok sangat tidak tepat. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta dalam sebuah acara resmi pemerintah daerah dengan merujuk pada ayat suci Al Quran sangatlah tidak perlu, tidak relevan dan tidak tepat. Karena itu jangan justru menyalahkan orang banyak yang merasa tersinggung, namun introspeksi diri adalah langkah yang lebih bijak dan dewasa.

Menjaga tenun kebhinnekaan jadi berat, sulit dan rumit jika ada pihak yang terus-menerus mengancam dengan pernyataan-pernyataan tak sensitif dan tak menghormati. Ikhtiar banyak orang yg berusaha merawat kedamaian itu jadi dicerai oleh ucapan tak sensitif dan tindakan tak patut.

Kompas.com menuliskan himbauan itu disampaikan oleh ketua DPR RI, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, keanggotaan DPR merupakan perwakilan rakyat yang diutus oleh rakyat. Menyebutkan ketua DPR dalam berita ini merupakan bentuk gambaran otoritas kekuasaan yang ada dalam lembaga perwakilan masyarakat, meskipun tidak semua anggota DPR menyetujui apa yang disampaikan pimpinannya.

Analisis **Tematik**, tema yang terdapat dalam berita menunjukkan dukungan terhadap Ahok. *Kompas.com* mengutip pernyataan dari ketua DPR RI, Ade Komarudin. Pernyataan ini menyampaikan tentang himbauan untuk umat islam menahan diri. Kompas menuliskan pernyataan Ketua DPR RI Ade Komarudin yang mengimbau kepada seluruh tokoh masyarakat agar menahan diri dalam memberikan pernyataan terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama.

Ketua DPR mengharapkan bahwa pernyataan-pernyataan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian, karena pasca pidato Ahok yang mengucapkan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 waktu melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, menimbulkan berbagai reaksi dari umat islam dan beberapa tokoh-tokoh Nasional.

Pernyataan ini disampaikan pasca beberapa aksi yang dilakukan oleh umat islam serta rencana aksi besar-besaran umat islam pada tanggal 11 November 2016 atau disebut dengan aksi 411, yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki TJahaja Purnama untuk dihukum atas dugaan penistaan agama. *Kompas.com* memframe bahwa aksi-aksi yang dilakukan umat islam yang menuntut Ahok dipenjara, merupakan upaya yang akan menimbulkan ketegangan di masyarakat.

Hal yang sama juga dituliskan *Kompas.com* pada tema berikutnya, berita ini menuliskan pernyataan Ade Komarudin, selaku ketua DPR yang merasa khawatir atas rencana aksi unjuk rasa "Aksi Bela Islam" yang akan digelar di depan Istana Negera pada Jumat (4/11/2016). Menurut Ade, unjuk rasa itu rawan didomplengi kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan.

Dengan alasan, pada aksi 411 nanti ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali," kata dia. Politisi Partai Golkar itu menyatakan, setiap tokoh masyarakat berkewajiban menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Untuk itu, ia meminta, agar mereka dapat bijak dalam bersikap.

Pada tema berikutnya *Kompas.com* menuliskan bahwa yang disampaikan Ahok pada pidatonya di Kepulauan Seribu, bukanlah penistaan terhadap agama, melainkan pada saat Ahok melakukan kunjungan dan menyampaikan pidato di depan warga pada saat itu, sebenarnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51 pada Al Quran.

Analisis **Retoris**, dari beberapa pilihan kata atau kalimat yang dituliskan *Kompas.com* masih tetap konsisten menunjukkan dukungannya terhadap Ahok. Bentuk dukungan itu bisa terlihat saat *Kompas.com* menuliskan himbauan Ketua DPR RI Ade Komarudin kepada seluruh tokoh masyarakat agar menahan diri dalam memberikan pernyataan terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama.

Himbauan ini disampaikan menyusul maraknya aksi damai umat islam yang menuntut Ahok atas dugaan penistaan agama, bahkan pada aksi besar-besaran yang dilakukan umat islam pada tanggal 4 November,

menurut informasi akan diikuti jutaan umat muslim dari berbagai daerah. Serta aksi ini juga akan diikuti oleh beberapa tokoh nasional.

Pilihan kata “himbauan untuk menahan diri kepada seluruh tokoh masyarakat dalam memberikan pernyataan terkait ucapan Ahok” yang dipakai *Kompas.com*, merupakan upaya untuk meminimalisir pengaruh umat islam yang lebih banyak untuk mengikuti aksi 411. Peran para tokoh untuk membangkitkan semangat umat islam untuk menuntut Ahok agar dipidana atas dugaan penistaan agama yang dilakukan akan sangat berpengaruh.

Pilihan kata berikutnya yang dipakai *Kompas.com* adalah terdapat dalam kalimat rencana unjuk rasa organisasi kemasyarakatan pada 4 November 2016 itu terkait pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Saat itu, Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 51 pada Al Quran.

Kompas.com menggunakan kalimat bahwa Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari kalimat ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pernyataan yang menyinggung surah Al-Maidah 51 apalagi sampai kepada tindakan penistaan agama, jika ada seorang calon kepala daerah yang tidak memaksa warganya untuk memilihnya, itu tindakan yang sangat fair bagi seorang petarung, tidak ada tindakan otoriter meskipun yang bersangkutan merupakan seorang *incumbent*.

Kemudian pada kalimat yang berkaitan dengan surah Al-Maidah 51, *Kompas.com* tidak menuliskan pernyataan Ahok yang menyebutkan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, namun dalam kalimat ini disebutkan hanya mengutip surat Al-Maidah ayat 51 pada Al Quran.


Makna mengutip tentu berbeda dengan dibohongi, mengutipkan ayat Al-Qur'an berarti menjadikan ayat itu sebagai dasar dalam menyampaikan sesuatu.

Tabel 4.8 Frame Kompas.com, 30 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Headline tentang pernyataan-pernyataan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat harus dihindari. Sebaliknya, tokoh-tokoh politik harus memberikan pernyataan yang menciptakan kedamaian. <i>Kompas.com</i> memframe bahwa terkait rencana aksi yang akan dilakukan merupakan upaya yang dapat membuat negara ini menjadi ricuh, karena aksi besar-besaran yang rencananya akan dilakukan oleh umat muslim pada tanggal 4 November 2016 mendatang, tidak hanya diikuti oleh organisasi islam tertentu melainkan diikuti dari berbagai unsur masyarakat, seperti masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama dan bahkan para politisi aktif.</p> <p>Aksi 411 merupakan demo besar-besaran terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama beberapa waktu lalu. Selain ormas Islam dari Jabodetabek, aksi ini juga diikuti massa dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti beberapa kota di Jawa, dari Medan, Makassar, Palembang dan masih banyak lagi. Adapun aksi ini juga akan diikuti ratusan ulama, dai-dai kondang, serta tokoh-tokoh ormas Islam dan lainnya.</p> <p><i>Kompas.com</i> menjadikan politikus partai golkar, Ade Komarudin sebagai sumber berita ini, dalam keterangannya politikus ini mengaku khawatir atas</p>

	rencana aksi unjuk rasa "Aksi Bela Islam" yang akan digelar di depan Istana Negera pada Jumat (4/11/2016). Menurutnya, unjuk rasa itu rawan didomplengi kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan. Ade takut ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali.
Skrip	<p>Berita ini menuliskan tentang himbauan yang disampaikan Ketua DPR supaya seluruh tokoh menahan diri terkait ucapan Ahok. Seuruh tokoh yang dimaksud adalah mereka yang tergabung kedalam kelompok yang menganggap bahwa pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 telah menistakan agama, tokoh-tokoh ini adalah mereka yang kerap memberikan komentarnya di depan publik terkait dengan pernyataan Ahok</p> <p><i>Kompas.com</i> menuliskan himbauan itu disampaikan oleh ketua DPR RI, DPR merupakan lembaga tinggi negara yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, keanggotaan DPR merupakan perwakilan rakyat yang diutus oleh rakyat. Menyebutkan ketua DPR dalam berita ini merupakan bentuk gambaran otoritas kekuasaan yang ada dalam lembaga perwakilan masyarakat, meskipun tidak semua anggota DPR menyetujui apa yang disampaikan pimpinannya</p>
Tematik	Tema yang terdapat dalam berita menunjukkan dukungan terhadap Ahok. <i>Kompas.com</i> mengutip

	<p>pernyataan dari ketua DPR RI, Ade Komarudin. Pernyataan ini menyampaikan tentang himbauan untuk umat islam menahan diri. Kompas menuliskan pernyataan Ketua DPR RI Ade Komarudin yang mengimbau kepada seluruh tokoh masyarakat agar menahan diri dalam memberikan pernyataan terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama.</p> <p>Hal yang sama juga dituliskan <i>Kompas.com</i> pada tema berikutnya, berita ini menuliskan pernyataan Ade Komarudin, selaku ketua DPR yang merasa khawatir atas rencana aksi unjuk rasa "Aksi Bela Islam" yang akan digelar di depan Istana Negara pada Jumat (4/11/2016). Menurut Ade, unjuk rasa itu rawan didomplengi kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan.</p> <p>Dengan alasan, pada aksi 411 nanti ada ormas yang anggotanya diperalat oleh kelompok-kelompok tertentu dan masuk skema sebagai martir yang bertujuan membuat negara semakin tidak terkendali," kata dia. Politisi Partai Golkar itu menyatakan, setiap tokoh masyarakat berkewajiban menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat. Untuk itu, ia meminta, agar mereka dapat bijak dalam bersikap.</p>
Retoris	<p>dari beberapa pilihan kata atau kalimat yang dituliskan <i>Kompas.com</i> masih tetap konsisten menunjukkan dukungannya terhadap Ahok. Bentuk dukungan itu bisa terlihat saat <i>Kompas.com</i> menuliskan himbauan</p>

	<p>Ketua DPR RI Ade Komarudin kepada seluruh tokoh masyarakat agar menahan diri dalam memberikan pernyataan terkait ucapan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama</p> <p><i>Kompas.com</i> menggunakan kalimat bahwa Ahok menyatakan tidak memaksa warga untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari kalimat ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pernyataan yang menyinggung surah Al-Maidah 51 apalagi sampai kepada tindakan penistaan agama, jika ada seorang calon kepala daerah yang tidak memaksa warganya untuk memilihnya, itu tindakan yang sangat fair bagi seorang petarung, tidak ada tindakan otoriter meskipun yang bersangkutan merupakan seorang <i>incumbent</i>.</p> <p>Kemudian pada kalimat yang berkaitan dengan surah Al-Maidah 51, <i>Kompas.com</i> tidak menuliskan pernyataan Ahok yang menyebutkan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, namun dalam kalimat ini disebutkan hanya mengutip surat Al-Maidah ayat 51 pada Al Quran. Makna mengutip tentu berbeda dengan dibohongi, mengutipkan ayat Al-Qur'an berarti menjadikan ayat itu sebagai dasar dalam menyampaikan sesuatu.</p>
--	---

9) Kompas.com, 4 November 2016: Aksi Damai 411 jadi Trending Topik Dunia dengan tagar #Aksi411

Analisis **Siktaksis**, berita ini menyampaikan aktifitas aksi 411 yang dilakukan umat islam di Jakarata untuk menuntut Ahok atas dugaan penistaan agama, *Kompas.com* menuliskan sisi lain dari aksi 411 serta meninggal substan aksi yang menuntut Ahok atas penistaan agama. Aksi ini diikuti jutaan umat muslim, tidak hanya diikuti oleh umat muslim yang berdomisili di Jakarta namun aksi mampu memanggil kehadiran dari umat muslim dari berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan dan tuntutan yang sama, yaitu menuntut Ahok agar dihukum atas dugaan penistaan agama.

Pada lead berita, *Kompas.com* menuliskan hal yang lain dari substansi aksi 411, dengan menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa di Jakarta pada Jumat (4/11/2016), tanda pagar #AksiDamai411 di Twitter pun menjadi trending topic teratas di Indonesia sekaligus tingkat dunia (Trending Topic World Wide).

Istilah trending topic ini merupakan istilah pada topik yang sedang ramai dibahas di Twitter, bisa secara global di dunia atau di negara sendiri, tergantung pengaturan anda untuk menampilkan trending topik global atau regional. *Kompas.com* menceritakan tentang aksi 4 November merupakan aksi yang sedang ramai dibahas di Twitter, meskipun *Kompas.com* secara eksplisit tidak menyebutkan apa alasan dan apa yang dibahas terkait dengan aksi 411 sehingga menjadi ternding topic teratas di Twitter.

Analisis **Skrip**, *Kompas.com* menyajikan informasi tentang aksi umat islam tanggal 4 November 2016. Informasi yang disajikan adalah aksi damai 411 masuk teratas di trending topic Dunia. *Kompas.com* merilis informasi iniberdasarkan pantauan kompastekno, pada pukul

14.20 WIB. Aksi 411 menjadi fenomena yang dibahas terbanyak per tanggal 4 November 2016. Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).

Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet. Di Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.

Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di Twitter, 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan penggunaan Twitter umumnya berlangsung saat terjadinya peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna Twitter mengirimkan lebih dari 340 juta kicauan per hari, dan Twitter menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Hal ini menyebabkan posisi Twitter naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh dua.[16]

Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. Twitter juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran.

Kompas.com ingin menggambarkan kepada masyarakat bahwa aksi tanggal 4 November yang dilakukan umat muslim atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, menjadi topik yang banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. *Kompas.com* memframe bahwa aksi 411 merupakan fenomena banyak dibahas oleh pengguna akun twitter sehingga menjadi trending topic dunia. Namun dalam uraian beritanya *Kompas.com* menampilkan beberapa tweet dari pengguna twitter yang menunjukkan sisi isu sara dan harapan tidak anarkis dari pelaksanaan aksi 411 ini.

Ada beberapa tweet yang dikutip oleh *Kompas.com*, misalnya, (@anggitfauziah) yang menulis “Menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai isu sara, semoga selalu damai saudara muslim ku dan smoga tidak hujan #AksiDamai411,” #DamaiDalamAksi, Semoga #AksiDamai411 berjalan lancar dan santun. Tidak bertindak anarkis dan berlebihan, dan tweet ats nama @abenkjunot. Yang menuliskan “Semoga #AksiDamai411 berjalan lancar dan santun. Tidak bertindak anarkis dan berlebihan, #DamaiDalamAksi,” kicau akun lain, atas nama Abenk Junot.

Analisis **Tematik**, dari unsur tematik berita ini menjelaskan tentang sebuah topik yang sedang tren, namun tidak membahas substansi dari topik yang sedang tren itu, tema ini hanya menceritakan kejadian berdasarkan tingkat kicauan *netizen* di Twitter yang memberikan tanggapan terkait aksi unjuk rasa yang sedang berlangsung. Isinya mulai dari dukungan, kritik, hingga harapan agar aksi tetap berjalan damai.

Tema yang ditampilkan dalam berita ini lebih banyak melihat dari sisi tanggapan miring yang disampaikan oleh para pengguna akun twitter, ada yang menuliskan bahwa aksi 411 menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai isu sara, kemudian berharap semoga selalu damai dan smoga tidak hujan. Tema ini menunjukkan bahwa aktifitas aksi 411 merupakan bagian dari isu sara.

SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Dalam pengertian lain SARA dapat disebut Diskriminasi yang merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain.

Dalam tema lain *Kompas.com* menuliskan bahwa demo 4 November 2016 dilakukan untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menistakan agama. *Kompas.com* menuliskan Ahok yang dianggap menistakan agama, kalimat ini bermakna bahwa Ahok hanya dituduh oleh kelompok tertentu telah menistakan agama.

Analisis **Retoris**, judul dalam berita yang digunakan menunjukkan pilihan alternatif dari aktifitas aksi 411 yang dilakukan umat Islam, aksi ini merupakan aksi untuk menuntut Ahok atas dugaan penistaan agama yang dilakukan pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Karena unjuk rasa menuntut pengadilan atas Ahok pada Jumat (4/11) lalu mampu menyedot lebih dari sejuta peserta. Dengan jumlah massa terbesar sepanjang sejarah dan durasi yang panjang, bisa dikatakan sukses. Dengan tujuan dan keinginan yang sama yaitu menuntut agar Ahok dihukum, maka *Kompas.com* dalam menuliskan beritanya hanya mengambil sisi yang tidak ada hubungannya dengan tuntutan massa yang diberi judul '#AksiDamai411 Teratas di "Trending Topic" Dunia'.

Selain itu, *Kompas.com* mengutip beberapa tweet dari pengguna akun Twitter yang hanya berisi isu sara, kritik, misalnya @anggitfauziah yang menulis "Menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai isu sara, semoga selalu damai saudara muslimku dan semoga tidak hujan

#AksiDamai411,” #DamaiDalamAksi, Semoga #AksiDamai411 berjalan lancar dan santun. Tidak bertindak anarkis dan berlebihan, dan tweet ats nama @abenkjnot. Yang menuliskan “Semoga #AksiDamai411 berjalan lancar dan santun. Tweet atas nama atas nama Abenk Junot menuliskan “Tidak bertindak anarkis dan berlebihan, #DamaiDalamAksi,”.

Kutipan tweet yang diambil oleh *Kompas.com*, hanya mereka yang berbicara tentang proses aksi yang berisi kritik, isu sara dan harapan. Tidak mengutip tweet-tweet yang berisi harapan agar Ahok segera diproses hukum atau semoga setelah aksi pihak kepolisian segera menentukan status hukum untuk Ahok. Pilihan-pilihan yang ditampilkan oleh *Kompas.com* dalam berita ini merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada Ahok.

Tabel 4.9 Frame Kompas.com, 4 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Berita ini menyampaikan aktifitas aksi 411 yang dilakukan umat islam di Jakarata untuk menuntut Ahok atas dugaan penistaan agama, <i>Kompas.com</i> menuliskan sisi lain dari aksi 411 serta meninggalkan substansi aksi yang menuntut Ahok atas penistaan agama. Aksi ini diikuti jutaan umat muslim, tidak hanya diikuti oleh umat muslim yang berdomisili di Jakarta namun aksi mampu memanggil kehadiran dari umat muslim dari berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan dan tuntutan yang sama.</p> <p>Pada lead berita, <i>Kompas.com</i> menuliskan hal yang lain dari substansi aksi 411, dengan menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa di Jakarta pada Jumat (4/11/2016), tanda pagar #AksiDamai411 di Twitter</p>

	<p>pun menjadi trending topic teratas di Indonesia sekaligus tingkat dunia (Trending Topic World Wide).</p>
Skrip	<p><i>Kompas.com</i> menyajikan informasi tentang aksi umat islam tanggal 4 November 2016. Informasi yang disajikan adalah aksi damai 411 masuk teratas di trending topic Dunia. Kompas.com merilis informasi ini berdasarkan pantauan kompastekno, pada pukul 14.20 WIB. Aksi 411 menjadi fenomena yang dibahas terbanyak per tanggal 4 November 2016. Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet).</p> <p><i>Kompas.com</i> ingin menggambarkan kepada masyarakat bahwa aksi tanggal 4 November yang dilakukan umat muslim atas dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, menjadi topik yang banyak dibahas oleh masyarakat Indonesia dan bahkan dunia. Kompas.com memframe bahwa aksi 411 merupakan fenomena banyak dibahas oleh pengguna akun twitter sehingga menjadi trending topic dunia.</p>
Tematik	<p>Tema yang ditampilkan dalam berita ini lebih banyak melihat dari sisi tanggapan miring yang disampaikan oleh para pengguna akun twitter, ada yang menuliskan bahwa aksi 411 menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai isu sara, kemudian berharap semoga selalu damai dan smoga tidak hujan. Tema ini menunjukkan bahwa aktifitas aksi 411 merupakan bagian dari isu</p>

	<p>sara.</p> <p>Dalam tema laian Kompas.com menuliskan bahwa demo 4 November 2016 dilakukan untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap menistakan agama. Kompas.com menuliskan Ahok yang dianggap menistakan agama, kalimat ini bermakna bahwa Ahok hanya dituduh oleh kelompok tertentu telah menistakan agama.</p>
Retoris	<p><i>Kompas.com</i> mengutip beberapa tweet dari pengguna akun twitter yang hanya berisi isu sara, kritik, misalnya @anggitfauziah yang menulis “Menjadi pelajaran bagi semua pihak mengenai isu sara, semoga selalu damai saudara muslimku dan semoga tidak hujan #AksiDamai411,” #DamaiDalamAksi, Semoga #AksiDamai411 berjalan lancar dan santun. Tidak bertindak anarkis dan berlebihan, dan tweet ats nama @abenkjunot. Yang menuliskan “Semoga #AksiDamai411 berjalan lancar dan santun. Kutipan tweet yang diambil oleh <i>Kompas.com</i>, hanya mereka yang berbicara tentang proses aksi yang berisi kritik, isu sara dan harapan. Tidak mengutip tweet-tweet yang berisi harapan agar Ahok segera diproses hukum atau semoga setelah aksi pihak kepolisian segera menentukan status hukum untuk Ahok. Pilihan-pilihan yang ditampilkan oleh Kompas.com dalam berita ini merupakan bentuk dukungan yang diberikan kepada Ahok.</p>

10) Kompas.com, 8 November 2016: Menurut Hamka Haq tidak ada penistaan agama yang dilakukan Ahok

Analisis **Siktaksis**, headline berita terdapat pada judul yang ditampilkan, disaat kasus ini sedang hangat dan mulai diperiksa oleh penyidik dengan memanggil beberapa ahli, *Kompas.com* terlihat mengambil kesempatan untuk mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Hamka Haq, yang merupakan saksi ahli atas dugaan kasus penistaan agama. Hamka Haq merupakan saksi ahli yang diambil oleh tim kuasa hukumnya Ahok, dan hampir bisa dikatakan pasti bahwa yang bersangkutan akan menyampaikan kesaksian yang bisa meringankan Ahok.

Sebenarnya cukup banyak saksi ahli yang dipanggil oleh penyidik Bareskrim, dari beberapa saksi ahli itu ada yang menyatakan Ahok telah menistakan agama dan ada juga yang menyatakan bahwa Ahok tidak menistakan agama. Pilihan *Kompas.com* untuk mengutip pernyataan dari Hamka Haq sebagai saksi ahli dari pihak Ahok, merupakan bentuk dukungan yang dilakukan *Kompas.com* terhadap Ahok. Ada banyak saksi ahli yang dipanggil penyidik polri kemudian memberikan keterangan bahwa Ahok telah menistakan agama, namun *Kompas.com* tidak menuliskan kesaksian itu sebagai berita.

Sumber berita yang pakai *Kompas.com* pada berita ini adalah Prof. Dr. H. Hamka Haq, beliau adalah Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Jawa Timur II. Hamka Haq adalah politisi senior PDIP dan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap Islam dari PDIP. Dari latar belakang yang sandang seorang Hamka Haq, maka sangatlah wajar jika beliau menyampaikan jika Ahok tidak melakukan penistaan agama terkat dengan pidato yang disampaikan di depan warga Kepulauan Seribu untuk melakukan kunjungan kerja.

Meskipun sebelumnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan pandangannya yang menyimpulkan bahwa pernyataan Ahok termasuk kedalam kategori menista agama atau menista ulama, namun sebagai anggota penasehat MUI Hamka Haq bersikap laian. Saat menyampaikan kesaksiannya di persidangan Hamka Haq menjelaskan bahwa gubernur adalah bagian dari pemerintah, sehingga MUI seharusnya memandangnya sebagai teman, bukan lawan. Menurutnya MUI dibentuk sebagai mitra pemerintah di era Orde Baru dan fatwa-fatwa yang dibuat berkaitan dengan kepentingan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan gubernur, MUI seharusnya mengambil tabayyun, apa sih salahnya? Kalau sudah memandang sebagai rival, itu beda. Lain niatnya,” kata Hamka. Untuk memperkuat argumentasinya, Hamka mengambil contoh Lia Eden dan Ahmadiyah yang dipanggil MUI untuk proses tabayyun. Sedangkan di artikel saya dulu yang mencontohkan bendahara MUI yang ditangkap KPK, tapi MUI mengeluarkan statement akan melakukan proses tabayyun dulu pada yang bersangkutan, dan sayangkan Ahok tidak dibegitukan.

Dalam pidana Islam itu ada praduga tidak bersalah. Nah, seseorang kalau melakukan sesuatu, tidak hanya diukur dari kesengajaannya, tapi diukur juga dari mengapa dia lakukan itu, tidak bisa dijawab oleh video,” kata Hamka. Video hanya menunjukkan perbuatan, tapi tidak menjelaskan maksud di balik itu. “Track record mengantarkan kita untuk mengambil kesimpulan . Tapi kalau track record bertentangan dengan yang biasa dilakukan, harus dilakukan tabayyun.

Analisis **Skrip**, berita ini menjelaskan tentang polemik dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok terkait dengan pidatonya tentang dibohongi surah Al-Maidah 51, dalam judul berita ini *Kompas.com* menjelaskan bahwa Ahok tidak menistakan agama melalui judul berita yang mengutip penjelasan dari prof. Hamka Haq. Dari unsur *Who* teks

berita ini menjawab yaitu politisi senior PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPR-RI periode 2014-2019 (PDIP) mewakili Dapil Jawa Timur II. juga sebagai Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap Islam dari PDIP , Prof. Hamka Haq.

Kemudian pada unsur *What*, berita ini menjelaskan pernyataan dari Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hamka Haq, beliau menilai tidak ada tindak penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51.

Menurut Hamka, konteks saat Ahok menyebut surat Al-Maidah ayat 51 dilakukan dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan di Kepulauan Seribu. Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain. Tidak ada penistaan agama karena konteks ucapan itu adalah konteks kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan, kunjungan pada tanggal 27 September ke Kepulauan Seribu, yang dilakukan Ahok bertujuan untuk mensosialisasikan program pengembangan perikanan yang dapat membawa banyak manfaat terhadap warga.

Ahok juga menyampaikan hal-hal bagaimana memajukan warga setempat untuk mendapat keuntungan dan bisa umrah dan lain-lain kalau program pengembangan perikanan berhasil. Selain itu Hamka juga menuturkan, tuduhan menghina ulama yang dialamatkan ke Ahok juga sulit untuk dibuktikan. Pasalnya, saat itu Ahok tidak menyebut pihak yang disebut melakukan pembohongan dengan menggunakan surat Al-Maidah ayat 51. "Dia (Ahok) katakan dibohongi. Jadi, tidak ada kata ulama di situ, tidak ada juga menyebut bahwa siapa yang memakai itu. Artinya, orang yang tidak jelas siapa subyek, siapa obyeknya.

Analisis **Tematik**, tema-tema yang terkandung di dalam teks pada berita yang berjudul Hamka Haq: Tidak Ada Penistaan Agama yang Dilakukan Ahok, menunjukkan bentuk dukungan yang dilakukan oleh *Kompas.com* terhadap Ahok. Diantara tema yang ditampilkan adalah “tidak ada tindak penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51”. Tema ini ditulis dalam berita ini berdasarkan pendapat yang disampaikan dari sumber berita, sumber beritanya yang diambil *Kompas.com* dalam berita ini adalah Prof. Hamka Haq.

Menurut Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hamka Haq, tidak ada tindak penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Karena konteks saat Ahok menyebut surat Al-Maidah ayat 51 dilakukan dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan di Kepulauan Seribu. Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain.

Tema berikutnya terlihat pada kalimat yang menuliskan bahwa Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain. Jika ini yang dijadikan ukuran, maka bisa dikatakan pasti Ahok tidak melakukan penistaan agama, karena semua orang mengetahui kegiatan yang dilakukan Ahok merupakan kunjungan kerja dalam rangka kerjasama budidaya ikan, bukan menyiarkan agama lain.

Menyiarkan agama lain ditempat orang yang sudah memiliki keyakinan agama merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Hal tersebut mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

Negeri ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama, bahwa Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dengan melakukan ibadah menurut agamanya.”

Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain dengan cara Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, pakaian, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan tersebut. Menyebarkan pamflet, majalah, bulletin, buku-buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan lainnya kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama yang lain. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk/menganut agama yang lain.

Analisis **Retoris**, kalimat dalam berita ini memberikan penekanan pada kata tidak ada penistaan agama yang dilakukan Ahok, meskipun ini adalah pendapat pribadi yang disampaikan oleh saksi dari pihak Ahok, namun sebagai media online yang terlihat pro kepada Ahok, penekanan pada kata tidak ada penistaan agama yang dilakukan Ahok cukup efektif untuk memberikan frame bahwa Ahok berada posisi yang benar, meskipun sebenarnya alasan-alasan yang dikemukakan agak kurang tepat.

Alasan yang dikemukakan adalah bahwa konteks saat Ahok menyebut surat Al-Maidah ayat 51 dilakukan dalam rangka sosialisasi program budidaya perikanan di Kepulauan Seribu. Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk

menyiarkan ajaran agama lain. Jadi, dengan alasan bahwa konteknya tidak menyiarkan agama lain, maka seseorang bisa menyampaikan apa saja terkait dengan agama lain.

Argumen yang disampaikan sebagai alasan pembelaan terhadap Ahok terkesan lebih menyederhanakan kategori penistaan agama itu kepada kontek yang dilakukan, misalnya yang terjadi pada penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto dipenjara selama empat tahun enam bulan, terkait survei untuk tabloid Monitor dengan lebih 33.000 kartu pos dari pembaca. Dalam survei tokoh pilihan pembaca tersebut, Presiden Soeharto kala itu berada di tempat pertama sementara Nabi Muhammad di urutan ke-11. Ini bukan dalam kontek menyiarkan agama lain, tapi kenyataan waktu yang bersangkutan tetap masuk kasus penodaan agama dan dihukum.

Tabel 4.10 Frame Kompas.com, 8 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>headline berita terdapat pada judul yang ditampilkan, disaat kasus ini sedang hangat dan mulai diperiksa oleh penyidik dengan memanggil beberapa ahli, Kompas.com terlihat mengambil kesempatan untuk mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Prof. Hamka Haq, yang merupakan saksi ahli atas dugaan kasus penistaan agama. Hamka Haq merupakan saksi ahli yang diambil oleh tim kuasa hukumnya Ahok, dan hampir bisa dikatakan pasti bahwa yang bersangkutan akan menyampaikan kesaksian yang bisa meringankan Ahok.</p> <p>Sumber berita yang pakai Kompas.com pada berita ini adalah Prof. Dr. H. Hamka Haq, beliau adalah Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai</p>

	<p>Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mewakili Dapil Jawa Timur II. Hamka Haq adalah politisi senior PDIP dan Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap Islam dari PDIP. Dari latar belakang yang sandang seorang Hamka Haq, maka sangatlah wajar jika beliau menyampaikan jika Ahok tidak melakukan penistaan agama.</p>
Skrip	<p>Berita ini menjelaskan tentang polemik dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok terkait dengan pidatonya tentang dibohongi surah Al-Maidah 51, dalam judul berita ini Kompas.com menjelaskan bahwa Ahok tidak menistakan agama melalui judul berita yang mengutip penjelasan dari prof. Hamka Haq. Dari unsur Who teks berita ini menjawab yaitu politisi senior PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPR-RI periode 2014-2019 (PDIP) mewakili Dapil Jawa Timur II. juga sebagai Ketua Umum Baitul Muslimin Indonesia, organisasi sayap Islam dari PDIP , Prof. Hamka Haq.</p> <p>Kemudian pada unsur What, bertita ini menjelaskan pernyataan dari Anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hamka Haq, beliau menilai tidak ada tindak penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51.</p>
Tematik	<p>Diantara tema yang terkandung di dalam teks pada berita yang berjudul Hamka Haq: Tidak Ada Penistaan Agama yang Dilakukan Ahok, menunjukkan bentuk dukungan yang dilakukan oleh Kompas.com terhadap Ahok. Diantara tema yang ditampilkan adalah “tidak</p>

	<p>ada tindak penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menyinggung surat Al-Maidah ayat 51”. Tema ini ditulis dalam berita ini berdasarkan pendapat yang disampaikan dari sumber berita, sumber beritanya yang diambil Kompas.com dalam berita ini adalah Prof. Hamka Haq.</p> <p>Tema berikutnya terlihat pada kalimat yang menuliskan bahwa Ahok baru bisa dituduh menista agama apabila kedatangannya itu bertujuan untuk menyiarkan ajaran agama lain. Jika ini yang dijadikan ukuran, maka bisa dikatakan pasti Ahok tidak melakukan penistaan agama, karena semua orang mengetahui kegiatan yang dilakukan Ahok merupakan kunjungan kerja dalam rangka kerjasama budidaya ikan, bukan menyiarkan agama lain</p>
Retoris	<p>Kalimat dalam berita ini memberikan penekanan pada kata tidak ada penistaan agama yang dilakukan Ahok, meskipun ini adalah pendapat pribadi yang disampaikan oleh saksi dari pihak Ahok, namun sebagai media online yang terlihat pro kepada Ahok, penekanan pada kata tidak ada penistaan agama yang dilakukan Ahok cukup efektif untuk memberikan frame bahwa Ahok berada posisi yang benar, meskipun sebenarnya alasan-alasan yang dikemukakan agak kurang tepat.</p> <p>Argumen yang disampaikan sebagai alasan pembelaan terhadap Ahok terkesan lebih menyederhanakan kategori penistaan agama itu kepada konteks yang dilakukan.</p>

11) Kompas.com, 10 November 2016: Jokowi menyampaikan kepada Ulama jika telah menegur Kapolri yang tafsirkan pernyataan Ahok.

Analisis **Siktaksis**, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok pada saat mealukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu tanggal 27 September membuat situasi keketegangan di masyarakat sedikit meningkat. Hal itu dikarenakan ada kelompok yang menganggap bahwa pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 telah menistakan agama dan bahkan ada kelompok yang menganggap pernyataan Ahok itu tidak menistakan agama. Pro dan kontra terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok tidak hanya terjadi pada masyarakat sipil, melainkan tindakan pro dan kontra juga ditunjukkan oleh para politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat bahkan pihak penegak hukum.

Kompas.com menuliskan judul berita pada edisi 10 November 2016 yang berjudul “ Kepada Ulama , Jokowi mengaku telah tegur Kapolri yang tafsirkan pernyataan Ahok. Dari judul yang ditampilkan dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa instansi kepolisian telah menunjukkan ketidak netralannya dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, karena telah melakukan penafsiran terhadap pernyataan Ahok. Sebagai lembaga yang berdiri sebagai penentu keputusan tentu tidak pantas untuk memberikan tafsiran itu, karena apapun tafsiran yang disampaikan, baik itu dikatakan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama ataupun tidak, maka akan tetap dipesepekan bahwa Kepolisian tidak netral dalam menangani kasus ini.

Pada kasus pidato Ahok yang menyatakan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 Kapolri memberikan tafsiran yang menunjukkan dukungan kepada Ahok. Kapolri menyampaikan bahwa ada perbedaan antara pernyataan "dibohongi pakai Al-Maidah 51" dan "dibohongi Al-Maidah 51". Pernyataan yang disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu menggunakan kata "pakai", sedangkan transkrip yang ditulis Buni Yani di akun Facebook-nya menghilangkan kata "pakai".

Kapolri melanjutkan bahwa "Kalau yang pertama 'dibohongi Al-Maidah 51' itu berarti yang dikatakan bohong adalah ayatnya, tetapi kalau 'dibohongi pakai Al-Maidah 51' berarti bukan ayatnya, tetapi orangnya. Jangan percaya kepada orang," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan. Pernyataan ini kemudian menimbulkan kegaduhan dimasyarakat karena menganggap kepolisian tidak netral dan dianggap membela Ahok.

Analisis **Skrip**, berita ini diberi judul “Kepada Ulama, Jokowi Mengaku Tegur Kapolri yang Tafsirkan Pernyataan Ahok”, pada unsur *Who* isi teks berita ini menjelaskan tentang teguran Presiden kepada Kapolri atas tafsiran yang dilakukan terhadap pernyataan Ahok. Yang memberi teguran adalah Presiden Joko Widodo, yang ditegur Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Teguran ini menurut pengakuan Presiden telah dilakukannya, meskipun tidak disampaikan tegurannya dalam bentuk lisan atau dalam bentuk teguran tertulis. Jika dalam bentuk tertulis maka ini bisa disebut sebagai surat peringatan presiden, artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan kenegaraan, namun jika teguran dalam bentuk lisan, bisa saja itu hanya berbentuk nasehat dan lain-lain.

Kemudian pada unsur *What*, berita ini menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo mengaku sudah menegur Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian karena menafsirkan pernyataan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengutip ayat Al-Qur'an . Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para ulama yang diundang ke Istana Negara. Pengakuan Presiden jika Kapolri sudah mendapat teguran disampaikan para Ulama yang mengahdiri undangan Presiden di Istana Negara, diantaranya Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Serang, Sidrajat Ardani, beliau mengatakan, awalnya dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu ia menyampaikan kritik terhadap Kapolri. Ia menilai, pernyataan Kapolri tersebut justru membuat netralitas kepolisian dipertanyakan dalam mengusut kasus Ahok.

Sidrajat Ardani mengatakan, para ulama yang hadir ke Istana Presiden sudah secara lantang menyampaikan kepada Bapak Presiden kegaduhan setelah 4 November adalah aparat keamanan, terutama polisi mendahului menafsirkan kata 'pakai', Menurut Sidrajat, Jokowi langsung menegur Tito atas pernyataannya yang disampaikan ke media itu. Jokowi mengakui pernyataan Tito memang tidak tepat. Hal serupa disampaikan pimpinan pondok pesantren Salafiyah Banten Matin Sarqowi. Ia mengatakan, seharusnya kepolisian tidak sembarangan menyampaikan pernyataan yang mendahului. Karena itu bukan ranahnya kepolisian. Ranah polisi adalah penyelidikan dan penyidikan.

Analisis **Tematik**, tema dalam berita ini menunjukkan kewenangan presiden yang telah menegur Kapolri atas tafsiran yang disampaikan sebelumnya, tema ini ingin menunjukkan bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga kepolisian ini telah diselesaikan oleh presiden, sehingga kegaduhan dan anggapan bahwa lembaga kepolisian tidak netral dalam hal penanganan kasus Ahok ini dianggap sudah selesai.

Teguran yang dialamatkan kepada Kapolri atas tafsiran Kapolri sebelumnya mengatakan, ada perbedaan antara pernyataan "dibohongi pakai Al-Maidah 51" dan "dibohongi Al-Maidah 51". Pernyataan yang disampaikan Ahok di Kepulauan Seribu menggunakan kata "pakai", sedangkan transkrip yang ditulis Buni Yani di akun Facebook-nya menghilangkan kata "pakai". "Kalau yang pertama 'dibohongi Al-Maidah 51' itu berarti yang dikatakan bohong adalah ayatnya, tetapi kalau 'dibohongi pakai Al-Maidah 51' berarti bukan ayatnya, tetapi orangnya. Jangan percaya kepada orang," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan.

Langkah masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok lewat jalur hukum dibandingkan menggunakan cara-cara nonhukum (baca main hakim sendiri) tentu sangat baik bagi kelangsungan kerukunan di DKI Jakarta. Fenomena ini juga harus dimaknai sebagai munculnya kepercayaan

masyarakat kita terhadap aparat hukum yang dinilainya mampu menyelesaikan masalah tersebut. Karena itu, kepercayaan masyarakat ini tidak boleh disia-siakan oleh aparat hukum. Sebagai aparat negara, polisi harus bersikap netral dan mengusut setiap laporan yang muncul dari masyarakat. Mengusut laporan dugaan pelecehan yang diduga dilakukan Gubernur Ahok ini memang cukup dilematis bagi polisi.

Umat Islam walau dalam keadaan sangat memanas suasananya namun masih tetap menyalurkan perkaranya kepada pihak penegak hukum itu menandakan betapa tinggi kesabarannya yang telah tersulut dengan perkataan Ahok yang mengusik keyakinan inti Islam yakni Al-Qur'an itu.

Dari sisi lain, berkaitan dengan akan dilangsungkannya pilkada DKI Jakarta 2017 dan si Ahok pengusik keimanan umat Islam tersebut menjadi salah satu bakal calon, maka justru yang dituntut bukannya polisi mendingkan kasusnya dengan alasan netralitas. Alasan netralitas itu justru mengandung makna di balik itu yaitu pembelaan terhadap yang berkasus. Kenapa? Karena dengan adanya mendingkan, dengan alasan apapun (kecuali alasan tepat, misalnya pelaku sudah mati, atau dinyatakan oleh psikiater bahwa dalam keadaan gila dan tidak mampu berkomunikasi sama sekali, dan semacamnya) maka sama dengan membelanya. Mendingkan orang yang seharusnya diproses hukum, berarti membelanya. Apalagi dalam masa menghadapi pilkada, maka justru lebih bisa diindikasikan bahwa itu merupakan salah satu cara membela.

Analisis **Retoris**, penggunaan kata tertentu yang dilakukan *Kompas.com* dalam berita ini masih tetap terlihat, pada edisi ini banyak media lain yang membuat judul tentang teguran yang dilakukan Presiden kepada Kapolri. *Kompas.com* membuat judul berita ini dengan judul Kepada Ulama, Jokowi Mengaku Tegur Kapolri yang Tafsirkan Pernyataan Ahok. *Kompas.com* hanya menggunakan kata “pernyataan Ahok” pada akhir kalimat dalam judul berita ini, hanya menuliskan pernyataan Ahok. Tidak diperjelaskan pernyataan Ahok yang mana atau

tentang apa, meskipun yang dimaksud adalah pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Penulisan hanya sebatas pernyataan Ahok merupakan upaya untuk melupakan tentang penistaan agama, karena Ahok dituduh menistakan agama akibat pernyataannya yang menyatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, bukan hanya karena sekedar pernyataan Ahok.

Kemudian pilihan-pilihan yang ditampilkan oleh *Kompas.com* pada berita ini juga terlihat pada gambar tampilan berita, gambar yang disajikan adalah foto Kapolri dan Panglima TNI beserta jajaran kepolisian yang sedang melakukan memeriksa pasukan usai apel kesiapsiagaan pengamanan tahapan kampanye Pilkada serentak 2017 di kawasan Monas. Tampilan ini berbeda dengan tampilan foto yang biasanya dilakukan oleh *Kompas.com* yang sesuai dengan tema berita, misalnya pada berita tentang aksi yang ditampilkan adalah foto massa, atau berita tentang pernyataan dari sumber berita yang ditampilkan adalah foto yang bersangkutan. Semestinya jika mengikuti kebiasaan dan menggambarkan judul berita, maka yang ditampilkan dalam berita ini bukanlah foto Kapolri yang sedang menjalankan tugasnya untuk apel kesiapsiagaan pengamanan tahapan kampanye Pilkada serentak 2017, karena tidak nyambung dengan judul berita yang menyampaikan “Presiden tegur Kapolri”.

Tabel 4.11 Frame Kompas.com, 10 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<i>Kompas.com</i> menuliskan judul berita pada edisi 10 November 2016 yang berjudul “ Kepada Ulama , Jokowi mengaku telah tegur Kapolri yang tafsirkan pernyataan Ahok. Dari judul yang ditampilkan dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa instansi kepolisian telah menunjukkan ketidak netralannya dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang

	<p>dilakukan Ahok, karena telah melakukan penafsiran terhadap pernyataan Ahok. Sebagai lembaga yang berdiri sebagai penentu keputusan tentu tidak pantas untuk memberikan tafsiran itu, karena apapun tafsiran yang disampaikan, baik itu dikatakan bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama ataupun tidak, maka akan tetap dipesepekan bahwa Kepolisian tidak netral dalam menangani kasus ini.</p> <p>Pada kasus pidato Ahok yang menyatakan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 Kapolri memberikan tafsiran yang menunjukkan dukungan kepada Ahok. Kapolri menyampaikan bahwa ada perbedaan antara pernyataan "dibohongi pakai Al-Maidah 51" dan "dibohongi Al-Maidah 51".</p>
Skrip	<p>Berita ini diberi judul “Kepada Ulama, Jokowi Mengaku Tegur Kapolri yang Tafsirkan Pernyataan Ahok”, pada unsur <i>Who</i> isi teks berita ini menjelaskan tentang teguran Presiden kepada Kapolri atas tafsiran yang dilakukan terhadap pernyataan Ahok. Yang memberi teguran adalah Presiden Joko Widodo, yang ditegur Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Teguran ini menurut pengakuan Presiden telah dilakukannya, meskipun tidak disampaikan tegurannya dalam bentuk lisan atau dalam bentuk teguran tertulis. Jika dalam bentuk tertulis maka ini bisa disebut sebagai surat peringatan presiden, artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan kenegaraan, namun jika teguran dalam bentuk lisan, bisa saja itu hanya berbentuk nasehat dan lain-lain.</p> <p>Kemudian pada unsur <i>What</i>, berita ini menyampaikan</p>

	<p>bahwa Presiden Joko Widodo mengaku sudah menegur Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian karena menafsirkan pernyataan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang mengutip ayat Al-Qur'an . Hal tersebut disampaikan Jokowi kepada para ulama yang diundang ke Istana Negara. Pengakuan Presiden jika Kapolri sudah mendapat teguran disampaikan para Ulama yang menghadiri undangan Presiden di Istana Negara, diantaranya Pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Serang, Sidrajat Ardani, beliau mengatakan, awalnya dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu ia menyampaikan kritik terhadap Kapolri.</p>
Tematik	<p>Tema dalam berita ini menunjukkan kewenangan presiden yang telah menegur Kapolri atas tafsiran yang disampaikan sebelumnya, tema ini ingin menunjukkan bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh lembaga kepolisian ini telah diselesaikan oleh presiden, sehingga kegaduhan dan anggapan bahwa lembaga kepolisian tidak netral dalam hal penanganan kasus Ahok ini dianggap sudah selesai.</p>
Retoris	<p><i>Kompas.com</i> membuat judul berita ini dengan judul Kepada Ulama, Jokowi Mengaku Tegur Kapolri yang Tafsirkan Pernyataan Ahok. <i>Kompas.com</i> hanya menggunakan kata “pernyataan Ahok” pada akhir kalimat dalam judul berita ini, hanya menuliskan pernyataan Ahok. Tidak diperjelaskan pernyataan Ahok yang mana atau tentang apa, meskipun yang dimaksud adalah pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Penulisan hanya sebatas</p>

	<p>pernyataan Ahok merupakan upaya untuk melupakan tentang penistaan agama, karena Ahok dituduh menistakan agama akibat pernyataannya yang menyatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, bukan hanya karena sekedar pernyataan Ahok.</p> <p>Kemudian pilihan-pilihan yang ditampilkan oleh <i>Kompas.com</i> pada berita ini juga terlihat pada gambar tampilan berita, gambar yang disajikan adalah foto Kapolri dan Panglima TNI beserta jajaran kepolisian yang sedang melakukan memeriksa pasukan usai apel kesiapsiagaan pengamanan tahapan kampanye Pilkada serentak 2017 di kawasan Monas.</p>
--	--

12) Kompas.com, 11 November 2016 : Menurut dosen Linguistik UPI Ahok Bisa Dianggap Tidak Menistakan Agama.

Analisis **Siktaksis**, headline berita ini ditunjukkan pada judul berita, berita memberikan claim bahwa Ahok bisa dianggap tidak menistakan agama apabila Ahok merujuk pada, 'Ada orang yang membohongi masyarakat pakai Surat Al-Maidah', Ahok harus bisa bertanggung jawab (membuktikan) pernyataan tersebut. Sebenarnya Lafal dibohongi di situ hanya bisa berkaitan dengan materi yang dianggap berupa kebohongan. Tidak bisa lafal dibohongi di situ digunakan untuk materi yang dinilai benar, bagus, dijunjung tinggi yang diyakini bahwa melanggarnya merupakan suatu kesalahan, kecuali untuk melecehkannya.

Ketika Ahok mengatakan: “Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu.” maknanya sama dengan menganggap surat Al-Maidah 51 itu materi kebohongan. Menurut Wakil Presiden Pak Jusuf Kalla bahwa karena ada kata bohong itulah, yang membuat Ahok dinilai menistakan agama Islam. Jusuf Kalla menilai yang menjadi masalah adalah ada kalimat ‘bohong’. Menurutnya, itulah pangkal masalah sehingga Ahok disebut melakukan penistaan terhadap agama. Jika

dipotong kata bohong, maka kalimat menjadi “saudara-saudara sekalian, apabila tidak pilih saya karena ayat Al-Maidah itu ya enggak apa apa’. Jika kalimatnya seperti itu maka umat islam tidak akan marah.

Berita ini menuliskan pendapat dari Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Andika Dutha Bachari, beliau menilai pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 bisa dianggap tidak menistakan agama. Dosen ilmu Linguistik ini melanjutkan bahwa pada kasus pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 ini, Ahok mengeluarkan pernyataan tanpa didasari data dan fakta. Karena itu, pernyataan Ahok menjadi sangat subyektif jika diucapkan justru seperti menghakimi pihak lain.

Analisis **Skrip**, berita ini menuliskan pendapat dari Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Andika Dutha Bachari, beliau menilai pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 bisa dianggap tidak menistakan agama. Pada unsur *Who* teks berita ini menunjukkan pada narasumber berita yaitu Andika Dutha Bachari yang merupakan Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Linguistik merupakan ilmu bahasa. Bergantung pada sudut pandang, dan pendekatan seorang peneliti, linguistika seringkali digolongkan ke dalam ilmu kognitif, psikologi, dan antropologi. Ada tiga aspek luas penelitian, yang meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks awal kegiatan yang dikenal dalam deskripsi bahasa telah dikaitkan dengan Pāṇini sekitar 500 SM, dengan analisisnya dari bahasa Sanskerta di Ashtadhyayi.

Bahasa dapat dipahami sebagai suatu interaksi suara, dan makna. Disiplin yang mempelajari suara linguistik disebut sebagai fonetik, yang berkaitan dengan sifat sebenarnya dari suara pidato, dan suara non pidato, dan bagaimana mereka diproduksi, dan dirasakan. Studi tentang makna

bahasa, di sisi lain, ini berkaitan dengan bagaimana bahasa menggunakan logika, dan referensi dunia nyata untuk menyampaikan, proses, dan menetapkan makna, serta untuk mengelola, dan menyelesaikan ambiguitas. Hal ini pada gilirannya mencakup studi semantik (bagaimana makna disimpulkan dari kata-kata, dan konsep) dan pragmatik (bagaimana makna disimpulkan dari konteks).

Ada sistem aturan (dikenal sebagai tata bahasa) yang mengatur komunikasi antara anggota suatu masyarakat tutur tertentu. Grammar dipengaruhi oleh suara, dan makna, dan termasuk morfologi (pembentukan, dan komposisi kata-kata), sintaks (pembentukan, dan komposisi frasa, dan kalimat dari kata-kata ini), dan fonologi (sistem suara). Melalui korpus linguistik, potongan besar teks dapat dianalisis untuk kemungkinan kejadian bentuk linguistik tertentu, dan pola gaya dalam wacana tertulis atau lisan.

Pada unsur *What*, berita ini memberikan penjelasan bahwa Ahok bisa dianggap tak menistakan agama apabila bisa membuktikan pernyataan tersebut. Jika merujuk pada, kalimat 'Ada orang yang membohongi masyarakat pakai Surat Al-Maidah', maka Ahok tidak menganggap yang berbohong adalah Al-Qur'an melainkan yang berbohong adalah orang-orang tertentu dengan beralih kepada Al-Qur'an .

Analisis **Tematik**, beberapa tema yang ditampilkan dalam berita ini, kesemuanya telah menunjukkan dukungannya terhadap Ahok. Pada judul disebut, Ahok bisa dianggap tidak menistakan agama apabila. Dalam judul ini *Kompas.com* tidak memperjelaskan, kalimat ini menuliskan bisa dianggap tidak bersalah apabila titik titik titik. Tema yang dipakai bisa dianggap apabila, lalu diputar-diputar dan tanpa ada kejelasan yang spesipik.

Seperti pada kalimat “Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Andika Dutha Bachari, menilai pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 bisa dianggap tidak menistakan

agama. Namun, Andika menilai bahwa Ahok bisa dianggap tak menistakan agama apabila bisa membuktikan pernyataan tersebut. Kalimat yang digunakan pada teks ini terlihat tidak menyakinkan, namun tetap digunakan sebagai frame bahwa masih ada peluang Ahok untuk dinyatakan tidak bersalah, melalui beberapa analisis yang dilihat dari sisi linguistik.

Kemudian pada tema berikutnya *Kompas.com* menuliskan kalimat ‘Ahok mengeluarkan pernyataan tersebut tanpa didasari data dan fakta’, kalimat ini digunakan untuk memperkuat dukungan kepada Ahok dengan memberikan alasan bahwa Kalau Ahok bilang, dia punya Informasi tentang ini, bahwa ada orang, sepanjang dia bisa mempertanggungjawabkan, oke. Artinya kualitas informasinya bisa diterima. Ini kan yang jadi masalah substansi informasinya, ada kategori negatif dan secara literal apa yang disampaikan derajat kebenarannya belum dapat diterima. Apa betul ada orang dibohongi dengan pakai Al-Maidah Ayat 51.

Kalimat ini memang dipakai untuk memperkuat argumen bahwa Ahok betul telah menyampaikan pidato yang berbunyi “jadi bapak ibu tidak bisa pilih saya karena dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 macam-macam” namun kalimat ini juga membantah bahwa ada orang yang melakukan bohong menggunakan Al-Maidah 51. Sehingga yang disampaikan Ahok juga tidak ada data dan fakta siapa yang berbohong menggunakan Al-Maidah 51. Dengan menggunakan kalimat ini yang seakan ingin memberikan argumen untuk membela Ahok, namun frame yang muncul bisa juga bahwa yang telah melakukan kebohongan, karena dia tidak punya bukti siapa-siapa (orang) yang telah berbohong dengan menggunakan Al-Qur’an surah Al-Maidah 51 ini.

Analisis **Retoris**, *Kompas.com* membuat sebuah judul dengan memilih bahasa yang tidak lengkap, “Ahok Bisa Dianggap Tidak Menistakan Agama, apabila...” pada kalimat ini yang ingin ditekankan oleh *Kompas.com* adalah Ahok bisa dianggap tidak bersalah terhadap

kasus dugaan penistaan agama yang telah beliau lakukan. Judul ini sengaja memilih dianggap tidak bersalah namun alasannya tersembunyi dari judul. Dengan judul ini sudah terlihat secara jelas bahwa *Kompas.com* telah menunjukkan dukungannya kepada Ahok, frame yang mau dibangun adalah Ahok dianggap tidak bersalah walaupun tidak menuliskan alasan-alasan akademisnya yang mengutip dari salah satu Dosen Linguistik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

Kemudian pilihan foto, *Kompas.com* lebih senang menggunakan foto Ahok meskipun dalam tema berita yang tidak ada hubungannya dengan foto Ahok. Pada berita ini *Kompas.com* mengutip pendapat Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Andika Dutha Bachari, menilai pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 bisa dianggap tidak menistakan agama. Semestinya supaya *fair* foto yang ditampilkan adalah foto Andika Dutha Bachari, karena seperti biasanya ketika *Kompas.com* menuliskan pendapat dari salah satu tokoh dia cenderung menampilkan foto yang bersangkutan.

Dibalik mudah dan cepatnya informasi saat ini yang bisa diakses di media online, ternyata terdapat beberapa hal yang masih menjadi kekurangan. Kekurangan tersebut salah satunya adalah penggunaan foto sebagai media pendukung dan bukti empiris dalam sebuah berita. Penggunaan foto memang menjadi hal yang sulit dipisahkan dari penulisan berita saat ini, seperti straight news. Sesuai dengan namanya, straight news merupakan berita pendek yang bertujuan untuk mengabarkan sebuah informasi yang baru saja terjadi. Sehingga kecepatan akan pemberitaan untuk segera dimuat menjadi pertimbangan utama selain informasi.

Diantara pilihan yang ditampilkan *Kompas.com* dapat disimpulkan bahwa yang diupayakan merupakan usaha untuk menampilkan frame yang benar kepad Ahok, meskipun dengan alasan-alasan yang tidak

substantip namun upaya bisa dilakukan dengan menekan pada kalimat, kata dan bahkan gambar tertentu.

Tabel 4.12 Frame Kompas.com, 11 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Headline berita ini ditunjukkan pada judul berita, berita memberikan claim bahwa Ahok bisa dianggap tidak menistakan agama apabila Ahok merujuk pada, 'Ada orang yang membohongi masyarakat pakai Surat Al-Maidah', Ahok harus bisa bertanggung jawab (membuktikan) pernyataan tersebut.</p> <p>Berita ini menuliskan pendapat dari Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Andika Dutha Bachari, beliau menilai pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 bisa dianggap tidak menistakan agama.</p>
Skrip	<p><i>Kompas.com</i> menuliskan pendapat dari Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Andika Dutha Bachari, beliau menilai pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 bisa dianggap tidak menistakan agama. Pada unsur <i>Who</i> teks berita ini menunjukkan pada narasumber berita yaitu Andika Dutha Bachari yang merupakan Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.</p> <p>Pada unsur <i>What</i>, berita ini memberikan penjelasan bahwa Ahok bisa dianggap tak menistakan agama apabila bisa membuktikan pernyataan tersebut. Jika</p>

	<p>merujuk pada, kalimat 'Ada orang yang membohongi masyarakat pakai Surat Al-Maidah', maka Ahok tidak menganggap yang berbohong adalah Al-Qur'an melainkan yang berbohong adalah orang-orang tertentu dengan beralih kepada Al-Qur'an .</p>
Tematik	<p>Beberapa tema yang ditampilkan dalam berita ini, kesemuanya telah menunjukkan dukungannya terhadap Ahok. Pada judul disebut, Ahok bisa dianggap tidak menistakan agama apabila. Dalam judul ini <i>Kompas.com</i> tidak memperjelaskan, kalimat ini menuliskan bisa dianggap tidak bersalah apabila titik titik titik. Tema yang dipakai bisa dianggap apabila, lalu diputar-diputar dan tanpa ada kejelasan yang spesifik.</p> <p>Kemudian pada tema berikutnya <i>Kompas.com</i> menuliskan kalimat 'Ahok mengeluarkan pernyataan tersebut tanpa didasari data dan fakta', kalimat ini digunakan untuk memperkuat dukungan kepada Ahok dengan memberikan alasan bahwa Kalau Ahok bilang, dia punya Informasi tentang ini, bahwa ada orang, sepanjang dia bisa mempertanggungjawabkan, oke. Artinya kualitas informasinya bisa diterima.</p>
Retoris	<p>Kalimat yang ditekankan oleh <i>Kompas.com</i> adalah Ahok bisa dianggap tidak bersalah terhadap kasus dugaan penistaan agama yang telah beliau lakukan. Judul ini sengaja memilih dianggap tidak bersalah namun alasannya tersembunyi dari judul. Dengan judul ini sudah terlihat secara jelas bahwa <i>Kompas.com</i> telah menunjukkan dukungannya kepada Ahok, frame yang mau dibangun adalah Ahok dianggap tidak bersalah</p>

	<p>walaupun tidak menuliskan alasan-alasan akademisnya yang mengutip dari salah satu Dosen Linguistik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.</p> <p>Kemudian pilihan foto, <i>Kompas.com</i> lebih senang menggunakan foto Ahok meskipun dalam tema berita yang tidak ada hubungannya dengan foto Ahok. Pada berita ini <i>Kompas.com</i> mengutip pendapat Dosen Ilmu Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Andika Dutha Bachari, menilai pernyataan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah Ayat 51 bisa dianggap tidak menistakan agama. Semestinya supaya <i>fair</i> foto yang ditampilkan adalah foto Andika Dutha Bachari, karena seperti biasanya ketika <i>Kompas.com</i> menuliskan pendapat dari salah satu tokoh dia cenderung menampilkan foto yang bersangkutan.</p>
--	--

13) Kompas.com, 16 November 2016: Penetapan Ahok sebagai Tersangka Diwarnai Perbedaan Pendapat Ahli.

Analisis **Siktaksis**, judul berita yang ditampilkan sudah sangat jelas menunjukkan pandangan *Kompas.com*, judul itu menunjukkan bahwa ada pro dan kontra dari penetapan Ahok sebagai tersangka, pro dan kontra itu dalam bentuk perbedaan pendapat ahli. Pada berita ini *Kompas.com* hanya mengutip pernyataan yang disampaikan Kepala Bareskrim Irjen Ari Dono mengatakan, dalam pernyataannya Kepala Bareskrim menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah mendengar sejumlah keterangan dari para saksi dan para ahli yang diajukan pihak pelapor dan terlapor.

Para ahli itu antara lain terdiri dari ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli agama, dan ahli psikologi. Dari sejumlah keterangan ahli, Bareskrim

mendapatkan ada perbedaan pendapat di kedua pihak. Perbedaan tajam para ahli mengenai apakah ada tindak pidana untuk menista agama. Perbedaan pendapat ini terjadi di antara lebih dari 20 ahli yang dihadirkan. Saksi itu berasal dari pihak pelapor, pihak terlapor, juga yang didatangkan penyidik.

Teks berita secara umum hanya mengutip pernyataan dari Kepala Bareskrim, namun dominasi yang kalimat yang dituliskan adalah pernyataan yang menganggap bahwa Perbedaan tajam para ahli mengenai apakah ada tindak pidana untuk menista agama, penetapan ahok sebagai tersangka menurut *Kompas.com* adalah sebuah keputusan yang diambil berdasarkan hasil pengumpulan pendapat dari para ahli, meskipun demikian penetapan tersangka adalah alternatif dan keputusan yang tidak bulat dari seluruh saksi ahli yang dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri.

Analisis **Skrip**, peristiwa yang diangkat *Kompas.com* adalah perdebatan ahli terhadap penetapan Ahok sebagai tersangka oleh kepolisian, ada dua hal yang dibahas dalam isi berita ini, yang pertama pernyataan Bareskrim Polri yang menetapkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Meski demikian, polisi tidak menahan Ahok karena berbagai pertimbangan: kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Penyidik tidak melihat ada kekhawatiran itu. Hal itu disampaikan oleh Kapolri, Tito Karnavian, seperti yang dikutip pada <http://news.liputan6.com>: Bahwa hasil gelar perkara dan kesimpulan yang disampaikan oleh Kabareskrim selaku pimpinan di Bareskrim, di mana tim penyidik di bawah komando Kabareskrim. Mereka bekerja berdasarkan undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penyelidikan adalah tindakan untuk mencari peristiwa tindak pidana dan menentukan apakah dapat dan tidak menentukan penyidikan. Langkah penyidikan adalah kegiatan dan rangkaian untuk menangani tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Dari dasar itu tim bekerja berdasar undang-undang. Bukan bekerja berdasar atasan. Sejak 14 Oktober hingga 21 Oktober tim sudah bekerja dari awal, walau ada dua surat telegram kasus yang melibatkan pasangan calon yang mendaftarkan diri, perintahnya ditunda sampai proses pilkada, agar Polri tidak menjadi alat dalam menjatuhkan sosok. Tapi melihat sensitivitasnya, saya sudah minta Kabareskrim melakukan langkah penyelidikan dengan maraton.

Sudah hampir 40 saksi, mungkin ada pihak yang menyederhanakan jadi simpel. Tapi kami tak ingin salah langkah. Walau ada nilai persamaan hukum, tapi kita melihat kompleksitas kasus. Saksi ahli bahasa, agama, dan pidana berbeda pendapat. Saya melihat laporan jika menyelidik 27 orang terjadi dissenting opinion. Dalam catatan ini, tidak benar kalau berbeda pendapat.

Maka sepakat selesaikan di peradilan yang lebih terbuka. Mengapa, karena presiden bilang secara terbuka. Ada ahli hukum yang sebut penyelidikan proses yang rahasia, maka sebaiknya dilakukan tertutup dan diberikan kesempatan pada semua pihak. Kami sudah undang Ombudsman, Kompolnas, DPR. Tapi DPR mengirim surat resmi dan tidak mau mengintervensi. Walau tidak bulat tapi secepat diselesaikan di pengadilan yang terbuka dan semua bisa melihat, seperti kasus Jessica. Kesaksian pendapat dan lainnya kami serahkan kepada hakim. Tim sepakat naikkan perkara ke penyidik dimulai hari ini dan akan mempercepatnya."

Kemudian *Kompas.com* menyajikan tentang perbedaan ahli dalam penetapan Ahok sebagai tersangka, hal ini bisa dilihat dari kalimat yang dituliskan dalam berita ini bahwa Kepala Bareskrim Irjen Ari Dono mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah mendengar sejumlah keterangan dari para saksi dan para ahli yang diajukan pihak pelapor dan terlapor. Para ahli itu antara lain terdiri dari ahli hukum pidana, ahli

bahasa, ahli agama, dan ahli psikologi. Dari sejumlah keterangan ahli, Bareskrim mendapatkan ada perbedaan pendapat di kedua pihak.

Perbedaan tajam para ahli mengenai apakah ada tindak pidana untuk menista agama, perbedaan pendapat ini terjadi di antara lebih dari 20 ahli yang dihadirkan. Saksi itu berasal dari pihak pelapor, pihak terlapor, juga yang didatangkan penyidik. Tidak hanya ahli, perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan penyidik yang terdiri dari 27 orang. Tetap diraih kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka.

Dominan menggunakan kata perbedaan pendapat dari para ahli atas penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok ini menunjukkan bahwa *Kompas.com* tetap berupaya untuk memberikan pembelaan terhadap Ahok meskipun penetapan tersangka sudah diumumkan oleh pihak kepolisian dan menjadi keputusan yang telah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.

Analisis **Tematik**, tema yang ditampilkan dalam berita ini lebih dominan menunjukkan bahwa keputusan penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama diwarnai dengan perbedaan dari para ahli yang menjadi saksi atas kasus tersebut. Diantara tema yang menunjukkan sisi perbedaan dari ahli misalnya terdapat pada kalimat “Perbedaan pendapat ini terjadi di antara lebih dari 20 ahli yang dihadirkan. Saksi itu berasal dari pihak pelapor, pihak terlapor, juga yang didatangkan penyidik. Tidak hanya ahli, perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan penyidik yang terdiri dari 27 orang”

Tema ini adalah menunjukkan sisi lain dari substansi berita, pokok terhadap peristiwa yang dibahas dalam berita ini seharusnya adalah penetapan Ahok sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, hal itu dikarenakan tuntutan terhadap Ahok ini menjadi isu yang sudah meluas sampai daerah. Bukti itu terlihat dari Aksi demo menuntut proses hukum

atas Ahok karena dinilai melecehkan Al-Qur'an Jum'at (14/10) lalu, ternyata bukan hanya menjadi perhatian warga Jakarta dan sekitarnya. Berbagai kota lain di Indonesia pun turut meramaikannya.

Seperti gabungan ormas di Aceh menggelar aksi serupa di halaman Masjid Raya Baiturrahman. Massa meminta agar aparat segera menangkap Ahok, selain mengingatkan kepada umat Islam untuk terus melakukan pembelaan terhadap Al-Qur'an . Adapun di Pekanbaru, Riau, himpunan ormas Islam juga menuntut agar Ahok segera ditangkap. "Jika aparat penegak hukum tidak menangkap Ahok dan tidak memproses hukum, jangan salah jika umat Islam akan melakukan tindakan," demikian salah satu bunyi orasi yang disampaikan.

Kemudian di pulau seberang, tepatnya di ibukota Kalimantan Timur, Samarinda, massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dua hari sebelumnya juga telah menuntut agar Ahok diadili dan dihukum. Hal itu dilakukan menyusulnya merebaknya video Ahok yang menyebut Surat Al-Maidah sebagai alat untuk pembodohan. Umat Islam di Pontianak pun menyuarakan hal senada..

Sejumlah kota di Jawa Tengah pun tak ketinggalan menggelar aksi serupa. Di wilayah Purworejo, Magelang dan Solo, kecaman terhadap Ahok disuarakan sebagai bentuk pembelaan terhadap Al-Qur'an yang telah dilecehkan. Mereka pun juga menuntut hal serupa, yakni proses hukum terhadap Ahok.

Analisis **Retoris**, teks dalam berita ini memberikan penekanan pada penggunaan kata perdebatan ahli, ahli yang dimaksud adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi (ilmiah, teknis atau lainnya) tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai "pendapat ahli". Saksi ahli juga dapat memberikan "bukti ahli" dalam bidang keahlian mereka. Kesaksian mereka dapat dibantah oleh

kesaksian dari para ahli lainnya atau dengan bukti atau fakta lain. Hukum Indonesia menyatakan bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah.

Dari analisis retorik, terlihat bahwa *Kompas.com*, melakukan penonjolan pada kalimat “penetapan Ahok sebagai tersangka diwarnai perdebatan ahli”, jika dipahami secara seksama dari kalimat ini, *Kompas.com* ingin memframe bahwa perdebatan ini dilakukan oleh banyak ahli, karena dalam kalimat isi *Kompas.com* menuliskan jumlah ahli ada 20 ahli dan juga sebanyak 27 orang penyidik.

Berita ini tidak menuliskan secara spesifik siapa saja ahli yang melakukan perdebatan terkait dengan penetapan Ahok sebagai tersangka atas dugaan kasus penistaan agama, berita ini juga tidak menuliskan apa saja yang diperdebatkan dari segi apa dan apa alasan perdebatannya. *Kompas.com* hanya melakukan frame bahwa penetapan Ahok sebagai tersangka masih ada celah hukum yang bisa dibantah oleh ahli.

Kompas.com menuliskan penetapan tersangka dilakukan setelah mendengar sejumlah keterangan dari para saksi dan para ahli yang diajukan pihak pelapor dan terlapor. Para ahli itu antara lain terdiri dari ahli hukum pidana, ahli bahasa, ahli agama, dan ahli psikologi. Dari sejumlah keterangan ahli, Bareskrim mendapatkan ada perbedaan pendapat di kedua pihak. Perbedaan tajam para ahli mengenai apakah ada tindak pidana untuk menista agama, perbedaan pendapat ini terjadi di antara lebih dari 20 ahli yang dihadirkan. Saksi itu berasal dari pihak pelapor, pihak terlapor, juga yang didatangkan penyidik. Tidak hanya ahli, perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan penyidik yang terdiri dari 27 orang.

teks dalam berita ini memberikan penekanan pada penggunaan kata perdebatan ahli, ahli yang dimaksud adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi (ilmiah, teknis atau lainnya)

tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai "pendapat ahli". Saksi ahli juga dapat memberikan "bukti ahli" dalam bidang keahlian mereka. Kesaksian mereka dapat dibantah oleh kesaksian dari para ahli lainnya atau dengan bukti atau fakta lain. Hukum Indonesia menyatakan bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah.

Dari analisis retorik, terlihat bahwa *Kompas.com*, melakukan penonjolan pada kalimat “penetapan Ahok sebagai tersangka diwarnai perdebatan ahli”, jika dipahami secara seksama dari kalimat ini, *Kompas.com* ingin memframe bahwa perdebatan ini dilakukan oleh banyak ahli, karena dalam kalimat isi *Kompas.com* menuliskan jumlah ahli ada 20 ahli dan juga sebanyak 27 orang penyidik.

Tabel 4.13 Frame Kompas.com, 16 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	Judul itu menunjukkan bahwa ada pro dan kontra dari penetapan Ahok sebagai tersangka, pro dan kontra itu dalam bentuk perbedaan pendapat ahli. Pada berita ini <i>Kompas.com</i> hanya mengutip pernyataan yang disampaikan Kepala Bareskrim Irjen Ari Dono mengatakan, dalam pernyataannya Kepala Bareskrim menyampaikan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah mendengar sejumlah keterangan dari para saksi dan para ahli yang diajukan pihak pelapor dan terlapor. Teks berita secara umum hanya mengutip pernyataan dari Kepala Bareskrim, namun dominasi yang kalimat yang dituliskan adalah pernyataan yang menganggap bahwa Perbedaan tajam para ahli mengenai apakah ada tindak pidana untuk menista agama, penetapan ahok sebagai tersangka menurut <i>Kompas.com</i> adalah sebuah

	<p>keputusan yang diambil berdasarkan hasil pengumpulan pendapat dari para ahli, meskipun demikian penetapan tersangka adalah alternatif dan keputusan yang tidak bulat dari seluruh saksi ahli yang dipanggil oleh penyidik Bareskrim Polri.</p>
Skrip	<p>Peristiwa yang diangkat <i>Kompas.com</i> adalah perdebatan ahli terhadap penetapan Ahok sebagai tersangka oleh kepolisian, ada dua hal yang dibahas dalam isi berita ini, yang pertama pernyataan Bareskrim Polri yang menetapkan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.</p> <p>Perbedaan tajam para ahli mengenai apakah ada tindak pidana untuk menista agama, perbedaan pendapat ini terjadi di antara lebih dari 20 ahli yang dihadirkan. Saksi itu berasal dari pihak pelapor, pihak terlapor, juga yang kedatangan penyidik. Tidak hanya ahli, perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan penyidik yang terdiri dari 27 orang. Tetap diraih kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka.</p>
Tematik	<p>Tema yang ditampilkan dalam berita ini lebih dominan menunjukkan bahwa keputusan penetapan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama diwarnai dengan perbedaan dari para ahli yang menjadi saksi atas kasus tersebut. Diantara tema yang menunjukkan sisi perbedaan dari ahli misalnya terdapat pada kalimat “Perbedaan pendapat ini terjadi</p>

	<p>di antara lebih dari 20 ahli yang dihadirkan. Tema ini adalah menunjukkan sisi lain dari substansi berita, pokok terhadap peristiwa yang dibahas dalam berita ini seharusnya adalah penetapan Ahok sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, hal itu dikarenakan tuntutan terhadap Ahok ini menjadi isu yang sudah meluas sampai daerah</p>
Retoris	<p>Teks dalam berita ini memberikan penekanan pada penggunaan kata perdebatan ahli, ahli yang dimaksud adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli. Hakim dapat mempertimbangkan opini khusus saksi (ilmiah, teknis atau lainnya) tentang bukti atau fakta sebelum pengadilan sesuai keahlian ahli, disebut sebagai "pendapat ahli". Saksi ahli juga dapat memberikan "bukti ahli" dalam bidang keahlian mereka. Kesaksian mereka dapat dibantah oleh kesaksian dari para ahli lainnya atau dengan bukti atau fakta lain. Hukum Indonesia menyatakan bahwa keterangan saksi ahli adalah alat bukti yang sah.</p> <p>Dari analisis retorik, terlihat bahwa <i>Kompas.com</i>, melakukan penonjolan pada kalimat “penetapan Ahok sebagai tersangka diwarnai perdebatan ahli”, jika dipahami secara seksama dari kalimat ini, <i>Kompas.com</i> ingin memframe bahwa perdebatan ini dilakukan oleh banyak ahli, karena dalam kalimat isi <i>Kompas.com</i> menuliskan jumlah ahli ada 20 ahli dan juga sebanyak 27 orang penyidik.</p>

Framing *Republika.co.id*

Berita *Republika.co.id* yang dipublikasi dalam waktu 6 Oktober – 16 November 2016 sebagai berikut:

1) *Republika.co.id*, 6 oktober 2016 : Video Ahok tentang dibohongi Al-Qur'an Surat Al-Maidah 51 viral di Medsos

Media online *Republika.co.id* mulai memuat pemberitaan tentang pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, satu hari setelah video Ahok di upload pada akun Face Book atas nama Buni Yani yang berprofesi sebagai Dosen lulusan Ohio University Amerika Serikat, mantan wartawan Tempo tahun 1996. Dibagikan dari tautan milik media NKRI tertanggal 5 Oktober 2016 di upload jam 20.52 WIB. Pada tanggal 6 Oktober 2016 *Republika.co.id* memuat berita itu dengan judul "Video Ahok: Anda Dibohongi Al-Qur'an Surat Al-Maidah 51 Viral di Medsos".

Pada berita ini *Republika.co.id* menyampaikan bahawa sedang beredar video berjudul 'Ahok: Anda Dibohongi Al-Qur'an Surat Al-Maidah 51'. Video tersebut tengah menjadi viral di sosial media baik Facebook ataupun Twitter. *Republika.co.id* membuat transkrip dari video Ahok yang menyatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 "Bapak Ibu ndak Bisa memilih Saya. dibohongi pake surah Al-Maidah 51 dan macem-macem itu. Itu hak bapak ibu. Ya, jika Bapak Ibu perasaan tidak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, ya enggak apa-apa? Karena inikan panggilan pribadi bapak-ibu. Program ini jalan saja. Jadi, bapak ibu tak usah merasa enggak enak dalam nuraninya enggak bisa memilih Ahok." Sebagai data pembanding *Republika.co.id* melakukan konfirmasi kepada Ruhut Sitompul sebagai Juru Bicara Timses Ahok-Djarot, Ruhut Sitompul membantah kalau Ahok menyebut Surat Al-Maidah bohong. Menurut Ruhut, ada orang yang sengaja memelintir pernyataan Ahok untuk memainkan isu SARA.

Dari analisis siktaksis, pandangan rebuplika tersebut diwujudkan dalam skema atau bagan dalam berita. Judul berita *Republika.co.id* sudah

sangat jelas menunjukkan bahwa video Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 merupakan pernyataan yang kontroversial, *Republika.co.id* menggunakan kata viral dalam judul beritanya, jika kita melihat arti viral dalam kamus bahasa Inggris viral bermakna virus. Namun dalam era sosial media istilah viral seringkali diperdengarkan karena bermakna lagi ngetren, terkenal dan menyebar luas secara cepat. Istilah viral dalam media sosial bisa karena sesuatu memiliki konten positif dan juga bisa juga sesuatu yang viral mempunyai konten negatif dimata publik. Terkait dengan judul yang ditulis oleh *Republika.co.id* ini, lebih cenderung bermakna bahwa viralnya video Ahok memiliki konten negatif karena yang disebut viral video bahwa Ahok menyatakan “Anda dibohongi Al-Qur’an surah Al-Maidah 51 “

Teks berita ini lebih menekankan pada status video yang sedang viral di media sosial, Ahok menyampaikan pernyataan tentang anda dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Meski *Republika.co.id* meminta konfirmasi kepada juru bicara timah Ahok saudara Ruhut Sitompul, sekilas ini seakan upaya untuk meminta fakta yang sesungguhnya, namun pada dasarnya dengan meminta konfirmasi kepada orang terdekat Ahok dalam hal ini Ruhut Sitompul sama saja memberikan kesan bahwa Ahok telah melakukan kesalahan atau bahkan diakui oleh timahnya atas kesalahan yang dilakukan Ahok karena telah menyinggung perasaan umat muslim.

2) *Republika.co.id*, 7 oktober 2016 : Video Ahok diputar berulang kali tetap ada unsur penodaan agama.

Pada edisi 7 oktober 2016 setidaknya *Republika.co.id* memuat 3 berita tentang pernyataan Ahok satu diantaranya yang berjudul “Video Ahok diputar berulang kali tetap ada unsur penodaan agama”. Dari analisis siktaksis berita ini sudah memberikan sebuah tekanan dari sebuah peristiwa, tekanan berita sudah ditunjukkan melalui judul dari berita ini yaitu ‘Video Ahok diputar berulang kali tetap ada unsur penodaan agama’

judul ini sudah bisa menyimpulkan bahwa Ahok telah melakukan penodaan terhadap agama islam, karena sumber peristiwa dari persoalan ini adalah video maka untuk memberikan kesimpulan terhadap maksud dari video itu harus diputar terlebih dahulu. Dalam berita ini sudah disampaikan telah memutar video berulang kali namun kemudian menyimpulkan dari analisisnya bahwa video itu mengandung unsur penodaan agama.

Pada berita ini, *Republika.co.id* menjadikan Bapak Saleh Partaonan Daulay sebagai sumber informasinya, beliau adalah politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) serta mantan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Jika dilihat dari latar belakang Bapak Saleh Partaonan Daulay yang diambil sebagai sumber informasi dalam berita ini, maka tentu tidak mengherankan jika opininya lebih cenderung menyimpulkan bahwa Ahok telah melakukan penodaan terhadap Agama, sebagai seorang politisi yang berasal dari partai berbasis Islam yang didirikan oleh seorang tokoh reformasi Bapak Amien Rais maka sangat wajar jika beliau berkesimpulan demikian. Partai Amanat Nasional adalah salah partai besar di Indonesia yang berasas akhlak politik berlandaskan Agama yang membawa rahmat bagi sekalian alam, dalam kanca perpolitikan di indonesia partai PAN konsisten untuk mewakilkan suara-suara dari masyarakat islam, sehingga dalam perjalanan politiknya tokoh-tokoh dari partai ini bahkan pendiri tokoh lebih dominan memberikan kritikan terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok.

Selain menjadi politisi dari Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay juga merupakan mantan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi secara kelembagaan yang telah melaporkan Ahok atas tuduhan melakukan penistaan terhadap agama Islam lewat video saat menyampaikan pidato pada waktu melakukan kunjungan kerja di Pulau

Seribu. Sehingga sangat wajar jika dia memberikan opini yang bisa menguatkan laporan dari organisasi yang pernah dia ikuti.

Analisis Skrip, dalam analisis skrip *Republika.co.id* menyajikan sebuah berita yang lengkap. Elemen *what*, dikatakan (Dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai sangat layak diproses secara hukum) *Why* (Pasalnya dugaan penodaan itu telah menyinggung masyarakat Islam dan ormas-ormas Islam) *How* (Saya telah mendengarkan kembali video itu seperti saran Ahok. Saya juga mengulang beberapa kali khususnya pada menit yang disebutkan. Setelah sekian kali mendengar, saya rasanya tetap menilai ada unsur penodaan). Dalam tubuh berita terdapat opini tunggal atau satu sumber berita yang menyampaikan bahwa ‘menyayangkan sikap defensif Ahok. Alih-alih meminta maaf, Ahok malah membela diri dengan memberikan penjelasan dan mengklaim tidak bersalah. Sumber berita mengatakan, seandainya Ahok segera meminta maaf, mungkin tidak akan muncul petisi dan juga pelaporan ke pihak kepolisian. "Kalau tidak merasa bersalah, ya sebaiknya dibuktikan lewat jalur hukum saja. Ada UU No 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama yang bisa dijadikan sebagai rujukan’.

Analisis Tematik, dari awal hingga akhir kalimat dalam berita ini menceritakan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ahok, berupa dugaan penodaan terhadap agama sehingga harus ditindak lanjuti kejalur hukum. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi lagi di masa depan. Apalagi, diwaktu yang akan datang akan ada banyak daerah yang juga akan melakukan pilkada serentak. Semua pihak menginginkan pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta di seluruh Indonesia berjalan damai. Karena itu, Sebaiknya unsur-unsur yang bisa menyinggung dan menyakiti perasaan masyarakat harus dihindari. Ini merupakan kewajiban para kandidat kepala daerah, tidak terkecuali Ahok. yang melakukan penodaan terhadap agama.

Pada paragraf pertama *Republika.co.id* telah memberikan framing bahwa dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai sangat layak diproses secara hukum. Pasalnya dugaan penodaan itu telah menyinggung masyarakat Islam dan ormas-ormas Islam, pada paragraf berikutnya *Republika.co.id* menulis tentang sikap defensif Ahok. Alih-alih meminta maaf, Ahok malah membela diri dengan memberikan penjelasan dan mengklaim tidak bersalah.

Analisis Retoris, dari awal berita *Republika.co.id* menggunakan kata ‘video ahok diputar berulang kali tetap ada unsur penodaan agama’ yang tertuang dalam judul berita edisi 7 Oktober 2016. Kata diputar berulang kali merupakan titik tekan yang dilakukan oleh *Republika.co.id*, penekan pada kata ini tentu memberikan keyakinan kepada para pembaca bahwa kebenaran terhadap penodaan agama pada video Ahok tersebut telah diujikan secara berulang-ulang, lalu hasil dari pengujian tersebut mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ada penodaan agama dalam video itu.

Selain memberikan penekanan pada kata berulang-ulang, *Republika.co.id* juga memberikan penekanan pada kata penodaan agama. Penodaan agama merupakan sebuah tindakan kejahatan dalam agama artinya seseorang telah melakukan penentangan terhadap hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Melalui perkataan yang menyebutkan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51.

3) *Republika.co.id* 10 Oktober 2016 : MUI DKI Jakarta menyampaikan teguran keras terhadap Ahok.

Analisis **Siktaksis**, judul berita yang ditulis oleh *Republika.co.id* sangat jelas menunjukkan pandangan *Republika.co.id*. Judul itu memberikan gambaran jelas bahwa Ahok telah melakukan sebuah kesalahan yang

sangat besar. Melalui judul berita MUI DKI Jakarta tegur keras Ahok, telah mengisyaratkan bahwa Ahok telah melakukan hal yang salah sehingga dia harus ditegur secara keras oleh lembaga yang di dalamnya diisi oleh para ustadz dan ulama yang secara moral memiliki nilai-nilai keislaman yang baik dan memiliki kesabaran yang cukup. Namun dalam kasus Ahok ini *Republika.co.id* telah menggambarkan kemarahan lembaga ini akibat pidato yang disampaikan oleh Ahok yang berisi dibohongi pakai surah Al-Maidah 51.

Dalam teks berita ini, *Republika.co.id* mewawancarai KH Zulfa Mustofa Pimpinan MUI DKI Jakarta, pimpinan MUI DKI Jakarta ini berpendapat bahwa pernyataan Ahok telah menimbulkan keresahan dan suasana kerukunan umat bergama yang tidak kondusif. Peristiwa tersebut akan mengancam kehidupan berbangsa di DKI Jakarta khususnya, dan di Indonesia umumnya. Skema seperti ini sudah menempatkan pandangan publik terhadap Ahok bahwa pidato yang disampaikan pada saat melakukan kunjungan ke pulau seribu yang menyinggung Al-Qur'an surah Al-Maidah 51 adalah bentuk kesalahan dan masuk kedalam kategori penodaan Agama.

Secara umum teks berita itu berpandangan adanya dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat berdialog dengan warga di Kepulauan Seribu. Pernyataan itu disampaikan oleh sebuah lembaga yang punya wewenang dalam menilai sesuatu terkait dengan agama islam, pada akhirnya penilaian itu menghasilkan kesimpulan dan akhirnya memberikan peringatan berupa surat teguran resmi MUI DKI Jakarta kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Analisis **Skrip**. Dari analisis skrip bisa dipahami bentuk dukungan yang diberikan oleh *Republika.co.id* terhadap pernyataan teguran yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Peristiwa yang diangkata dalam berita ini tentang teguran MUI DKI Jakarta tentang

adanya dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kemudian narasumber yang diambil dalam berita ini hanya satu yaitu Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta MUI DKI Jakarta yang menilai bahwa pernyataan Ahok telah menimbulkan keresahan dan suasana kerukunan umat bergama yang tidak kondusif serta mengancam kehidupan berbangsa di DKI Jakarta khususnya, dan di Indonesia umumnya.

Republika.co.id tidak hanya megisahkan tentang pernyataan pimpinan MUI DKI yang akan memberikan teguran kepada Gubernur DKI karena dianggap melakukan penodaan terhadap Al-Qur'an, namun *Republika.co.id* juga menuliskan lengkap teguran tertulis MUI DKI Jakarta. Diantara kutipan teguran MUI DKI Jakarta yang ditulis oleh *Republika.co.id* sebagai berikut:

“Setelah memperhatikan kondisi sosial, politik dan keagamaan yang terjadi belakangan ini di DKI Jakarta, khususnya terkait dengan pernyataan Saudara selaku Gubernur DKI Jakarta yang berkenaan dengan Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan ajaran serta keyakinan umat Islam, telah menimbulkan keresahan dan suasana kerukunan umat bergama yang tidak kondusif serta berpotensi mengancam kehidupan berbangsa di DKI Jakarta khususnya, dan di Indonesia umumnya, maka dengan ini Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta menyatakan MENEGUR DENGAN KERAS kepada Saudara Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta, dan meminta kepada yang bersangkutan untuk:

1. Tidak melakukan perbuatan dan pernyataan atau komentar yang dapat meresahkan kehidupan masyarakat DKI Jakarta umumnya, dan kaum Muslimin khususnya.
2. Tidak masuk ke area perbincangan yang bukan menjadi kewenangan tugasnya, seperti pernyataan yang dikategorikan penghinaan dan hasutan serta penyebaran kebencian di kalangan umat Islam khususnya, dan warga DKI Jakarta umumnya.
3. Gubernur tidak lagi melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan yang dianggap meremehkan umat Islam atau para ulamanya, seperti menyatakan bahwa umat Islam dibohongi dengan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat ke- 51. Para Ulama atau Pendakwah telah menyampaikan apa yang digariskan oleh Al Qur'an yang tafsirnya disepakati oleh mayoritas Ulama, sehingga tidak dapat dipandang sebagai pembohongan atau pembodohan serta bukan bentuk politisasi

- ayat, tetapi bagian dari tugas para ulama untuk menyampaikan kebenaran Al-Qur'an .
4. Menarik perkataannya yang menganggap bahwa Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagai pelecehan yang dilakukan umat Islam.
 5. Agar Gubernur lebih fokus kepada tugas utama yang diembannya untuk memajukan Kota DKI Jakarta, dan meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta, jasmaninya maupun rohaninya.

Analisis **Tematik**. Dari struktur tematik secara umum tema dalam teks menunjukkan dukungan *Republika.co.id* terhadap teguran yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kalimat pertama dimulai dengan kasus dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat berdialog dengan warga di Kepulauan Seribu pada Rabu (30/9) , Basuki Tjahaja Purnama terus menuai kontroversi. Secara umum kontroversi bermakna perdebatan, pertentangan atau persengketaan berkepanjangan mengenai suatu hal yang terjadi dalam masyarakat dan biasanya mengenai pendapat atau sudut pandang yang bisa memicu konflik. Dari tata bahasa ini maka bisa dimaknai bahwa Gubernur DKI Jakarta telah melakukan sesuatu yang dapat memicu konflik di lingkungan masyarakat, maka menjadi sesuatu perilaku yang buruk telah ditunjukkan oleh seorang kepala daerah.

Kemudian tema dalam beberapa teks berikutnya memberikan dukungan pada kalimat awal, kasus dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat berdialog dengan warga di Kepulauan Seribu pada Rabu (30/9) , Basuki Tjahaja Purnama terus menuai kontroversi, diantaranya kalimat, Majelis Ulama DKI Jakarta, akhirnya melayangkan teguran keras kepada pria yang akrab di sapa Ahok tersebut, melalui surat resmi tertulis. Tema dalam teks ini telah memberikan makna bahwa kontroversi yang dilakukan oleh Ahok telah memberikan dampak yang negatif dan mampu menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat serta menimbulkan suasana kerukunan umat bergama yang tidak kondusif sehingga MUI DKI Jakarta sebagai lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia

untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin harus memberikan teguran yang keras kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Analisis **Retoris**. Penekanan kata yang digunakan oleh *Republika.co.id* pada teks berita ini berupa, teguran keras yang terdapat pada judul dari berita ini. Dengan menggunakan kata teguran dan keras artinya *Republika.co.id* memberikan frame yang negatif terhadap seseorang yang dimaksud. Teguran bermakna kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah diperbuat, jika ditambahkan dengan teguran keras maka dia memberikan makna substansi yang dikritik kepada seseorang sudah masuk kedalam kategori yang membahayakan bagi kehidupan sosial.

Selain kata teguran keras, *Republika.co.id* juga menggunakan kata dugaan penodaan Al-Qur'an . Meski kata penodaan diawali dengan dugaan, namun istilah penodaan pasti bermakna negatif. Kata penodaan dalam kamus Bahasa Indonesia merupakan turunan kata dari kata noda. Artinya, noda yang menyebabkan menjadi tampak kotor; bercak. Di samping itu, noda juga berarti aib, cela, atau cacat. Sedangkan kata agama ialah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tata cara peribadatan, dan tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.

Dalam Islam, penodaan terhadap agama sama halnya dengan penghinaan agama. Istilah penghinaan agama dikenal dengan sabb ad-diin. Penghinaan itu meliputi penghinaan terhadap sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis serta menyelisih dan berpaling dari hukum yang ada pada keduanya; penghinaan terhadap Allah dan rasul-Nya.

Tabel 4.14 Frame Republika.co.id, 10 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Judul berita yang ditulis oleh Republika.co.id sangat jelas menunjukkan pandangan Republika.co.id. judul itu memberikan gambaran jelas bahwa Ahok telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar</p> <p>Dalam teks berita ini, Republika.co.id mewawancarai KH Zulfa Mustofa Pimpinan MUI DKI Jakarta, pimpinan MUI DKI Jakarta ini berpendapat bahwa pernyataan Ahok telah menimbulkan keresahan dan suasana kerukunan umat bergama yang tidak kondusif. Peristiwa tersebut akan mengancam kehidupan berbangsa di DKI Jakarta khususnya, dan di Indonesia umumnya. Skema seperti ini sudah menempatkan pandangan publik terhadap Ahok bahwa pidato yang disampaikan pada saat melakukan kunjungan ke pulau seribu.</p>
Skrip	<p>Dari analisis skrip bisa dipahami bentuk dukungan yang diberikan oleh <i>Republika.co.id</i> terhadap pernyataan teguran yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Peristiwa yang diangkata dalam berita ini tentang teguran MUI DKI Jakarta tentang adanya dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kemudian narasumber yang diambil dalam berita ini hanya satu yaitu Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta MUI DKI Jakarta yang menilai bahwa pernyataan Ahok telah menimbulkan keresahan dan</p>

	<p>suasana kerukunan umat bergama yang tidak kondusif serta mengancam kehidupan berbangsa di DKI Jakarta khususnya, dan di Indonesia umumnya.</p>
Tematik	<p>Secara umum tema dalam teks menunjukkan dukungan <i>Republika.co.id</i> terhadap teguran yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Kalimat pertama dimulai dengan kasus dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta saat berdialog dengan warga di Kepulauan Seribu pada Rabu (30/9) , Basuki Tjahaja Purnama terus menuai kontroversi</p> <p>Majelis Ulama DKI Jakarta, akhirnya melayangkan teguran keras kepada pria yang akrab di sapa Ahok tersebut, melalui surat resmi tertulis. Tema dalam teks ini telah memberikan makna bahwa kontroversi yang dilakukan oleh Ahok telah memberikan dampak yang negatif dan mampu menimbulkan konflik di lingkungan masyarakat serta menimbulkan suasana kerukunan umat bergama yang tidak kondusif</p>
Retoris	<p>Penekanan kata yang digunakan oleh <i>Republika.co.id</i> pada teks berita ini berupa, teguran keras yang terdapat pada judul dari berita ini. Dengan menggunakan kata teguran dan keras artinya <i>Republika.co.id</i> memberikan frame yang negatif terhadap seseorang yang dimaksud. Teguran bermakna kritik sosial yang dilakukan secara langsung dan terbuka sehingga yang bersangkutan segera menyadari kekeliruan yang telah diperbuat, jika ditambahkan dengan teguran keras maka substansinya membahayakan bagi kehidupan sosial.</p>

4) ***Republika.co.id*, 11 Oktober 2016: MUI memberikan tanggapan resmi soal pernyataan Ahok tentang Al-Maidah 51**

Analisis **Siktaksis**, meski dalam judul berita *Republika.co.id* tidak memberikan just apakah dia akan menuliskan dukungan atau tidak terhadap pidato Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51. Namun frame *Republika.co.id* bisa terlihat lebih cenderung ikut menyalahi Ahok dimulai pada kalimat awal isi teks berita itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan pernyataan resmi mengenai komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang diduga menistakan Islam karena menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51.

Ahok dianggap menistakan Islam, menista bisa bermakna tindakan, perbuatan, ucapan yang bersifat merendahkan atau penghinaan terhadap seseorang atau golongan. Jika Ahok dianggap menistakan Islam, artinya Ahok telah melakukan tindakan merendahkan atau penghinaan terhadap Islam. Untuk meyakinkan bahwa ada dugaan penistaan terhadap Islam yang dilakukan oleh Ahok, *Republika.co.id* mengutip potongan pidato Ahok saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu yang menyatakan 'dibohongi Al-Maidah 51' kutipan tersebut sebagai berikut:

"Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya".

Secara umum dalam teks berita ini, *Republika.co.id* menampilkan tanggapan Majelis Ulama Indonesia, dan pada akhirnya memberikan sebuah kesimpulan bahwa MUI berpendapat bahwa menyatakan bahwa surah Al-Maidah 51 bohong hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan ayat Al-Qur'an tersebut merupakan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam dan memiliki konsekuensi hukum.

Analisis **Skrip**, peristiwa yang diangkat *Republika.co.id* pada teks berita ini adalah tentang tanggapan Majelis Ulama Indonesia terhadap

pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51, MUI menyatakan bahwa setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Jika ada orang yang menyatakan kandungan surah Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan, maka hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan ayat Al-Qur'an tersebut merupakan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam dan memiliki konsekuensi hukum.

Pada teks ini, frame *Republika.co.id* memberikan dukungan kepada Majelis Ulama Indonesia, dan tidak ada pernyataan dari orang lain yang diambil untuk memberikan opini pembelaan terhadap Ahok. Dengan demikian berkesimpulan bahwa Ahok telah melakukan penistaan terhadap Islam, setelah MUI mengkaji dan menyampaikan sikap mereka. MUI menyampaikan bahwa Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51, secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin.

Analisis **Tematik**, dari struktur tematik menunjukkan dukungan *Republika.co.id* melalui pernyataan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 meresahkan masyarakat. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin. Ketika ulama menyampaikan surah Al-Qur'an kepada umat muslim, maka itu adalah sebuah kebenaran yang harus diyakini dan ditaati. Termasuk surah Al-Maidah 51, ulama pun wajib menyampaikan isi surah Al-Maidah ayat 51 kepada umat Islam bahwa memilih pemimpin Muslim itu wajib. Setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.

Elemen berikutnya adalah pada teks, bahwa Ahok menyatakan kandungan surah Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan,

hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an . Sama saja dia menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan ayat Al-Qur'an tersebut, maka itu merupakan penghinaan terhadap ulama dan umat Islam dan memiliki konsekuensi hukum.

Analisis **Retoris**, bentuk dukungan *Republika.co.id* terhadap dugaan penistaan islam yang dilakukan oleh Ahok terlihat pada elemen retorik. Pada awal teks berita *Republika.co.id* memulai dengan kalimat diduga menistakan Islam karena menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51. Klaim tentang menistakan islam merupakan sebuah upaya untuk membangun image pembaca tentang perilaku tercela yang dilakukan Ahok, karena sebagai seorang pemimpin di ibu kota negeri ini yang mayoritas berpenduduk muslim, maka perilaku itu sudah melukai ratusan juta umat islam di indonesia.

Kemudian sebagai seorang non muslim tidak wajar jika menafsirkan Al-Qur'an , jangankan orang non muslim orang islam saja yang mampu membaca Al-Qur'an tidak bisa seenaknya melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an . Karena penafsiran Al-Qur'an hanya bagi mereka yang telah memiliki ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan isinya berfungsi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan), menjelaskan tentang arti dan kandungan Al-Qur'an , khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak di pahami dan samar artinya. Dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab, tetapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang menyangkut Al-Qur'an dan isinya. Ilmu untuk memahami Al-Qur'an ini disebut dengan Ushul Tafsir atau biasa dikenal dengan Ulumul Qur'an (ilmu-ilmu Al-Qur'an). Lalu bagaimana dengan Ahok seenaknya saja melakukan tafsiran terhadap Al-Qur'an, jangankan menafsirkan yang harus paham dengan bahasa Arab, membaca Al-Qur'an saja belum tentu bisa.

Penekanan berikutnya pada kalimat penutup dalam teks berita ini yaitu menyatakan kandungan surah Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah

kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an . Pada kalimat ini juga cukup jelas bagaimana *Republika.co.id* menampilkan sebuah bahasa yang tegas dan lugas yang pada akhirnya semua pembaca bisa menyimpulkan bahwa Ahok telah melakukan penodaan terhadap islam.

Tabel 4.15 Frame *Republika.co.id*, 11 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Frame <i>Republika.co.id</i> bisa terlihat lebih cenderung ikut menyalahi Ahok dimulai pada kalimat awal isi teks berita itu, Majelis Ulama Indonesai (MUI) mengeluarkan pernyataan resmi mengenai komentar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) yang diduga menistakan Islam karena menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51.</p> <p>Ahok dianggap menistakan islam, menista bisa bermakna tindakan, perbuatan , ucapan yang bersifat merendahkan atau penghinaan terhadap seseorang atau golongan. Jika Ahok dianggap menistakan Islam, artinya Ahok telah melakukan tindakan merendahkan atau penghinaan terhadap terhadap islam</p>
Skrip	<p>MUI menyatakan bahwa setiap orang Islam wajib meyakini kebenaran isi surah Al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin. Jika ada orang yang menyatakan kandungan surah Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan, maka hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an</p> <p>Pada teks ini, frame <i>Republika.co.id</i> memberikan dukungan kepada Majelis Ulama Indonesia, dan tidak ada pernyataan dari orang lain yang diambil untuk memberikan opini pembelaan terhadap Ahok. Dengan</p>

	demikian berkesimpulan bahwa Ahok telah melakukan penistaan terhadap islam, setelah MUI mengkaji dan menyampaikan sikap mereka.
Tematik	<p>Dari struktur tematik menunjukkan dukungan <i>Republika.co.id</i> melalui pernyataan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 meresahkan masyarakat. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin.</p> <p>Elemen berikutnya adalah pada teks, bahwa Ahok menyatakan kandungan surah Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an.</p>
Retoris	<p>Penekanan berikutnya pada kalimat penutup dalam teks berita ini yaitu menyatakan kandungan surah Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an .</p> <p>Pada kalimat ini juga cukup jelas bagaimana <i>Republika.co.id</i> menampilkan sebuah bahasa yang tegas dan lugas yang pada akhirnya semua pembaca bisa menyimpulkan bahwa Ahok telah melakukan penodaan terhadap islam.</p>

5) **Republika.co.id, 13 Oktober 2017: Ahok mengatakan soal Al-Maidah sudah selesai, tidak ada pelanggaran.**

Analisis **Siktaksis**, pada judul berita ini *Republika.co.id* menulis kalimat yang disampaikan Ahok saat diwawancarai oleh wartawan. Dilihat dari judul yang ditampilkan, secara sederhana memberikan asumsi bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok terkait dengan pernyataannya tentang dibohongi Al-Maidah 51, namun judul ini tidak mencerminkan dari lead berita yang disajikan. Teks berita ini dimulai dengan kalimat, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menimbulkan kemarahan umat Islam soal pernyataannya terkait Surah Al-Maidah ayat 51. Ahok mengatakan hal itu sudah selesai dan mengklaim tidak ada pelanggaran.

Pada teks ini *Republika.co.id* menyampaikan sebuah kemarahan yang dilakukan oleh umat muslim kepada Gubernur DKI Jakarta atas pernyataan tentang dibohongi surah Al-Maidah 51, *Republika.co.id* menggambar situasi emosi yang dirasakan oleh umat muslim terhadap Ahok terkait dengan yang menyatakan dibohongi surah Al-Maidah 51. Frame seperti ini adalah upaya untuk menciptakan sebuah perubahan dari kondisi seseorang atau kelompok, penggunaan kata kemarahan umat islam mampu merubah kondisi psikologis seorang pembaca pada berita ini. Jika sebelumnya dia tidak tersinggung dengan pernyataan dibohongi surah Al-Maidah 51, bisa saja dengan adanya frame dari media bahwa umat islam marah dengan video itu, maka seseorang itu akan berubah menjadi marah.

Pesan/informasi yang disampaikan *Republika.co.id* dengan menggunakan bahasa kemarahan umat islam terhadap video Ahok yang menyatakan dibohongi surah Al-Maidah 51 dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda oleh masyarakat sesuai dengan budayanya. Karena apa yang dibaca oleh seseorang akan memberikan pengaruh terhadap sikap individunya.

Analisis **Skrip**, peristiwa yang diangkat dalam berita pada berita ini adalah pengakuan Ahok terkait dengan pernyataannya yang

mengatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 sudah selesai tidak dan tidak ada pelanggaran. Ahok menyampaikan tidak ada pelanggaran pada pernyataannya tentang dibohongi surah Al-Maidah 51, karena semua pemimpin agama PBNU sudah *ngomong*. Bahkan Bawaslu juga mengatakan tidak ada pelanggaran. *Enggak* ada maksud. Pengakuan itu disampaikan Ahok di Balai Kota Jakarta.

Republika.co.id menuliskan pengakuan Ahok bahwa semua pemimpin agama sudah *ngomong*, namun Ahok hanya menyebut PBNU. Dari teks ini bisa dilihat bahwa *Republika.co.id* ingin menunjukkan sebuah kebohongan yang diucapkan oleh Ahok, jika semua pemimpin agama menyatakan Ahok tidak melakukan pelanggaran, lalu kenapa PBNU yang disebut pemimpin agama. PBNU bukan pemimpin agama tetapi organisasi masyarakat Islam, jika yang dimaksud semua pemimpin agama itu adalah organisasi Islam kenapa tidak ada disebut organisasi Islam selain PBNU, karena ormas Islam di Indonesia sangat banyak.

Pada teks berita ini, terlihat secara lengkap *Republika.co.id* menuliskan kalimat beritanya sesuai dengan ucapan yang disampaikan oleh Ahok, tanpa ada polesan atau tambahan agar berita ini terlihat lebih baik. Sebagai contoh *Republika.co.id* menuliskan apa yang diucapkan Ahok

"Intinya mereka *kan cuma* mau *nyeret* aku ke penjara *kan*. *Gitu kan*. Ini *kan* sebagian orang dari gerakan yang mau *nyeret* saya mulai dari kasus Sumber Waras, *nyeret* saya reklamasi, yang bikin anarkis di KPK. *Kan* tujuannya *cuma* itu. Tujuannya *cuma* satu, *gimana* Ahok bisa masuk penjara, *enggak* ikut pilkada,"

Kalimat ini maka bisa menunjukkan sifat sombong dan angkuh, jika kalimat ini disampaikan dengan bahasa wartawan bisa jadi akan lebih santun dan lembut bahasanya. Namun *Republika.co.id* tidak menambah atau mengurangi ucapan Ahok agar terlihat lebih baik.

Analisis **Tematik**, meski dalam judul berita menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan Ahok terkait dengan video yang menyatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, namun pada awal

kalimat *Republika.co.id* sudah memulai dengan sebuah interpretasi lain, kalimat pembuka dari berita ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menimbulkan kemarahan umat Islam soal pernyataannya terkait Surah Al-Maidah ayat 51. Agak sulit menyatakan bahwa frame *Republika.co.id* pada berita ini tidak ikut menyalahi Ahok.

Meskipun bentuk klaim bersalah kepada Ahok dituliskan di awal kalimat saja, namun pada kalimat-kalimat berikutnya juga tidak bisa dikatakan bahwa *Republika.co.id* ikut memberikan gambaran bahwa Ahok tidak melakukan pelanggaran terhadap pernyataannya tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51. Ketika ada kalimat Soal Al-Maidah 51, sudah Selesai tidak ada pelanggaran, namun *Republika.co.id* menuliskan bahwa itu adalah ungkapan Ahok, dan tidak menyebutkan ada ungkapan dari orang lain atau sebuah lembaga yang berwenang untuk menilai apakah Ahok melakukan pelanggaran atau tidak.

Saat Ahok menyatakan "Orang sudah selesai *kok*. Semua pemimpin agama PBNU sudah *ngomong*. Bahkan Bawaslu juga mengatakan tidak ada pelanggaran. *Enggak* ada maksud," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (14/10). Namun *Republika.co.id* tidak menampilkan pernyataan dari lembaga PBNU dan Bawaslu untuk mengetahui apakah benar kedua lembaga ini sudah memberikan kesimpulan bahwa Ahok tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok terkait dengan pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51.

Analisis **Retoris**, berita ini berupaya untuk menyampaikan sebuah pengakuan yang dilakukan Ahok, tanpa ada pernyataan lain dari selain Ahok. Penekanan bisa terlihat dari judul berita yang menuliskan kalimat sudah selesai *kok*, tidak ada pelanggaran. Kata *kok* yang ditulis miring adalah sebagai bentuk penekanan bahwa pernyataan itu hanya sebuah pengakuan yang disampaikan Ahok semata, kemudian menggunakan kata *kok* memberikan makna seakan-akan pernyataan itu tidak formal, dan hanya pengakuan biasa. Dalam bahasa Indonesia yang baku kata *kok* berarti bola bulu tangkis (bahasa Inggris: *Shutt lecock*) adalah bola yang

digunakan dalam olahraga bulu tangkis, terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka, dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus.

Selain pada tulisan, *Republika.co.id* memberikan tekanan pada sebuah gambar yang ditampilkan dalam berita ini. Gambar yang ditampilkan adalah foto Ahok saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu dimana itu adalah tempat Ahok menyatakan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Memang suatu hal yang lumrah jika setiap berita selalu diiringi dengan sebuah gambar. Karena penggunaan foto dalam surat kabar adalah penting karena beberapa sebab. Pertama, foto merupakan unsur pertama yang menangkap mata pembaca, kedua, foto dalam surat kabar bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan pembaca yang mempunyai latar belakang beraneka ragam, karena foto bersifat universal.

Yang menarik dari gambar yang ditampilkan *Republika.co.id* pada berita ini adalah penambahan tulisan “dibohongin pake surat Al-Maidah Ayat 51”. Selain menampilkan foto Ahok yang sedang pidato dengan bahasa tubuh yang sedang emosi, *Republika.co.id* juga menambahkan tulisan pada gambar Ahok tersebut yang bertuliskan “dibohongin pake surat Al-Maidah Ayat 51”. Frame ini ingin lebih menonjolkan pada pidato Ahok yang menyatakan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, bukan pada pengakuan Ahok yang mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

Tabel 4.16 Frame *Republika.co.id*, 13 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	Dari judul yang ditampilkan, secara sederhana memberikan asumsi bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ahok terkait dengan pernyataannya tentang dibohongi Al-Maidah 51, namun judul ini tidak mencerminkan dari lead berita yang disajikan. Teks berita ini dimulai dengan kalimat, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menimbulkan kemarahan umat Islam soal

	<p>pernyataannya terkait Surah Al-Maidah ayat 51. Ahok mengatakan hal itu sudah selesai dan mengklaim tidak ada pelanggaran.</p> <p>Pada teks ini <i>Republika.co.id</i> menyampaikan sebuah kemarahan yang dilakukan oleh umat muslim kepada Gubernur DKI Jakarta atas pernyataan tentang dibohongi surah Al-Maidah 51, <i>Republika.co.id</i> menggambar situasi emosi yang dirasakan oleh umat muslim terhadap Ahok terkait dengan yang menyatakan dibohongi surah Al-Maidah 51.</p>
Skrip	<p><i>Republika.co.id</i> menuliskan pengakuan Ahok bahwa semua pemimpin agama sudah ngomong, namun Ahok hanya menyebut PBNU. Dari teks ini bisa dilihat bahwa <i>Republika.co.id</i> ingin menunjukkan sebuah kebohongan yang diucapkan oleh Ahok, jika semua pemimpin agama menyatakan Ahok tidak melakukan pelanggaran, lalu kenapa PBNU yang disebut pemimpin agama. PBNU bukan pemimpin agama tetapi organisasi masyarakat islam, jika yang dimaksud semua pemimpin agama itu adalah organisasi islam kenapa tidak ada disebut organisasi islam selain PBNU, karena ormas islam di Indonesia sangat banyak.</p> <p>Pada teks berita ini, terlihat secara lengkap <i>Republika.co.id</i> menuliskan kalimat beritanya sesuai dengan ucapan yang disampaikan oleh Ahok, tanpa ada polesan atau tambahan agar berita ini terlihat lebih baik.</p>
Tematik	<p>Hubungan antara kalimat awal dengan kalimat berikutnya bertentangan, 1 adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menimbulkan kemarahan umat Islam soal pernyataannya terkait Surah Al-Maidah ayat 51. 2 Orang sudah selesai <i>kok</i>. Semua pemimpin agama PBNU sudah <i>ngomong</i>. pada awal kalimat <i>Republika.co.id</i> sudah memulai dengan sebuah interpretasi lain, kalimat pembuka</p>

	dari berita ini adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menimbulkan kemarahan umat Islam soal pernyataannya terkait Surah Al-Maidah ayat 51. Agak sulit menyatakan bahwa frame <i>Republika.co.id</i> pada berita ini tidak ikut menyalahi Ahok.
Retoris	<p>Penekanan bisa terlihat dari judul berita yang menuliskan kalimat sudah selesai <i>kok</i>, tidak ada pelanggaran. Kata <i>kok</i> yang ditulis miring adalah sebagai bentuk penekanan bahwa pernyataan itu hanya sebuah pengakuan yang disampaikan Ahok semata, kemudian menggunakan kata <i>kok</i> memberikan makna seakan-akan pernyataan itu tidak formal, dan hanya pengakuan biasa. Dalam bahasa Indonesia yang baku kata <i>kok</i> berarti bola bulu tangkis (bahasa Inggris: <i>Shutt lecock</i>) adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis</p> <p>Selain pada tulisan, <i>Republika.co.id</i> memberikan tekanan pada sebuah gambar yang ditampilkan dalam berita ini. Gambar yang ditampilkan adalah foto Ahok saat menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu dimana itu adalah tempat Ahok menyatakan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51.</p>

6) *Republika.co.id*, 15 Oktober 2016 : Partai Nasdem mendukung polisi usut pelaporan terhadap Ahok.

Analisis **Siktaksis**, judul yang disajikan *Republika.co.id* pada berita ini adalah penafsiran dari pernyataan yang disampaikan oleh Wibi Andrino Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem DKI Jakarta sekaligus sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Wibi Andrino menyampaikan sebagai negara hukum, kami mendukung penuh langkah polisi mengungkap kasus ini agar semuanya jelas terang benderang. kemudian mendorong kasus tersebut dibuka selebar mungkin, karena Wibi Andrino meyakini bahwa kepolisian terlebih lagi di bawah

komando Jenderal Tito Karnavian akan bekerja secara profesional dan bebas intervensi dari pihak manapun. Kepolisian akan melakukan proses hukum tanpa terpengaruh opini publik.

Dari elemen siktaksis, pandangan *Republika.co.id* cenderung lebih membuat frame tentang kesalahan Ahok melalui judul yang ditampilkan. Kemudian dijelaskan pada kalimat pembuka pada berita ini, Partai Nasdem mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara profesional. Ini bertujuan agar kasus tersebut menjadi jelas dan tidak ada dugaan-dugaan negatif yang berkembang ke depannya.

Selain itu, kecenderungan bahwa *Republika.co.id* lebih senang mengungkap kesalahan Ahok terlihat pada akhir-akhir kalimat. Dimana *Republika.co.id* menuliskan bahwa Ahok menjadi bulan-bulanan banyak pihak terkait pernyataannya tentang surah Al-Maidah ayat 51. Semuanya berawal dari beredarnya video di Youtube yang direkam pada acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan warga Kepulauan Seribu. Pernyataan seperti ini adalah bentuk penegasan dari *Republika.co.id* bahwa Ahok benar-benar melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar, sehingga sangat wajar ketika harus diselesaikan oleh pihak Kepolisian.

Analisis **Skrip**, peristiwa yang diangkat dalam berita ini adalah tentang mengusut tuntas pelaporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Apa yang diusut dari laporan yaitu pernyataan tentang surah Al-Maidah 51, siapa yang menyetujui pengusutan laporan itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem DKI Jakarta. Bagaimana pengusutan pelaporan tersebut, kasus tersebut dibuka selebar mungkin. Kepolisian di bawah komando Jenderal Tito Karnavian akan bekerja secara profesional dan bebas intervensi dari pihak manapun. Kepolisian akan melakukan proses hukum tanpa terpengaruh opini publik. Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum harus menghormati proses yang tengah berjalan.

Dari teks ini, *Republika.co.id* memberikan frame pada elemen skripnya bahwa kasus Ahok tentang Al-Maidah 51 ini tidak hanya jadi bulan-bulanan umat muslim Indonesia yang merasa tersinggung dengan ucapannya, namun dorongan untuk mengadili Ahok juga datang dari Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Nasdem DKI Jakarta. Sebagai partai pendukung Ahok pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta masa bakti 2017-2022 menjadi sesuatu yang menarik. Statement ini akan memberikan penafsiran di kalangan masyarakat, bahwa kesalahan Ahok tidak hanya diakui oleh masyarakat muslim secara umum, namun kesadaran akan tindakan tercelah Ahok juga dirasakan oleh DPW Nasdem DKI Jakarta.

Analisis **Tematik**, tema dalam teks berita itu semuanya menunjukkan bahwa Ahok telah melakukan sesuatu yang berakibat harus diusut oleh pihak penegakan hukum dalam hal ini Polisi. Kalimat pertama dalam teks berita ini dituliskan, Partai Nasdem mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara profesional. Kalimat ini menunjukkan bahwa Ahok telah diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum, sehingga harus diusut.

Kalimat berikutnya, mendorong kasus tersebut dibuka selebar mungkin, kepolisian supaya bekerja secara profesional dan bebas intervensi dari pihak manapun serta kepolisian akan melakukan proses hukum tanpa terpengaruh opini publik. Kalimat pemebelaaan muncul pada teks berikutnya, Hingga kini, Wibi percaya apa yang diucapkan Ahok tidak bertujuan untuk mendiskreditkan agama tertentu, serta bukan termasuk tindak pidana. Apalagi, Wibi menyebut Ahok bersama Nasdem telah berkomitmen tak akan menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) hanya untuk kepentingan politik sesaat.

Namun pada akhir-akhir kalimat sebagai penutup berita ini, *Republika.co.id* menceritakan keadaan dan sejarah kasus ini, Ahok menjadi bulan-bulanan banyak pihak terkait pernyataannya tentang surah

Al-Maidah ayat 51. Semuanya berawal dari beredarnya video di Youtube yang direkam pada acara pertemuan Gubernur DKI Jakarta dengan warga Kepulauan Seribu. Video tersebut dipublikasikan pada tanggal 27 September 2016. Dalam video tersebut, Ahok mengatakan bahwa masyarakat yang datang dalam acara tersebut dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 agar tidak memilihnya di pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017.

Susunan kalimat pada teks berita ini cukup unik, di awal teks ini menceritakan yang lebih dominan memberikan statment tentang kesalahan Ahok, kemudian kalimat berikutnya berisi tentang pembelaan. Kemudian teks berita ini ditutup dengan tetap memberikan stigma yang buruk kepada Ahok terhadap pernyataan tentang surah Al_Maidah 51.

Analisis **Retoris**, *Republika.co.id* mencoba untuk mengajak pembacanya sedikit penasaran melalui judul berita yang ditampilkan yaitu “Nasdem Dukung Polisi Usut Pelaporan Terhadap Ahok” sehingga bentuk penekanan kalimat ada pada judul berita ini tepatnya pada partai Nasdem. Sudah menjadi rahasia umum seperti apa komitmen Nasdem terhadap Ahok, partai Nasdem menjadi partai pertama yang menyatakan dukungannya terhadap Ahok. Meski pada awalnya Ahok berniat untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen, namun partai Nasdem tidak pernah mempermasalahkannya. Menurut Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, partai Nasdem tidak akan mempermasalahkan jalur yang akan dipilih Ahok untuk mencalonkan diri, mau dia dari jalur independen ataupun partai politik.

Selanjutnya penekanan juga terdapat pada kata Ahok menjadi bulan-bulanan banyak pihak. Makna menjadi bulan bulanan banyak pihak banyak dikonotasikan sesuatu yang buruk, jadi istilah bulan-bulanan untuk seseorang apalagi seseorang itu merupakan kepala daerah, maka bisa bermakna negatif.

Tabel 4.17 Frame Republika.co.id, 15 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Cenderung menampilkan kesalahan Ahok melalui judul berita. penjelasan pada kalimat pembuka, partai Nasdem mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara profesional. Ini bertujuan agar kasus tersebut menjadi jelas dan tidak ada dugaan-dugaan negatif yang berkembang ke depannya.</p>
Skrip	<p>peristiwa yang diangkat dalam berita ini adalah tentang mengusut tuntas pelaporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dari teks ini, <i>Republika.co.id</i> memberikan frame pada elemen skripnya bahwa kasus Ahok tentang Al-Maidah 51 ini tidak hanya jadi bulan-bulanan umat muslim Indonesia yang merasa tersinggung dengan ucapannya, namun dorongan untuk mengadili Ahok juga datang dari Dewan Pimpinan wilayah (DPW) Nasdem DKI Jakarta.</p>
Tematik	<p>Tema dalam teks berita itu semuanya menunjukkan bahwa Ahok telah melakukan sesuatu yang berakibat harus diusut oleh pihak penegakan hukum dalam hal ini Polisi. Kalimat pertama dalam teks berita ini dituliskan, Partai Nasdem mendukung pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara profesional. Kalimat ini menunjukkan bahwa Ahok telah diduga melakukan pelanggaran terhadap hukum, sehingga harus diusut.</p> <p>Kalimat berikutnya, mendorong kasus tersebut dibuka selebar mungkin, kepolisian supaya bekerja secara profesional dan bebas intervensi dari pihak manapun serta kepolisian akan melakukan proses hukum tanpa terpengaruh opini publik di awal teks menceritakan lebih</p>

	<p>dominan memberikan statment tentang kesalahan Ahok, kemudian kalimat berikutnya berisi tentang pembelaan. Lalu berita ditutup dengan teks yang memberikan stigma buruk kepada Ahok terhadap pernyataan tentang surah Al_Maidah 51.</p>
Retoris	<p>Bentuk penekanan kalimat ada pada judul berita ini tepatnya pada partai Nasdem. Sudah menjadi rahasia umum seperti apa komitmen Nasdem terhadap Ahok, partai Nasdem menjadi partai pertama yang menyatakan dukungannya terhadap Ahok. Meski pada awalnya Ahok berniat untuk maju ke Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independen, namun partai Nasdem tidak pernah mempermasalahkannya</p> <p>Selanjutnya penekanan juga terdapat pada kata Ahok menjadi bulan-bulanan banyak pihak. Makna menjadi bulan-bulanan banyak pihak banyak dikonotasikan sesuatu yang buruk, jadi istilah bulan-bulanan untuk seseorang apalagi seseorang itu merupakan kepala daerah, maka bisa bermakna negatif.</p>

7) *Republika.co.id*, 20 Oktober 2016 : Menurut ICMI pernyataan Ahok soal Al-Maidah 51, merupakan penistaan Al-Qur'an.

Analisis **Siktaksis**, judul dalam berita ini adalah “Soal Al-Maidah 51, ICMI: Pernyataan Ahok Penistaan Al-Qur'an”. Berita ini menggambarkan pernyataan resmi dari salah satu ormas islam yang menyebutkan bahwa Ahok telah melakukan penistaas Al-Qur'an terkait dengan pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 yang disampaikan dalam sambutan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu itu merupakan wujud penistaan Al-Qur'an. Kecendrungan *Republika.co.id* memberikan pembelaan terhadap pernyataan ICMI bisa

dilihat dari kutipan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang ditampilkandalam berita tersebut, “Jelas ini penistaan Al-Qur’an, kasih huruf besar-besar. Kami sebagai cendekiawan muslim tentu membela isi kandungan Al-Qur’an surat apa saja”.

Dominasi dalam berita tertuju pada pernyataan Ahok melakukan prnistaan terhadap Al-Qur’an, sejak awal hingga pada akhir kalimat semua isi teks beritanya menyampaikan pelanggaran yang dilakukan Ahok. Beberapa kutipan teks diantaranya: “Sungguh sungguh ICMI tidak pernah berpolitik. Kami ini sedang berusaha menyatukan dan menyejukkan umat, agar tidak terbelah dan tidak anarkis. Contoh lah nabi, bisa membela Al-Qur’an dengan damai". Isi kandungan Al-Qur’an merupakan sesuatu yang mutlak bagi umat muslim. ICMI berharap kepala daerah manapun tidak meresahkan masyarakat. "Ini tidak main-main karena pelanggarannya sudah meresahkan umat Islam. Terutama resahnya itu lama sudah dua bulan. Kalau masyarakat resah itu akan membuat saling curiga," kata dia.

ICMI juga meminta seluruh pihak menyerahkan kasus dugaan penistaan Al-Qur’an kepada pihak berwajib. Ketua Koordinasi Organisasi dan Pembinaan Keanggotaan ICMI Didin Muhafidin menyatakan seorang kepala daerah dilarang meresahkan masyarakat.

Menurut Didin, ICMI mendorong pihak berwajib menyelesaikan masalah hukum dugaan penistaan Al-Qur’an yang melibatkan pejabat publik secara transparan, akuntabel dan seadil-adilnya. ICMI juga meminta Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan pengesahan calon kepala daerah yang diduga menistakan Al-Qur’an dan telah meresahkan masyarakat.

"Di dalam UU Pilkada syarat calon gubernur itu tidak boleh melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan keterangan kepolisian," kata Didin. ICMI juga meminta masyarakat memperjuangkan keadilan dengan tertib dan damai”

Analisis **Skrip**, berita ini berisikan pendapat organisasi Islam yaitu Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang menyebutkan Ahok telah melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an terkait pernyataan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Yang disampaikan dalam berita ini adalah pernyataan dari ormas ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia menyampaikan bahwa Ahok telah menistakan Al-Qur'an dalam pidatonya di Kepulauan Seribu waktu melakukan kunjungan kerja. Sebagai cendekiawan muslim lembaga ini melakukan pembelaannya terhadap isi kandungan Al-Qur'an surat apa saja.

Bentuk pernyataan ini disampaikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui konferensi pers, yang berisi *pertama*, konferensi pers yang dilakukan untuk menyikapi penistaan terhadap Al-Qur'an, tindakan ICMI tidak ada muatan politiknya. *Kedua*, ICMI mengatakan isi kandungan Al-Qur'an merupakan sesuatu yang mutlak bagi umat muslim. ICMI berharap kepala daerah manapun tidak meresahkan masyarakat. Tindakan Ahok ini tidak main-main karena pelanggarannya sudah meresahkan umat Islam. Terutama resahnya itu lama sudah dua bulan. *Ketiga*, ICMI juga meminta seluruh pihak menyerahkan kasus dugaan penistaan Al-Qur'an kepada pihak berwajib, ICMI mendorong pihak berwajib menyelesaikan masalah hukum dugaan penistaan Al-Qur'an yang melibatkan pejabat publik secara transparan, akuntabel dan seadil-adilnya. *Keempat*, ICMI juga meminta Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan pengesahan calon kepala daerah yang diduga menistakan Al-Qur'an dan telah meresahkan masyarakat.

Analisis **Tematik**, *Republika.co.id* mendukung bahwa Ahok telah melakukan penistaan Al-Qur'an, hal ini bisa dilihat dari tema besar berita ini yang tertuang di dalam judul berita. Kemudian judul berita ini dijabarkan di dalam isi berita. Terlihat secara jelas bentuk dukungan *Republika.co.id* bahwa Ahok telah melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an. Dukungan ini dimuat didalam berita yang ditulis dalam teks berita mulai dari awal kalimat hingga penutup.

Pandangan *Republika.co.id* bahwa Ahok telah menistakan Al-Qur'an tercermin dari kesenimbangan antar kalimat. Kalimat awal menuliskan bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu merupakan wujud penistaan Al-Qur'an. Kemudian diakhir-akhir kalimat *Republika.co.id* menuliskan bahwa ICMI mendorong pihak berwajib menyelesaikan masalah hukum dugaan penistaan Al-Qur'an yang melibatkan pejabat publik secara transparan, akuntabel dan seadil-adilnya. ICMI juga meminta Komisi Pemilihan Umum mempertimbangkan pengesahan calon kepala daerah yang diduga menistakan Al-Qur'an dan telah meresahkan masyarakat. Di dalam UU Pilkada syarat calon gubernur itu tidak boleh melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan keterangan kepolisian.

Bentuk lain yang bisa mencerminkan bahwa *Republika.co.id* mendukung bahwa Ahok telah menistakan Al-Qur'an adalah, tidak adanya narasumber lain yang ditampilkan dalam berita ini. Memang ini tidak dipermasalahkan dalam kaedah penulisan berita, namun jika ada narasumber yang lain sebagai pembanding dari pernyataan sikap Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sesungguhnya akan lebih baik.

Analisis **Retoris**, penistaan Al-Qur'an yang dituliskan pada judul berita merupakan bentuk penekanan berita yang dimuat oleh *Republika.co.id*. kata penistaan Al-Qur'an telah ditulis sebanyak enam kali dalam berita tersebut diantara ditulis pada judul, kemudian pada kalimat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu merupakan wujud *penistaan Al-Qur'an*. Pada paragraf kedua, Jelas ini *penistaan Al-Qur'an*, kasih huruf besar-besar. Kami sebagai cendekiawan muslim tentu membela isi kandungan Al-Qur'an surat apa saja. Paragraf ketiga, Jelas ini *penistaan Al-Qur'an*, kasih huruf besar-besar. Kami sebagai cendekiawan muslim tentu membela isi kandungan Al-Qur'an surat apa saja. Paragraf keenam, ICMI juga

meminta seluruh pihak menyerahkan kasus dugaan *penistaan Al-Qur'an* kepada pihak berwajib. Paragraf ketujuh, Menurut Didin, ICMI mendorong pihak berwajib menyelesaikan masalah hukum dugaan *penistaan Al-Qur'an* yang melibatkan pejabat publik secara transparan, akuntabel dan seadil-adilnya.

Tabel 4.18 Frame *Republika.co.id*, 20 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	Berita ini menggambarkan pernyataan resmi dari salah satu ormas islam yang menyebutkan bahwa Ahok telah melakukan penistaas Al-Qur'an terkait dengan pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 yang disampaikan dalam sambutan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu
Skrip	pendapat organisasi Islam yaitu Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang menyebutkan Ahok telah melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an terkait pernyataan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Dominasi dalam berita tertuju pada pernyataan Ahok melakukan prnistaan terhadap Al-Qur'an, sejak awal hingga pada akhir kalimat semua isi teks beritanya menyampaikan pelanggaran yang dilakukan Ahok. Beberapa kutipan teks diantaranya: “Sungguh sungguh ICMI tidak pernah berpolitik. Kami ini sedang berusaha menyatukan dan menyejukkan umat, agar tidak terbelah dan tidak anarkis.
Tematik	Terlihat secara jelas bentuk dukungan <i>Republika.co.id</i> bahwa Ahok telah melakukan penistaan terhadap Al-Qur'an . Dukungan ini dimuat didalam berita yang ditulis dalam teks berita mulai dari awal kalimat hingga penutup. Pandangan <i>Republika.co.id</i> bahwa Ahok telah menistakan Al-Qur'an tercermin dari kesenimbangan antar kalimat. Kalimat awal menuliskan bahwa Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai kasus yang melibatkan

	Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu merupakan wujud penistaan Al-Qur'an. Kemudian diakhir-akhir kalimat <i>Republika.co.id</i> menuliskan bahwa ICMI mendorong pihak berwajib menyelesaikan masalah hukum dugaan penistaan Al-Qur'an.
Retoris	Penekanan pada penistaan Al-Qur'an. Kata penistaan Al-Qur'an telah ditulis sebanyak enam kali dalam berita tersebut Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menilai kasus yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu merupakan wujud <i>penistaan Al-Qur'an</i> .

8) Reublika.co.id, 21 Oktober 2016: Massa ormas islam jabar melakukan demo menuntut Ahok dipidana.

Ananlisis **Siktaksis**, judul yang ditampilkan dalam berita ini menunjukkan nominalisasi bahwa semua ormas Islam di Jabar melakukan demo untuk menuntut Ahok dipidana atas pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Yang menjadi judul dalam berita ini bukan ormas islam tertentu yang melakukan demo, namun menggunakan ormas Islam Jabar. Judul semacam ini upaya untuk membentuk opini kepada keberpihakan secara global. Kata ormas Islam adalah bentuk global dari bermacam ormas islam yang ada di Jabar. Menggunakan kata ormas Islam tentu ini membangun stigma bagi pembaca bahwa semua ormas yang berideologi islam telah melakukan demo untuk menuntut Ahok dipidana.

Pada awal teks berita dinyatakan aksi ini dilakukan oleh gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam seluruh Jawa Barat, aksi disebut Aksi Damai Bela Islam di Kota Bandung. Ribuan orang yang terlibat unjuk rasa sekaligus *long march* dari halaman Gedung Sate di Jalan Diponegoro menuju Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Aksi ini

dilatarbelakangi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok terkait Surah Al-Maidah yang dinilai menjadi alat pembohong. Pernyataan itu dianggap menyakiti hati seluruh umat Muslim, bukan hanya yang di Jakarta.

Disebutkan beberapa organisasi islam ikut tergabung dalam aksi damai bela Islam di kota Bandung tersebut, namun masih ada juga organisasi masyarakat islam lain yang tidak disebut dan tidak ikut dalam aksi ini. Jika mengatakan bahwa ini adalah aksi organisasi Islam Jawa Barat seharusnya diberikan penegasan bahwa tidak ada satupun organisasi masyarakat islam di Jawa Barat yang tidak ikut pada aksi tersebut. Jika dicermati, ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan belum terlalu lengkap, dalam kalimat berikutnya *Republika.co.id* menampilkan sebuah pernyataan yang diwakili oleh ormas Front Pembela Islam (FPI) yang menjabat sebagai panitia aksi, dalam pernyataannya disampaikan bahwa unjuk rasa ini ditujukan untuk menuntut agar Ahok menjadi terdakwa. Pasalnya pernyataan Ahok sudah melecehkan ayat suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat Muslim.

Analisis **Skrip**, berita ini menceritakan unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam seluruh Jawa Barat yang disebut 'Aksi Damai Bela Islam'. Pada judul berita disebut aksi ini adalah aksi ormas islam Jawa Barat, tidak disebutkan organisasi islam yang dimaksud. Kemudian didalam penjelasan disebut gabungan organisasi masyarakat islam.

Dari analisis skrip, *Republika.co.id* menunjukkan dukungannya terhadap aksi yang menuntut Ahok dipidana, bentuk dukungan itu bisa dianalisis dari beberapa teks dalam berita ini. Isi dari teks berita ini diantaranya menjelaskan bahwa unjuk rasa ini ditujukan untuk menuntut agar Ahok menjadi terdakwa. Terkait dengan pernyataan Ahok yang telah melecehkan ayat suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Muslim. Lewat demo besar yang dilakukan itu diharapkan menjadi dorongan agar institusi kepolisian berani memproses Ahok yang telah menyakiti hati

umat Islam. Polemik tersebut harus menjadi pelajaran bagi pemimpin lainnya. Bahwa dalam berpolitik diharapkan tidak menjelek-jelekan agama lain. Kasus Ahok harus jadi pelajaran kepada pemimpin lain.

Para pendemo ini meminta kepada pihak kepolisian agar dalam satu bulan status terdakwa Ahok sudah harus diputuskan. Jika dalam tenggat waktu tersebut tidak juga ada perkembangan kasus hukum atas Ahok, maka massa mengancam akan melakukan demo yang lebih besar lagi, serta demo tersebut akan dilaksanakan langsung di DKI Jakarta.

Analisis **Tematik**, jika dibaca secara utuh berita yang dikeluarkan *Republika.co.id* edisi 21 Oktober 2016 ini, maka akan terlihat bentuk dukungan *Republika.co.id* terhadap unjuk rasa yang digelar di kota Bandung Jawa Barat tersebut. Memberikan dukungan terhadap unjuk rasa yang dilakukan tersebut berarti juga memberikan dukungan terhadap penuntutan pidana terhadap Ahok. Bentuk dukungan yang diberikan oleh *Republika.co.id* bisa terbaca melalui kalimat-kalimat yang disajikan pada teks berita ini.

Saling berhubungan antar kalimat dalam teks ini bisa disimpulkan bahwa kegiatan demo yang dilaksanakan oleh gabungan organisasi masyarakat Islam Jawa Barat itu diapresiasi melalui teks berita yang dipublikasikan oleh *Republika.co.id*. Judul dalam berita adalah Massa Ormas Islam Jabar Demo Tuntut Ahok Dipidana. Kemudian bentuk penegasan dari judul itu dituliskan di beberapa tema kalimat yang ditampilkan, diantaranya Aksi ini dilatarbelakangi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok terkait Surah Al-Maidah yang dinilai menjadi alat pembohong. Pernyataan itu dianggap menyakiti hati seluruh umat Muslim, bukan hanya yang di Jakarta.

Kalimat yang lain juga bisa dilihat misalnya Panitia aksi yang juga Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Kota Bandung Ahmad Kurniawan mengatakan unjuk rasa ini ditujukan untuk menuntut agar Ahok menjadi terdakwa. Pasalnya pernyataan Ahok sudah melecehkan ayat suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup umat Muslim. "Kepada Bareskrim

kami ingin tindak Ahok jadi terdakwa karena sudah nyata fakta saksi dan pernyataan beliau yang bilang dibohongi Al-Qur'an ,". Kemudian *Republika.co.id* menutup berita ini dengan kalimat “dalam aksi ini, massa berjalan kaki dengan rute dari Gedung Sate, Polrestabes, hingga ke Gedung Merdeka. Mereka mengenakan pakaian putih-putih sambil meneriakkan tuntutan pidana bagi Ahok. Ormas yang terlibat di antaranya FPI, Garis, Pemuda Bulan Bintang, Muhammadiyah, Persis, Annas dan sejumlah ormas lainnya”

Analisis **Retoris**, judul dalam berita ini sudah menunjukkan penekanan pada kata ormas islam Jabar. Ormas islam jabar bermakna semua ormas yang berlatar belakang agama islam, kata ormas islam jabar ini hanya terdapat pada judul. Tidak ada kata ini dimunculkan dalam kalimat pada teks berita ini, apalagi diakhir kalimat dituliskan beberapa ormas islam saja yang ikut dalam aksi tersebut. Ini menunjukkan bahwa judul berita itu yang menggunakan kata ormas islam jabar hanya untuk memberikan penekanan pada makna tertentu saja.

Kemudian pada gambar, ditampilkan ratusan peserta unjuk rasa yang menggunakan baju putih dilengkapi dengan kopiah dan surban yang berdiri tegak dengan rapih. Ini menunjukkan penekanan juga ditampilkan pada pilihan gambar yang ditampilkan. Ratusan pendemo menunjukkan bahwa peserta yang hadir dalam aksi ini cukup banyak, menggunakan identitas muslim ini juga menampilkan pesan bahwa yang hadir dalam aksi ini adalah ormas islam yang terdiri dari berbagai latar belakang organisasi masyarakat islam. Gambar yang berdiri secara rapih dan teratur, gambar ini ingin menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan benar-benar dalam keadaan damai, tidak perbuatan anarkis yang dilakukan. Sehingga demo yang dilakukan ini sesuai dengan temanya yaitu disebut dengan 'Aksi Damai Bela Islam.

Tabel 4.19 Frame *Republika.co.id*, 21 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Judul yang ditampilkan dalam berita ini menunjukkan nominalisasi bahwa semua ormas Islam di Jabar melakukan demo untuk menuntut Ahok dipidana atas pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Yang menjadi judul dalam berita ini bukan ormas islam tertentu yang melakukan demo, namun menggunakan ormas Islam Jabar. Judul semacam ini upaya untuk membentuk opini kepada keberpihakan secara global</p>
Skrip	<p>Dari analisis skrip, <i>Republika.co.id</i> menunjukkan dukungannya terhadap aksi yang menuntut Ahok dipidana, bentuk dukungan itu bisa dianalisis dari beberapa teks dalam berita ini. Isi dari teks berita ini diantaranya menjelaskan bahwa unjuk rasa ini ditujukan untuk menuntut agar Ahok menjadi terdakwa. Terkait dengan pernyataan Ahok yang telah melecehkan ayat suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Muslim. Lewat demo besar yang dilakukan itu diharapkan menjadi dorongan agar institusi kepolisian berani memproses Ahok yang telah menyakiti hati umat Islam. Polemik tersebut harus menjadi pelajaran bagi pemimpin lainnya. Bahwa dalam berpolitik diharapkan tidak menjelek-jelekan agama lain. Kasus Ahok harus jadi pelajaran kepada pemimpin lain. Berita ini menceritakan unjuk rasa yang dilakukan oleh gabungan organisasi masyarakat (ormas) Islam seluruh Jawa Barat yang disebut 'Aksi Damai Bela Islam.</p>
Tematik	<p>Saling berhubungan antar kalimat dalam teks ini bisa disimpulkan bahwa kegiatan demo yang dilaksanakan</p>

	<p>oleh gabungan organisasi masyarakat islam Jawa Barat itu diapresiasi melalui teks berita yang dipublikasikan oleh <i>Republika.co.id</i>. judul dalam berita adalah Massa Ormas Islam Jabar Demo Tuntut Ahok Dipidana. Kemudian bentuk penegasan dari judul itu dituliskan di beberapa tema kalimat yang ditampilkan, diantaranya Aksi ini dilatarbelakangi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok terkait Surah Al-Maidah yang dinilai menjadi alat pembohong. Pernyataan itu dianggap menyakiti hati seluruh umat Muslim, bukan hanya yang di Jakarta.</p>
Retoris	<p>Penekanan pada kata ormas islam Jabar. Ormas islam jabar bermakna semua ormas yang berlatar belakang agama islam, kata ormas islam jabar ini hanya terdapat pada judul. Tidak ada kata ini dimunculkan dalam kalimat pada teks berita ini, apalagi diakhir kalimat dituliskan beberapa ormas islam saja yang ikut dalam aksi tersebut. Ini menunjukkan bahwa judul berita itu yang menggunakan kata ormas islam jabar hanya untuk memberikan penekanan pada makna tertentu saja.</p> <p>Kemudian pada gambar, ditampilkan ratusan peserta unjuk rasa yang menggunakan baju putih dilengkapi dengan kopiah dan surban yang berdiri tegak dengan rapih. Ini menunjukkan penekanan juga ditampilkan pada pilihan gambar yang ditampilkan. Ratusan pendemo menunjukkan bahwa peserta yang hadir dalam aksi ini cukup banyak, menggunakan identitas muslim ini juga menampilkan pesan bahwa yang hadir dalam aksi ini adalah ormas islam yang terdiri dari berbagai latar belakang organisasi masyarakat islam.</p>

	Gambar yang berdiri secara rapih dan teratur, gambar ini ingin menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan benar-benar dalam keadaan damai, tidak perbuatan anarkis yang dilakukan
--	--

9) *Republika.co.id* 25 Oktober 2016: Hasil uji forensik Mabes Polri soal video Al-Maidah 51.

Analisis **Siktaksis**, berita *Republika.co.id* edisi 25 Oktober 2016 ini ingin memberitahukan tentang hasil uji forensik dari Mabes Polri soal video Ahok yang menyatakan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, jika dianalisis dari judul berita yang ditampilkan mak tidak ada terkesan bentuk kepentingan *Republika.co.id* terhadap hasil dari uji forensik itu. Dari skema siktaksis, judul ini hanya ingin memberitahukan khalayak tentang hasil dari uji forensik itu, secara normal pihak yang mempermasalahkan atau yang tidak mempermasalahkan tentang pernyataan Ahok dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 memiliki kepentingan untuk membaca berita ini. Dari judul yang ditampilkan “ini hasil uji forensik Mabes Polri soal video Al-Maidah 51” tidak ada frame bahwa berita yang dipublikasikan menguntungkan atau merugikan pihak-pihak tertentu.

Frame *Republika.co.id* bisa terlihat pada awal kalimat dari teks berita ini yang menyatakan bahwa hasil uji forensik video dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah keluar. Puslabfor membenarkan bahwa telah terjadi pemotongan dari durasi panjang video tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto mengatakan, hasil uji labfor hanya mengatakan hanya terjadi pemotongan. Sedangkan penambahan-penambahan tertentu tidak ditemukan sama sekali di dalam video itu.

Dalam teks ini berisikan tentang hasil forensik Mabes Polri yang menyatakan bahwa video Ahok memang ada pemotongan, namun video

murni tidak ada penambahan atau pengurangan. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa jika hanya potongan video yang diambil dari video utuhnya dengan tanpa ada penambahan-penambahan apalagi pengeditan oleh pihak-pihak tertentu, artinya video ini betul-betul murni. Sehingga publik bisa menyimpulkan bahwa pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 itu benar adanya. Dari analisis siktaksis, ada upaya *Republika.co.id* untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat bahwa dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ahok atas pernyataannya tentang dibohongi Al-Maidah 51 itu benar adanya, ini bisa dilihat dari latar atau bagian berita yang ditampilkan.

Analisis **Skrip**, berita ini bermaksud untuk menceritakan hasil dari uji forensik yang dilakukan oleh Mabes Polri, atas video Ahok atas pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Secara umum makna uji forensik adalah upaya yang dilakukan dengan tujuan membantu penyidik untuk menentukan identitas seseorang. Identifikasi personal sering merupakan suatu masalah dalam kasus pidana maupun perdata. Menentukan identitas personal dengan tepat amat penting dalam penyidikan karena adanya kekeliruan dapat berakibat fatal dalam proses peradilan.

Unsur *what* dalam berita ini adalah hasil uji forensik Mabes Polri tentang video Ahok, yang melakukannya uji forensik video Ahok tentang pernyataan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 adalah Mabes Polri, hasilnya forensiknya membenarkan bahwa telah terjadi pemotongan dari durasi panjang video tersebut. Hasil uji labfor hanya mengatakan hanya terjadi pemotongan. Sedangkan penambahan-penambahan tertentu tidak ditemukan sama sekali di dalam video itu.

Analisis **Tematik**, peristiwa yang disampaikan sesungguhnya dalam berita ini adalah hasil uji forensik yang menyatakan tidak ada penambahan dari video tersebut, frame yang disampaikan *Republika.co.id* dari skema tematik ini adalah kebenaran dari video yang dilakukan Ahok, yang ditunjukkan melalui uji forensik. Kebenaran dari video ini

mengisyaratkan bahwa dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan Ahok benar adanya. Membenarkan adanya dugaan penistaan terhadap yang dilakukan Ahok menunjukkan dukungan *Republika.co.id* kelompok yang menganggap Ahok telah melakukan penistaan Al-Qur'an .

Kemudian bentuk dukungan *Republika.co.id* kepada kelompok yang menganggap Ahok telah melakukan penistaan Al-Qur'an juga terlihat dari ungkapan-ungkapan di beberapa kalimat yang tertulis dalam teks berita ini, seperti pada kalimat “Andrianto menjabarkan, setelah hasil uji labfor keluar, pihaknya pun melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Ahok. Hasil klarifikasi pada mantan bupati Belitung Timur menyatakan bahwa memang tidak ditemukan juga penambahan dalam video yang telah dipotong itu.

Analisis **Retoris**, isi pesan yang disampaikan dalam berita ini adalah hasil forensik video Ahok yang dinyatakan benar adanya pemotongan pada video Ahok tersebut, meskipun adanya pemotongan dari durasi panjang video tersebut, namun video itu tetap mengeluarkan makna yang asli, karena video Ahok terkait dengan pernyataan tentang dibohongi Al-Maidah 51 ini tidak ada penambahan dan pengurangan. *Republika.co.id* lebih cenderung melakukan penekanan pada kata tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, artinya *Republika.co.id* ingin menekankan bahwa benar adanya apa yang disaksikan dan di dengar di dalam video yang diduga menistakan Al-Qur'an itu, asli disampaikan oleh yang bersangkutan (Ahok).

Kemudian selaian penekanan terdapat pada kalimat tidak ada penambahan dan pengurangan, makna kalimat yang bisa menyimpulkan bahwa *Republika.co.id* lebih cenderung memihak kepada kelompok yang menganggap Ahok menistakan Al-Qur'an juga bisa dilihat dari kalimat yang terdapat pada teks sebagai penutup berita ini yang menyatakan bahwa proses penyelidikan dugaan penistaan kepada surah Al-Maidah 51 akan terus dilanjutkan. Karena hasil labfor telah keluar, maka langkah selanjutnya adalah mendatangkan para ahli.

Tabel 4.20 Frame Republika.co.id, 25 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Teks Ini Berisikan Tentang Hasil Forensik Mabes Polri Yang Menyatakan Bahwa Video Ahok Memang Ada Pemotongan, Namun Video Murni Tidak Ada Penambahan Atau Pengurangan. Kalimat Ini Mengisyaratkan Bahwa Jika Hanya Potongan Video Yang Diambil Dari Video Utuhnya Dengan Tanpa Ada Penambahan-Penambahan Apalagi Pengeditan Oleh Pihak-Pihak Tertentu, Artinya Video Ini Betul-Betul Murni.</p> <p>Dalam teks ini berisikan tentang hasil forensik Mabes Polri yang menyatakan bahwa video Ahok memang ada pemotongan, namun video murni tidak ada penambahan atau pengurangan. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa jika hanya potongan video yang diambil dari video utuhnya dengan tanpa ada penambahan-penambahan apalagi pengeditan oleh pihak-pihak tertentu, artinya video ini betul-betul murni.</p>
Skrip	<p>Berita ini adalah hasil uji forensik Mabes Polri tentang video Ahok, yang melakukannya uji forensik video Ahok tentang pernyataan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 adalah Mabes Polri, hasilnya forensiknya membenarkan bahwa telah terjadi pemotongan dari durasi panjang video tersebut. Hasil uji labfor hanya mengatakan hanya terjadi pemotongan. Sedangkan penambahan-penambahan tertentu tidak ditemukan</p>

	sama sekali di dalam video itu.
Tematik	<p>Kebenaran dari video yang dilakukan Ahok, yang ditunjukkan melalui uji forensik. Kebenaran dari video ini mengisyaratkan bahwa dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan Ahok benar adanya. Membenarkan adanya dugaan penistaan terhadap yang dilakukan Ahok menunjukkan dukungan <i>Republika.co.id</i> kelompok yang menganggap Ahok telah melakukan penistaan Al-Qur'an.</p> <p>Kemudian bentuk dukungan <i>Republika.co.id</i> kepada kelompok yang menganggap Ahok telah melakukan penistaan Al-Qur'an juga terlihat dari ungkapan-ungkapan di beberapa kalimat yang tertulis dalam teks berita ini, seperti pada kalimat "Andrianto menjabarkan, setelah hasil uji labfor keluar, pihaknya pun melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Ahok. Hasil klarifikasi pada mantan bupati Belitung Timur menyatakan bahwa memang tidak ditemukan juga penambahan dalam video yang telah dipotong itu.</p>
Retoris	<p>Teks berita ini memberikan penekanan pada kata tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, artinya <i>Republika.co.id</i> ingin menekankan bahwa benar adanya apa yang disaksikan dan di dengar di dalam video yang diduga menistakan Al-Qur'an itu, asli disampaikan oleh yang bersangkutan (Ahok).</p> <p>Kemudian pada kalimat, kendati demikian, lanjutnya, proses penyelidikan dugaan penistaan kepada surah Al-Maidah 51 akan terus dilanjutkan. Karena hasil labfor telah keluar, maka langkah selanjutnya adalah mendatangkan para ahli</p>

10) *Republika.co.id* 31 Oktober 2016: setelah minta maaf, Ahok menganggap kasus Al-Maidah 51 telah selesai.

Analisis **Siktaksis**, lead yang ditulis dalam kalimat berita ini sedikit agak berbeda penjelasannya jika kita teliti dari judul berita yang diangkat. Judul dalam berita ini “sudah minta maaf, Ahok anggap kasus Al-Maidah 51 selesai”. Kalimat awal yang dituliskan dalam teks adalah rencana aksi besar-besaran yang akan dilakukan umat muslim pada tanggal 4 November 2016, kutipan kalimat yang dituliskan *Republika.co.id* yaitu Gabungan dari ribuan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan berencana akan berunjuk rasa besar-besaran pada Jumat (4/11) di Istana Negara Republik Indonesia. Demo ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dalam pernyataannya soal surah Al-Maidah ayat 51.

Namun, Ahok tak ambil pusing dengan rencana unjuk rasa besar-besaran ini. Ahok menganggap kasus ini sudah selesai dan dia pun sudah meminta maaf. "Saya kira kasus sudah selesai. Kita sudah minta maaf, kita sudah datang ke Bareskrim. Silakan bagi pihak yang enggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum, minta saja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim. Buat apa merusak Jakarta gitu lho," ujar Ahok di Kebagusan, Senin (31/10). dengan judulnya. Penjelasan yang disampaikan dalam kalimat pada berita ini sedikit tidak nyambung ketika membaca judul beritanya.

Dari analisis siktaksis pengungkapan dalam berita ini menunjukkan keberpihakan *Republika.co.id* kepada kelompok yang menganggap Ahok telah menistakan Al-Qur'an, karena yang dibesarkan dalam lead berita ini adalah rencana aksi besa-besaran umat muslim yang akan dilaksanakan pada 1 November 2016 atau disebut dengan aksi 411.

Analisis **Skrip**, dari struktur skrip dapat dilihat bagaimana *Republika.co.id* mengisahkan peristiwa dalam berita ini, tidak menggunakan struktur piramida terbalik. Kalimat berita dimulai dari *what*, namun *what* yang diceritakan dalam berita ini bukanlah menerangkan tentang apa isi

berita yang jika dilihat dari judul yang ditampilkan. Namun *Republika.co.id* memulai dengan *What* yaitu menceritakan tentang Gabungan dari ribuan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan berencana akan berunjuk rasa besar-besaran pada Jumat (4/11) di Istana Negara Republik Indonesia. Dari komponen ini bisa dilihat bagaimana *Republika.co.id* terkesan mendukung kelompok yang menganggap bahwa Ahok telah menistakan Al-Qur'an, *Republika.co.id* membuat judul yang berisikan Ahok sudah minta maaf namun yang ditonjolkan dalam penjelasan kalimat adalah upaya aksi yang akan dilakukan umat Islam pada tanggal 4 November 2016 yang akan datang, atau yang dikenal dengan aksi 411.

Diantara judul dengan penjelasan kalimat ini kemudian menjadi dua hal yang memiliki perbedaan makna. Pada judul berita disampaikan Ahok sudah minta maaf, namun dalam penjelasannya berisikan tentang rencana aksi umat muslim terkait dengan dugaan penistaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ahok. Logika dalam pemahaman berita ini sedikit terbalik, seharusnya jika Ahok sudah minta maaf, dan menganggap kasus ini sudah selesai seharusnya, maka tidak ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh umat muslim. Seharusnya jika *Republika.co.id* ingin tetap menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan oleh umat muslim terkait dengan dugaan penistaan Al-Qur'an dalam tubuh beritanya, kiranya lebih pas jika judul yang ditampilkan bukan "sudah minta maaf, Ahok anggap kasus Al-Maidah 51 selesai" namun sebaiknya menggunakan judul yang berkaitan dengan rencana aksi umat muslim pada tanggal 4 November 2016, atau jika tetap ingin menggunakan kata Ahok sudah meminta maaf, maka judul itu bisa ditambah. Seperti Ahok sudah minta maaf, namun umat muslim akan tetap melakukan aksi 411. Tentunya jika judul ini yang ditampilkan akan lebih pas jika mengkaitkan diantara judul berita dengan penjelasan yang terdapat didalam berita tersebut, walaupun pada akhirnya berita ini akan dimaknai beragam oleh para pembacanya. Bisa saja ada yang memberikan makna bahwa kasus Ahok tentang pernyataannya dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 sudah sangat besar, sehingga sulit untuk

dimaafkan oleh umat. Atau bisa juga para pembacanya memaknai dari judul itu bahwa umat muslim sudah tidak lagi punya kesabaran, Ahok sudah menyampaikan permintaan maafnya namun umat tetap akan melakukan aksi itu.

Analisis **Tematik**, dari unsur tematik ini bisa disimpulkan bahwa tema yang disampaikan pada dasarnya adalah tentang rencana aksi umat muslim yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016, meskipun judul berita ini adalah tentang Ahok sudah minta maaf, Ahok anggap kasus Al-Maidah 51 selesai. Namun tema besar yang terdapat dalam berita ini adalah menceritakan rencana aksi 411, ini bisa dilihat dari beberapa tema kalimat yang menceritakan tentang aksi umat islam terhadap Ahok. Seperti pada awal kalimat yang berbunyi, Gabungan dari ribuan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan berencana akan berunjuk rasa besar-besaran pada Jumat (4/11) di Istana Negara Republika Indonesia. Demo ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dalam pernyataannya soal surah Al-Maidah ayat 51. Kalimat ini tidak spesifik menampilkan tentang Ahok sudah minta maaf, kalimat Ahok meminta maaf hanya dituliskan sebagai pelengkap dari berita yang menceritakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh umat muslim.

Kemudian dalam kalimat lain *Republika.co.id* menuliskan kembali tentang aksi yang akan dilakukan yang mengutip pernyataan Ahok yang berbunyi, Namun, Ahok tak ambil pusing dengan rencana unjuk rasa besar-besaran ini. Ahok menganggap kasus ini sudah selesai dan dia pun sudah meminta maaf. "Saya kira kasus sudah selesai. Kita sudah minta maaf, kita sudah datang ke Bareskrim. Silakan bagi pihak yang enggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum, minta saja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim. Buat apa merusak Jakarta gitu lho". Dominan kalimat yang disampaikan dalam teks berita bukanlah persepsi positif yang dilakukan oleh Ahok, namun lebih kepada sebuah susunan kalimat yang

justru menguatkan anggapan banyak orang terhadap dugaan penistaan terhadap Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ahok.

Analisis **Retoris**, dari unsur retorik dalam berita ini bisa kita lihat pertama kali pada gambar berita yang ditampilkan, gambar yang ditampilkan dalam berita ini adalah foto umat muslim saat sedang melakukan aksi, diantara masa aksi itu ada seseorang yang menggunakan surban dan memegang foto Ahok yang diberi simbol silang pada muka Ahok kemudian bertuliskan "hukum penista Agama, Neraka menunggumu wahai Ahok". Secara makna gambar yang ditampilkan oleh *Republika.co.id* dalam berita ini tidak sesuai dengan judul yang dituliskan, judul berita bicara tentang ahok sudah minta maaf namun gambar yang ditampilkan adalah bentuk kebencian terhadap ahok, semestinya republika menampilkan gambar Ahok yang sedang melakukan konpersi pers yang menyampaikan permintaan maaf, atau menggunakan foto Ahok yang bersalaman dengan tokoh Agama, Kiai dan lain-lain yang ada kaitannya dengan judul pada berita ini.

Penekanan yang dilakukan *Republika.co.id* dalam penulisan berita ini terdapat pada kalimat "Ahok Anggap Kasus Al-Maidah 51 Selesai", pernyataan ini menunjukkan bahwa anggapan telah selesainya kasus ini hanya dari pribadi Ahok, terbukti tidak ada pernyataan dari pihak lain yang dituliskan oleh *Republika.co.id* sebagai pendukung dari anggapan Ahok yang menyatakan bahwa kasus Al-Maidah 51 selesai. Dalam kalimat lain Ahok menganggap kasus ini sudah selesai dan dia pun sudah meminta maaf. Namun jika Ahok sudah menyatakan sudah minta maaf, sesungguhnya Ahok minta maaf sama siapa, dimana dan kapan. Semua itu tidak dituliskan oleh *Republika.co.id*.

Tabel 4.21 Frame Republika.co.id, 31 Oktober 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>lead yang ditulis dalam kalimat berita ini sedikit agak berbeda penjelasannya jika kita teliti dari judul berita yang diangkat. Judul dalam berita ini “sudah minta maaf, Ahok anggap kasus Al-Maidah 51 selesai”. Kalimat awal yang dituliskan dalam teks adalah rencana aksi besar-besaran yang akan dilakukan ummat muslim pada tanggal 4 November 2016, kutipan kalimat yang dituliskan <i>Republika.co.id</i> yaitu Gabungan dari ribuan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan berencana akan berunjuk rasa besar-besaran pada Jumat (4/11) di Istana Negara Republika Indonesia. Demo ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dalam pernyataannya soal surah Al-Maidah ayat 51.</p>
Skrip	<p>Kalimat berita dimulai dari what, namun what yang diceritakan dalam berita ini bukanlah menerangkan tentang apa isi berita yang jika dilihat dari judul yang ditampilkan. Namun <i>Republika.co.id</i> memulai dengan What yaitu menceritakan tentang Gabungan dari ribuan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan berencana akan berunjuk rasa besar-besaran pada Jumat (4/11) di Istana Negara Republika Indonesia. Dari komponen ini bisa dilihat bagaimana <i>Republika.co.id</i> terkesan mendukung kelompok yang menganggap bahwa Ahok telah menistakan Al-Qur’an, <i>Republika.co.id</i> membuat judul yang berisikan ahok sudah minta maaf namun yang ditonjolkan dalam penjelasan kalimat adalah upaya aksi yang akan dilakukan umat islam pada tanggal 4 November 2106 yang akan datang, atau yang dikenal dengan aksi 411.</p>
Tematik	<p>Tema yang disampaikan pada dasarnya adalah tentang</p>

	<p>rencana aksi umat muslim yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 November 2016, meskipun judul berita ini adalah tentang Ahok sudah minta maaf, Ahok anggap kasus Al-Maidah 51 selesai. Namun tema besar yang terdapat dalam berita ini adalah menceritakan rencana aksi 411, ini bisa dilihat dari beberapa tema kalimat yang menceritakan tentang aksi umat islam terhadap Ahok. Seperti pada awal kalimat yang berbunyi, Gabungan dari ribuan organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan berencana akan berunjuk rasa besar-besaran pada Jumat (4/11) di Istana Negara Republika Indonesia. Demo ini terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dalam pernyataannya soal surah Al-Maidah ayat 51. Kalimat ini tidak spesipik menampilkan tentang Ahok sudah minta maaf, kalimat Ahok meminta maaf hanya dituliskan sebagai pelengkap dari berita yang menceritakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh umat muslim.</p>
Retoris	<p>Unsur retorik dalam berita ini bisa kita lihat pertama kali pada gambar berita yang ditampilkan, gambar yang ditampilkan dalam berita ini adalah foto umat muslim saat sedang melakukan aksi, diantara masa aksi itu ada seseorang yang menggunakan surban dan memegang foto Ahok yang diberi simbol silang pada muka Ahok kemudian bertuliskan “hukum penista Agama, Neraka menunggumu wahai Ahok”. Secara makna gambar yang ditampilkan oleh Republika.co.id dalam berita ini tidak sesuai dengan judul yang dituliskan, judul berita bicara tentang ahok sudah minta maaf namun gambar yang ditampilkan adalah bentuk kebencian terhadap ahok</p>

11) *Republika.co.id* 6 November 2016 : Pemerintah diminta fokus dan tak alihkan isu penistaan Agama.

Analisis **Siktaksis**, pasca aksi 4 November atau sering disebut dengan aksi 411, *Republika.co.id* kembali mengangkat sebuah berita yang ada kaitannya dengan dugaan penistaan agama dan aksi 411. Dalam berita ini *Republika.co.id* membuat *headline* dalam judul berita tersebut yaitu “Pemerintah diminta fokus dan tak alihkan isu penistaan Agama” *lead* dalam teks berita ini langsung menampilkan pendapat seorang pakar terkait dengan aksi 411 yang dilakukan oleh umat muslim serta kaitannya dengan dugaan penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahok. Teks ini menceritakan tentang pendapat Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir, beliau menyampaikan pemerintah tak perlu merisaukan adanya dugaan aktor politik 'menunggangi' Aksi Bela Islam II. Ia khawatir, pemerintah justru melupakan substansi aksi damai tersebut yang meminta adanya tindakan tegas terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Republika.co.id menuliskan pendapat pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) dengan memakai judul “Pemerintah diminta fokus dan tak alihkan isu penistaan Agama”. Fokus yang dimaknai dalam pernyataan ini artinya meminta hanya memandang pada satu sisi dan tidak boleh memberikan analisis lain terhadap sesuatu yang terjadi. Pada dasarnya yang dikomentari dalam persoalan saat itu adalah terkait dengan aksi umat muslim (411) yang mampu membuka hati jutaan umat muslim di Indonesia, aksi seperti baru terjadi pertama kali dalam sejarah demokrasi Republik ini, banyak yang menganggap aksi ini di luar kebiasaan masyarakat Indonesia saat melakukan aksi. Aksi terbesar dalam sejarah Indonesia adalah aksi yang dilakukan oleh masyarakat dan mahasiswa tahun 1998 untuk menggulingkan Presiden Soeharto yang pada akhirnya melahirkan Demokrasi, namun secara kuantitas peserta aksi tidak sebesar yang terjadi pada aksi 411.

Karena hal itu, maka banyak persepsi yang berkembang bahwa aksi 411 itu ditunggangi oleh aktor-aktor politik, yang diperuntukkan bagi kepentingan kelompok politik tertentu dan pada akhirnya menjadi ancaman bagi pemerintahan yang berkuasa saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari, yang dituliskan di media online *antaranews.com* ada empat kelompok kepentingan di balik aksi demo menentang pernyataan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Jumat, 4 Nopember.

Pertama, kelompok yang tersinggung pada pernyataan Ahok terkait dengan surat Al-Maidah. Kelompok pertama ini terdiri dari organisasi umat Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi lainnya yang memiliki banyak jamaah. Kelompok pertama ini menuntut agar Pemerintah dan Polri segera memproses Ahok melalui proses hukum karena dinilai menista agama.

Kedua, kelompok yang menginginkan turunnya elektabilitas Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada pilkada serentak tahun 2017. Kelompok ketiga ini berasal dari partai politik maupun ormas pendukung partai politik yang juga menjagokan pasangan calon gubernur-wakil gubernur lainnya. Keempat, kelompok lawan politik pasangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sarannya untuk menurunkan legitimasi pemerintah.

Dari beberapa opini yang berkembang terkait dengan aksi 411, *Republika.co.id* kemudian memberikan sebuah penegasan bahwa aksi yang dilakukan umat muslim pada tanggal 4 November adalah benar-benar panggilan hati umat muslim untuk membela Agamanya, atas dugaan penodaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Ahok, melalui berita yang dipublikasi berjudul lewat "Pemerintah diminta fokus dan tak alihkan isu penistaan Agama".

Analisis **Skrip**, berita ini menceritakan permintaan terhadap pemerintah untuk fokus pada substansi aksi umat muslim tanggal 4 November 2016 atau dikenal dengan aksi 411, tidak mencari-cari celah

untuk mencidrai aksi murni umat muslim ini dengan memberikan stigma adanya aktor-aktor politik yang menunggangi. Unsur *Who* dalam berita ini adalah siapa yang meminta agar pemerintah tetap fokus pada substansi aksi 411, yang dituliskan dalam berita ini adalah Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir. Pakar hukum pidana secara umum bermakna seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang hukum pidana. Biasanya para pakar dimintai nasihat dalam bidang terkait mereka, namun mereka tidak selalu setuju dalam kekhususan bidang studi. Melalui pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi, maupun pengalaman, seorang pakar dipercaya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya di atas rata-rata orang, dimana orang lain bisa secara resmi (dan sah) mengandalkan pendapat pribadi.

Kemudian komponen *Apa* yang disampaikan dalam berita ini (*What*), pemerintah tak perlu merisaukan adanya dugaan aktor politik 'menunggangi' Aksi Bela Islam II. Karena substansi aksi damai tersebut yakni meminta adanya tindakan tegas terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Aksi 411 adalah untuk memprotes pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas pernyataannya tentang dibohongi surah Al-Maidah 51. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, bohong bermakna sesuatu yang tidak sesuai dengan hal keadaan yang sebenarnya. Dengan demikian, Ahok menganggap apa yang disampaikan oleh orang lain tentang makna surah Al-Maidah 51 adalah tidak benar.

Analisis **Tematik**, kalimat-kalimat yang disampaikan pada isi teks berita ini memiliki makna yang sama, meski terdiri dari beberapa kalimat namun setiap paragraf yang ditulis adalah bentuk dukungan terhadap pokok bahasan yang terdapat dalam berita. Pokok utama yang ingin disampaikan dalam berita ini adalah tentang penistaan agama, walaupun dalam uraian setiap kalimat menggunakan gaya dan bahasa yang berbeda, tetapi substansi dari isi teksnya tetap mendukung pada pokok bahasan utamanya.

Pada kalimat pertama *Republika.co.id* menuliskan pemerintah tak perlu merisaukan adanya dugaan aktor politik 'menunggangi' Aksi Bela Islam II. Substansi aksi damai tersebut meminta adanya tindakan tegas terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kalimat ini ingin menerangkan bahwa yang menjadi pokok utama yang harus jadi perhatian adalah persoalan dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok, aktifitas aksi itu bukanlah hasil dari provokasi dari pihak tertentu, namun itu adalah bentuk protes terhadap pernyataan Ahok dan sekaligus itu adalah bentuk kecintaan umat muslim terhadap Al-Qur'an . Oleh karena itu sesuatu yang sudah menjadi keyakinan oleh agama tertentu tidak boleh ditafsirkan salah oleh pihak lain.

Kemudian dalam kalimat berikutnya *Republika.co.id* mengutip perkataan dari pakar hukum pidana “Pemerintah nggak usah ngurusi itu, mau ditunggang atau enggak fokus saja pada substansi demo”. Meski kalimat ini tidak menggunakan kata penodaan agama, namun kutipan pendapat seseorang yang ditulis *Republika.co.id* tetap bermakna untuk mendukung penodaan agama pada kalimat sebelumnya. Kalimat fokus saja pada substansi demo, ini juga berarti fokus saja pada dugaan penodaan agama yang dilakukan Ahok, karena pada kalimat awal sudah dijelaskan bahwa yang menjadi substansinya adalah dugaan penistaan agama.

Makna yang sama juga terlihat pada akhir-akhir kalimat dalam teks berita ini, *Republika.co.id* menuliskan tentang pernyataan pakar hukum pidana tersebut, "Kita bicara substansi. Demo ini sebabnya karena apa, dan pernyataan 'dibohongi (pakai) Al-Maidah 51' benar atau tidak. Kalau menghina ya diproses, jadi tak ada embel-embel lain. Itu ciri khas negara RI. Dari beberapa sub kalimat yang dituliskan *Republika.co.id* pada berita ini, menunjukkan frame yang dibangun adalah dugaan penistaan agama yang dilakukan ahok atas pernyataannya tentang dibohongi Al-Maidah 51.

Analisis **Retoris**, *Republika.co.id* lebih banyak menggunakan kata substansi demo dan penistaan agama, dua hal yang berbeda namun

memiliki makna yang saling berkaitan dalam tulisan berita ini. Kata substansi secara umum memang dimaknai watak yang sebenarnya dari sesuatu (isi, pokok inti), sedangkan penistaan yang bermakna penghinaan, merendahkan atau seseorang yang menghina atau merendahkan orang atau kelompok lain. Berita ini menjelaskan bahwa substansi dari demo adalah tentang penistaan agama, maka adanya demo karena ada yang substansi yaitu yang dimaksud.

Kemudian pada gambar berita, *Republika.co.id* menampilkan foto umat islam yang menggunakan pakaian mayoritas warnah putih dilengkapi dengan bendera merah putih. Tanpa dalam foto tersebut suasana umat islam yang melakukan aksi sangat padat dan memenuhi sepanjang jalan yang cukup panjang. Foto ini bisa menggambarkan sebuah kesatuan, artinya semua peserta aksi bersatu melakukan aksi dengan menggunakan pakaian dan simbol islam dengan mayoritas warnah putih. Kedamaian, meski dalam keadaan padat yang memenuhi disepanjang ruas jalan, namun barisan para peserta aksi tetap rapih dan tidak ada terlihat adanya saling dorong atau adanya teriakan yang berlebihan diantara para peserta aksi.

Inilah frame yang dibangun *Republika.co.id* dari unsur tematik, aktifitas aksi bela islam yang dilakukan oleh para pendemo menunjukkan kekuatan massa yang sangat banyak, namun tetap menjaga kesatuan dan persatuan dengan tujuan dan cara yang sama serta tetap mampu menjaga kedamaian, meski massa dalam situasi psikologis yang emosional atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.

Tabel 4.22 Frame *Republika.co.id*, 6 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p><i>Republika.co.id</i> membuat headline dalam judul berita tersebut yaitu “Pemerintah diminta fokus dan tak alihkan isu penistaan Agama” lead dalam teks berita ini langsung menampilkan pendapat seorang pakar terkait dengan aksi 411 yang dilakukan oleh umat muslim serta kaitannya dengan dugaan penistaan Agama yang dilakukan oleh Ahok. Teks ini menceritakan tentang pendapat Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir, beliau menyampaikan pemerintah tak perlu merisaukan adanya dugaan aktor politik 'menunggangi' Aksi Bela Islam II. Ia khawatir, pemerintah justru melupakan substansi aksi damai tersebut yang meminta adanya tindakan tegas terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).</p>
Skrip	<p>Berita ini menceritakan permintaan terhadap pemerintah untuk fokus pada substansi aksi umat muslim tanggal 4 November 2016 atau dikenal dengan aksi 411, tidak mencari-cari celah untuk mencidrai aksi murni umat muslim ini dengan memberikan stigma adanya aktor-aktor politik yang menunggangi.</p> <p>Unsur <i>Who</i> dalam berita ini adalah siapa yang meminta agar pemerintah tetap fokus pada substansi aksi 411, yang dituliskan dalam berita ini adalah Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Muzakir. Pakar hukum pidana secara umum bermakna seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang hukum pidana.</p> <p>Kemudian komponen Apa yang disampaikan dalam berita ini (<i>What</i>), pemerintah tak perlu merisaukan adanya dugaan</p>

	<p>aktor politik 'menunggangi' Aksi Bela Islam II. Karena substansi aksi damai tersebut yakni meminta adanya tindakan tegas terhadap dugaan penistaan agama.</p>
Tematik	<p>Kalimat yang disampaikan pada isi teks berita ini memiliki makna yang sama, meski terdiri dari beberapa kalimat namun setiap paragraf yang ditulis adalah bentuk dukungan terhadap pokok bahasan yang terdapat dalam berita. Pokok utama yang ingin disampaikan dalam berita ini adalah tentang penistaan agama, walaupun dalam uraian setiap kalimat menggunakan gaya dan bahasa yang berbeda, tetapi substansi dari isi teksnya tetap mendukung pada pokok bahasan utamanya.</p>
Retoris	<p><i>Republika.co.id</i> lebih banyak menggunakan kata substansi demo dan penistaan agama, dua hal yang berbeda namun memiliki makna yang saling berkaitan dalam tulisan berita ini. Kata substansi secara umum memang dimaknai watak yang sebenarnya dari sesuatu (isi, pokok inti), sedangkan penistaan yang bermakna penghinaan, merendahkan atau seseorang yang menghina atau merendahkan orang atau kelompok lain.</p> <p>Pada gambar berita, <i>Republika.co.id</i> menampilkan foto umat islam yang menggunakan pakaian manyoritas warnah putih dilengkapi dengan bendera merah putih. Tanpa dalam foto tersebut suasana umat islam yang melakukan aksi sangat padat dan memenuhi sepanjang jalan yang cukup panjang. Foto ini bisa menggambarkan sebuah kesatuan, artinya semua peserta aksi bersatu melakukan aksi dengan menggunakan pakaian dan simbol islam dengan manyoritas warnah putih.</p>

12) *Republika.co.id* 8 November 2016: Kasus Ahok bisa mengakibatkan terjadinya saling menghina atribut agama.

Analisis **Siktaksis**, Ahok diframe oleh *Republika.co.id* sebagai pemicu akan terjadinya konflik antar agama di Indonesia pada masa yang akan datang, jika beliau tidak dihukum atas kasus penistaan agama dan ini menjadi masalah besar yang mengancam kedamaian di Indonesia. Dalam berita ini *Republika.co.id* menuliskan berita dengan menjadikan narasumber dari SNH Advocacy Center, lembaga ini menilai ada masalah lebih besar yang akan mengancam Indonesia bila kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak sampai ke meja hijau dan divonis bersalah. Sebab menurut lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, advokasi hukum dan HAM ini, bila gubernur DKI non aktif yang akrab disapa Ahok ini bebas, maka menjadi insiden buruk menjaga pondasi Pancasila dan Kebhinekaan.

Kekawatiran akan terjadi konflik antar agama ini disampaikan oleh *Republika.co.id* berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid, dikatakan bahwa pondasi Pancasila dan kebhinekaan yang sudah terjalin baik antar masyarakat dan golongan maupun antar sesama pemeluk agama akan rusak bila Ahok tidak dihukum dari kasus penistaan agama.

Frame yang dilakukan *Republika.co.id* merupakan upaya mengungkit kembali tragedi pahit yang dialami masyarakat terkait dengan perang antar agama di Indonesia, seperti misalnya tragedi Poso. Awal konflik Poso terjadi setelah pemilihan bupati pada desember 1998. Ada sintimen keagamaan yang melatarbelakangi pemilihan tersebut. Dengan menangnya pasangan Piet I dan Mutholib Rimi waktu tidak lepas dari identitas agama dan suku[1]. Untuk seterusnya agama dijadikan tedeng aling-aling pada setiap konflik yang terjadi di Poso. Perseteruan kecil, semacam perkelahian antar persona pun bisa menjadi pemicu kerusuhan yang ada di sana. Semisal, ada dua pemuda terlibat perkelahian. Yang satu beragama islam dan yang satunya lagi beragama Kristen. Karena salah

satu pihak mengalami kekalahan, maka ada perasaan tidak terima diantara keduanya. Setelah itu salah satu, atau bahkan keduanya, melaporkan masalah tersebut ke kelompok masing-masing, dan timbullah kerusuhan yang melibatkan banyak orang dan bahkan kelompok.

Sebelum meletus konflik Desember 1998 dan diikuti oleh beberapa peristiwa konflik lanjutan, sebenarnya Poso pernah mengalami ketegangan hubungan antar komunitas keagamaan (Muslim dan Kristen) yakni tahun 1992 dan 1995. Tahun 1992 terjadi akibat Rusli Lobolo (seorang mantan Muslim, yang menjadi anak bupati Poso, Soewandi yang juga mantan Muslim) dianggap menghujat Islam, dengan menyebut Muhammad nabinya orang Islam bukanlah Nabi apalagi Rasul. Sedangkan peristiwa 15 Februari 1995 terjadi akibat pelemparan masjid dan madrasah di desa Tegalrejooleh sekelompok pemuda Kristen asal desa Mandale. Peristiwa ini mendapat perlawanan dan balasan pemuda Islam asal Tegalrejo dan Lawanga dengan melakukan pengrusakan rumah di desa Mandale. Kerusuhan-kerusuhan "kecil" tersebut kala itu diredam oleh aparat keamanan Orde Baru, sehingga tak sampai melebar apalagi berlarut-larut.

Memang, setelah peristiwa 1992 dan 1995, masyarakat kembali hidup secara wajar. Namun seiring dengan runtuhnya Orde Baru, lengkap dengan lemahnya peran "aparat keamanan" yang sedang digugat disemua lini melalui berbagai isu, kerusuhan Poso kembali meletus, bahkan terjadi secara beruntun dan bersifat lebih masif. Awal kerusuhan terjadi Desember 1998, konflik kedua terjadi April 2000, tidak lama setelah kerusuhan tahap dua terjadi lagi kerusuhan ketiga di bulan Mei-Juni 2000. konflik masih terus berlanjut dengan terjadinya kerusuhan keempat pada Juli 2001; dan kelima pada November 2001. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga kerusuhan-kerusuhan dicermati dalam konteks jilid satu sampai lima.

Analisis **Skrip**, berita ini menyampaikan ancaman bahaya bagi keutuhan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, atas kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok tentang pernyataannya dibohongi surah Al-

Maidah 51. Diantara komponen yang bisa dimasukkan dalam berita ini adalah unsur *Who*, siapa yang menjadi pemicu akan terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia, maka jawabannya adalah Ahok. Kemudian unsur *Why*, mengapa adanya pemicu konflik, karena adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok saat menyampaikan pada kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Awalnya Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Pada saat menyampaikan pidato di depan warga Ahok menyampaikan bahwa program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub Februari 2017, sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata hanya ingin program itu terus dilanjutkan.

Pada cuplikan pidatonya Ahok menyampaikan, "kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu," inilah sebagai pemicu utama sehingga menjadi bulan-bulanan umat islam untuk melaksanakan aksi menuntut Ahok menjadi tersangka pada kasus dugaan penistaan agama ini

Analisis **Tematik**, tema dalam berita ini berisikan vonis sebagai pemicu konflik antar umat beragama terhadap Ahok, ada *claim* bahwa dugaan penistaan agama ini akan berdampak kepada yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. *Claim* itu bisa dilihat dari beberapa tema kalimat pada setiap teks paragraf yang dituliskan oleh *Republika.co.id*. seperti pada awal kalimat, SNH Advocacy Center menilai ada masalah lebih besar yang akan mengancam Indonesia bila kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak sampai ke meja hijau dan divonis bersalah. Teks ini menjelaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok akan berdampak lebih luas, serta mengancam kerukunan antar umat beragama indonesia. Kerukunan antar umat beragama tentu menjadi kunci persatuan Republik Indonesia,

Toleransi antar umat beragama yaitu menyakini bahwa agamaku adalah agamaku dan agamamu adalah agamamu tetapi disini harus saling respect / menghargai agama orang lain dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kami. Serta kami tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan, mengejek-ngejek dan mencela agama orang lain dengan alasan apapun karena sejatinya kita adalah sama-sama manusia yang hidup berdampingan.

Frame yang ditulis *Republika.co.id* dalam tema ini adalah ancaman terhadap hilangnya toleransi antar umat beragama yang telah dibangun selama puluhan tahun Indonesia merdeka. Kepentingan menjaga toleransi antar agama ini menjadi kewajiban setiap warga negara, dan tidak boleh dicitra oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu.

Kemudian sebagai penekanan dalam berita ini, *Republika.co.id* menuliskan pendapat Direktur SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid, yang menyatakan bahwa pondasi Pancasila dan kebhinekaan yang sudah terjalin baik antar masyarakat dan golongan maupun antar sesama pemeluk agama akan rusak bila Ahok tidak dihukum dari kasus penistaan agama. "Karena masyarakat akan saling menghina, mengejek dan merendahkan atribut agama maupun golongan lain hanya dengan menambah kata 'pakai'". Frame ini menunjukkan bahwa satu-satunya solusi yang bisa dilakukan untuk mencegah akan terjadinya konflik antara agama di masyarakat adalah dengan memonis Ahok sebagai terdakwa dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang benar.

Analisis **Retoris**, bentuk penekanan dalam berita ini sudah ditempatkan mulai pada judul, kalimat yang digunakan saling hina atribut agama lain. Jika antar penganut agama terjadi saling hina, maka dampaknya akan terjadi konflik antar umat beragama. sejarah pahit Indonesia tentu tidak boleh diulang kembali, apalagi hanya karena kepentingan kekuasaan. Belajar dari beberapa konflik antar agama yang sangat menyeramkan pernah terjadi di Indonesia, misalnya Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik

ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya.

Konflik ini awalnya dianggap sebagai konflik biasa. Namun muncul sebuah dugaan jika ada pihak yang sengaja merencanakan dengan memanfaatkan isu yang ada. Selain itu ABRI juga tak bisa menangani dengan baik, bahkan diduga sengaja melakukannya agar konflik terus berlanjut dan mengalihkan isu-isu besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi di Ambon membuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia jadi memanas hingga waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, penggunaan kata saling hina atribut agama lain menjadi frame yang cukup memberikan makna buruk bagi Ahok, karena dalam kalimat ini beliau dijadikan subjek (pelaku) penyebab akan terjadinya saling hina atribut agama.

Bentuk penekanan yang lain juga bisa dimaknai melalui gambar yang ditampilkan dalam berita ini, judul dalam berita ini adalah “kasus Ahok dinilai akibatkan saling hina atribut agama lain” namun dalam gambar yang ditampilkan adalah foto para umat muslim yang menjadi peserta aksi, foto peserta aksi itu dilengkapi dengan beberapa poster yang menuntut Ahok. . Frame ini adalah upaya publikasi yang dilakukan *Republika.co.id* mengenai dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok untuk terus dibawa kerana hukum.

Tabel 4.23Frame *Republika.co.id*, 8 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Ahok diframe oleh <i>Republika.co.id</i> sebagai pemicu akan terjadinya konflik antar agama di Indonesia pada masa yang akan datang, jika beliau tidak dihukum atas kasus penistaan agama dan ini menjadi masalah besar yang mengancam kedamaian di Indonesia. Dalam berita ini <i>Republika.co.id</i> menuliskan berita dengan menjadikan narasumber dari SNH Advocacy Center, lembaga ini menilai ada masalah lebih besar yang akan mengancam Indonesia bila kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak sampai ke meja hijau dan divonis bersalah. Sebab menurut lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, advokasi hukum dan HAM ini, bila gubernur DKI non aktif yang akrab disapa Ahok ini bebas, maka menjadi insiden buruk menjaga pondasi Pancasila dan Kebhinekaan.</p>
Skrip	<p>Berita ini menyampaikan ancaman bahaya bagi keutuhan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, atas kasus penistaan agama yang dilakukan Ahok tentang pernyataannya dibohongi surah Al-Maidah 51. Diantara komponen yang bisa dimasukkan dalam berita ini adalah unsur Who, siapa yang menjadi pemicu akan terjadinya konflik antar umat beragama di Indonesia, maka jawabannya adalah Ahok. Kemudian unsur Why, mengapa adanya pemicu konflik, karena adanya dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok saat menyampaikan pada kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Awalnya Ahok datang untuk meninjau program pemberdayaan budi daya kerapu. Pada saat menyampaikan pidato di depan warga Ahok menyampaikan bahwa program itu akan tetap dilanjutkan meski dia nanti tak terpilih lagi menjadi gubernur di pilgub Februari 2017,</p>

	sehingga warga tak harus memilihnya hanya semata-mata hanya ingin program itu terus dilanjutkan.
Tematik	Tema dalam berita ini berisikan vonis sebagai pemicu konflik antar umat beragama terhadap Ahok, ada <i>claim</i> bahwa dugaan penistaan agama ini akan berdampak kepada yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. <i>Claim</i> itu bisa dilihat dari beberapa tema kalimat pada setiap teks paragraf yang dituliskan oleh <i>Republika.co.id</i> . seperti pada awal kalimat, SNH Advocacy Center menilai ada masalah lebih besar yang akan mengancam Indonesia bila kasus Basuki Tjahaja Purnama tidak sampai ke meja hijau dan divonis bersalah. Teks ini menjelaskan bahwa kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok akan berdampak lebih luas, serta mengancam kerukunan antar umat beragama Indonesia. Kerukunan antar umat beragama tentu menjadi kunci persatuan Republik Indonesia
Retoris	Bentuk penekanan dalam berita ini sudah ditempatkan mulai pada judul, kalimat yang yang digunakan saling hina atribut agama lain. Jika antar penganut agama terjadi saling hina, maka dampaknya akan terjadi konflik antar umat beragama. sejarah pahit Indonesia tentu tidak boleh diulang kembali, apalagi hanya karena kepentingan kekuasaan. Belajar dari beberapa konflik antar agama yang sangat menyeramkan pernah terjadi di Indonesia, misalnya Konflik yang ada kaitannya dengan agama terjadi di Ambon sekitar tahun 1999. Konflik ini akhirnya meluas dan menjadi kerusuhan buruk antara agama Islam dan Kristen yang berakhir dengan banyaknya orang meninggal dunia. Orang-orang dari kelompok Islam dan Kristen saling serang dan berusaha menunjukkan kekuatannya.

13) Republika.co.id, 10 November 2016: Kalimat tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51 merupakan ajakan untuk tidak mengikuti anjuran agama.

Analisis **Siktaksis**, headline yang ditampilkan dalam berita ini terletak pada judul. *Republika.co.id* menggunakan kalimat dibohongi pakai Al-Maidah 51 merupakan ajakan untuk tidak mengikuti anjuran agama. Bagi umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti anjuran agama, sumber anjuran agama dalam islam terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, maka jika ada yang ada orang yang menganjurkan umat islam untuk tidak mengikuti anjuran agama sama saja hal nya orang tersebut mengajak umat islam untuk tidak taat kepada Al-Qur'an .

Frame yang dimunculkan oleh *Republika.co.id* pada judul berita ini, sesungguhnya bagi umat muslim sungguh sangat kejam, sama saja dengan merampas hak-haknya sebagai penganut agama islam. Karena bagi umat islam Al-Qur'an merupakan pedoman hidup, sehingga banyak ayat-ayat didalam Al-Qur'an yang menegaskan wajibnya umat muslim sebagai hamba Allah untuk mengikuti dalil, yaitu firman Allah dan sabda Rasul-Nya. Allah SWT memerintahkan kaum mu'minin dengan suatu perkara yang membuat iman menjadi sempurna, dan bisa mewujudkan kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat, yaitu: menaati Allah dan menaati Rasul-Nya dalam perkara-perkara pokok agama maupun dalam perkara cabangnya. Taat artinya menjalankan setiap apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang sesuai dengan tuntunannya dengan penuh keikhlasan dan pengikutan yang sempurna.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada Rasulullah Saw. Melalui perantara malaikat jibril dengan lafal dan maknanya. Al-Qur'an merupakan mukjizat beliau yang sangat berharga bagi umat Islam hingga saat ini. Kitab suci yang diturunkan pada bulan suci Ramadhan ini, di dalamnya terkandung petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah

Saw. Agar dijadikan sebagai pedoman, konsep, dan aturan hidup manusia. Al Quran merupakan kitab suci yang sempurna, baik itu dalam hal mengatur kehidupan penganutnya, maupun dalam berinteraksi dengan Tuhannya dalam bentuk ritual ibadah yang secara wajib dikerjakan dalam tuntunannya. Semua ajaran Islam tersebut bersumber pada satu kitab suci tersebut. Pada zaman dulu semua persoalan dapat diselesaikan langsung oleh Rasulullah saw. Jika ada persoalan yang sulit dipecahkan, maka Allah memberi petunjuk melalui wahyu. Lalu setelah Nabi dan Rasul wafat, manusia perlu pedoman agar kehidupan mereka tidak berantakan.

Al Quran sebagai pedoman hidup manusia dan umat Muslim khususnya. Jika tanpa pegangan atau pedoman, maka manusia akan kehilangan arah. Perjalanan hidup penuh dengan berbagai persoalan, dari persoalan yang paling ringan sampai yang paling berat. Firman Allah yang dihimpun dalam sebuah kitab yang bernama Al Quran, menjadi petunjuk yang komplis bagi manusia dalam menjalin hubungan dengan Sang Khalik, dengan sesama manusia dan makhluk lainnya.

Republika.co.id mengambil sumber berita dari pakar hukum pidana, dalam *lead* berita *Republika.co.id* menyampaikan bahwa menurut Pakar Hukum Pidana, Syaiful Bakhri sangat mudah untuk membuktikan apakah perkataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu, terkait 'Dibohongi pakai Al-Maidah 51'. Menurutnya perkataan itu sendiri sudah bagian dari ajakan kepada mereka yang hadir di situ agar tidak mengikuti aturan agama. Kalimat itu adalah ajakan agar tidak mengikuti anjuran itu sebagai dasar memilih. Frame yang dibangun oleh *Republika.co.id* dari berita ini adalah tindakan Ahok merupakan bentuk penistaan terhadap agama islam, mengajak umat penganut agama tertentu untuk tidak taat kepada anjuran agamanya sama saja halnya dengan melakukan penistaan kepada agama tertentu.

Analisis **Skrip**, berita ini ingin memberikan makna lain dari pernyataan Ahok tentang dibohongi surah Al-Maidah 51, pada teks berita ini tidak disebutkan secara spesifik bahwa pernyataan Ahok tentang

dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 merupakan penistaan agama. Namun pernyataan Ahok ini dimaknai sebagai ajakan agar tidak mengikuti aturan agama. Jika umat islam diajak untuk tidak taat kepada anjuran agamanya, maka sama halnya mengajak umat muslim untuk mengingkari keimanannya. Didalam islam percaya kepada Al-Qur'an merupakan bentuk keimanan seseorang, jika umat islam tidak lagi percaya dengan Al-Qur'an maka dia termasuk kedalam golongan orang kafir.

Unsur penjelasan dalam berita ini terdapat pada apa makna dibohongi Al-Maidah 51 menurut pakar hukum pidana (*What*), yaitu kalimat dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 merupakan ajakan agar tidak mengikuti anjuran itu sebagai dasar memilih. Jadi sesungguhnya sangat mudah bagi polisi dan penyidik membuktikan apakah ada penistaan agama atau tidak dari pernyataan tersebut. Tapi faktanya polisi terlihat sangat sulit mencarinya, sehingga perlu mendatangkan ahli dan memutuskan gelar perkara terbuka demi mendapatkan kepercayaan publik.

Kalimat ini menegaskan, mestinya pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 bisa langsung dimaknai sebagai upaya mengajak umat islam untuk tidak taat kepada anjuran agama islam, jika makna ini yang dipakai oleh pihak kepolisian dalam memahami pernyataan Al-Maidah 51, maka sesungguhnya Ahok telah melakukan kesalahan yang fatal dan harus diproses hukum. Namun menurut frame *Republika.co.id* pihak kepolisian tidak mau memaknai pernyataan itu sebagai bentuk ajakan untuk tidak taat terhadap anjuran agama.

sesungguhnya sangat mudah bagi polisi dan penyidik membuktikan apakah ada penistaan agama atau tidak dari pernyataan tersebut. Tapi faktanya polisi terlihat sangat sulit mencarinya, sehingga perlu mendatangkan ahli dan memutuskan gelar perkara terbuka demi mendapatkan kepercayaan publik. Selain itu bila merujuk Yurisprudensinya, kasus ini sama dengan banyak kasus penistaan agama lain, sangat sederhana. Beda kasusnya bila pemuka agama yang berkhotbah di rumah ibadah, baik itu pemuka agama Kristen di Gereja atau

pemuka agama Islam di Masjid, mengajak memilih pemimpin sesuai agamanya.

Kemudian dalam unsur *Who*, siapa yang dianggap membuat ajakan untuk tidak taat pada anjuran agama, jawabannya adalah Ahok. pada pidato yang disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu untuk meninjau program pemberdayaan budi daya ikan kerapu. Pidato Ahok kemudian menjadi viral di medsos dan pada akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penistaan agama, isi pidato itu adalah “Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok”. Pernyataan ini membuat kemarahan umat islam di Indonesia sehingga terjadinya aksi-aksi di Ibu kota Jakarta dan di beberapa daerah menuntut Ahok untuk dihukum.

Analisis **Tematik**, kalimat pembuka dalam teks pada berita ini menampilkan pendapat pakar hukum, Syaiful Bakhri, pakar hukum pidana ini menyampaikan sangat mudah untuk membuktikan apakah perkataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu, terkait 'Dibohongi pakai Al-Maidah 51'. Menurutnya perkataan itu sendiri sudah bagian dari ajakan kepada mereka yang hadir di situ agar tidak mengikuti aturan agama. Tema ini menunjukkan seakan-akan pihak kepolisian terlalu berlebihan untuk melindungi Ahok, secara sederhana pernyataan Ahok sudah dikategorikan sebagai bentuk ajakan penyimpangan dari ajaran umat islam.

Kemudian kalimat-kalimat berikutnya yang dituliskan sebagai pendukung dari judul berita yang ditampilkan, pada paragraf kedua *Republika.co.id* menuliskan bahwa sesungguhnya sangat mudah bagi polisi dan penyidik membuktikan apakah ada penistaan agama atau tidak dari

pernyataan tersebut. Tapi faktanya polisi terlihat sangat sulit mencarinya, sehingga perlu mendatangkan ahli dan memutuskan gelar perkara terbuka demi mendapatkan kepercayaan publik. Selanjutnya *Republika.co.id* mengajak untuk merujuk Yurisprudensinya, karena kasus ini sama dengan banyak kasus penistaan agama lain, sangat sederhana. Misalnya kasus yang dialami Penulis dan wartawan Arswendo Atmowiloto, beliau harus merasakan menginap di hotel prodeo selama empat tahun enam bulan karena dinilai bersalah telah menistakan agama.

Kasus ini terjadi pada tahun 1990. Kala itu, Arswendo menjabat sebagai pemimpin redaksi Tabloid Monitor. Arswendo masuk penjara karena Tabloid Monitor memuat hasil jajak pendapat tentang tokoh yang disukai pembaca Tabloid Monitor. Dalam survei tokoh pilihan pembaca tersebut, Presiden Soeharto kala itu berada di tempat pertama sementara Nabi Muhammad di urutan ke-11. Survei ini menimbulkan kemarahan umat islam.

Selain itu ada juga kasus yang sama, seperti yang terjadi pada kasus Lia Aminudin atau Lia Eden, Pada 1998, Lia menyebut dirinya Mesias yang muncul di dunia sebelum hari kiamat untuk membawa keamanan dan keadilan di dunia. Selain itu, dia juga menyebut dirinya sebagai reinkarnasi Bunda Maria, ibu dari Yesus Kristus. Lia juga mengatakan bahwa anaknya, Ahmad Mukti, adalah reinkarnasi Isa. Lia dijebloskan ke penjara dua kali. Pertama pada Juni 2006, divonis dua tahun karena terbukti menodai agama dan tiga tahun kemudian pada 2009 juga dengan alasan yang sama setelah polisi menyita ratusan brosur yang dinilai menistakan agama.

Kemudian teks berita ini juga membandingkan dengan pemuka agama yang berkhotbah di rumah ibadah, baik itu pemuka agama Kristen di Gereja atau pemuka agama Islam di Masjid, mengajak memilih pemimpin sesuai agamanya. *Republika.co.id* menyampaikan menurut pakar hukum pidana, itu tidak menista agama, justru dilindungi konstitusi negara. Karena konstitusi negara kita merujuk pada Ketuhanan yang Maha

Esa. Jadi tidak dimaknai penghinaan di ruang-ruang rumah ibadah yang disampaikan masing-masing pemuka agama itu. Tetapi penghinaan yang menggunakan alat, dengan kata 'dibohongi' apalagi yang menyampaikan bukan bidangnya menyampaikan itu, dan disampaikan dimuka umum. Tentu hal ini berpotensi menjadi penghinaan agama. Yang tidak boleh dilakukan adalah mengajak orang agar tidak mengikuti ajaran agamanya di depan umum.

Analisis **Retoris**, pilihan kata yang digunakan *Republika.co.id* yang terdapat pada judul berita memberikan tekanan pada makna penistaan agama, kalimat ajakan untuk tidak mengikuti anjuran agama sesungguhnya bisa lebih besar dari penistaan agama. Dalam islam ajakan untuk tidak mengikuti anjuran agama adalah perannya para syetan yang menggoda umat manusia. Salah satu tugas setan adalah mengajak manusia dalam jalan kesesatan yang nantinya akan berujung kepada neraka. Oleh karena itu setan mempunyai wasilah dan sarana untuk merekrut manusia agar masuk ke dalam golongannya. Kata setan berasal dari kata syathona yang berarti jauh dari kebenaran atau rahmat Allah Swt. Setan bisa berasal dari kalangan manusia ataupun kalangan jin. Setiap manusia atau jin yang durhaka kepada Allah Swt bisa disebut dengan setan.

Diantara cara setan menggoda manusia adalah dengan memutarbalikkan perkataan yang batil, pemikiran yang keliru, dan khayalan-khayalan semu yang merupakan sampah otak, kotoran pikiran, dan buih-buih yang mengotori hati yang gelap dan terbuai. Dengan memutarbalikkan itu, kebatilan dianggap kebenaran, dan kebenaran dianggap kebatilan. Hati dan pikiran kehilangan pegangan dan hanya mengikuti praduga. Keimanan menjadi rapuh seiring dorongan-dorongan untuk mangkir. Tak ada iktikad baik dari orang-orang seperti ini. Mereka telah menipu dengan ucapan-ucapan palsu. Mereka mengabaikan Al-Qur'an . Mereka berada dalam keraguan yang kronis. Mereka terus-menerus berada dalam kehancuran. Semoga Allah melindungi kita dari keadaan seperti itu.

Dari kalimat ini bisa dimaknai bahwa *Republika.co.id* melakukan frame bahwa apa yang telah dilakukan Ahok sama halnya dengan apa yang menjadi peran setan dalam mengajak dan menggoda umat islam untuk jauh dari perintah atau anjuran agama.

Tabel 4.24 Frame *Republika.co.id*, 10 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Headline yang ditampilkan dalam berita ini terletak pada judul. <i>Republika.co.id</i> menggunakan kalimat dibohongi pakai Al-Maidah 51 merupakan ajakan untuk tidak mengikuti anjuran agama. Bagi umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk mengikuti anjuran agama, sumber anjuran agama dalam islam terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, maka jika ada yang ada orang yang menganjurkan umat islam untuk tidak mengikuti anjuran agama sama saja halnya orang tersebut mengajak umat islam untuk tidak taat kepada Al-Qur'a.</p> <p>Frame yang dimunculkan oleh <i>Republika.co.id</i> pada judul berita ini, sesungguhnya bagi umat muslim sungguh sangat kejam, sama saja dengan merampas hak-haknya sebagai penganut agama islam. Karena bagi umat islam Al-Qur'an merupakan pedoman hidup, sehingga banyak ayat-ayat didalam Al-Qur'an yang menegaskan wajibnya umat muslim sebagai hamba Allah untuk mengikuti dalil, yaitu firman Allah dan sabda Rasul-Nya.</p>
Skrip	<p>Berita memberikan makna lain dari pernyataan Ahok tentang dibohongi surah Al-Maidah 51, pada teks berita ini tidak disebutkan secara spesifik bahwa pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 merupakan penistaan agama. Namun pernyataan Ahok ini dimaknai sebagai ajakan agar</p>

	<p>tidak mengikuti aturan agama. Jika umat islam diajak untuk tidak taat kepada anjuran agamanya, maka sama halnya mengajak umat muslim untuk mengingkari keimanannya. Didalam islam percaya kepada A-Qur'an merupakan bentuk keimanan seseorang, jika umat islam tidak lagi percaya dengan Al-Qur'an maka dia termasuk kedalam golongan orang kafir.</p>
Tematik	<p>Kalimat pembuka dalam teks pada berita ini menampilkan pendapat pakar hukum, Syaiful Bakhri, pakar hukum pidana ini menyampaikan sangat mudah untuk membuktikan apakah perkataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kepulauan Seribu, terkait 'Dibohongi pakai Al-Maidah 51'. Menurutnya perkataan itu sendiri sudah bagian dari ajakan kepada mereka yang hadir di situ agar tidak mengikuti aturan agama. Tema ini menunjukkan seakan-akan pihak kepolisian terlalu berlebihan untuk melindungi Ahok, secara sederhana pernyataan Ahok sudah dikategorikan sebagai bentuk ajakan penyimpangan dari ajaran umat islam. Kemudian kalimat-kalimat berikutnya yang dituliskan sebagai pendukung dari judul berita yang ditampilkan.</p>
Retoris	<p>Pilihan kata yang digunakan <i>Republika.co.id</i> yang terdapat pada judul berita memberikan tekanan pada makna penistaan agama, kalimat ajakan untuk tidak mengikuti anjuran agama sesungguhnya bisa lebih besar dari penistaan agama. Dalam islam ajakan untuk tidak mengikuti anjuran agama adalah perannya para syetan yang menggoda umat manusia. Salah satu tugas setan adalah mengajak manusia dalam jalan kesesatan yang nantinya akan berujung kepada neraka.</p>

14) Republika.co.id, 11 November 2016: Bisakah ayat Al-Qur'an dipakai untuk Berbohong?

Edisi 11 November 2016, *Republika.co.id* mempublikasikan tulisan Wartawan Republika, Ahmad Syalaby, dengan judul “Bisakah Ayat Al-Qur'an Dipakai untuk Berbohong?” pada edisi *Republika.co.id* menampilkan secara utuh tulisan dari wartawan Republika, Ahmad Syalaby. Karena dianggap sudah profesional dan profesi memang sebagai wartawan, maka tidak ada terlihat framing tertentu yang dilakukan oleh tim redaksi *Republika.co.id*.

Analisis **Siktaksis**, berita ini termasuk kedalam kategori opini, opini menunjukkan bahwa *Republika.co.id* mendukung pada kelompok yang menganggap Ahok melakukan penistaan terhadap agama atas pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Tulisan yang ditampilkan terkesan lebih banyak mengungkapkan bahwa Ahok melakukan penistaan terhadap agama islam, kalimat itu bisa terlihat pada paragraf yang menuliskan “pihak kepolisian dan ahli bahasa pun mencoba menggiring bahwa hipotesis penistaan agama harus diuji kembali oleh ahli bahasa. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian apakah suatu perbuatan menista agama atau tidak sudah memberi pernyataan tegas.

Pendapat dan sikap keagamaan MUI pada 11 Oktober lalu pun di antaranya berbunyi: "Menyatakan bahwa kandungan surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an . Kemudian, menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah Al-Maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.”

Tulisan ini menyampaikan wewenang dalam menentukan keputusan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama islam adalah lembaga Majelis Ulama Indonesia, pendapat para ulama yang tergabung di dalam lembaga itu tentu berdasarkan dasar yang kuat, sehingga tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan orang atau kelompok tertentu.

Analisis **Skrip**, opini dalam berita ini menjawab pertanyaan yang tertera di dalam judul tulisan, jawaban itu dijelaskan secara panjang lebar, sebagai berikut. Bisakah ayat Al-Qur'an dipakai untuk berbohong? Harus diakui, ada beberapa ayat Al-Qur'an yang disalahgunakan saat tidak dibaca dalam konteks yang tepat dan utuh. Kita bisa ambil contoh dalam QS Al Maun ayat 4. Ayat itu menjelaskan ancaman bagi orang yang shalat. "Maka celakalah bagi orang yang shalat. "Jika kita pahami hanya dari teks ini, tidak akan ada orang yang mau shalat karena diancam Allah SWT akan celaka. Para orientalis dulu pun kerap mengutip ayat ini untuk melemahkan akidah umat Islam. Hanya, mispersepsi tak akan terjadi saat kita membaca ayat dengan utuh. Pada ayat ke-5, Allah SWT berfirman. "Yaitu orang-orang yang lalai dari shalatnya."

Ayat lainnya tercantum dalam QS At Taubah ayat 36. "Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya." Ayat ini pun dijadikan argumen bagi para teroris berlandaskan paham keagamaan untuk membunuh semua orang kafir. Apakah dia kafir harbi (yang tidak mengikat perjanjian damai dengan Islam/memerangi Islam) atau zimmi (yang tidak memerangi Islam). Kata kaffah atau semuanya dijadikan pembena bahwa tidak ada perbedaan dalam memperlakukan orang kafir.

Padahal, jumhur ulama sepakat wajib bagi Muslim untuk hidup rukun dengan kafir zimmi. Mengutip Fiqih Al Jihad karangan Dr Yusuf Al-Qaradawi, ahli fiqih Ustaz Ahmad Sarwat menjelaskan, apa yang dimaksud dengan kaffah dalam ayat ini adalah sebatas orang-orang musyrik yang disebutkan dalam ayat tersebut.

Ayat tersebut sedang membicarakan tentang tindakan sekelompok orang-orang musyrik yang berkhianat atas ketentuan perang. Pengkhianatan ini berisiko besar, yaitu umat Islam akan dibunuh semuanya. Ketika mereka benar-benar berkhianat, tidak ayal semua yang terlibat dalam pengkhianatan itu memang harus dibunuh. Bukan kafir yang berada di luar perang tersebut. Lantas, apakah para orientalis dan orang-orang yang memusuhi Islam memakai ayat-ayat itu untuk berbohong? Bisakah ayat Al-Qur'an yang notabene suci dipakai untuk mengatakan tidak benar? Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata bohong sebagai tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya.

Sebagai sebuah teks, ayat Al-Qur'an tidak pernah bohong. Al-Qur'an bahkan dapat diuji kesahihannya lewat pembuktian ilmiah. Ambil contoh misalnya dalam QS Al Mu'minun:14. Allah SWT berfirman: "Kemudian Kami jadikan nutfah (air mani) itu 'alaqah. Lalu 'alaqah tadi Kami jadikan mudghah (segumpal daging).

Analisis **Tematik**, tulisan ini menganalisis sisi bohong dari pernyataan Ahok "jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya" tulisan ini ingin menerangkan apakah bisa ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai alat untuk berbohong. Pertanyaan ini sudah dijawab pada paragraf ke 13 yang menyebutkan bahwa sebagai sebuah teks, ayat Al-Qur'an tidak pernah bohong. Al-Qur'an bahkan dapat diuji kesahihannya lewat pembuktian ilmiah. Ambil contoh misalnya dalam QS Al Mu'minun:14. Allah SWT berfirman: "Kemudian Kami jadikan nutfah (air mani) itu 'alaqah. Lalu 'alaqah tadi Kami jadikan mudghah (segumpal daging).

Sebagai penjelasan dari jawaban bahwa Al-Qur'an tidak pernah bohong dijabarkan melalui beberapa penelitian ilmiah seperti yang dilakukan Dokter Ibrahim B Syed dari Universitas Louisville, Kentucky,

Amerika Serikat, mengungkapkan, ‘alaqah dalam bahasa Arab memiliki dua pengertian. Pertama, sesuatu yang menempel dan menyangkut pada sesuatu yang lain. Kedua, alaqah berarti lintah. Dibuktikan dalam dunia medis, penempelan menggambarkan tentang terjadinya penyangkutan, kemudian menempel lantas tertanamnya blastosis (embrio setelah lima hari pascapembuahan) ke lapisan batas dinding rahim (endometrium).

Embrio tersebut melekat di dinding endometrium dari uterus, dengan cara persis seekor lintah saat menempel di kulit manusia. Bagaimana Al-Qur’an bisa secara presisi menggambarkan proses alaqah yang bisa terbukti dalam ilmu pengetahuan modern saat ini? Maka itu, ayat Al-Qur’an sudah pasti benar seperti dijamin Allah SWT dalam QS Al Hijr ayat 9. “Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur’an dan kami yang memeliharanya.”

Tak hanya itu, orisinalitas ayat-ayat Al-Qur’an bahkan terjaga hingga kini. Kita bisa uji mushaf tertua dengan usia 1.370 tahun yang ditemukan di Universitas Birmingham pada 2015. Isinya sama dengan mushaf saat ini. Hal ini dikatakan sendiri Profesor Universitas Birmingham yang ahli dalam Kristen dan Islam David Thomas.

Pada akhirnya pertanyaan bisakah ayat Al-Qur’an dipakai untuk berbohong? Menyimpulkan bahwa dengan kebenaran dan keaslian tersebut, tidak bisa seseorang memakai ayat Al-Qur’an untuk berbohong. Saat mengutip ayat Al-Qur’an, orang pasti mengatakan sebenarnya sebagaimana yang ada dalam teks Al-Qur’an. Kembali pada contoh di atas, saat seseorang menyatakan ada ayat yang menyuruh kaum Muslimin memerangi semua orang musyrik dalam surah At Taubah, maka dia tidak sedang berbohong. Karena memang ada teks yang menjelaskan hal tersebut.

Analisis **Retoris**, gaya tulisan yang terkesan tegas serta mencantumkan beberapa bukti ilmiah yang ditampilkan dalam tulisan ini adalah bentuk penekanan yang ditonjolkan untuk mengungkapkan bahwa pernyataan Ahok yang menyebutkan Al-Qur’an sebagai alat bohong atau

dimaknai juga bahwa Al-Qur'an itu bohong adalah kekeliruan dan merupakan bentuk penistaan agama.

Pembuktian ilmiah yang disampaikan dalam tulisan ini adalah ketika ayat Al-Qur'an diuji oleh Dokter Ibrahim B Syed dari Universitas Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, yang mengungkapkan mengenai mengungkapkan tentang 'alaqah. dalam QS Al Mu'minun:14. Allah SWT berfirman: "Kemudian Kami jadikan nutfah (air mani) itu 'alaqah. Lalu 'alaqah tadi Kami jadikan mudghah (segumpal daging). dalam bahasa Arab 'alaqah memiliki dua pengertian. Pertama, sesuatu yang menempel dan menyangkut pada sesuatu yang lain. Kedua, alaqah berarti lintah. Dibuktikan dalam dunia medis, penempelan menggambarkan tentang terjadinya penyangkutan, kemudian menempel lantas tertanamnya blastosis (embrio setelah lima hari pascapembuahan) ke lapisan batas dinding rahim (endometrium).

Embrio tersebut melekat di dinding endometrium dari uterus, dengan cara persis seekor lintah saat menempel di kulit manusia. Bagaimana Al-Qur'an bisa secara presisi menggambarkan proses alaqah yang bisa terbukti dalam ilmu pengetahuan modern saat ini? Maka itu, ayat Al-Qur'an sudah pasti benar seperti dijamin Allah SWT dalam QS Al Hijr ayat 9.

Tak hanya itu, orisinalitas ayat-ayat Al-Qur'an bahkan terjaga hingga kini. Kita bisa uji mushaf tertua dengan usia 1.370 tahun yang ditemukan di Universitas Birmingham pada 2015. Isinya sama dengan mushaf saat ini. Hal ini dikatakan sendiri Profesor Universitas Birmingham yang ahli dalam Kristen dan Islam David Thomas.

Itu hanya sebagian bukti tentang kebenaran Al-Qur'an, sesuatu ungkapan yang disampaikan dengan pembuktian ilmiah maka itu adalah sebuah kebenaran. Namun sesuatu yang disampaikan tidak berdasarkan bukti ilmiah yang hanya mengandalkan pendapat atau logika seseorang, maka itu sesungguhnya adalah kebohongan.

Tabel 4.25 Frame *Republika.co.id*, 11 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Penerbitan tulisan ini telah menunjukkan bahwa <i>Republika.co.id</i> mendukung pada kelompok yang menganggap Ahok melakukan penistaan terhadap agama atas pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Tulisan yang ditampilkan terkesan lebih banyak mengungkapkan bahwa Ahok melakukan penistaan terhadap agama islam, kalimat itu bisa terlihat pada paragraf yang menuliskan “pihak kepolisian dan ahli bahasa pun mencoba menggiring bahwa hipotesis penistaan agama harus diuji kembali oleh ahli bahasa. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian apakah suatu perbuatan menista agama atau tidak sudah memberi pernyataan tegas.</p> <p>Tulisan ini menyampaikan wewenang dalam menentukan keputusan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan agama islam adalah lembaga Majelis Ulama Indonesia, pendapat para ulama yang tergabung di dalam lembaga itu tentu berdasarkan dasar yang kuat, sehingga tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan orang atau kelompok tertentu.</p>
Skrip	<p>Opini yang ditebitkan dalam berita ini menjawab pertanyaan yang tertera di dalam judul tulisan, jawaban itu dijelaskan secara panjang lebar, sebagai berikut. Bisakah ayat Al-Qur’an dipakai untuk berbohong? Harus diakui, ada beberapa ayat Al-Qur’an yang disalahgunakan saat tidak dibaca dalam konteks yang tepat dan utuh. Kita bisa ambil contoh dalam QS Al Maun ayat 4. Ayat itu menjelaskan ancaman bagi orang yang shalat. “Maka celakalah bagi orang yang shalat. "Jika kita pahami hanya</p>

	<p>dari teks ini, tidak akan ada orang yang mau shalat karena diancam Allah SWT akan celaka. Para orientalis dulu pun kerap mengutip ayat ini untuk melemahkan akidah umat Islam.</p>
Tematik	<p>Tulisan ini menganalisis sisi bohong dari pernyataan Ahok “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat Al-Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya” tulisan ini ingin menerangkan apakah bisa ayat Al-Qur’an dijadikan sebagai alat untuk berbohong. Pertanyaan ini sudah dijawab pada paragraf ke 13 yang menyebutkan bahwa sebagai sebuah teks, ayat Al-Qur’an tidak pernah bohong. Al-Qur’an bahkan dapat diuji kesahihannya lewat pembuktian ilmiah. Ambil contoh misalnya dalam QS Al Mu’minun:14. Allah SWT berfirman: “Kemudian Kami jadikan nutfah (air mani) itu ‘alaqah. Lalu ‘alaqah tadi Kami jadikan mudghah (segumpal daging).</p>
Retoris	<p>Gaya tulisan yang terkesan tegas serta mencantumkan beberapa bukti ilmiah yang ditampilkan dalam tulisan ini adalah bentuk penekanan yang ditonjolkan untuk mengungkapkan bahwa pernyataan Ahok yang menyebutkan Al-Qur’an sebagai alat bohong atau dimaknai juga bahwa Al-Qur’an itu bohong adalah kekeliruan dan merupakan bentuk penistaan agama. Sesuatu ungkapan yang disampaikan dengan pembuktian ilmiah maka itu adalah sebuah kebenaran. Namun sesuatu yang disampaikan tidak berdasarkan bukti ilmiah yang hanya mengandalkan pendapat atau logika seseorang, maka itu sesungguhnya adalah kebohongan.</p>

15) Republika.co.id, 16 November 2016: Ahok menyampaikan kalimat yang berisikan “bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran”

Analisis **Siktaksis**, diantara beberapa berita yang dipublikasikan oleh *Republika.co.id* pada edisi 16 November 2016 yang merupakan hari dimana Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu diantara banyak judul beritanya adalah “Ahok: bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran”. Berita ini menjadi *headline* karena terbukti telah di *share* oleh pembaca sebanyak 10576 kali, jika berita ini dibagikan ke media sosial seperti, whatsapp, twitter, facebook, BBM dan lain-lain maka diperkirakan mencapai jutaan orang yang membaca berita ini.

Unsur siktaksis dalam berita ini terdapat pada judul berita, judul yang ditampilkan menjadi kontroversial, jika dianalisis bisa banyak persepsi yang timbul terhadap Ahok, kalimat “bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran” ini bisa menunjukkan kesombongan seorang Ahok, seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian namun tetap menunjukkan karakter angkuh dan menantang banyak orang.

Ahok seakan-akan tidak akan pernah berubah, sikap kasar dan terkesan angkuh yang selalu ditampakkan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta tetap ditampilkan meskipun saat itu sesungguhnya dalam keadaan yang sudah dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian. Sangat jarang dan hampir tidak ada orang yang kita temukan sebelumnya yang bersikap seperti Ahok, kebiasaan yang terjadi di masyarakat seseorang akan menunjukkan perlawanan tatkala dia baru diduga, namun ketika sudah ada ketetapan tersangka biasanya seseorang itu menunjukkan sisi lemahnya.

Pada lead berita dituliskan bahwa calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku tidak takut ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. "Kalau memang ditentukan saya tersangka pun proses pemilihan masih berjalan,

kita akan fight di pengadilan seperti kasus reklamasi, Rumah Sakit Sumber Waras,". Ahok menyampaikn kalau penistaan agama, makanya dia minta dinaikkan ke persidangan biar semua orang tonton dan lihat, menarik. "Bisa bayangin enggak malunya, saya detersangkakan eh saya menang satu putaran. Malu dia. Kita harus fight. Kita cuma butuh 50 persen plus 1"

Kalimat ini bentuk tantangan yang disampaikan oleh Ahok, tidak jelas kepada siapa dia memberikan tantangan tersebut, namun jika dilihat dari kalimat yang disampaikan mengenai eh saya menang satu putaran, maksudnya menang 1 putaran pada pilkada DKI Jakarta. Bisa disimpulkan yang ditantang adalah lawan politiknya pada pilkada DKI Jakarta, dengan memberikan tantangan kepada lawan politiknya maka ada frame bahwa Ahok menganggap bahwa status tersangka yang dia alami pada kasus penodaan agama adalah bagian dari strategi politik untuk menjatuhkan dirinya.

Analisis **Skrip**, berita ini menuliskan tentang pernyataan Ahok pasca ditetapkannya sebagai tersangka kasus penistaan agama, *Republika.co.id* menjadi ucapan Ahok yang menyebutkan bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran sebagai judul beritanya edisi 16 November 2016. Siapa yang menyampaikan pernyataan, yaitu Ahok Gubernur DKI Jakarta non aktif sekaligus sebagai calon Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Unsur *What* pada berita ini adalah pernyataan Ahok bahwa tidak takut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.

Frame yang diberikan diberikan *Republika.co.id* pada berita ini adalah bentuk keangkuhan Ahok, seseorang yang berasal dari etnis cina dan beragama Kristen telah melakukan penistaan agama islam melalui pernyataan umat muslim tidak bisa memilih beliau pada saat pilkada DKI Jakarta karena masyarakat dibohongi dan dibodohi oleh orang-orang tertentu menggunakan surah Al-Maidah 51. Pernyataan itu diucapkan pada saat meyampaikan pidato di Kepulauan Seribu dalam rangka kunjungan kerja. Kesombongan yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan

pelaksanaan pilkada yang diikuti, Ahok menganggap status tersangka yang menimpah beliau atas tuduhan penistaan agama yang dia lakukan tidak akan berpengaruh terhadap pilihan rakyat warga DKI Jakarta terhadapnya.

Analisis **Tematik**, tema utama yang disampaikan dalam berita ini sesungguhnya adalah berita tentang penetapan Ahok sebagai tersangka atas kasus penistaan agama yang dilakukan pada pidato kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Frame dengan menampilkan headline pada judul yang berbunyi “Ahok: bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran” ini menunjukkan keberpihakan *Republika.co.id* terhadap kelompok umat islam yang menganggap Ahok telah menistakan agama islam. Judul yang ditampilkan adalah pernyataan sekilas yang disampaikan Ahok saat diwawancarai beberapa media, sehingga bisa saja *Republika.co.id* menggunakan bahasa lain untuk judul dalam berita ini.

Judul ini bisa dianalisis sebagai bentuk perlawanan yang ditunjuka Ahok, meski Ahok tidak menyebutkan secara langsung siapa yang dia lawan namun jika dianalisis dari ucapan yang mengatakan “jika menang satu putaran dia akan malu” maka yang dimaksud sebagai musuhnya adalah lawan politik dalam pilkada DKI Jakarta, karena yang disebutkan adalah menang dalam satu putaran. Namun pada sisi lain bisa saja Ahok ingin menunjukan bahwa beliau punya kekuatan yang besar dan melawan semua yang menuntutnya sebagai tersangka dengan memenangkan pilkada DKI satu putaran. Lawan yang dimaksud dalam konteks ini tentu jutaan umat islam yang telah melakukan aksi untuk menuntut Ahok dihukum atas dugaan penistaan agama yang beliau lakukan.

Dengan menggunakan tema seperti ini, seakan *Republika.co.id* ingin memberikan frame kepada semua kelompok yang menuntut Ahok untuk menjadi tersangka, bahwa perjuangan untuk menjadikan Ahok sebagai tersangka bukan akhir dari segalanya. Karena Ahok masih menantang para umat islam pada pilkada DKI Jakarta, dan bertekad untuk memenangkan pemilihan gubernur dalam 1 putaran. Jika umat kelompok umat islam yang menuntut Ahok untuk dijadikan tersangka memahami

pernyataan Ahok sebagai tantangan, maka tentu persatuan yang ditunjukkan oleh umat islam pada saat melakukan aksi 411 akan berlanjut pada pilkada DKI Jakarta untuk memenang Gubernur muslim.

Analisis **Retoris**, penekanan atau penonjolan yang dilakukan *Republika.co.id* terlihat pada penetapan pernyataan Ahok sebagai judul pada berita ini, kalimat “bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran” kalimat ini memancing kelompok umat islam yang menuntut Ahok sebagai tersangka, seakan-akan perjuangan yang dilakukan oleh kelompok umat islam dalam menuntut Ahok adalah agenda politik kelompok tertentu.

Selain itu, pernyataan Ahok ini seakan menunjukkan protes seorang Ahok. Penetapan tersangka yang dialamat kebeliau seakan tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada DKI Jakarta, bahkan dengan adanya penetapan tersangka terhadap beliau akan memberikan kekuatan dan akan dibuktikan pada pilkada mendatang.

Ahok memiliki gaya komunikasi cenderung frontal. Jika agak kelewatan, Ahok terkesan meremehkan atau merendahkan lainnya. Dalam beberapa pernyataan yang disampaikan di televisi bahkan Ahok pernah menyampaikan perkataan yang tidak pantas. Padahal setiap orang terutama pemimpin, harus tahu mana yang bisa disampaikan di publik dan mana yang harus disampaikan dalam ruangan. Bahkan terhadap wakilnya sendiri Ahok pernah menyebut Djarot tidak berhak mengeluarkan izin apapun atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena dia bukanlah pasangannya saat Pilkada lalu.

Djarot disebut Ahok dilantiknya atas dasar undang-undang. Karena itu Ahok menyebut meski wakil gubernur, wewenang Djarot yang politisi PDIP itu sama dengan para deputinya. Mestinya itu bisa disampaikan dalam pertemuan empat mata tidak dilontarkan di publik begitu maka hasilnya akan lebih baik.

Gaya komunikasi ini mau ditunjukkan *Republika.co.id* terhadap Ahok, gaya Ahok yang cenderung sombong dan frontal bagi *republika.co.id* tidak akan berubah. Terbukti, meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka namun Ahok masih tetap menunjukkan gaya sombongnya dengan menyatakan “bisa bayangin gak, saya tersangka eh menang satu putaran.

Tabel 4.26 Frame *Republika.co.id*, 16 November 2016

Elemen	Teks/Penulisan
Siktaksis	<p>Unsur siktaksis dalam berita ini terdapat pada judul berita, judul yang ditampilkan menjadi kontroversial, jika dianalisis bisa banyak persepsi yang timbul terhadap Ahok, kalimat “bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran” ini bisa menunjukkan kesombongan seorang Ahok, seseorang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian namun tetap menunjukkan karakter angkuh dan menantang banyak orang.</p> <p>Pada lead berita dituliskan bahwa calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama (Ahok), mengaku tidak takut ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri telah menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.</p>
Skrip	<p>Berita ini menuliskan tentang pernyataan Ahok pasca ditetapkannya sebagai tersangka kasus penistaan agama, <i>Republika.co.id</i> menjadi ucapan Ahok yang menyebutkan bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1. Unsur <i>What</i> pada berita ini adalah pernyataan Ahok bahwa tidak takut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri.</p> <p>Frame yang diberikan diberikan <i>Republika.co.id</i> pada berita ini adalah bentuk keangkuhan Ahok, seseorang yang berasal dari etnis cina dan beragama Kristen telah melakukan penistaan agama islam melalui pernyataan umat muslim tidak bisa memilih beliau pada saat pilkada DKI</p>

	<p>Jakarta karena masyarakat dibohongi dan dibodohi oleh orang-orang tertentu menggunakan surah Al-Maidah 51</p>
Tematik	<p>Tema utama yang disampaikan dalam berita ini sesungguhnya adalah berita tentang penetapan Ahok sebagai tersangka atas kasus penistaan agama yang dilakukan pada pidato kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Frame dengan menampilkan headline pada judul yang berbunyi “Ahok: bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran” ini menunjukkan keberpihakan <i>Republika.co.id</i> terhadap kelompok umat islam yang menganggap Ahok telah menistakan agama islam</p> <p>Dengan menggunakan tema seperti ini, seakan <i>Republika.co.id</i> ingin memberikan frame kepada semua kelompok yang menuntut Ahok untuk menjadi tersangka, bahwa perjuangan untuk menjadikan Ahok sebagai tersangka bukan akhir dari segalanya. Karena Ahok masih menantang para umat islam pada pilkada DKI Jakarta, dan bertekad untuk memenangkan pemilihan gubernur dalam 1 putaran.</p>
Retoris	<p>Penekanan atau penonjolan yang dilakukan <i>Republika.co.id</i> terlihat pada penetapan pernyataan Ahok sebagai judul pada berita ini, kalimat “bisa bayangin enggak, saya tersangka eh menang 1 putaran” kalimat ini memancing kelompok umat islam yang menuntut Ahok sebagai tersangka, seakan-akan perjuangan yang dilakukan oleh kelompok umat islam dalam menuntut Ahok adalah agenda politik kelompok tertentu.</p> <p>Selain itu, pernyataan Ahok ini seakan menunjukkan protes seorang Ahok. Penetapan tersangka yang dialamatkan kebeliau seakan tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pilkada DKI Jakarta, bahkan dengan adanya penetapan tersangka terhadap beliau akan memberikan kekuatan dan akan dibuktikan pada pilkada mendatang.</p>

4. Isu yang ditonjolkan *Kompas.com* dan *Republika.co.id*. terkait dengan peristiwa video pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51.

Pada umumnya frame kedua media *online* ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar *pertama*, kelompok yang menganggap pernyataan video pernyataan Gubernur DKI Jakarta tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 merupakan penistaan Agama, khususnya masyarakat yang beragama islam yang merasa terganggu atas ucapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang melecehkan ayat suci Al Qur'an dengan menyampaikan kalimat "dibohongi pakai surah Al-Maidah 51". Sehingga kasus ini harus diselesaikan secara hukum mengingat ada sejumlah bukti yurisprudensi terkait dugaan penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kelompok ini menganggap bahwa Ahok tidak mampu menjaga keberagaman beragama, sebagian besar umat muslim meyakini bahwa Ahok telah menista agama islam dengan pernyataannya tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Apalagi gaya bicara Ahok kurang diplomatis saat membahas masalah ini yang membuatnya kontroversial soal agama.

Jika kasus Ahok ini dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi lagi di masa depan. Apalagi, Keimanan pada Al-Qur'an adalah salah satu esensi utama dari aqidah Islam. Bahkan, iman dan percaya pada kitab-kitab suci, khususnya Al-Qur'an, termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Karena itu, orang dikatakan beriman jika imannya kepada Allah sama kualitasnya dengan imannya kepada kitab suci Al-Qur'an.

Karena itu, jika ada orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an berisi kebohongan atau membohongi umatnya. Maka itu tentu sangat menyinggung perasaan orang-orang yang mengimani dan mempercayainya. Wajar jika kemudian banyak reaksi yang muncul di tengah masyarakat. Tidak ada unsur politisasi dalam kasus ini apalagi memanfaatkan situasi jelang Pilkada DKI Jakarta, para penda'i memiliki tanggung jawab teologis dan sosiologis untuk mengingatkan umatnya.

Karena itu, jika mereka menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an , termasuk kriteria memilih pemimpin, itu bukanlah SARA, adalah tugas ulama dan da'i untuk mengajak umat melaksanakan dan membumikan Al-Qur'an yang diimani umat Islam tersebut. Semua pihak menginginkan pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta di seluruh Indonesia berjalan damai. Karena itu, sebaiknya unsur-unsur yang bisa menyinggung dan menyakiti perasaan masyarakat harus dihindari. Ini merupakan kewajiban para kandidat kepala daerah, tidak terkecuali Ahok.

Kedua kelompok yang menganggap tidak ada penistaan dalam pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Kelompok ini berpandangan Ahok tidak bermaksud melecehkan ayat dalam surat Al-Maidah ayat 51, Ahok ingin menyampaikan bahwa ada orang-orang yang kerap menggunakan ayat tersebut untuk kepentingan politik, khususnya dalam konteks pemilihan kepada daerah di Jakarta. Pernyataan tersebut titik tekannya adalah kalimat 'membohongi pakai ayat', bukan ayatnya yang membohongi, kelompok kedua ini menganggap ucapan Ahok sangat berpotensi disalahpahami.

Karena itu wajar jika kemudian ada penilaian yang menyebut Ahok telah melakukan pelecehan terhadap ayat tersebut. Pernyataan ini dibesar-besarkan mengingat situasi menjelang Pilkada DKI Jakarta, kasus ini dimanfaatkan oleh para lawan politik untuk menjatuhkan Ahok lewat isu SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan) sehingga melahirkan kontroversi di lingkungan masyarakat terutama warga DKI Jakarta sebagai peserta Pilkada DKI. Dalam politik tidak menutup kemungkinan ada orang yang menjadikan ayat-ayat hanya sebagai alat politik. Memperlakukan ayat-ayat sebagai alat politik untuk memperkuat dan melemahkan calon tertentu atas doktrin Agama.

5. Konstruksi Realitas peristiwa video pernyataan Gubernur DKI Jakarta tentang dibohongi pakai AI-Maidah 51

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrument pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Dalam konteks media massa, keberadaan bahasa ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas melainkan bisa menentukan gambaran (makna citra) mengenai suatu realitas realitas media yang akan muncul di benak khalayak. Oleh karena persoalan makna itulah, maka penggunaan bahasa berpengaruh terhadap konstruksi realitas, terlebih atas hasilnya (makna atau citra). Penggunaan bahasa tertentu dengan demikian berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya.

Dari uraian tersebut maka media telah menjadi sumber informasi yang dominan tidak saja bagi individu tetapi juga bagi masyarakat dalam memperoleh gambaran realitas mengenai suatu peristiwa. Ada dua konsep dalam melihat realitas yang direfleksikan media. Pertama, konsep media secara aktif yang memandang media sebagai partisipan yang turut mengkonstruksi pesan sehingga muncul pandangan bahwa tidak ada realitas sesungguhnya dalam media. Kedua, konsep media secara pasif yang memandang media hanya sebagai saluran yang menyalurkan pesan-pesan sesungguhnya, dalam hal ini media berfungsi sebagai sarana yang netral, media menampilkan suatu realitas apa adanya.

Dalam konteks ini, maka konsep media secara aktif menjadi relevan dalam kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini juga sesuai dengan paradigm konstruksionis yang digunakan, yang memandang media dilihat bukan sebagai saluran yang bebas atau netral melainkan sebagai subyek yang mengkonstruksi realitas, dimana para pekerja yang terlibat dalam memproduksi pesan juga menyertakan pandangan, bias dan pemihakannya. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif.

Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan.

Realitas tercipta lewat konstruksi, sudut pandang tertentu dari wartawan. Disini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan yang mempunyai pandangan berbeda. Dalam konsepsi positivis diandaikan ada realitas yang bersifat eksternal yang ada dan hadir sebelum wartawan meliputnya.

Jadi, ada realitas yang bersifat objektif, yang harus diambil dan diliput oleh wartawan. Pandangan semacam ini sangat bertolak belakang dengan pandangan konstruksionis. Fakta atau realitas bukan sesuatu yang tinggal ambil, ada, dan menjadi bahan dari berita. Fakta/realitas pada dasarnya dikonstruksi. Manusia membentuk dunia mereka sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan video pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah dikonstruksi oleh *Kompas.com* dan *Republika.co.id*, meskipun peristiwa yang dikaji dalam kasus ini adalah satu, yaitu video Ahok yang menyatakan tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, namun video ini dikonstruksi berbeda oleh kedua media *online Kompas.com* dan *Republika.co.id*. Perbedaan ini terdapat pada hasil berita yang dipublikasikan setiap edisinya, kedua media *online* ini memiliki perbedaan dalam pemilihan kalimat berita, *Kompas.com* lebih banyak menggunakan bahasa mengutip ayat suci, tidak ada penistaan agama serta isu yang diangkat adalah isu SARA jelang Pilkada DKI Jakarta. Kemudian *republika*, lebih cenderung menggunakan penistaan agama, penyebar kebencian dan dibohongi pakai surah Al-Maidah 51.

Framing kedua media *online* ini dipengaruhi oleh pemilihan narasumber, kecenderungan-kecenderungan narasumber sudah dipetakan oleh kedua media ini sehingga framing yang akan dibuat didukung dengan fakta sumber informasi dari sumber beritanya.

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis framing yang dilakukan penulis terhadap pemberitaan video pernyataan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) di *Kompas.com* dan *Republika.co.id*, bahwa kedua media *online* memiliki frame yang berbeda khusus pemberitaan tentang video pernyataan Gubernur DKI Jakarta (Ahok) tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan itu, *pertama*, latar belakang sejarah berdirinya media *Kompas*. *Kompas* lahir di tanah Indonesia pada awalnya bernama *Intisari*, apabila kita membicarakan *Intisari* tidak dapat kita lepaskan dari Kelompok *Kompas Gramedia* atau disingkat *KKG*.

Di tengah lingkungan politik, ekonomi dan infrastruktur yang kurang menunjang, P.K. Ojong dan Jacob Oetama mulai membangun perusahaan dengan mempersiapkan penerbitan koran baru sebagai corong Partai Katolik. Namun kondisi politik yang kurang kondusif membuat pekerjaan tersebut menjadi tidak mudah dan rencananya koran ini dinamai *Bentara Rakyat*. Meskipun beratnya syarat yang harus dipenuhi sebuah surat kabar yang akan terbit pada waktu itu, dengan adanya aturan pengumpulan tanda tangan pelanggan sebanyak 5.000 orang, tidak menyurutkan semangat para pengurus, termasuk di dalamnya Frans Seda. Pada tanggal 28 Juni 1965 di Jakarta *Kompas* terbit untuk yang pertama kali dengan tiras 4800 eksemplar.

Dalam kondisi nasional yang kurang kondusif tersebut pada akhirnya *Kompas* mampu memenuhi syarat-syarat yang lumayan berat untuk di penuhi. Dengan dukungan yang diberikan oleh Jendral A. Yani sebagai bentuk harapan untuk mengeliminir kekuatan komunis pada saat itu sehingga muncul semacam kekuatan jurnalistik untuk berposisi dengan komunis, selain itu juga mengingat pada saat itu banyak koran yang mengalami pembredelan dikarenakan dinilai kurang revolusioner. *Kompas* sendiri menemui banyak cemoohan dari media massa yang condong pada komunis dalam usia yang sangat belia saat itu.

Pemerintahan sangat memberikan warna dalam dinamika pers, dalam masa demokrasi Terpimpin, pemerintah saat itu memberlakukan peraturan menyangkut kehidupan pemberlakuan peraturan yang menyangkut kehidupan pers di Indonesia melalui Peraturan Presiden no. 6 tahun 1964 yang menetapkan bahwa setiap surat kabar berafiliasi dengan partai politik yang ada.

Kompas sendiri pada saat itu bergabung dengan Partai Katolik Indonesia (Parkindo). Kompas kembali menjadi media cetak yang independen serta bersifat umum. Kembalinya Kompas menjadi surat kabar yang independen didasarkan pada keyakinan para perintisnya sejak semula, yaitu bahwa visi kemasyarakatan koran harus terbuka. Visi dan sikap itu selain sesuai dengan keyakinan para perintisnya, juga dianggap sesuai dengan fungsi pers Indonesia, yaitu ikut mengembangkan sikap saling pengertian dalam masyarakat yang majemuk. Dengan keterbukaan itulah memungkinkan Kompas berkembang lebih cepat. Dalam perkembangan selanjutnya, pada 3 bulan usianya, Kompas sudah dilarang terbit bersama beberapa surat kabar lainnya, tepatnya pada Oktober 1965. Larangan terbit ini berkaitan dengan peristiwa nasional G 30 S PKI yang menewaskan enam Jenderal pucuk pimpinan TNI AD, termasuk Letjen Achmad Yani yang menggagas terbentuknya Kompas .

Namun, Kompas baru terbit kembali pada 6 November 1965 dengan partner percetakan PT. Kinta, salah satu percetakan terbaik pada waktu itu. Pindahinya Kompas ke partner baru, yaitu PT. Kinta dikarenakan Ppelrada tetap melarang terbit kepada beberapa media, yang salah satunya berpartner dengan PT. Kinta. Melihat peluang ini, Kompas segera bergabung dengan PT. Kinta. Dengan partner barunya, bukan saja wajah Kompas yang semakin cantik tetapi tirasnya juga meningkat menjadi 23.268 eksemplar. Peningkatan ini, tentu saja bukan karena cantiknya tampilan Kompas tapi juga didorong oleh kevakuman informasi sebagai akibat larangan terbit beberapa surat kabar. Sehingga ketika larangan itu dicabut, munculnya surat kabar menjadi sarana untuk mendapatkan informasi yang paling penting di

samping radio. Usaha peningkatan mutu cetakan terus dilakukan. Belum genap satu tahun Kompas dicetak PT. Kinta, Kompas sudah berpindah-pindah cetakan. Setelah PT. Kinta, Kompas pindah ke percetakan Abadi dan pada 2 Agustus 1966, Kompas sudah pindah percetakan lagi ke percetakan Masa Merdeka.

Kompas dengan kelompok Gramedianya mempunyai sedikitnya tujuh jenis usaha yang berbeda, yaitu: pers, penerbitan buku, pasar swalayan, percetakan, perhotelan, bank dan tambak udang. Khusus di bidang pers, Kompas juga mengembangkan berbagai majalah dan tabloid olahraga Bola, majalah mingguan Jakarta, majalah anak-anak Bobo, majalah remaja Hai, tabloid wanita Nova, tabloid hiburan Citra, Bintang, Monitor, majalah hiburan Senang, tabloid kesehatan dan eksekutif Senior, tabloid ekonomi dan bisnis Kontan, serta suplemen Kompas untuk kaum muda dan wanita, yaitu Aktual Muda dan Swara. Khusus tabloid hiburan Monitor, majalah Senang dan majalah Jakarta Jakarta sudah tidak terbit. Tabloid Monitor tidak terbit karena kasus angket tokoh idola yang dilakukan tabloid ini yang mengundang protes keras dari umat Islam pada tahun 1990. Dalam angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad di bawah beberapa tokoh terkenal lainnya seperti Soeharto dan KH Zainuddin MZ.

Sedangkan majalah Senang membekukan diri karena dirasa telah mengilustrasikan gambar Nabi Muhammad pada salah satu rubrik konsultasi mimpi. Sedang majalah Jakarta tidak terbit karena alasan ekonomi. Di samping mengembangkan beberapa media tersebut, Kompas juga melebarkan sayap ke daerah-daerah. Media yang dikembangkan Kompas di daerah antara lain Harian Sriwijaya Pos, Serambi Indonesia di Aceh, Harian Surya di Surabaya, dan Harian Bernas di Yogyakarta. Kompas juga telah merambah dalam media audio visual dengan mendirikan stasiun televisi dengan nama TV7. Selain itu pula seiring dengan maraknya pengembangan internet di Indonesia, di mana banyak media-media yang berbasis internet, Kompas juga memanfaatkan internet dengan membuka homepage dengan nama Kompas Online pada alamat *www.Kompas.com*.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis melihat bahwa ada korelasi antara berita video pernyataan Ahok tentang dibohongi Al-Maidah 51 yang dipublikasikan di *Kompas.com* dengan kepentingan ideologi pemilik media *kompas*. Dari awal *kompas* didirikan sebagai corong partai katolik, selain itu salah satu tabloid milik *kompas*, yaitu Tabloid Monitor pernah mendapatkan protes keras dari umat islam karena dianggap menistakan Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada akhirnya tabloid ini tidak lagi terbit sampai saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak bisa dipungkiri kepentingan umat katolik akan menjadi pertimbangan *kompas* dalam mempublikasi sebuah berita. Begitu juga pada kasus video pernyataan Ahok tentang Al-Maidah 51, karena Ahok yang berlatar belakang non muslim, maka penulis menilai faktor subjektifitas *Kompas.com* lebih dominan dalam melihat kasus ini.

Begitu juga dengan Republika, media ini merupakan harian umum yang terbit pada tahun 1993 merupakan koran Islam yang berasosiasi dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abadi Bangsa yang dipimpin oleh mantan Menristek BJ Habibie. Nama Republika berasal dari ide Presiden Soeharto, yang saat itu disampaikan saat beberapa pengurus ICMI Pusat menghadap untuk menyampaikan rencana peluncuran harian umum tersebut. Pada awalnya, harian ini akan diberi nama Republik. Yayasan Abadi Bangsa, sebagai pengelola harian Republika, mendapatkan SIUPP dari pemerintah, yakni Departemen penerangan RI pada tanggal 19 Desember 1992, melalui dukungan ICMI. Perolehan SIUPP Republika ini sangat mudah bila dibandingkan dengan media lain, karena lima tahun terakhir menjelang Republika lahir pemerintah tidak pernah mengeluarkan SIUPP baru.

Tujuan Republika searah dengan tujuan ICMI yang berdiri pada tanggal 7 Desember 1990, yaitu mewujudkan penyebaran program ICMI ke seluruh bangsa melalui program 5K, yaitu Kualitas Iman, Kualitas Hidup, Kualitas Karya, Kualitas Kerja, dan Kualitas Pilar. Kehadiran harian ini membawa konsep baru dalam dunia persuratkabaran di Indonesia. Di awal pembentukannya, Republika dikelola oleh para jurnalis yang handal dan

intelektual muslim modernis yang ingin mempersiapkan masyarakat dalam era baru perkembangan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya.

Oleh para pengagasnya harian Republika ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi sebagian besar rakyat Indonesia secara proporsional dalam percaturan nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Mereka adalah rakyat yang tergolong lemah secara ekonomi. Karena ekonominya lemah, kecil pula aksesnya pada sumber-sumber informasi dan pusat-pusat pengambilan keputusan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, mereka sering di rugikan, dan sering disebut *the underdog*.

Melihat latar belakang ini, penulis menilai bahwa ada kepentingan-kepentingan kelompok agama yang mempengaruhi kedua media *online* dalam melihat kasus video pernyataan Ahok tentang Al-Maidah ini. Kepentingan-kepentingan ini diwujudkan oleh kedua media *online* dengan melakukan framing, diantaranya menonjolkan dan menghilangkan kalimat-kalimat tertentu, misalnya pada kalimat “dibohongi surah Al-Maidah 51” dihilangkan kemudian diganti “mengutip ayat suci” atau ada yang menggunakan kalimat “penistaan agama” dan ada yang menggunakan kalimat “isu SARA jelang Pilkada DKI”.

Selain adanya penonjolan pada kalimat tertentu, kedua media *online* ini memilih narasumber yang bisa mendukung framing yang akan dibuat, misalnya narasumber yang mengatakan “tidak ada penistaan agama yang dilakukan Ahok” atau “Ahok tidak menganggap Al-Qur’an berbohong tetapi ada orang yang menggunakan Al-Qur’an untuk berbohong”. Kemudian ada juga narasumber yang menyatakan “video Ahok tentang Al-Maidah 51 diputar berulang kali tetap ada penistaan agama” atau “menganggap ada orang yang berbohong menggunakan Al-Qur’an tetap saja menista Al-Qur’an karena Al-Qur’an tidak bisa dijadikan alat untuk berbohong”

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Framing *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta berkenaan dengan Al-Maidah 51 terdapat perbedaan dalam menceritakan peristiwa terkait dengan video pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51, perbedaan itu disebabkan karena ada cara yang berbeda dalam membingkai peristiwa, ini yang terlihat dari unsur-unsur *siktaksis*, *skrip*, *tematik* dan *retoris*. Faktor ideologi dan kepentingan pemilik media menjadi sumber utama perbedaan itu, secara historis kedua media *online* ini merupakan representasi dari dua kekuatan agama yang berbeda. *Republika.co.id* ingin mengangkat pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51 sebagai penistaan kepada agama sedangkan *Kompas.com* ingin mengalihkan dari framing penistaan agama.
2. Isu yang dominan ditonjolkan berdasarkan framing *Kompas.com* dan *Republika.co.id* terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51 juga memiliki perbedaan. *Kompas.com* lebih dominan mengkaitkan peristiwa video pernyataan Ahok dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 pada isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta, dengan alasan bahwa ada kesengajaan dari lawan politik untuk membesarkan peristiwa ini dengan tujuan menjatuhkan elektabilitas Ahok, sehingga secara sepihak akan sangat merugikan Basuki Tjahaja Purnama sebagai kontestan pada Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar.

Sedangkan *Republika.co.id*, lebih banyak mengaitkan berita tentang video pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 ini dengan isu penistaan agama, Ahok dianggap telah melakukan ujaran kebencian terhadap agama islam. *Republika.co.id* banyak menampilkan gelombang protes umat muslim terhadap pernyataan Ahok seperti aksi-aksi yang dilakukan ormas islam di Jakarta ataupun aksi yang dilakukan di daerah dengan tuntutan tangkap Ahok atas dugaan penistaan agama.

3. Dalam melakukan konstruksi realitas sosial terhadap video pernyataan Gubernur DKI Jakarta tentang dibohongi pakai Al-Maidah 51, *Kompas.com* dan *Republika.co.id* memiliki cara yang hampir sama, namun substansi berita yang dihasilkan berbeda dikarenakan adanya perbedaan dalam pilihan narasumber serta kalimat atau kata yang ditonjolkan. Dalam memilih kata dalam sebuah berita video pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 *Kompas.com* lebih banyak menggantikan kata dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 dengan kalimat “kutip ayat suci”. Misalnya *Kompas.com* menulis berita tanggal 6 Oktober 2016 dengan judul “Soal Ahok yang kutip ayat suci, ini penjelasan Nusron Wahid”.

Kemudian, *Republika.co.id* lebih banyak membuat judul dan isi berita menggunakan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan peristiwa yang terjadi, misalnya dibohongi pakai surah Al-Maidah 51, penistaan Al-Qur’an atau yang paling sering menggunakan kalimat “Soal Al-Maidah 51”. *Republika.co.id* selalu membuat berita terkait dengan pernyataan Ahok tentang dibohongi pakai surah Al-Maidah 51 dengan menuliskan secara lengkap kata Al-Maidah 51, tidak pernah menggunakan bahasa mengutip ayat suci.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang dikemukakan. Berikut ini ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan didalam bagi media yang dijadikan objek penelitian penulis maupun bagi para penulis yang akan melakukan penelitian berikutnya.

1. Media harus memiliki independensi walaupun pemiliknya dekat dengan para pemangku kebijakan. Media harus mampu berkata jujur demi memberitakan kebenaran kepada masyarakat, tidak peduli siapa pun pemiliknya. Tidak boleh merubah suatu peristiwa yang sebenarnya atas kepentingan politik tertentu.

2. Kelebihan Jurnalisme online memiliki dibandingkan dengan jurnalisme konvensional seperti surat kabar adalah karena informasi yang publikasikan lebih update dan dengan mudah di *forward* ke media sosial, oleh karena media *online* harus tetap mentaati kode etik tentang berita sehingga kepercayaan publik terhadap media *online* semakin meningkat.
3. Secara metodologis, penelitian ini adalah langka awal bagi penelitian selanjutnya dalam menggali seberapa jauh konstruksi media terhadap sebuah realitas. Penelitian ini merupakan bagian dari contoh kasus yang bisa dijadikan referensi dalam menggali informasi-informasi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan analisis framing. Jika dalam penelitian ini hanya menggunakan paradigma konstruktivisme, penelitian berikutnya dengan paradigma kritis meskipun dengan objek penelitian yang sama sehingga menghasilkan kajian yang lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Alex, Sobur, 2006 *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Simiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ardial, 2009, *Komunikasi Politik*, Jakarta: Indeks.
- Bungin, Burhan, 2008, *Konstruksi Sosial Media Massa*, Jakarta: Prenada Media.
- Eriyanto, 2002, *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*, Yogyakarta: LKIS
- Cangara, Hafied, 2009, *Komunikasi Politik : Konsep, Teori, dan Strategi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Fauzi, Choiri Arifatul, 2007, *Kabar-kabar Kekerasan dari Bali*, Yogyakarta: LKIS.
- Fiske, John, 1990, *Cultural and Communication: Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra
- Halim, Syaiful, 2013, *Poskomodifikasi Media, (dalam kata pengantar dari Idi Subandy Ibrahim*, Jakarta, Jalansutra,
- Hardit, Hanno, 2007, *Critical Communication Studies*, Yogyakarta: Jalasutra
- Heryanto, Gun Gun, 2010, *Komunikasi Politik di era Industri Citra* Jakarta: PT. Lasswell Visitama.
- Ibrahim, Subandy, Idi dan Achmad, Ali, Bachrudin, 2014, *Komunikasi dan Komodifikasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indrawan, Rully, 2014, *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Lull, James, 1998, *Media Komunikasi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lister, Martin, Jon Dovey, dkk. 2009, *New Media a Critical Introduction*. Kanada: Routledge.
- Littlejohn, Stephen, W dan Karen, A. Foss. 2009, *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.

- Littlejohn, Stephen W. dan Karen A, Foss, 2011, *Teori Komunikasi, edisi 9*
 Jakarta: Salemba Humanika,
- Margono, 2010, *Metodologi penelitian pendidikan* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- McQuail, Dennis 2005. *McQuail's Mass Communication Theory 5 th edition*,
 London: Sage Publications.
- Moscow, Vincent, 1996, *The Political Ekonomi Studies*, London: Sage
 Publications
- Nasrullah, Rulli, 2012, *Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber*, Jakarta:
 Kencana.
- Neuman, W. Lawrence, 2000, *Sosial Research Methods: Qualitative and
 Quantitative Approach*, edisi keempat Boston: Allyn and Bacon.
- Nimmo, Dan, 2004, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*,
 Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nogroho, Bimo, Eriyanto, Surdiasis, Frans, 1999, *Politik Media Mengemas
 Berita*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Patton, Michael, *Qualitative Research and Evaluation Methods*, London: Sage
 Publications, 2002.
- Rauf, Maswadi, dkk, 1993, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta: PT
 Gramedia Pustaka Utama.
- Romli, M. Syamsul, Asep, 2012, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola
 Media Online* Bandung: Nuansa Cendekia.
- Rusadi, Udi, 2015, *Kajian Media, isu ideologi dalam perspektif, teori dan metode*,
 Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santana, K. Septiawan, 2005, *Jurnalisme Kontemporer*, Jakarta: Yayasan Obor
 Indonesia.
- Sastroatmodjo, Sudjono, 1995, *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Shoemaker, Pamela J & Stephen D Reese, 2001, *Mediating The Message:
 Theories of Influences on Mass Media Content 2nd Ed*, New York:
 Longman Publisher, 1996
- Sudibyoy, Agus, 2001, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: LkiS
 Printing Cemerlang.

- Sudiby, Agus, 2004, *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Yogyakarta: Lkis,
- Uchjana, Effendy, Onong, 2002, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Venus, Antar 2004, *Manajemen Kampanye*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Vivian, Jhon, 2008, *Teori Komunikasi Massa*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yunus, Syarifudin, 2010, *Jurnalistik Terapan* Bogor: Ghalia Indonesia.

Tesis

- Hartadi, Kristanto. 2012: *Analisis Framing (Studi Kompas dan Media Indonesia dalam Liputan Kerusuhan Di Temanggung 8 Februari 2011)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.
- Irfan, Noor. 2011. *Analisis Framing (Pemberitaan Harian Kompas Atas RUUK-DIY)* Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Jurnal

- Arianto, *Ekonomi Politik Lembaga Media Komunikasi*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011 (Dosen Tetap Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Tadulako-Palu)
- Fahrudin, Dedi, *Konglomerasi Media, Studi Ekonomi Politik Terhadap Media Group*, Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), volume 1 nomor 2, September, 2014
- Tyas Sagitaning, *Konglomerat Industri Penyiaran di Indonesia Analisis Ekonomi Politik Pada Group Media Nusantara*, Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwa dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah
- [http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/Artikel%20Jurnal%20\(08-17-14-07-09-14\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/Artikel%20Jurnal%20(08-17-14-07-09-14).pdf)

Internet

<http://sangpencerah.id/2016/10/prof-din-syamsuddin-ahok-telah-menistikan-al-quran.html>

<http://www.Republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/10/14/of167x330-kabareskrim-janji-periksa-ahok-soal-Al-Maidah-51>

<https://m.tempo.co/read/video/2016/10/07/5094/sejumlah-tokoh-ormas-adukan-ahok-ke-polisi-ini-kata-ahok>

<http://www.pos-metro.com/2016/10/inilah-pendapat-dan-sikap-keagamaan.html>

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/834772-di-depan-massa-kapolda-metro-janji-kawal-proses-hukum-ahok>

<http://www.Republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/16/10/14/of125o330-ribuan-massa-mulai-bergerak-ke-balai-kota-dki>

<http://www.faktamedia.net/2016/10/umat-islam-serentak-turun-ke-jalan-aksi.html>
(<http://nasional.Kompas.com/read/2016/10/10/11122041/megawati.sedih.isu.sara.warnai.pilkada.dki>)

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/837904-wapres-jk-pantas-umat-islam-marah-sama-ahok?>

<http://megapolitan.Kompas.com/read/2016/09/27/08293901/hari.ini.ahok.beraktivitas.di.kepulauan.seribu>

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/211038-belajar-menghargai-keberagaman-ala-kanada>

https://books.google.co.id/books?id=8Sv8D_9egFEC&pg=PA239&lpg=PA239&dq=visi+dan+misi+media+republika&source=bl&ots=tgsSBHbeMR&sig=TydN1NiXxIbkIoEUDssnoqC-Nrg&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiy-Jz2v4zTAhWJuI8KHf_QBwI4HhDoAQgdMAE#v=onepage&q=visi%20dan%20misi%20media%20republika&f=false